PEMERINTAH KOTA
SURABAYA







2021

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat terus menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Akhir Tahun Anggaran 2021 berikut penyampaian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam Rapat Paripurna dilakukan secara tepat waktu.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui LKPJ Walikota Surabaya ini, diharapkan DPRD Kota Surabaya memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan dan kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Akhir Tahun Anggaran 2021 memuat garis besar pelaksanaan, realisasi dan capaian tugas-tugas Pemerintah Daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021, yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan di Tahun 2021.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak semester pertama tahun 2020 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan yang berimbas pada semua aspek kehidupan, baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi bahkan keuangan. Pandemi Covid-19 ini telah berdampak pada ekonomi dunia sehingga terjadi perlambatan secara merata termasuk di Kota Surabaya. Pada Tahun 2020, kita dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang merosot pada angka minus 4,85%, menghadapi hal tesebut dibutuhkan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Langkah tersebut diwujudkan melalui *refocussing* kegiatan serta realokasi anggaran yang diperuntukkan bagi

penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pada tahun 2021, kita telah melakukan berbagai upaya agar penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi dapat berjalan beriringan, sehingga pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berada pada angka 4.29%. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari gotong royong yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya, Warga Kota Surabaya, dan seluruh elemen pemangku kepentingan di Kota Surabaya.

Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kota Surabaya merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya.

Demikian LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran 2021 disampaikan. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKPJ ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya pada masa yang akan datang dan membawa Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan. Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Surabaya, 11 Maret 2022

Walikota Surabaya



ERI CAHYADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 DASAR HUKUM I-2
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH I-6
1.3 DATA UMUM DAERAH I-13
1.3.1 Kondisi Geografis Daerah I-13
1.3.2 Gambaran Umum Demografis I-13
1.3.4 Kondisi Ekonomi I-19
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan I-32
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja I-48
1.3.7 Realisasi Pembiayaan I-49

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH II-1
2.1 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH II-3
2.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH II-5
2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH II-8

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH III-1
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN III-1
3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja III-1
3.1.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) III-1
3.1.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) III-15
3.1.2 Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan III-33
3.1.2.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar III-33
3.1.2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar III-91
3.1.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan III-163
3.1.2.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan III-175
3.1.2.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan III-214
3.1.2.6 Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan III-233
3.1.2.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan III-237
3.1.2.8 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum III-430
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja III-437
3.1.3.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar III-437
3.1.3.2 Kinerja Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar III-438
3.1.3.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan III-439
3.1.3.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan III-440
3.1.3.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan III-440
3.1.3.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan III-441
3.1.3.7 Kinerja Unsur Kewilayahan III-441

3.1.3.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum III-441
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN III-442
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA III-446
3.4 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN III-506
3.5 PENGHARGAAN TAHUN 2021 ..... III-510

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN IV-1
4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN IV-1
4.1.1 Identifikasi Tugas Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat Daerah Atasnya IV-1
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkat Pemerintahan di bawahnya IV-1
4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN IV-2

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perumusan Penjelasan Visi – Misi I-8
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2021 ..... I-17
Tabel 1.3 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin I-18
Tabel 1.4 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin I-18
Tabel 1.5 Jumlah PNS berdasarkan Golongan I-19
Tabel 1.6 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan I-19
Tabel 1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2021 (dalam Juta Rupiah) I-23
Tabel 1.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan I-24
Tabel 1.9 Komoditas Ekspor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2020 dan 2021 ..... I-25
Tabel 1.10 Komoditas Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2020 dan 2021 ..... I-27
Tabel 1.11 10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Surabaya I-32
Tabel 1.12 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2021 ..... I-33
Tabel 1.13 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 ..... I-34
Tabel 1.14 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 ..... I-37
Tabel 1.15 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 ..... I-42
Tabel 1.16 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan I-43
Tabel 1.17 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya I-44
Tabel 1.18 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer I-45
Tabel 1.19 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Surabaya I-48
Tabel 1.20 Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 ..... I-48
Tabel 1.21 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 ..... I-50
Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 ..... II-4
Tabel 2.2 Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 ..... II-7
Tabel 2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 ..... II-8
Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 – 2021 ..... III-2
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017 – 2021 ..... III-4
Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 2017 – 2021 ..... III-5
Tabel 3.4 Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Tahun 2017 – 2021 ..... III-6
Tabel 3.5 Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2017 – 2021 ..... III-7
Tabel 3.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2017 – 2021 ..... III-9
Tabel 3.7 Indeks Budaya Lokal Tahun 2017 – 2021 ..... III-10
Tabel 3.8 Indeks Gini Tahun 2017 – 2021 ..... III-11
Tabel 3.9 Pertumbuhan PDRB/LPE Tahun 2017 – 2021 ..... III-12
Tabel 3.10 Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2017 – 2021 ..... III-13
Tabel 3.11 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017 – 2021 ..... III-15
Tabel 3.12 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021 ..... III-16
Tabel 3.13 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021 ..... III-34
Tabel 3.14 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021 ..... III-92
Tabel 3.15 Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun 2021 ..... III-164

Tabel 3.16 Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2021 ..... III-176
Tabel 3.17 Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2021 ..... III-215
Tabel 3.18 Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2021 ..... III-234
Tabel 3.19 Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2021 ..... III-238
Tabel 3.20 Capaian Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021 ..... III-431
Tabel 3.21 Kebijakan Strategis Tahun 2021 ..... III-442
Tabel 3.22 Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020 ..... III-447
Tabel 3.23 Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021 ..... III-506
Tabel 3.24 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Daerah Dalam Negeri Tahun 2021 ..... III-507
Tabel 3.25 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pihak Ketiga Tahun 2021 ..... III-508
Tabel 3.26 Penghargaan Internasional Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021 ..... III-510
Tabel 3.27 Penghargaan Nasional Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021 ..... III-510

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2021 ..... I-14
Gambar 1.2 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia I-15
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 ..... I-16
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... I-20
Gambar 1.5 Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional I-28
Gambar 1.6 Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya I-29
Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 – 2021 ..... III-2
Gambar 3.2 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017 – 2021 ..... III-3
Gambar 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 – 2021 ..... III-5
Gambar 3.4 Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Tahun 2017 – 2021 ..... III-6
Gambar 3.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2017 – 2021 ..... III-9
Gambar 3.6 Indeks Budaya Lokal Tahun 2017 – 2021 ..... III-10
Gambar 3.7 Indeks Gini Tahun 2017 – 2021 ..... III-11
Gambar 3.8 Pertumbuhan PDRB/LPE Tahun 2017 – 2021 ..... III-12
Gambar 3.9 Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2017 – 2021 ..... III-13
Gambar 3.10 Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Kelompok Urusan dan Penunjangnya ... III-436
Gambar 3.11 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib Pelayanan Dasar III-437
Gambar 3.12 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar III-439
Gambar 3.13 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pilihan III-439
Gambar 3.14 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .. III-440
Gambar 3.15 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan III-441

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir .

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang terdiri dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

LKPJ Tahun 2021 disampaikan oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, berisi tentang capaian kinerja hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan berupa program dan kegiatan, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan merupakan tahun transisi pelaksanaan Pemerintahan Daerah dengan dilakukannya pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.25-312 Tahun 2021 tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kapala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, sehingga laporan pertanggungjawaban tahun 2021 yang disusun masih mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 namun pelaporannya disampaikan oleh Kepala Daerah yang baru. Hal tersebut mengacu pada Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan daerah serta respon yang adaptif dalam pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun 2021 melalui penyesuaian belanja dan perubahan alokasi belanja untuk kebutuhan penanganan Covid-19 sesuai dengan amanat Permendagri 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengamanatkan penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kebijakan Umum APBD Kota Surabaya Tahun 2021, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah disepakati dalam berita acara antara Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, sehingga pada LKPJ Tahun 2021 dilakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kesepakatan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Surabaya Tahun 2021.

1.1 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surabaya Tahun 2021 didasarkan atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034; (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021; (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 7);
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 37);
29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 72);
30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 36);

31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 49);
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 54).

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

"Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter
dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi"

Makna dalam visi tersebut adalah:

1. **Sentosa** adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.
2. **Berkarakter** menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila.
3. **Berdaya saing global** bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien, serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.
4. **Berbasis ekologi** adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi

kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi risiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2016-2021 yang terus berjalan, terdapat perubahan kebijakan nasional sehingga Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk percepatan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah, dilakukan re-grouping misi pembangunan kota yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) misi pembangunan kota berikut dan dijelaskan pada Tabel 1.1.

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;
6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan;
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 1.1

Perumusan Penjelasan Visi – Misi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi	Misi	Penjelasan Misi
SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI	1. Sentosa	Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri	1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketahanan pangan
				Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
				Meningkatkan kompetensi angkatan kerja
				Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
				Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
			2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi	Misi	Penjelasan Misi
	2. Berkarakter	Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila	4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
	3. Berdaya Saing Global	Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global	5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional.
				Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan
				Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri.
				Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas.
				Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata internasional.

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi	Misi	Penjelasan Misi
			7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas
				Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK
				Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan OPD
				Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
				Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi	Misi	Penjelasan Misi
	4. Berbasis Ekologi	Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (*sustainability*) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang
				Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota
				Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas
				Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
				Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terintegrasi serta mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum
				Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan
				Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi	Misi	Penjelasan Misi
			6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	Menyediakan rumah tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai serta didukung dengan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan

1.3 DATA UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah Kota Surabaya disajikan berdasarkan kondisi geografis dan demografis serta kondisi ekonomi, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

1.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Kota Surabaya secara geografis terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur, secara umum kondisi topografi Kota Surabaya memiliki ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77% dan sebelah selatan sebesar 6,52%. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya luas wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas ± 33.451,14 Ha dengan wilayah laut sejauh 1/3 dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
3. Sebelah Timur : Selat Madura;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

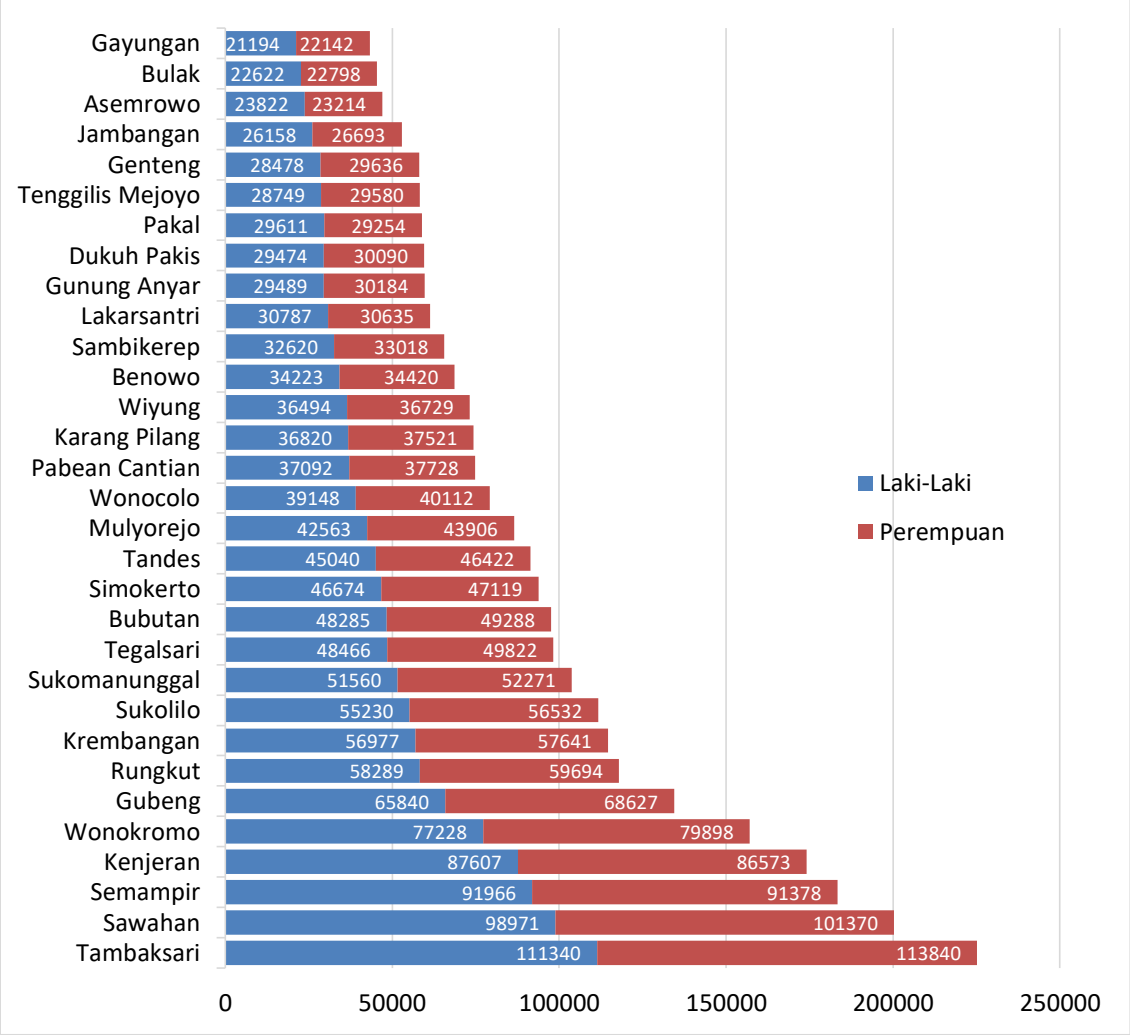
1.3.2 Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Surabaya berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK Tahun 2021 sebesar 2.970.952 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin meliputi 1.498.135 jiwa atau 50,43% penduduk perempuan dan 1.472.817 jiwa atau 49,57% penduduk laki-laki. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari yaitu 225.180 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Gayungan yaitu 43.336 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2021

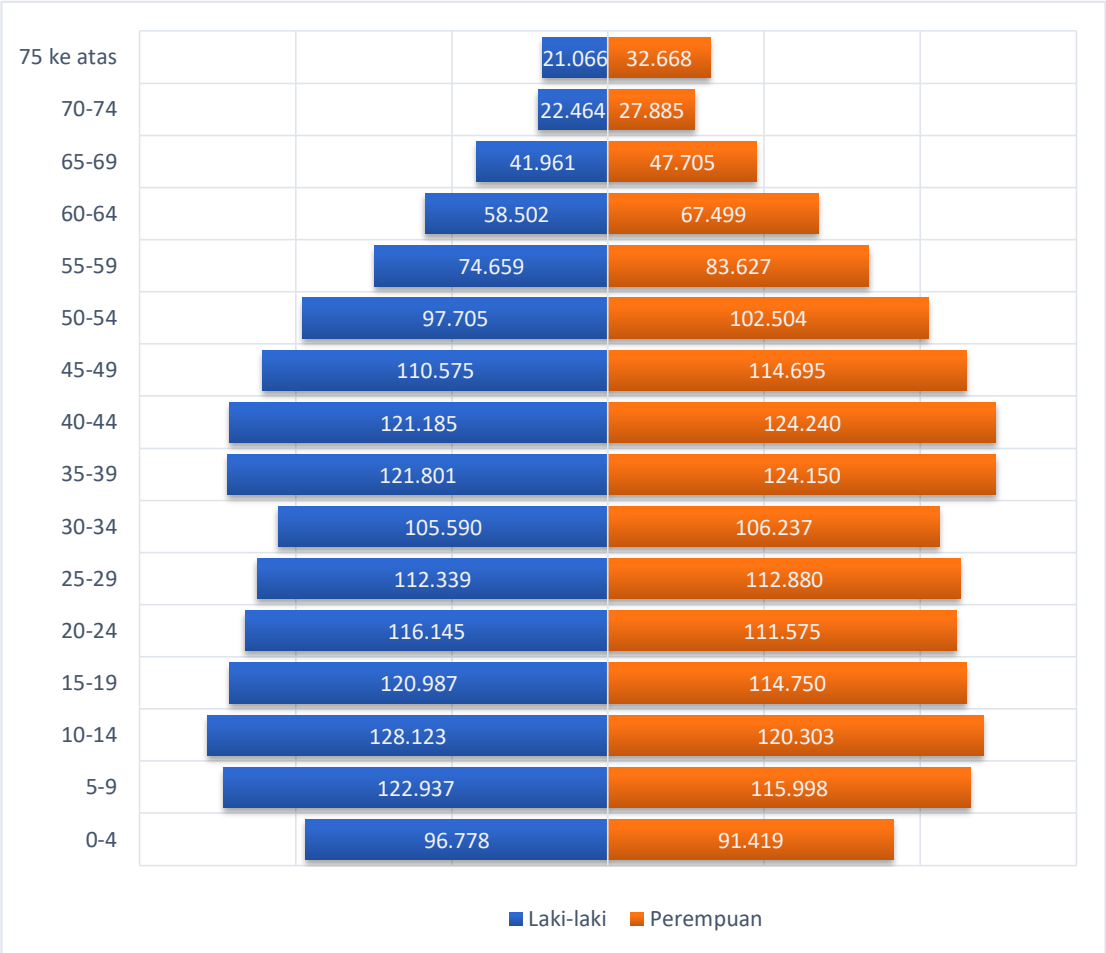


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2022

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 2.101.645 jiwa atau 70,74%, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 675.558 jiwa atau 22,74% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 193.749 jiwa atau 6,52%. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa (*stasioner*). Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Surabaya pertumbuhan penduduknya kecil disebabkan angka kelahiran dan angka kematian hampir mendekati seimbang.

Gambar 1.2
Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia

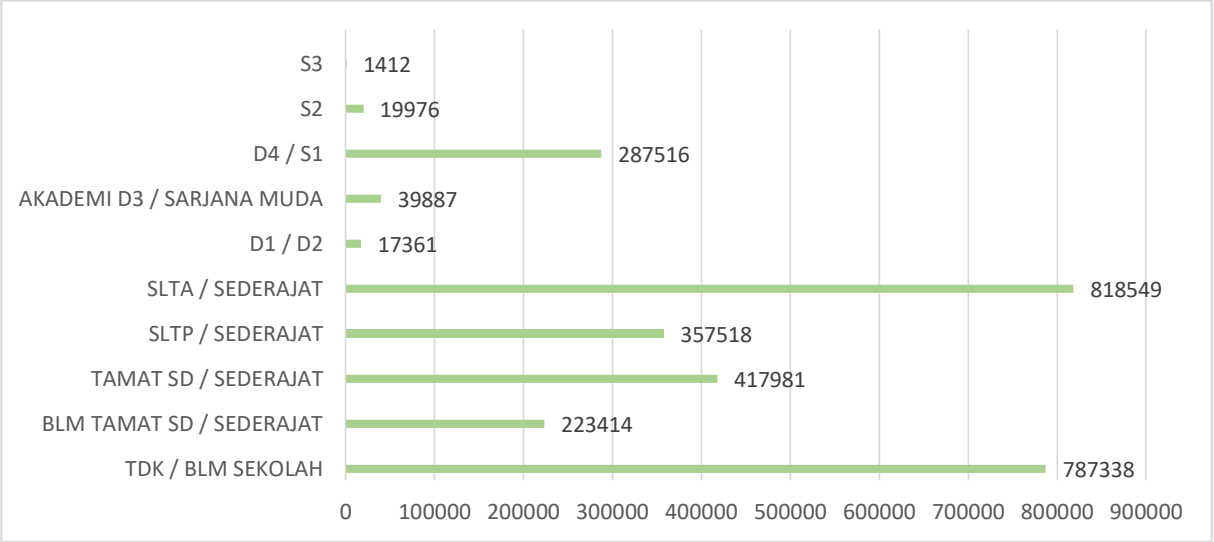


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2022

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Sarjana S1 sebanyak 287.516 jiwa. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Menengah dan Dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/sederajat sebanyak 818.549 orang, tidak/belum sekolah sebanyak 787.338 orang dan tamat SD/sederajat sebanyak 417.981 orang. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2022

d. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah pertambahan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2017-2021 relatif stabil, akan tetapi pada tahun 2017, dengan diberlakukannya KTP-elektronik jumlah penduduk Kota Surabaya yang tercatat dan diakui mengalami penyesuaian. Pergerakan jumlah penduduk ini selain karena faktor pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), mutasi penduduk (pindah masuk dan pindah keluar) juga karena adanya proses pemutakhiran data kependudukan yang terpusat dalam Satu Data Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2017 telah dilakukan pendataan penduduk dengan proses verifikasi data penduduk pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Secara detail gambaran persebaran dan perkembangan jumlah penduduk perkecamatan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2021

No.	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	KARANG PILANG	70.636	72.044	77.557	74.281	74.341
2	WONOCOLO	76.318	78.546	85.284	79.361	79.260
3	RUNGKUT	109.260	111.987	121.247	117.287	117.983
4	WONOKROMO	157.008	158.235	169.994	159.138	157.126
5	TEGALSARI	98.816	99.866	108.097	98.904	98.288
6	SAWAHAN	202.266	203.011	216.414	201.743	200.341
7	GENTENG	58.611	58.303	63.165	58.450	58.114
8	GUBENG	136.021	135.727	143.874	135.817	134.467
9	SUKOLILO	106.167	107.957	116.915	110.705	111.762
10	TAMBAKSARI	219.653	221.986	239.272	225.507	225.180
11	SIMOKERTO	94.836	94.642	104.143	94.619	93.793
12	PABEAN CANTIAN	76.772	76.800	85.856	75.346	74.820
13	BUBUTAN	99.926	99.619	107.835	98.762	97.573
14	TANDES	90.056	90.744	96.590	91.827	91.462
15	KREMBANGAN	114.293	114.818	126.743	114.807	114.618
16	SEMAMPIR	183.254	182.245	206.449	183.158	183.344
17	KENJERAN	159.473	162.274	179.198	172.452	174.180
18	LAKARSANTRI	56.835	57.637	61.907	60.770	61.422
19	BENOWO	61.450	63.199	68.351	67.828	68.643
20	WIYUNG	68.564	69.332	74.024	72.522	73.223
21	DUKUH PAKIS	58.715	59.028	62.846	59.740	59.564
22	GAYUNGAN	42.559	42.907	47.827	43.553	43.336
23	JAMBANGAN	49.139	49.892	54.105	52.249	52.851
24	TENGGILIS MEJOYO	56.359	56.794	60.274	58.239	58.329
25	GUNUNG ANYAR	55.219	56.135	60.505	59.048	59.673
26	MULYOREJO	83.551	84.328	91.339	86.407	86.469
27	SUKOMANUNGGAL	101.276	101.195	108.264	103.814	103.831
28	ASEMROWO	45.896	44.899	49.808	46.563	47.036
29	BULAK	43.044	43.401	46.166	44.975	45.420
30	PAKAL	53.879	54.102	58.599	57.805	58.865
31	SAMBIKEREP	62.328	62.278	66.833	65.053	65.638
JUMLAH		2.892.180	2.913.931	3.159.481	2.970.730	2.970.952

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

Pada Tahun 2019, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya sebesar 8,43 persen terhadap jumlah penduduk Tahun 2018. Sedangkan pada Tahun 2020, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya -5,97 persen, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarenakan penyesuaian data dengan Satu Data Kementerian Dalam Negeri. Dan pada tahun 2021, pertumbuhan penduduk kota Surabaya sebesar 0,075%.

1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SDM non PNS agar dapat mewujudkan pelayanan prima. Jumlah PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki sebagamana tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Tahun 2021
1.	Jumlah PNS Laki-laki	5.043
2.	Jumlah PNS Perempuan	7.655
	Jumlah seluruh PNS	**12.698**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2021

Komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin berbeda jika dikaitkan dengan pemegang jabatan struktural karena terdapat pejabat struktural berjenis kelamin laki-laki yang lebih besar daripada perempuan dengan selisih yang kecil sebagaimana Tabel 1.4. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mengakomodasi konsep kesetaraan gender dalam karir dan jabatan selain mempertimbangkan aspek yang utama yaitu kompetensi, disiplin, integritas dan pendidikan.

Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Tahun 2021	
1.	Jumlah PNS Pejabat Struktural		1.424
	Laki-laki	741	
	Perempuan	683	
2.	Jumlah PNS Staf		11.274
	Laki-laki	4.302	
	Perempuan	6.972	
	Jumlah seluruh PNS		**12.698**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2021

Jika dikelompokkan berdasarkan golongan, maka dapat diketahui bahwa jumlah PNS terbanyak pada golongan III dan paling sedikit pada golongan I sebagaimana yang disampaikan dalam Tabel 1.5. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang memiliki keterampilan dan pengalaman bekerja masih mendominasi jumlah PNS di Kota Surabaya.

Tabel 1.5
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tahun 2021
1.	Jumlah PNS Golongan I	240
2.	Jumlah PNS Golongan II	2.711
3.	Jumlah PNS Golongan III	6.546
4.	Jumlah PNS Golongan IV	3.201
	Jumlah seluruh PNS	**12.698**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2021

Jumlah PNS dengan tingkat golongan golongan III dan IV, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.6. menunjukkan bahwa golongan III dan IV tersebut banyak dipenuhi oleh PNS berpendidikan diploma III dan strata I.

Tabel 1.6
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Tahun 2021
1.	Jumlah PNS pendidikan terakhir SD	187
2.	Jumlah PNS pendidikan terakhir SMP	324
3.	Jumlah PNS pendidikan terakhir SLTA	2.201
4.	Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma I	15
5.	Jumlah PNS pendidikan terakhir Dilpoma II	85
6.	Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma III	1.049
7.	Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma IV	98
8.	Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata I	7.044
9.	Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata II	1.683
10.	Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata III	12
	Jumlah seluruh PNS	**12.698**

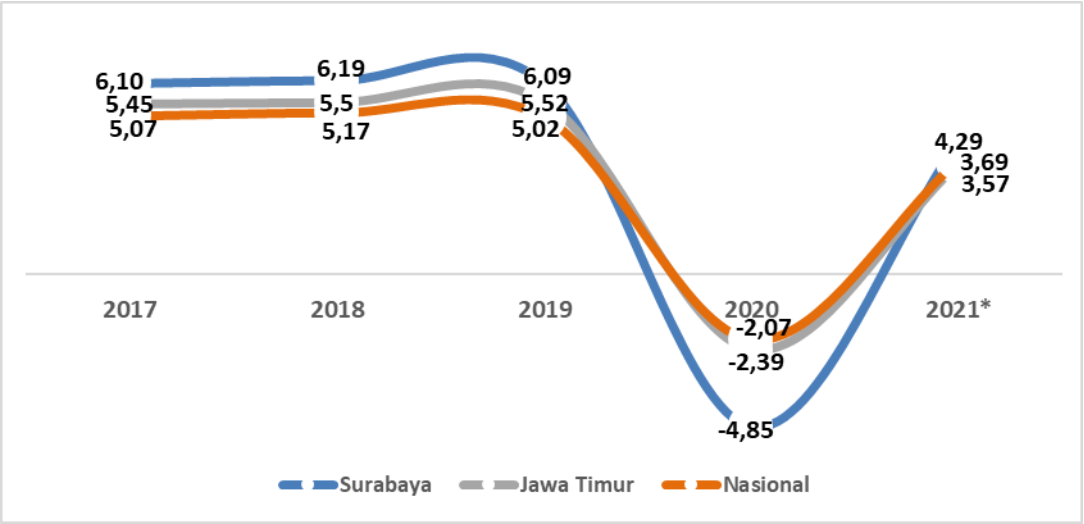
Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2021

1.3.4 Kondisi Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Keberlanjutan pemulihan ekonomi dan keberhasilan penanganan kasus Covid-19 di Kota Surabaya menjadi faktor penentu kinerja perekonomian Kota Surabaya selama tahun 2021. Meskipun pada pertengahan tahun 2021 kasus Covid-19 mengalami kenaikan akibat virus varian delta yang mengakibatkan pemerintah kembali menetapkan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang tentunya berimbas terhadap arus perekonomian, namun kinerja perekonomian Kota Surabaya hingga akhir tahun 2021 masih menunjukkan angka yang positif jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2022, diolah
Catatan :)Data sementara*

Besarnya proses pemulihan ekonomi Kota Surabaya selama tahun 2021 direfleksikan dengan capaian perekonomian Kota Surabaya yang tumbuh sebesar 4,29 persen, dimana laju pertumbuhannya lebih tinggi dibanding perekonomian Jawa Timur sebesar 3,57 persen dan Nasional sebesar 3,69 persen. Angka tersebut merupakan sinyal yang baik mengingat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -4,85 pada tahun 2020, bahkan lebih dalam dibanding kontraksi pertumbuhan Jawa Timur dan Nasional.

Pemerintah Kota Surabaya telah mengupayakan beragam strategi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Salah satu hal yang dilakukan adalah mendorong percepatan vaksinasi sehingga dapat menunjang pergerakan dunia usaha di Kota Surabaya. Capaian vaksinasi terus ditingkatkan agar dosis kedua dapat mencapai target 100%. Pemerintah Kota Surabaya juga berfokus pada pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Intervensi dilakukan Pemerintah Kota Surabaya seperti pemberdayaan usaha mikro, pelatihan wirausaha, sampai dengan fasilitas penunjang pemberdayaan seperti lokasi usaha hingga sarana pendukung usaha, dimana seluruh intervensi tersebut melibatkan MBR sehingga dapat meningkatnya kesejahteraan khususnya setelah terdampak pandemi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dilihat dari sisi penawaran pada tahun 2021, dari 17 lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya terdapat 16 lapangan usaha yang tumbuh positif, dan sisanya 1 lapangan usaha yang masih terkontraksi yakni lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan. Pertumbuhan tertinggi dikontribusi oleh lapangan usaha utama Kota Surabaya, yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor (7,37%); diikuti lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (6,10%); Informasi dan Komunikasi (6,00%); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (5,63%) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (5,17%). Sementara lapangan usaha yang lainnya tumbuh kurang dari 5%.

Kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor yang tumbuh tinggi dipengaruhi oleh kebijakan pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat seiring semakin menurunnya kasus Covid-19 sejak awal tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2021. Bahkan ditriwulan II 2021, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mencapai pertumbuhan tertinggi selama pandemi Covid-19 yang mencapai 8,91%. Selain itu, meningkatnya kinerja lapangan usaha ini juga didorong oleh aktivitas belanja *online* yang masih tinggi menjadi pilihan ditengah masa pandemi. Percepatan kinerja perdagangan juga tercermin dari aktivitas ekspor impor yang membaik dibandingkan capaian di tahun 2020. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan kembali meningkatnya lapangan usaha utama pendorong perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2021.

Lapangan usaha yang berkontribusi tertinggi selanjutnya yakni Pengadaan Listrik dan Gas serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mempertahankan pertumbuhan positif di tahun 2021, yakni sebesar 5,63%. Masih berlanjutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terutama saat jumlah kasus positif varian delta yang meningkatkan jumlah kasus positif secara signifikan di Kota Surabaya ikut mendorong banyaknya aktivitas masyarakat baik belajar dan bekerja dari rumah mendorong tingginya permintaan pada lapangan usaha ini. Disamping itu, Penerapan protokol yang ketat dengan selalu memakai masker dan rajin menjaga higienitas dengan rajin cuci tangan menjadi kebiasaan normal baru bagi masyarakat juga ikut berkontribusi terhadap meningkatnya sektor ini.

Lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial masih tumbuh cukup signifikan mengingat sektor tersebut berkaitan langsung dengan perkembangan situasi pandemi

Covid-19. Pada tahun 2021, percepatan vaksinasi menjadi poin utama dalam penanggulangan Covid-19 baik secara umum di wilayah aglomerasi maupun secara khusus di Kota Surabaya sendiri. Selain itu, aktivitas *testing* & *tracing* juga terus dilaksanakan sebagai upaya memutus rantai penularan virus Covid-19. Sementara Lapangan usaha informasi dan komunikasi tetap tumbuh didorong oleh terbatasnya pergerakan masyarakat yang menuntut akan kebutuhan teknologi virtual sehingga permintaan lalu lintas data *provider celluler* masih tetap tinggi.

Selama proses pemulihan ekonomi, kecepatan laju pertumbuhan masing-masing lapangan usaha berbeda antar lapangan usaha satu dengan yang lainnya. Kecepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh berapa besar peranan lapangan usaha itu sendiri serta kendala dari masing-masing lapangan usaha untuk kembali produktif dengan semestinya. Secara keseluruhan, dari 17 lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya, terdapat 16 lapangan usaha yang tumbuh positif tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemulihan ekonomi di Kota Surabaya selama tahun 2021 sudah sangat memuaskan. Sebagaimana yang telah diuraikan terperinci sebelumnya, lapangan usaha yang berkaitan erat dengan situasi pandemi mengalami laju pertumbuhan yang lebih cepat dibanding lapangan usaha yang lainnya.

Lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi masih mengalami pertumbuhan positif di tahun 2021, walaupun tidak terlalu signifikan. Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pembiayaan serta tingginya ketidakpastian risiko ditengah pandemi Covid-19 menjadi penyebab sedikitnya masyarakat yang memanfaatkan sumber pendanaan melalui jasa keuangan. Sementara lapangan usaha *real estate* juga tidak jauh berbeda, dengan masih menunjukkan pertumbuhan positif dipengaruhi oleh masih tingginya permintaan akan hunian di Kota Surabaya meskipun permintaan di tahun 2021 tidak setinggi permintaan sebelum adanya Covid-19. Lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2021 juga tumbuh positif dibanding tahun 2020 yang terkontraksi cukup dalam, meski laju pertumbuhannya tidak signifikan. Hal itu disebabkan karena pada pertengahan tahun 2021 lapangan usaha ini kembali mendapat tekanan berat akibat tingginya penyebaran virus Covid-19 varian delta sehingga produktivitasnya kurang optimal. Pola tersebut sama terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya, dimana lapangan usaha ini juga sempat tumbuh tinggi namun harus tertekan akibat

meningkatnya kasus Covid-19. Banyaknya jasa hiburan yang kembali tidak beroperasi menjadi alasan utama lapangan usaha ini tumbuh positif namun belum optimal.

Perbaikan kinerja ekonomi Kota Surabaya dari sisi permintaan selama tahun 2021 dikontribusi oleh perbaikan seluruh komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran, yakni tingkat konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi dan ekspor impor. Kontribusi tertinggi masih dikontribusi oleh konsumsi masyarakat, dimana pada tahun 2021 memberikan kontribusi terbesar yakni 59,10% dari total perekonomian Kota Surabaya. Mulai kembali normalnya perekonomian Kota Surabaya sebagai dampak pelonggaran kebijakan pembatasan masyarakat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat meskipun masih terbatas. Perbaikan ekonomi mitra dagang Kota Surabaya turut mendorong kinerja perdagangan sehingga mampu menstimulus ekonomi dari sisi ekspor impor. Lebih lanjut lagi, kenaikan investasi juga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya lebih tinggi ditunjukkan oleh capaian realiasasi investasi yang mengalami peningkatan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

b. Potensi Unggulan Daerah

Pemulihan perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2021 juga ditunjukkan oleh peningkatan nilai tambah yang dihasilkan, yang terlihat pada nilai tambah PDRB Kota Surabaya baik PDRB Atas Dasar Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Berdasarkan tabel 1.7 dan tabel 1.8 nilai tambah dari seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan namun dengan variasi peningkatan yang berbeda-beda.

Tabel 1.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020-2021 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Tahun 2020	2021*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	889.331,91	939.465,1
B	Pertambangan dan Penggalian	31.943,80	32.761,30
C	Industri Pengolahan	107.416.294,34	113.544.581,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.237.615,57	2.417.167,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	824.951,94	872.320,90
F	Konstruksi	51.969.408,77	55.273.538,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.246.755,05	163.509.913,20

Kategori	Uraian	Tahun 2020	2021*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
H	Transportasi dan Pergudangan	29.794.090,41	30.520.260,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.618.582,64	91.418.079,70
J	Informasi dan Komunikasi	33.247.669,54	35.273.340,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.183.377,44	30.560.741,60
L	Real Estate	15.354.350,85	15.790.323,10
M,N	Jasa Perusahaan	14.116.912,06	14.543.158,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.238.304,23	8.310.975,30
P	Jasa Pendidikan	14.540.365,94	14.682.371,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.880.587,79	5.220.638,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.918.915,11	7.340.199,70
	PDRB	**554.509.457,38**	**590.227.966,80**

Sumber data : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022
*Catatan : *) Data Sementara*

Tabel 1.8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2020-2021 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Tahun 2020*	2021*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	547.994,90	554.054,70
B	Pertambangan dan Penggalian	19.464,04	19.479,80
C	Industri Pengolahan	76.384.521,77	79.366.597,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.449.668,99	1.538.145,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	630.336,37	665.833,70
F	Konstruksi	38.387.739,29	40.070.071,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	106.340.867,71	114.183.332,30
H	Transportasi dan Pergudangan	19.477.422,82	19.875.912,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.053.239,21	57.221.633,10
J	Informasi dan Komunikasi	29.511.280,46	31.281.790,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.231.210,98	19.324.709,70
L	Real Estate	11.000.304,15	11.179.684,10
M,N	Jasa Perusahaan	8.801.216,28	8.974.255,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.754.525,35	4.748.920,20
P	Jasa Pendidikan	9.934.443,75	9.993.043,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.539.299,11	3.722.145,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.872.889,81	5.007.190,10
	PDRB	**390.936.424,98**	**407.726.799,20**

Sumber data : BPS Kota Surabaya, 2022
*Catatan : *) Data Sementara*

c. Ekspor Impor Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar negara. Beragam infrastruktur tersedia di Kota Surabaya seperti kemudahan aksesibilitas, transportasi, ketersediaan energi dan tersedianya kawasan industri. Di samping itu, keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Teluk Lamong turut menjadikan faktor pendorong Kota Surabaya sebagai kota penghubung (*city hub*) aktivitas perdagangan, baik untuk daerah lain maupun daerah sekitar Kota Surabaya.

Tabel 1.9
Komoditas Ekspor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2020 dan 2021

Ekspor Non Migas 2020		Ekspor Non Migas 2021	
Komoditas	Nilai (US$)	Komoditas	Nilai (US$)
Perhiasan/Permata	2.452.561.212	Lemak dan Minyak Hewan/Nabati	2.130.680.020
Kayu, Barang dari Kayu	1.397.433.943	Tembaga	1.899.255.165
Tembaga	1.276.700.289	Kayu, Barang dari Kayu	1.822.750.608
Ikan dan Udang	1.121.760.696	Perhiasan/Permata	1.579.696.859
Lemak & minyak hewan/nabati	990.267.259	Bahan Bakar Mineral	1.479.327.935
Kertas/Karton	874.571.725	Ikan dan Udang	1.171.659.590
Daging dan Ikan Olahan	782.602.149	Bahan Kimia Organik	1.062.381.595
Bahan kimia organik	625.873.372	Kertas/Karton	914.775.732
Perabot, penerangan rumah	610.277.933	Berbagai Produk Kimia	901.402.479
Kendaraan dan Bagiannya	494.717.751	Daging dan Ikan Olahan	898.637.281
Jumlah 10 Komoditas	10.262.766.328	Jumlah 10 Komoditas	13.860.567.263
Jumlah Komoditas Lainnya	6.652.208.579	Jumlah Komoditas Lainnya	8.920.110.688
Nilai Total Ekspor Non Migas	17.278.974.907	Total Ekspor Non Migas	22.780.677.951

Sumber data: BPS Jawa Timur dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2022 diolah

Performa pemulihan ekonomi yang terus menunjukkan perbaikan seiring tren positif keberhasilan penanganan Covid-19 juga tercermin dari kinerja perdagangan Kota Surabaya. Perbaikan ekonomi secara global yang terjadi secara bertahap turut diikuti oleh negara-negara mitra dagang Kota Surabaya sehingga berdampak pada perbaikan aktivitas

perdagangan Kota Surabaya. Kinerja perdagangan yang dilihat dari sisi ekspor non migas Kota Surabaya sebagaimana ditunjukkan oleh tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan. Kinerja ekspor non migas Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar US$22.780.677.951 atau meningkat sebesar 31,84% dibanding kinerja tahun 2020. Berdasarkan komoditasnya, permintaan lemak dan minyak hewani menjadi komoditas tertinggi yang diminati para importir selama tahun 2021. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya ekpor lemak nabati, yang mulanya sebesar US$990.267.259 di tahun 2020 menjadi sebesar US$2.130.680.020 di tahun 2021. Jika sebelumnya perhiasan/permata menjadi komoditas ekspor non migas tertinggi Kota Surabaya pada tahun 2020, mencapai US$2.452.561.212, untuk tahun 2021 komoditas tersebut mengalami penurunan permintaan menjadi US$1.579.696.859. Mengingat komoditas perhiasan/permata merupakan barang mewah maka kondisi perekonomian yang masih belum membaik secara keseluruhan mempengaruhi permintaan terhadap komoditas perhiasan/permata. Kondisi Komoditas ekspor non migas tertinggi selanjutnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perdagangan Kota Surabaya terangkum dalam tabel 1.3. Jika dilihat komposisi, jenis komoditas ekspor non migas Kota Surabaya yang pada tahun 2021 hampir sama dengan jenis komoditas di tahun 2020 namun variasi besaran nilainya yang berbeda.

Kondisi yang sama terjadi pada kinerja impor Kota Surabaya yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2021 yakni mencapai hampir 30% dibanding tahun 2020. Realisasi kinerja impor Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar US$19.568.405.393 sementara realiasi pada tahun 2020 menunjukkan angka yang lebih rendah yakni US$15.382.235.848. Jika dilihat dari komposisinya, 10 jenis komoditas tertinggi masih sama dengan tahun sebelumnya, namun variasinya sedikit mengalami perubahan. Karakteristik komoditas impor Kota Surabaya masih merupakan barang modal yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Adanya peningkatan nilai realisasi impor Kota Surabaya tahun 2021 dapat merefleksikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Surabaya sudah lebih produktif dibanding pada masa pandemi yang ditunjukkan dari permintaan akan *input* produksi yang meningkat seiring pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di Kota Surabaya.

Data kinerja ekspor impor kota Surabaya yang selama ini tersaji bukan sepenuhnya mencerminkan kondisi ekspor impor Kota Surabaya yang sebenarnya, melainkan juga

mencerminkan arus perdagangan dari dan ke wilayah sekitar Kota Surabaya dan wilayah Indonesia bagian timur. Hal tersebut disebabkan karena letak Kota Surabaya yang strategis sebagai kota pelabuhan menjadikan Kota Surabaya menjadi penghubung untuk Kota Surabaya sendiri dan wilayah Indonesia bagian timur.

Tabel 1.10
Komoditas Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2020 dan 2021

Impor Non Migas 2020		Impor Non Migas 2021	
Komoditas	Nilai (USD)	Komoditas	Nilai (USD)
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	1.959.228.268	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	1.878.758.513
Besi dan Baja	1.148.625.710	Besi dan Baja	1.793.452.311
Ampas/Sisa Industri Makanan	1.111.854.871	Ampas/Sisa Industri Makanan	1.473.608.658
Plastik dan Barang dari Plastik	1.056.768.744	Plastik dan Barang dari Plastik	1.406.342.145
Buah-buahan	837.594.972	Perhiasan/Permata	1.046.572.397
Gandum-ganduman	711.182.486	Buah-buahan	941.545.168
Mesin/peralatan listrik	621.899.717	Gandum-ganduman	880.837.604
Perhiasan/Permata	606.141.073	Mesin/Peralatan Plastik	778.563.827
Bahan kimia organik	475.979.690	Bahan Kimia Organik	599.530.381
Biji-bijian berminyak	416.402.964	Biji-bijian Berminyak	570.173.189
Jumlah 10 Komoditas	8.945.678.495	Jumlah 10 Komoditas	11.369.384.193
Jumlah Komoditas Lainnya	6.436.557.353	Jumlah Komoditas Lainnya	8.199.021.200
Nilai Total Ekspor Non Migas	15.382.235.848	Jumlah Impor Non Migas	19.568.405.393

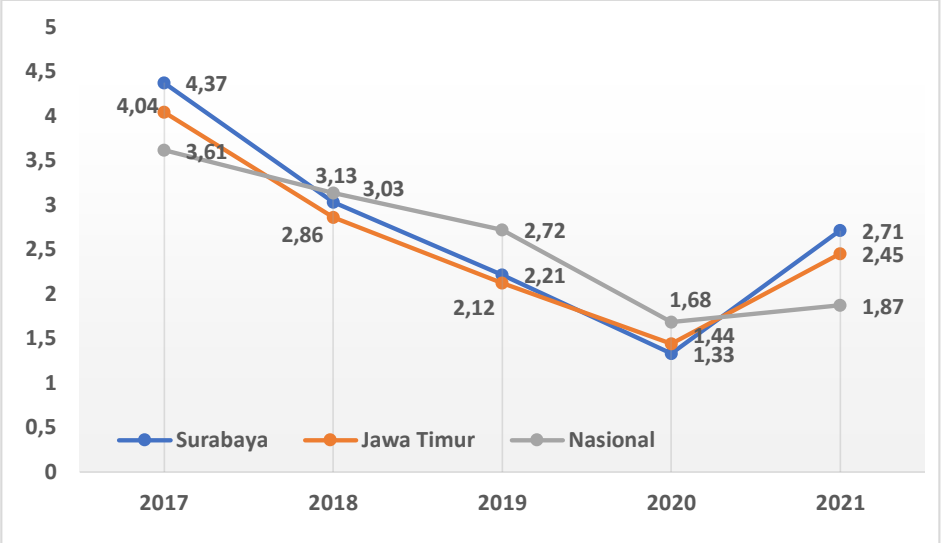
Sumber data: BPS Jawa Timur dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2022, diolah

d. Inflasi Kota Surabaya

Inflasi Kota Surabaya sejak tahun 2017 memiliki kecenderungan menurun, dimana inflasi yang rendah sesuai dengan target sasaran yang selama ini ditetapkan yakni pada kisaran 3 ± 1 persen. Inflasi yang ditargetkan stabil dan terkendali diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang selanjutnya dapat menstimulus perekonomian agar terus mengalami peningkatan. Penurunan yang lebih dalam tersebut berlanjut hingga tahun 2020, dimana perekonomian secara keseluruhan terkontraksi

akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi yang berimbas terhadap realisasi inflasi. Inflasi yang terus menunjukkan penurunan hingga terdalam pada tahun 2020 yakni sebesar 1,33%. Inflasi Kota Surabaya tersebut pada tahun 2020 lebih rendah dibanding realisasi inflasi Jawa Timur (1,44 persen) dan Nasional (1,68 persen) disebabkan oleh melemahnya permintaan masyarakat sebagai dampak kebijakan *social distancing* dalam rangka mencegah penularan virus Covid-19.

Gambar 1.5
Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2017-2021



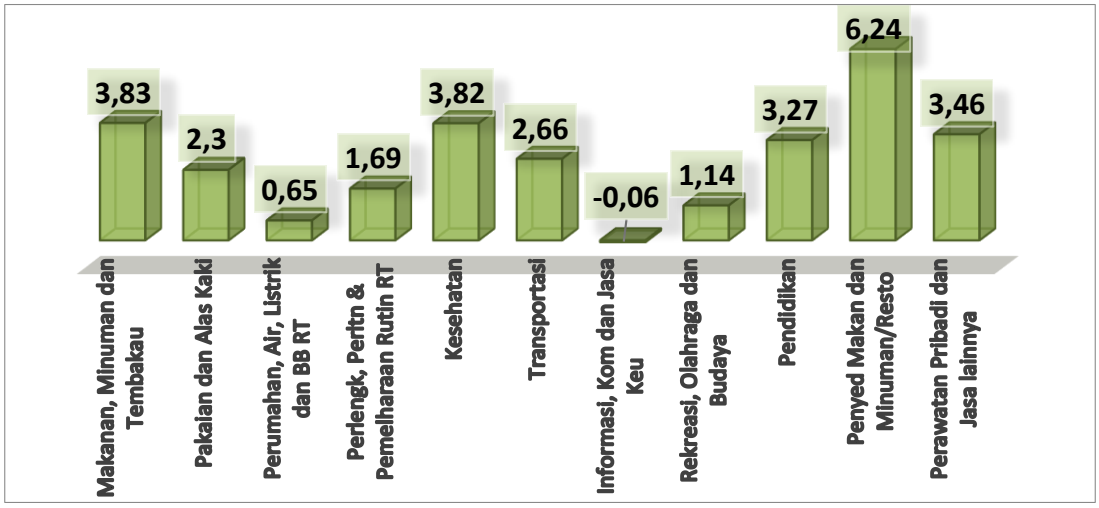
Sumber: BPS Pusat, Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2022, diolah

Pemulihan ekonomi yang menunjukkan tren positif ditandai oleh meningkatnya aktivitas perekonomian. Salah satu indikator meningkatnya aktivitas perekonomian yakni meningkatnya inflasi. Hal itu ditunjukkan oleh inflasi Kota Surabaya yang mengalami peningkatan di tahun 2021 yakni 2,71% atau meningkat sebesar 1,03% dibanding tahun 2020. Realisasi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2021 juga lebih tinggi dibanding realisasi inflasi Jawa Timur dan Nasional. Meskipun demikian, inflasi Kota Surabaya tahun 2021 masih selaras dengan arah inflasi Jawa Timur dan Nasional. Inflasi yang lebih tinggi juga merefleksikan peningkatan daya beli masyarakat sehingga peningkatan inflasi yang lebih tinggi di Kota Surabaya mengindikasikan mulai kemballi pulihnya perekonomian Kota Surabaya yang ditunjukkan dari sisi permintaan masyarakat.

Berdasarkan kelompok jenis barang dan jasa pembentuk inflasi, pada tahun 2021 dari sebelas kelompok pengeluaran, 10 (sepuluh) kelompok mengalami Inflasi dan 1

(satu) kelompok mengalami deflasi. Kelompok jenis barang dan jasa yang mengalami inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, Makanan, Minuman dan Tembakau; Kesehatan; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya; serta Pendidikan. Sisanya terdapat 5 kelompok barang dan jasa yang mengalami inflasi kurang dari tiga persen. Sementara satu kelompok jenis barang dan jasa pembentuk inflasi yang mengalami deflasi yakni Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yakni sebesar -0,06%.

Gambar 1.6
Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2021



Sumber: BPS Pusat, Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2022, diolah

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dikontribusi oleh sub kelompok Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman dengan kontribusi sebesar 6,24% selama tahun 2021. Pembukaan kembali restoran/tempat makan maupun mall dengan kapasitas yang terbatas seiring pemberlakuan kehidupan *new normal* ditengah masa pandemi yang belum berakhir menjadi salah satu faktor yang menjadi indikasi meningkatnya inflasi pada kelompok ini. Inflasi Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran kelompok juga mengindikasikan peningkatan positif perbaikan ekonomi di Kota Surabaya yang ditinjau dari sisi permintaan. Hal itu didasarkan oleh kontribusi kelompok penyediaan makanan dan minuman menjadi sektor ketiga yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Selain itu, meningkatnya

harga beberapa kelompok bahan makanan juga menjadi faktor pendorong meningkatnya inflasi kelompok ini.

Kelompok yang berperan tinggi selanjutnya yakni Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kesehatan yang memiliki kontribusi hampir sama yakni 3,83% dan 3,82%. Kelompok makanan minuman dan tembakau dipengaruhi oleh beberapa bahan makanan yang mengalami peningkatan harga pada momen-momen tertentu diakibatkan siklus musiman sehingga ketersediaan stok terbatas di pasaran yang menyebabkan peningkatan harga. Tingginya permintaan bahan makanan yang dipengaruhi oleh banyaknya restoran/tempat makan disertai jumlah penduduk yang banyak baik yang penduduk asli maupun penduduk pendatang menjadi faktor rentannya kenaikan harga bahan makanan di Kota Surabaya. Ditambah lagi Kota Surabaya yang bukan merupakan daerah penghasil bahan pertanian menyebabkan ketergantunga yang tinggi terhadap daerah penghasil sehingga fluktuasi harga cukup tinggi. Komoditi-komoditi bahan makan yang rentan menjadi pendorong inflasi Kota Surabaya dapat dijelaskan pada tabel dibawah. Kelompok makanan, minuman dan tembakau juga dikomtribusi oleh inflasi sub kelompok rokok dan tembakau dengan kontribusi 6,02%. Peningkatan inflasi pada sub kelompok rokok dan tembkau seiring dengan adanya kebijakan Kementerian Keuangan yang meningkatkan cukai rokok sebesar 12,5% pada tahun 2021.

Kelompok Kesehatan pada tahun 2021 masih berkontribusi tinggi terhadap inflasi Kota Surabaya disebabkan karena kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kesehatan selama pandemic Covid-19 baik untuk penggunaan pencegahan maupun pengobatan menjadi alasan kelompok ini tetap menyumbangkan inflasi selama tahun 2021.

Kelompok Pendidikan menjadi penyumbang inflasi setiap tahunnya di Kota Surabaya. Tingginya sub kelompok Pendidikan yang berkontribusi terhadap inflasi Kota Surabaya pada tahun 2021 disumbang oleh sub kelompok perguruan tinggi yakni 5,70%. Hal tersebut terjadi dikarenakan Kota Surabaya merupakan Kota Pendidikan dimana banyak perguruan tinggi ternama yang menjadi tujuan untuk menempuh pendidikan tinggi. Oleh karena itu, adanya kebijakan kenaikan tarif pendidikan setiap tahunnya ketika memasuki pendaftaran tahun ajaran baru secara otomatis akan membuat kelompok ini sebagai pendorong inflasi setiap tahunnya.

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2021 dilihat dari kelompok disagregasinya, terkendali dipengaruhi oleh stabilnya inflasi kelompok *volatile food* (bahan makanan) meskipun beberapa bahan makanan masih menjadi pemicu inflasi, namun dipengaruhi oleh faktor eksternal. Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2021 cenderung dipengaruhi kelompok harga kelompok *administered price* yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara *core inflation* (inflasi inti) cenderung stabil di tahun 2021.

Inflasi kelompok bahan bahan makanan cenderung mengalami deflasi meskipun beberapa komoditi mengalami kenaikan harga. Komoditas dalam kelompok bahan makanan yang meyumbang inflasi tertinggi sepanjang tahun 2021 yakni: minyak goreng, tahu mentah, cabai rawit dan sop. Kenaikan harga minyak goreng terjadi disebabkan oleh harga CPO global yang mengalami peningkatan. Sementara harga cabai rawit dan sop menjadi termasuk salah satu kontributor tertinggi peningkatan inflasi Kota Surabaya pada tahun 2021 disebabkan oleh pasokan yang terbatas yang diakibatkan oleh faktor cuaca. Sementara inflasi pada komoditas tahu mentah di dorong oleh meningkatnya harga kedelai global sebagai bahan baku produksi tahu.

Komoditas *administered price*, pada tahun 2021 masih menjadi penyumbang inflasi yakni tarif jalan tol dan angkutan udara. Kelompok transportasi mengalami inflasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan jasa angkutan udara pada momen-momen tertentu maupun momen libur panjang akhir pekan mendorong beberapa maskapai membuat kebijakan peningkatan harga. Kenaikan tarif angkutan udara juga disebabkan oleh upaya maskapai khususnya yang *low cost carrier* yang menerapkan tarif diatas tarif batas bawah yang diatur Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan pendapatannya. Sementara untuk kenaikan tarif jalan tol disebabkan adanya kebijakan penerapan peningkatan tarif jalan tol ruas Surabaya-Gempol yang ditetapkan mulai tanggal 17 Januari 2021. Sementara peningkatan inflasi untuk komoditas rokok kretek filter seiring dengan kebijakan Kementerian Keuangan yang meningkatkan cukai rokok sebesar 12,5% pada tahun 2021. Pelaku usaha ditengarai melakukan kebijakan penyesuaian harga secara bertahap untuk mentransmisikan kenaikan cukai tersebut.

Kelompok *volatile food* selama tahun 2021 mendominasi menjadi penahan laju inflasi Kota Surabaya. Hal itu ditunjunjukkan dari 10 (sepuluh) komoditas penyumbang tertinggi inflasi Kota Surabaya selama tahun 2020, 8 (delapan) komoditas merupakan kelompok barang *volatile food* dan 2 (dua) sisanya merupakan dalam kelompok

administered price. Komoditas *volatile food* yang menekan laju inflasi Kota Surabaya sepanjang tahun 2020 yakni bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, tomat, pisang, biskuit dan mujair. Deflasi yang terjadi disebabkan oleh melimpahnya stok disertai dengan stabilnya permintaan selama tahun 2021. Penurunan inflasi pada kelompok bumbu-bumbuan yang terjadi pada komoditas sejalan dengan penurunan harga yang didorong oleh melimpahnya stok pasca panen raya pada sentra sentra produksi.

Kelompok transportasi juga mengalami deflasi pada komoditas tarif kereta api. Deflasi pada komoditas tersebut diindikasi oleh masih moderatnya permintaan roda transportasi publik darat dan memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk meminimalisir kontak fisik sebagai respon masyarakat untuk mencegah penularan virus Covid-19 di transportasi publik akibat masih tingginya penyebaran Covid-19 di awal semester pertama tahun 2021.

Tabel 1.11
10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Inflasi	Sumbangan (%)	Deflasi	Sumbangan (%)
1	Minyak Goreng	0.21	Bawang Merah	-0.05
2	Akademi/Perguruan Tinggi	0.16	Telur Ayam Ras	-0.05
3	Tarif Jalan Tol	0.13	Daging Ayam Ras	-0.04
4	Angkutan Udara	0.11	Telepon Seluler	-0.04
5	Tahu Mentah	0.07	Cabai Merah	-0.03
6	Cabai Rawit	0.07	Tomat	-0.03
7	Sop	0.07	Pisang	-0.02
8	Rokok Kretek Filter	0.07	Tarif Kereta Api	-0.02
9	Pemeliharaan/Service	0.05	Biskuit	-0.01
10	Obat Dengan Resep	0.05	Ikan Mujair	-0.01

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022, diolah

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah maka PAD sebagai salah satu sumber daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2021 terealisasi sebesar Rp8.327.041.521.082,- atau 95,99% dari target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid -19 yang masih berlangsung dengan adanya varian baru. Rincian target realisasi dan capaian pendapatan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	5.322.810.142.550	4.727.444.074.525	88,81%
2	Pendapatan Transfer	2.986.875.924.098	3.218.952.114.659	107,77%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	365.322.180.486	380.645.331.898	104,19%
Jumlah		**8.675.008.247.134**	**8.327.041.521.082**	**95,99%**

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2022

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp3.649.931.910.437- atau 85,96%, retribusi daerah sebesar Rp235.648.553.763,- atau 66,56%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar

Rp160.867.394.117,- atau 97,99% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp680.996.216.208,-atau 121,91% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Daerah	4.245.952.242.350	3.649.931.910.437	85,96%
2	Retribusi Daerah	354.044.747.943	235.648.553.763	66,56%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	164.173.248.498	160.867.394.117	97,99%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	558.639.903.759	680.996.216.208	121,90%
Jumlah		**5.322.810.142.550**	**4.727.444.074.525**	**88,81%**

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2022

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.649.931.910.437,- atau 85,96%. Terjadinya pandemi Covid-19 yang masih berdampak di tahun 2021 telah mengakibatkan meningkatnya beban ekonomi masyarakat sehingga Pemerintah Kota Surabaya memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran pajak daerah agar sektor perekonomian segera pulih, dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi sebagai Akibat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya, menyebutkan pemberian insentif pajak daerah meliputi penghapusan sanksi bunga, denda dan kenaikan untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, PPJ, pajak air tanah dan reklame dimulai tanggal 17 Maret 2020 saat melakukan pembayaran sanksi otomatis akan akan terhapus secara sistem. Regulasi ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa darurat Covid-19 yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku;

2. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-728;
3. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah berupa Pembebasan Pajak bagi Hotel yang dimanfaatkan untuk isolasi warga yang memiliki potensi terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam rangka Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76;
5. Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2021 dalam Rangka Hari Pahlawan;
6. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
7. Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Pajak Daerah secara umum belum mencapai target di tahun 2021 dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021, maka dengan adanya dampak tersebut mengakibatkan:

1. Adanya obyek hotel yang mengajukan penundaan pembayaran;
2. Adanya restoran dan hiburan yang tidak beroperasional di masa Pandemi Covid-19;
3. Adanya hotel, restoran dan tempat hiburan yang tidak beroperasional di masa pandemi Covid-19 sehingga pemilik reklame mengajukan keberatan dan menunda pengurusan perpanjangan dan pembayaran pajak reklame hotel, restoran dan hiburan;
4. Adanya perusahaan, mall, perkantoran yang mengurangi penggunaan listrik dan jam operasional sehingga setoran PPJ kepada PLN ikut berkurang;

5. Adanya restoran, hotel dan tempat hiburan tutup selama masa pandemi serta adanya pembatasan pengunjung sehingga pendapatan pajak parkir mengalami penurunan yang sangat signifikan;
6. Adanya tempat usaha dan perkantoran yang menutup usaha termasuk penghentian penggunaan air tanah sehingga mengakibatkan realisasi Pajak Air Tanah mengalami penurunan;
7. BPHTB adalah Transaksi Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mengikuti perkembangan ekonomi dan jual beli properti, dengan adanya pandemi ini sangat berpengaruh kepada daya beli masyarakat terhadap properti dan karena banyaknya orang yang menunda pembayaran BPHTB.

Dari Sembilan pajak daerah yang mengalami capaian terendah adalah Pajak Hiburan hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan Instruksi Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang menyebutkan :

1. Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan ditutup
2. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai
    b. Kapasitas maksimal 50% dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam peduli lindungi yang boleh masuk
    c. pengunjung usia < 12 tahun dilarang masuk
3. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

Selengkapnya mengenai rincian target, realisasi dan capaian Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.14

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Hotel				
	a.	Pajak Hotel	297.186.278.677	153.548.441.116	51,67%
	b.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	3.153.568.394	1.775.764.019	56,31%
	Jumlah Pajak Hotel		300.339.847.071	155.324.205.135	51,72%
2	Pajak Restoran				
	a.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	553.702.820.727	311.928.339.803	56,33%
	b.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	41.676.556.398	19.169.609.563	46,00%
	Jumlah Pajak Restoran		595.379.377.125	331.097.949.366	55,61%
3	Pajak Hiburan				
	a.	Pajak Tontonan Film	41.821.726.962	4.004.160.874	9,57%
	b.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	4.576.755.081	443.263.577	9,69%
	c.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	53.749.331.562	9.974.362.519	18,56%
	Jumlah Pajak Hiburan		100.147.813.605	14.421.786.970	14,40%
4	Pajak Reklame				
	a.	Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	128.034.812.484	102.535.838.400	80,08%
	b.	Pajak Reklame Kain	17.261.161.738	15.864.925.100	91,91%
	Jumlah Pajak Reklame		145.295.974.222	118.400.763.500	81,49%
5	Pajak Penerangan Jalan				
	a.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	492.774.421	453.476.365	92,03%
	b.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	447.483.971.692	406.588.539.122	90,86%
	Jumlah Pajak Penerangan Jalan		447.976.746.113	407.042.015.487	90,86%
6	Pajak Parkir				
	a.	Pajak Parkir	107.473.740.180	60.255.266.387	56,07%
	Jumlah Pajak Parkir		107.473.740.180	60.255.266.387	56,07%
7	Pajak Air Tanah				
	a.	Pajak Air Tanah	1.426.858.578	1.360.531.960	95,35%
	Jumlah Pajak Air Tanah		1.426.858.578	1.360.531.960	95,35%
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				
	a.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.227.836.058.286	1.274.379.927.993	103,79%
	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)		1.227.836.058.286	1.274.379.927.993	103,79%
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	a. BPHTB-Pemindahan Hak	1.193.068.244.452	1.287.649.463.639	107,93%
	b. BPHTB-Pemberian Hak Baru	127.007.582.718	0	0,00%
	Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.320.075.827.170	1.287.649.463.639	97,54%
Jumlah Pajak Daerah		**4.245.952.242.350**	**3.649.931.910.437**	**85,96%**

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2022

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar Rp235.648.553.763,- atau 66,56% dari target Rp354.044.747.943,- meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar Rp100.773.350.462,- atau 71,17%, retribusi jasa usaha sebesar Rp83.211.454.021,- atau 86,58% dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp51.663.749.280,- atau 40,57%. Selain kebijakan pengurangan pajak daerah Pemerintah Kota juga memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan menetapkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% terhadap retribusi izin mendirikan bangunan yang terutang akibat dampak penyebaran wabah Covid-19 di Kota Surabaya;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2021 tentang pemberian pengurangan retribusi izin pemakaian tanah kepada masyarakat pemegang izin pemakaian tanah dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-728;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemberian pengurangan retribusi izin pemakaian rumah dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dan Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang penghapusan sanksi administratif berupa denda pelanggaran kemajuan pelaksanaan pembangunan di lapangan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang pemberian pengurangan tarif sewa rumah susun akibat dampak penyebaran wabah Covid-19 di Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 125 Tahun 2021 tentang tata cara pengawasan dan pengendalian, pengosongan dan pemenuhan utang retribusi serta pengenaan

sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah.

Retribusi Daerah belum mencapai target di tahun 2021, disebabkan oleh :

1. Retribusi pelayanan kesehatan terealisasi Rp2.511.989.000,- atau 31,97% hal ini dikarenakan kepesertaan BPJS meningkat sehingga pasien umum yang datang ke puskesmas berkurang;
2. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terealisasi Rp12.846.753.544,- atau 36,71% hal ini dikarenakan pemberlakuan PPKM di Kota Surabaya, sehingga membatasi masyarakat untuk beraktivitas dan mengurangi kunjungan ke tempat usaha dan fasilitas publik;
3. Retribusi pengujian kendaraan bermotor terealisasi Rp15.798.983.900,- atau 83,05% hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran Muatan *(Over Loading)* dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih *(Over Dimension)* sehinngga banyak kendaraan yang Over Dimensi tidak mengujikan kendaraannya. Faktor lain adalah banyaknya mobil penumpang umum (Taksi) yang dirubah sifat menjadi kendaraan plat hitam;
4. Retribusi penggantian biaya cetak peta terealisasi Rp45.000,- atau 4,50% hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota surabaya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, mulai tanggal 21 Mei 2018 tidak memungut retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, ada realisasi karena adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya;
5. Retribusi pengolahan limbah cair terealisasi Rp542.307.120,- atau 92,99% hal ini dikarenakan selama pandemi Covid-19 tempat usaha, perkantoran dan sekolah swasta tutup sehingga volume pembuangan tinja menurun;
6. Retribusi pelayanan tera/tera ulang terealisasi Rp2.180.149.900,- atau 98,74% hal ini dikarenakan :
   a. Komponen Meter Air (Barindo), Kondisi pandemi yang hebat pada Tahun 2021 mengakibatkan menurunnya penjualan dari PT Barindo Anggun Industry sehingga jumlah meter air yang diproduksi menurun drastis;
   b. Komponen Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (TUTSIT). Masa berlaku tera ulang TUTSIT yang lama menjadikan TUTSIT sulit untuk dijadikan acuan. Menurut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018, masa berlaku tera ulang TUTSIT adalah selama 10 tahun. Pemilik TUTSIT pun terbatas pada perusahaan besar saja antara lain PT. Pertamina, PT. Pelindo beberapa perusahaan dengan level multinasional.

7. Retribusi pemakaian kekayaan daerah terealisasi Rp72.573723.821,- atau 91,10% hal ini dikarenakan :
   a. Retribusi penyewaan tanah yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan tidak terealisasi dikarenakan keterbatasan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah karena dampak pandemi Covid-19;
   b. Retribusi pemakaian ruangan pada Sentra Wisata Kuliner yang dikelola oleh Dinas Koperasi tidak terealisasi karena Pandemi berkelanjutan sehingga meningkatkan penyebaran virus Covid-19 mendorong Pemerintah mengambil kebijakan pembatasan mobilitas manusia (PPKM) yang memberikan dampak negatif dalam kegiatan berusaha/penjualan di Sentra Wisata Kuliner;
   c. Retribusi pemakaian ruangan pada Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia (GNI) yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata tidak terealisasi dikarenakan adanya pembatasan pergerakan masyarakat pada saat pandemi Covid-19.
8. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan) yaitu Pasar Ikan Hias Gunungsari yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terealisasi Rp444.014.000,- atau 91,10% hal ini dikarenakan penutupan sentra ikan hias pada saat PPKM Darurat;
9. Retribusi terminal terealisasi Rp5.170.002.700,- atau 61,73% yaitu Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum serta Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal hal ini dikarenakan :
   a. Tingkat mobilitas masyarakat berkurang saat kondisi pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh kepada jumlah angkutan yang beroperasi;
   b. Pada saat PPKM Terminal Purabaya tetap beroperasi tetapi animo pengguna jasa angkutan umum belum sepenuhnya normal;
   c. Masyarakat yang memanfaatkan jasa angkutan umum di terminal semakin berkurang karena adanya transportasi *online*;

d. Dampak dari adanya pandemic Covid-19 berpengaruh pada jumlah pengunjung Terminal.

10. Retribusi tempat khusus parkir terealisasi Rp3.885.509.000,- atau 54,31% hal ini dikarenakan sebagian tempat wisata tutup dan aktifitas perkantoran di sekitar lokasi PTK menurun, sehingga berimbas pada potensi pendapatan;
11. Retribusi izin mendirikan bangunan terealisasi Rp47.147.713.980,- atau 38,88% hal ini dikarenakan:
    a. Penurunan jumlah permohonan IMB bangunan tinggi;
    b. Dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi IMB;
    c. Banyaknya permohonan koreksi retribusi (Pemohon mempunyai IMB lama).
12. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum terealisasi Rp116.286.000,- atau 36,84% hal ini dikarenakan :
    a. Sesuai Undang undang No. 22 tahun 2009 Kendaraan Umum wajib berbadan Hukum. Saat ini kendaraan umum yang sudah berakhir masa berlaku pajak dan STNK nya tidak bisa balik nama kendaraan dikarenakan belum Berbadan Hukum, sedangkan syarat pengurusan Izin Trayek adalah Pajak dan STNK Kendaraan masih berlaku;
    b. Adanya persaingan dengan Angkutan *Online* yang berdampak pada turunnya pendapatan pemilik Angkutan Umum sehingga banyak yang tidak melakukan perbaikan kendaraan, tidak Uji Kendaraan dan tidak memperpanjang Izin Operasi / Trayek;
    c. Banyaknya kendaraan Taksi yang dirubah menjadi plat hitam sehingga terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan Izin Operasi.
13. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) terealisasi Rp4.399.749.300,- atau 76.23% hal ini dikarenakan berdasarkan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahwa Kabupaten/Kota harus menyesuaikan nomenklatur Perda Retribusi Perpanjangan

IMTA menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sehingga per 1 Nopember 2021 penerimaan Retribusi IMTA dihentikan oleh Pemerintah Pusat.

Rincian target, realisasi dan capaian retribusi daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Retribusi Jasa Umum				
	a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.857.883.300	2.511.989.000	31,97%
	b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	60.680.182.458	61.555.211.998	101,44%
	c.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.226.930.000	5.337.910.000	102,12%
	d.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan	35.000.000.000	12.846.753.544	36,71%
	e.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	19.023.916.220	15.798.983.900	83,05%
	f.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000	45.000	4,50%
	g.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	583.200.000	542.307.120	92,99%
	h.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.207.955.000	2.180.149.900	98,74%
Jumlah Retribusi Jasa Umum			**130.581.066.978**	**100.773.350.462**	**77,17%**
2	Retribusi Jasa Usaha				
	a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	79.660.185.436	72.573.723.821	91,10%
	b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	553.584.000	444.014.000	80,21%
	c.	Retribusi Terminal	8.374.646.000	5.170.002.700	61,73%
	d.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	7.154.735.000	3.885.509.000	54,31%
	e.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	368.628.500	1.138.204.500	308,77%
Jumlah Retribusi Jasa Usaha			**96.111.778.936**	**83.211.454.021**	**86,58%**
3	Retribusi Perizinan Tertentu				
	a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	121.264.288.029	47.147.713.980	38,88%
	b.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	315.614.000	116.286.000	36,84%
	c.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5.772.000.000	4.399.749.300	76,23%

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu		127.351.902.029	51.663.749.280	40,57%
Jumlah Retribusi Daerah		354.044.747.943	235.648.553.763	66,56%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2022

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp160.867.394.117,- atau 97,99% merupakan realisasi atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh BUMD maupun BUMN. Bagian laba yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Surabaya tersebut merupakan output atas penurunan pendapatan BUMD dan BUMN di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN				
	a.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	9.164.857.754	9.161.832.754	99,97%
	Jumlah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		**9.164.857.754**	**9.161.832.754**	**99,97%**
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				
	a.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	17.298.290.847	17.264.149.789	99,80%
	b.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	68.000.000	50.000.000	73,53%
	c.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	137.642.099.897	134.391.346.103	97,64%

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Jumlah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	155.008.390.744	151.705.495.892	97,87%
3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta			
	a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		65.471	
	Jumlah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		65.471	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		164.173.248.498	160.867.394.117	97,99%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2022

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2021 sebesar Rp680.996.216.208,- atau 121,90% dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.17
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.836.687.500	4.713.307.090,00	166,16%
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	22.998.204.715	32.533.742.998	141,46%
3	Jasa Giro	4.628.350.505	5.861.800.713	126,65%
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.183.723.964	187.723.393	15,86%
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	117.453.449.031	65.023.310.230	55,36%
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.299.712.870	228.533.699	5,32%
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	23.976.259.707	4.776.270.507	19,92%
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.844.526.795	3.332.585.159	117,16%

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000	1.032.277.609	103,23%
10	Pendapatan BLUD	346.207.428.787	532.603.493.342	153,84%
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	31.211.559.885	30.703.171.468	98,37%
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		**558.639.903.759**	**680.996.216.208**	**121,90%**

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2022

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2021 sebesar Rp3.218.952.114.659,- atau 107,77% dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.18
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer
Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021

No		Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Transfer					
1	**Pendapatan Transfer dari Pusat**				
1.1	**Dana Perimbangan**				
1.1.1	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**				
	a.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.268.707.000	10.442.518.987	143,66%
	b.	DBH PPh Pasal 21	261.563.496.000	402.490.635.944	153,88%
	c.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	52.206.371.000	100.490.275.399	192,49%
	d.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	27.060.191.835	25.862.043.167	95,57%
	e.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	36.021.058.000	57.368.872.546	159,26%
	f.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	807.637.000	1.087.707.787	134,68%
	g.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	27.552.000	39.874.676	144,73%
	h.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.737.805.000	3.405.465.855	195,96%
	i.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	245.721.000	490.135.324	199,47%
	j.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000	1.357.619.150	120,32%
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		**388.066.857.835**	**603.035.148.835**	**155,39%**
1.1.2	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				
	a.	DAU	1.182.439.723.000	1.167.156.329.918	98,71%

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**1.182.439.723.000**	**1.167.156.329.918**	**98,71%**
1.1.3	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**				
	a.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.387.244.000	-	0,00%
	b.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.333.258.000	-	0,00%
	c.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	198.970.000	-	0,00%
	d.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-RegulerPelayanan Kesehatan Dasar	2.000.000.000	1.357.500.000	67,88%
	e.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-RegulerPelayanan Kefarmasian	8.419.602.000	6.651.066.000	79,00%
	f.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-PenugasanPenurunan AKI dan AKB	1.784.838.000	1.766.000.000	98,94%
	g.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.550.398.000	1.427.475.000	92,07%
	h.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.246.578.000	3.705.741.060	70,63%
	i.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.070.728.000	676.237.400	63,16%
	j.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	483.999.000	-	0,00%
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		**24.475.615.000**	**15.584.019.460**	**63,67%**
1.1.4	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**				
	a.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	258.158.206.000	258.158.206.000	100,00%
	b.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	888.000.000	888.000.000	100,00%
	c.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	71.405.200.000	48.686.927.480	68,18%
	d.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.157.500.000	-	0,00%
	e.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000	344.723.700	49,25%
	f.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	35.888.052.000	272.951.473	0,76%
	g.	DAK Non Puskesmas	3.228.651.000	-	0,00%
	h.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.938.518.000	-	0,00%
	i.	DAK Non Fisik-PK2UKM	459.181.000	458.943.380	99,95%
	j.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	5.134.936.000	4.987.668.180	97,13%
	k.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	51.039.050.000	51.039.050.000	100,00%

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	l.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	326.462.000	326.462.000	100,00%
	m.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.913.140.000	2.866.091.910	48,47%
	n.	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	507.815.000	253.907.000	50,00%
	o.	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian	560.000.000	280.000.000	50,00%
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		**443.304.711.000**	**368.562.931.123**	**83,14%**
	Jumlah Dana Perimbangan		**2.038.286.906.835**	**2.154.338.429.336**	**105,69%**
1.2	**Dana Insentif Daerah (DID)**				
	a.	DID	48.197.603.000	48.197.603.000	100,00%
	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)		**48.197.603.000**	**48.197.603.000**	**100,00%**
Jumlah Pendapatan Transfer dari Pusat			**2.086.484.509.835**	**2.202.536.032.336**	**105,56%**
2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**				
2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**				
	a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	367.549.473.571	471.748.087.809	128,35%
	b.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	239.995.676.670	261.207.410.554	108,84%
	c.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	211.965.388.852	180.556.381.849	85,18%
	d.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.229.383.856	1.291.429.375	105,05%
	e.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	76.076.091.314	98.357.372.736	129,29%
	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil		**896.816.014.263**	**1.013.160.682.323**	**112,97%**
2.2	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**				
	a.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.575.400.000	3.255.400.000	91,05%
	Jumlah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		**3.575.400.000**	**3.255.400.000**	**91,05%**
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah			**900.391.414.263**	**1.016.416.082.323**	**112,89%**
Jumlah Pendapatan Transfer			**2.986.875.924.098**	**3.218.952.114.659**	**107,77%**

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2022

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2021 sebesar Rp380.645.331.898,- atau 104,19% dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.19
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1	Pendapatan Hibah			
	a. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		15.255.315.784	
	Jumlah Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		**15.255.315.784**	
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	a. Pendapatan Hibah Dana BOS	229.824.984.486	229.892.356.743	100,03%
	Jumlah Lain-lain Pendapatan	**229.824.984.486**	**229.892.356.743**	**100,03%**
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
	a. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	135.497.196.000	135.497.659.371	100,00%
	Jumlah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	**135.497.196.000**	**135.497.659.371**	**100,00%**
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		**365.322.180.486**	**380.645.331.898**	**104,19%**

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2022

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah Kota Surabaya Tahun 2021 sebesar Rp7.819.087.766.019,- atau terealisasi 87,06%, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.20
Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Belanja Daerah			
1	**Belanja Operasi**			
	Belanja Pegawai	2.510.065.269.214	2.353.630.642.870	93,77%
	Belanja Barang dan Jasa	4.821.136.771.841	4.259.975.510.473	88,36%
	Belanja Hibah	219.567.952.056	157.779.323.459	71,86%
	Belanja Bantuan Sosial	64.559.800	58.944.000	91,30%
	Jumlah Belanja Operasi	**7.550.834.552.911**	**6.771.444.420.802**	**89,68%**
2	**Belanja Modal**			
	Belanja Modal Tanah	175.524.457.912	171.876.414.740	97,92%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.860.424.405	163.131.234.366	85,03%

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	368.592.657.205	345.118.654.570	93,63%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	650.404.320.891	329.418.247.818	50,65%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.170.816.992	6.791.951.896	94,72%
	Jumlah Belanja Modal	**1.393.552.677.405**	**1.016.336.503.390**	**72,93%**
3	**Belanja Tidak Terduga**			
	Belanja Tidak Terduga	34.178.160.389	28.251.407.155	82,66%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**34.178.160.389**	**28.251.407.155**	**82,66%**
4	**Belanja Transfer**			
	Belanja Bagi Hasil	3.055.434.672	3.055.434.672	100,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	
	Jumlah Belanja Transfer	**3.055.434.672**	**3.055.434.672**	**100,00%**
Jumlah Belanja Daerah		**8.981.620.825.377**	**7.819.087.766.019**	**87,06%**

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2022

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah meliputi :

a. Terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat terlaksana dikarenakan refocussing kegiatan dalam rangka memenuhi pemulihan kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan sebagai dampak terjadinya Covid-19;
b. Ketidaksesuaian antara alokasi dan kegiatan yang didanai dari pendapatan transfer (DAK dan DBHCHT) dengan kebutuhan Pemerintah Kota.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan belanja sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan agar penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan tepat waktu, efisien dan efektif;
b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terkait dengan Petunjuk Teknis yang ada terkait dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

1.3.7 Realisasi Pembiayaan

Pada Tahun 2021 pengeluaran pembiayaan untuk Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,- masih belum di realisasikan karena Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021 memprioritaskan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.21

Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**316.612.578.243**	**316.623.750.967**	**100,00%**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	316.612.578.243	316.612.578.243	100,00%
	Penerimaan kembali pinjaman daerah		11.172.724	
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**10.000.000.000**	**0**	**0,00%**
	Penyertaan Modal	10.000.000.000	0	0,00%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2022

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pemulihan perekonomian beberapa negara di dunia akibat terjadinya pandemi Covid-19 masih terus berlanjut. Pemulihan tersebut seiring perkembangan pelaksanaan vaksinasi global. Meskipun demikian, optimisme pemulihan ekonomi global kedepan juga masih diiringi oleh resiko dan ketidakpastian yang tinggi. Optimisme pemulihan ekonomi global tersebut didasarkan oleh perkembangan beberapa indikator ekonomi makro global yang masih terus menunjukkan perbaikan hingga saat ini.

Perekonomian domestik juga terus membaik secara bertahap. Realisasi perekonomian Nasional pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding periode yang sama di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2021 sebesar 3,69 persen. Momen pemulihan ekonomi yang tetap terjaga dan berlanjut meskipun dihadapkan ketidakpastian seperti meningkatnya kasus Covid-19 akibat merebaknya virus varian delta dipertengahan tahun 2021 serta bayangan munculnya virus varian baru yang lebih berbahaya masih menjadi faktor utama penyebab tertahannya ekonomi Nasional di tahun 2021. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat kembali memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas sosial ekonomi atau PPKM darurat secara bertahap sehingga berdampak pada tidak maksimalnya aktivitas sektor-sektor ekonomi produktif. Meskipun demikian, realisasi kinerja ekonomi nasional yang menunjukkan pertumbuhan positif merupakan implementasi keberhasilan dari proses pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga didukung oleh pola hidup tatanan baru diiringi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan kondisi pandemi. Dengan demikian, pola hidup yang baru diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi kembali berjalan normal.

Perbaikan ekonomi juga terealisasi di Kota Surabaya. Realisasi capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang terus menunjukkan perbaikan positif setiap triwulannya seiring proses pemulihan ekonomi yang terus membaik dampak berhasilnya penanganan Covid-19 di Kota Surabaya. Seiring kondisi tersebut, peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Surabaya mendorong kinerja perekonomian

kembali produktif. Kebijakan pelonggaran PPKM sebagai imbas kasus Covid-19 di Kota Surabaya yang menurun, membuat banyaknya tenan-tenan pelaku usaha yang kembali beroperasi serta pusat perbelanjaan yang kembali ramai, menjadi salah satu indikator kembali pulihnya ekonomi di Kota Surabaya. Kebijakan pelonggaran tersebut tentunya diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Data BPS Kota Surabaya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sejak triwulan I 2021 menunjukkan perbaikan. Kondisi perekonomian yang membaik terus belanjut hingga triwulan II, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tumbuh signifikan di triwulan II 2021 mencapai 8,91 persen. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2021 ditopang oleh beberapa lapangan usaha yang tumbuh positif, yakni lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, penyediaan makan dan minum serta sektor Jasa. Walaupun belum memberikan kontribusi setinggi sebelum adanya pandemi, namun adanya pelonggaran kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tumbuh cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha utama kota surabaya mampu memberikan *multiplier effect* yang tinggi mengingat lapangan usaha tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun melibatkan sektor-sektor lainnya. Meskipun adanya pelonggaran aktivitas ekonomi, masih berlangsungnya pembatasan akibat meningkatnya penyebaran virus varians delta di pertengahan tahun 2020 berdampak terhadap belum maksimalnya aktivitas ekonomi secara keselurahan. Oleh karena itu, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada akhir tahun 2021 tumbuh positif namun masih mengalami pertumbuhan yang terbatas.

Realisasi tingkat inflasi Kota Surabaya dari sisi perkembangan harga sampai tahun 2021 sebesar 2,71 persen selaras dengan sasaran inflasi nasional. Berdasarkan kelompok pembentuknya, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2021 sebagian besar dikontribusi oleh kelompok *administered price* (harga diantur pemerintah). Sementara kelompok *volatile food* (bahan makanan) cenderung menjadi penahan laju inflasi dan kelompok *core inflation* (inflasi inti) cenderung stabil di tahun 2021. Lebih tingginya realisasi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2021 pada angka diatas 2 (dua) persen dibanding realisasi inflasi tahun 2020 sebesar 1,33 pesen menjadi indikasi adanya

peningkatan konsumsi masyarakat sehingga mendorong peningkatan harga barang-barang.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi guna menjaga produktivitas ekonomi di Kota Surabaya tetap terjaga tinggi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang antara lain: 1) pemulihan sektor usaha mikro; 2) pemulihan sektor perdagangan; 3) penguatan ketahanan dan keamanan pangan; 4) pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; 5) pemulihan sektor tenaga kerja. Program-program tersebut selanjutnya diwujudkan dalam program maupun kegiatanyang harapannya dapat menstimulus perekonomian Kota Surabaya sesuai yang ditargetkan.

2.1 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya Tahun 2021 adalah:

1. Adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah yaitu dari pajak dan retribusi daerah sebagai akibat dari pandemi Covid -19 berdasarkan :
   a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-728;
   b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah berupa Pembebasan Pajak bagi Hotel yang dimanfaatkan untuk isolasi warga yang memiliki potensi terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
   c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam rangka Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76.
2. Adanya penyesuaian Pendapatan Transfer berdasarkan :
   a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya;
   b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021

c. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/2936.36/101.1/2021, Perihal Refocusing Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021

Pendapatan daerah pada saat penyusunan Perubahan APBD 2021, mengalami perubahan semula sebesar Rp8.660.402.684.341,- menjadi Rp8.675.008.247.134,- mengalami peningkatan sebesar Rp14.614.562.793,- atau 0,17% yang meliputi :

A. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari Rp5.561.555.949.381.,- menjadi Rp5.322.810.142.550,- mengalami penurunan sebesar Rp238.745.806.831,- atau -4,29%;

B. Pendapatan Transfer mengalami perubahan dari Rp2.891.701.734.960,- menjadi Rp2.986.875.924.098,- mengalami peningkatan sebesar Rp95.174.189.138,- atau 3,29%;

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami perubahan dari Rp207.145.000.000,- menjadi Rp365.322.180.486,- mengalami peningkatan sebesar Rp158.177.180.486,- atau 76,36%.

Adapun perubahan pendapatan daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

No	Uraian	APDB 2021		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
1	**Pendapatan Asli Daerah**				
	Pajak Daerah	4.442.976.688.357	4.245.952.242.350	-197.024.446.007	-4,43%
	Retribusi Daerah	332.030.853.590	354.044.747.943	22.013.894.353	6,63%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	172.056.350.058	164.173.248.498	-7.883.101.560	-4,58%
	Lain-lain PAD yang sah	614.492.057.376	558.639.903.759	-55.852.153.617	-9,09%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**5.561.555.949.381**	**5.322.810.142.550**	**-238.745.806.831**	**-4,29%**
2	**Pendapatan Transfer**				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.069.382.681.000	2.086.484.509.835	17.101.828.835	0,83%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	822.319.053.960	900.391.414.263	78.072.360.303	9,49%
	Jumlah Pendapatan Transfer	**2.891.701.734.960**	**2.986.875.924.098**	**95.174.189.138**	**3,29%**
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**				

No	Uraian	APDB 2021		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	207.145.000.000	365.322.180.486	158.177.180.486	76,36%
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**207.145.000.000**	**365.322.180.486**	**158.177.180.486**	**76,36%**
Jumlah Pendapatan Daerah		**8.660.402.684.341**	**8.675.008.247.134**	**14.605.562.793**	**0,17%**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan OPD Penghasil 2022, diolah

2.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi mengakibatkan banyak kegiatan yang telah tersusun dalam RKPD 2021 harus ditunda pelaksanaannya dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Munculnya varian baru Covid-19 mengakibatkan terjadinya gelombang kedua peningkatan kasus Covid-19 sehingga belanja daerah masih diarahkkan untuk mencapai tema RKPD 2021 yakni ***"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus pembangunan Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana guna Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Surabaya"*** dengan fokus pada :

1. Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19;
2. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
3. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi;
4. Pemulihan dan penguatan sistem kesehatan;
5. Penguatan sistem jaring pengaman sosial;
6. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai nilai budaya lokal dalam sendi kehidupan masyarakat;
7. Peningkatan Ketahanan Pangan
8. Peningkatan Ketahanan Bencana
9. Peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik
10. Transparansi pengelolaan belanja daerah didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

11. Pelaksanaan skenario tatanan normal baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol Covid-19;
12. Pelaksanaan program skala besar dan prioritas.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 terkait Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Perubahan Kebijakan perencanaan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 disebabkan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.0712021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.O7DO21;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian lnsentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 440/4066/SJ dan Nomor HK.01.08/Menkes/930/2021 tentang Percepatan Pemberian lnsentif Bagi Tenaga Kesehatan di Daerah Yang Menangani Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi;

5. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/PK/2O21 tentang Dukungan Pendanaan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19;
6. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja Daerah pada saat penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021, mengalami perubahan dari Rp9.828.392.793.866,- menjadi Rp8.981.620.825.377,- berkurang sebesar Rp846.771.968.489,- atau -8,62%, yang meliputi:

1. Belanja Operasi mengalami perubahan dari Rp7.442.236.820.643,- menjadi Rp7.550.834.552.911,- bertambah sebesar Rp108.597.732.268,- atau 1,46%
2. Belanja Modal mengalami perubahan dari Rp2.369.905.973.223,- menjadi Rp1.393.552.677.405,- berkurang sebesar Rp976.353.295.818,- atau -41,20%
3. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan dari Rp15.000.000.000,- menjadi Rp34.178.160.389,- bertambah sebesar Rp19.178.160.389,- atau 127,85%
4. Belanja Transfer mengalami perubahan dari Rp1.250.000.000,- menjadi Rp3.055.434.672,- bertambah sebesar Rp1.805.434.672 atau 144,43%

Adapun perubahan Belanja Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

No	Uraian	APDB 2021		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Belanja Daerah				
1	**Belanja Operasi**				
	Belanja Pegawai	2.651.970.819.266	2.510.065.269.214	-141.905.550.052	-5,35%
	Belanja Barang dan Jasa	4.535.628.975.383	4.821.136.771.841	285.507.796.458	6,29%
	Belanja Hibah	254.572.466.194	219.567.952.056	-35.004.514.138	-13,75%
	Belanja Bantuan Sosial	64.559.800	64.559.800	0	0,00%
	Jumlah Belanja Operasi	**7.442.236.820.643**	**7.550.834.552.911**	**108.597.732.268**	**1,46%**
2	**Belanja Modal**				
	Belanja Modal Tanah	337.183.109.864	175.524.457.912	-161.658.651.952	-47,94%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	302.271.132.510	191.860.424.405	-110.410.708.105	-36,53%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	657.307.577.403	368.592.657.205	-288.714.920.198	-43,92%

No	Uraian	APDB 2021		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.053.744.116.364	650.404.320.891	-403.339.795.473	-38,28%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.400.037.082	7.170.816.992	-12.229.220.090	-63,04%
	Jumlah Belanja Modal	**2.369.905.973.223**	**1.393.552.677.405**	**-976.353.295.818**	**-41,20%**
3	**Belanja Tidak Terduga**				
	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	34.178.160.389	19.178.160.389	127,85%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**15.000.000.000**	**34.178.160.389**	**19.178.160.389**	**127,85%**
4	**Belanja Transfer**				
	Belanja Bagi Hasil	750.000.000	3.055.434.672	2.305.434.672	307,39%
	Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000	0	-500.000.000	-100,00%
	Jumlah Belanja Transfer	**1.250.000.000**	**3.055.434.672**	**1.805.434.672**	**144,43%**
Jumlah Belanja Daerah		**9.828.392.793.866**	**8.981.620.825.377**	**-846.771.968.489**	**-8,62%**

Sumber: Tim anggaran, Tahun 2022, diolah

2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : 465/S-HP/XVIII-SBY/05/2021, Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020, tanggal 11 Mei 2021 yang memuat lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 46.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 Tanggal 7 Mei 2021. Penerimaan pembiayaan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang semula diproyeksikan sebesar Rp1.177.990.109.525,- berdasarkan hasil pemeriksaan menjadi sebesar Rp316.612.578.243,- bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Adapun perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

Uraian	APBD 2021		Bertambah/Berkurang	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Penerimaan Pembiayaan	**1.177.990.109.525**	**316.612.578.243**	**-861.377.531.282**	**-73,12%**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	1.177.990.109.525	316.612.578.243	-861.377.531.282	-73,12%

Uraian	APBD 2021		Bertambah/Berkurang	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Pengeluaran Pembiayaan	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**0**	**0%**
Penyertaan Modal	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%
Pembiayaan Daerah Neto	**1.167.990.109.525**	**306.612.578.243**	**-861.377.531.282**	**-73,75%**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappedalitbang Kota Surabaya diolah, 2022

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2021 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta dari pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan. Capaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan, terbagi dalam 8 bagian, yaitu Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Pelaksanaan Urusan Pilihan, Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Pelaksanaan Unsur Kewilayahan, dan Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum.

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja

3.1.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

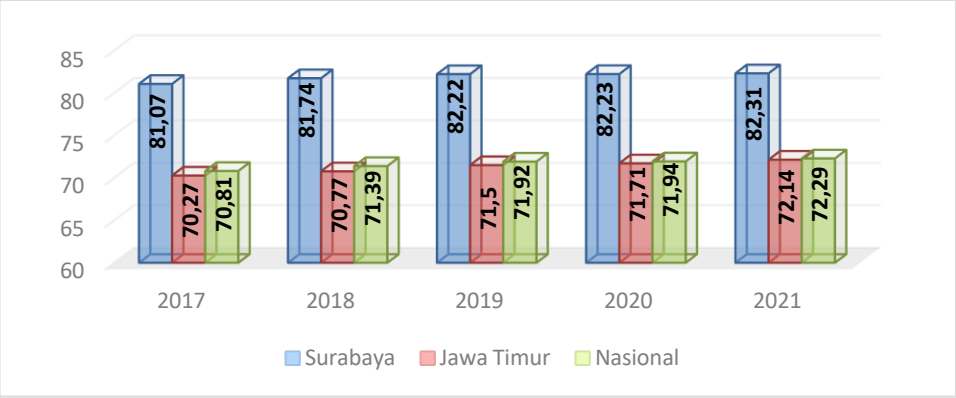
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan

Hidup (AHH) saat lahir yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh Pengeluaran Per Kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Gambar 3.1
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Tabel 3.1
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 – 2021

INDIKATOR	#	2017	2018	2019	2020	2021
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Target	79-80	79-80	80-81	80-81	81-82
	Realisasi	81,07	81,74	82,22	82,23	82,31

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan selama periode 2017 hingga 2021. IPM Kota Surabaya meningkat dari 81,07 pada tahun 2017 menjadi 82,31 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya rata-rata tumbuh sebesar 0,55 % per tahun. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kota Surabaya menjadi kategori sangat tinggi, dan merupakan angka tertinggi level Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. IPM Provinsi Jawa Timur di

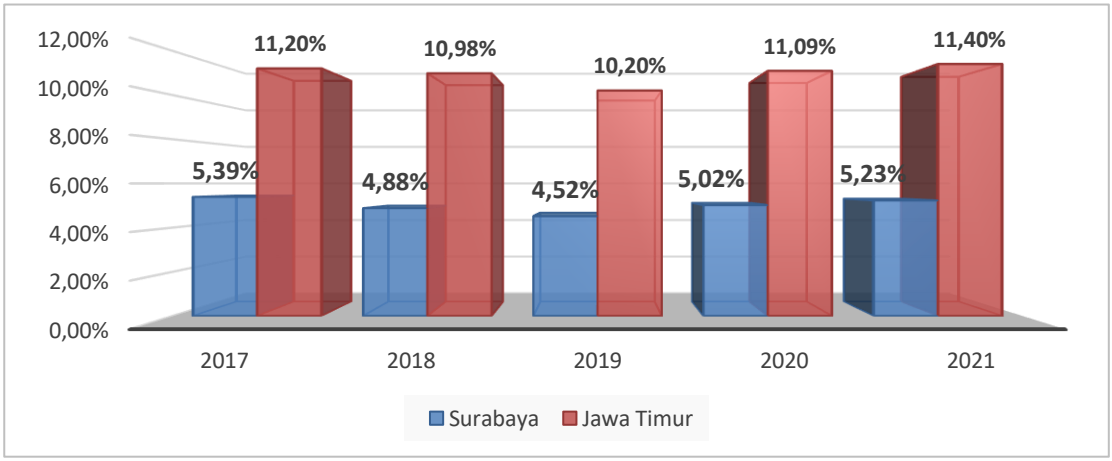
tahun 2021 adalah 72,14.

B. Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Indikator Persentase Penduduk Miskin digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah sejak Tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Namun demikian angka kemiskinan tetap diperhitungkan dalam menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir.

Gambar 3.2
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Tabel 3.2
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017 – 2021

INDIKATOR	#	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penduduk Miskin	Target	-	-	-	4,75-4,70%	4,71%-4,60%
	Realisasi	5,39%	4,88%	4,52%	5,02%	5,23%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp 474.365 perkapita perbulan. Jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebanyak 154.710 jiwa, sehingga Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2017 adalah 5,39%.

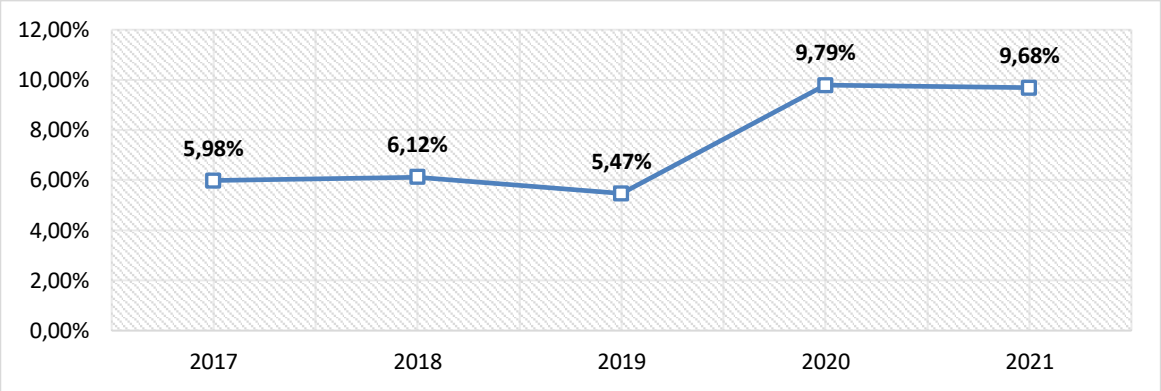
Pada tahun 2020, batas garis kemiskinan yang ditentukan BPS Kota Surabaya meningkat menjadi Rp 592.197 perkapita perbulan dibandingkan tahun 2019. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 145.670 jiwa, sehingga Persentase Penduduk Miskin sebesar 5,02%. Kondisi tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan daya serap tenaga kerja.

Batas garis kemiskinan yang ditentukan BPS Kota Surabaya di tahun 2021 meningkat menjadi Rp 611.466 perkapita perbulan, bertambah sebesar Rp 19.329 perkapita perbulan atau meningkat sebesar 3,26% bila dibandingkan tahun 2020. Jumlah penduduk miskin Kota Surabaya mencapai 152.490 jiwa, bertambah sebesar 6.820 jiwa dari tahun 2020. Sehingga persentase penduduk miskin meningkat menjadi 5,23%. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian yang masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Gambar 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Tabel 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka 2017 – 2021

INDIKATOR	#	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Target	6,73%	6,59%	6,47%	6,40%-5,95%	6,30%-5,90%
	Realisasi	5,98%	6,12%	5,47%	9,79%	9,68%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

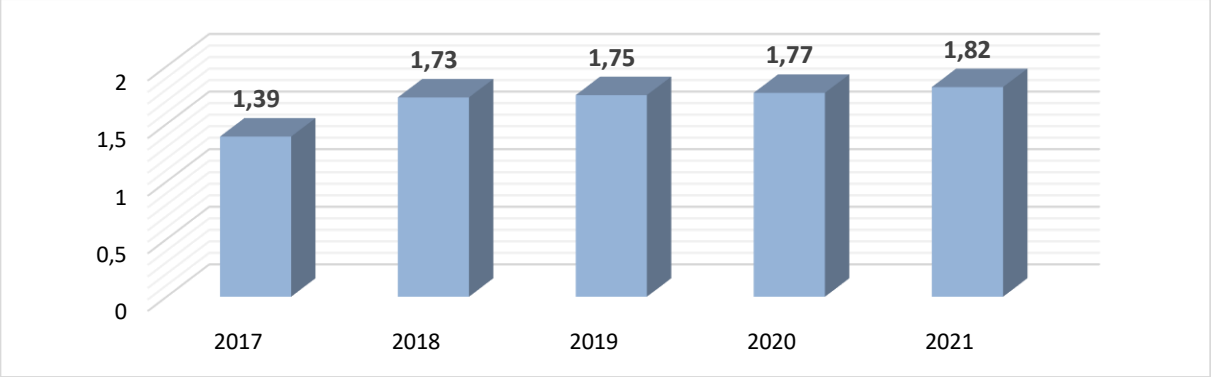
Selama periode 5 tahun terakhir TPT Kota Surabaya menunjukkan tren yang menurun, sehingga menunjukkan keberhasilan Kota Surabaya dalam mengentaskan pengangguran di Kota Surabaya belum optimal. Realisasi TPT 2017 tercatat sebesar 5,98%, sampai pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 5,47%. Namun, pada tahun 2020 TPT mengalami peningkatan menjadi 9,79%. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena terdampaknya perekonomian Kota Surabaya, Indonesia dan ekonomi gobal. Pada tahun 2021 realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya tercatat sebesar 9,68% atau mengalami penurunan 0,11% jika dibandingan dengan realisasi pada tahun 2020.

D. Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota

Ketertiban dan Ketenteraman Kota adalah salah satu faktor penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota adalah indikator tingkat ketertiban dan ketenteraman kota, yang diukur dari rata-rata invers banyaknya kejadian anarkis dan banyaknya pelanggaran perda. Selama

periode 5 tahun terakhir, indeks ketertiban dan ketenteraman menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun tahun 2021, Angka Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota mencapai angka 1,82 meningkat 0,05 poin dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum norma dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berjalannya kegiatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.4
Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Tahun 2017 – 2021



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Tabel 3.4
Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Tahun 2017 – 2021

INDIKATOR	#	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	Target	0,93	0,96	0,99	1,01	1,04
	Realisasi	1,39	1,73	1,75	1,77	1,82

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Meskipun pada tahun 2021 banyaknya kejadian anarkis tidak menjadi indikator sasaran kota, namun Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota tetap diperhitungkan dari rata-rata invers banyaknya kejadian anarkis dan banyaknya pelanggaran perda.

E. Indeks Infrastruktur Kota

Indeks Infrastruktur Kota merupakan indikator tujuan kota sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan target adalah 0,84. Indeks Infrastruktur Kota terdiri dari tiga komponen, yaitu Tingkat Mobilitas, Tingkat Konektivitas dan Tingkat Aksesibilitas. Realisasi Indeks Infrastruktur Kota pada tahun 2021 adalah 0,995.

Tabel 3.5
Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2017 – 2021

INDIKATOR	#	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Infrastruktur Kota	Target	n/a	n/a	n/a	0,8	0,84
	Realisasi	n/a	n/a	n/a	0,95	0,995

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2022

1. Tingkat Mobilitas

Tingkat Mobilitas didapatkan dari Layanan Kinerja Ruas Jalan di Kota Surabaya dengan melakukan *survey* lapangan pada ruas jalan protokol yang ada di Kota Surabaya. Layanan Kinerja Ruas Jalan tersebut berupa Derajat Kejenuhan (V/C Ratio), *Level of Service* (*LOS*) dan Lama Jam Sibuk.

Kota Surabaya telah berhasil mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota, diantaranya :

a. Menyediakan alternatif rute perjalanan karena memiliki kehandalan jaringan jalan;
b. Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas

2. Tingkat Konektivitas

Perhitungan Tingkat Konektivitas didapatkan dari Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah dan Penurunan Luas Kawasan Tergenang. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan telah melakukan berbagai upaya, diantaranya:

a. Mempercepat waktu tanggap penanggulangan kejadian bencana alam kurang dari 24 jam dan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit serta pencegahan kejadian kebakaran bangunan/lahan;
b. Pembangunan, peningkatan, serta operasional sarana dan prasarana pematusan dalam rangka penanganan genangan.

3. Tingkat Aksesibilitas

Perhitungan Tingkat Aksesibilitas didapatkan dari Persentase Cakupan Penyebaran dan Layanan Jaringan Utilitas Kota dan Persentase Sinkronisasi Sistem

Penataan Ruang dalam Kebijakan Satu Peta Tata Ruang Kota. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, diantaranya:

a. Meningkatkan dan mengelola sistem jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) hemat energi melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
b. Menyediakan layanan air bersih melalui Badan Usaha Milik Daerah PDAM Surya Sembada;
c. Menyediakan layanan rekomendasi utilitas yang mencakup rekomendasi penempatan jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan gas, jaringan listrik maupun utilitas lainnya melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

Perkembangan Kota Surabaya tidak terlepas dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Untuk tingkat kabupaten/kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) merupakan acuan bagi rencana strategis, rencana rinci, maupun rencana sektoral yang berada di bawahnya. Untuk itu, sinkronisasi rencana strategis, rencana rinci, maupun rencana sektoral dengan RTRWK menjadi tolak ukur yang signifikan.

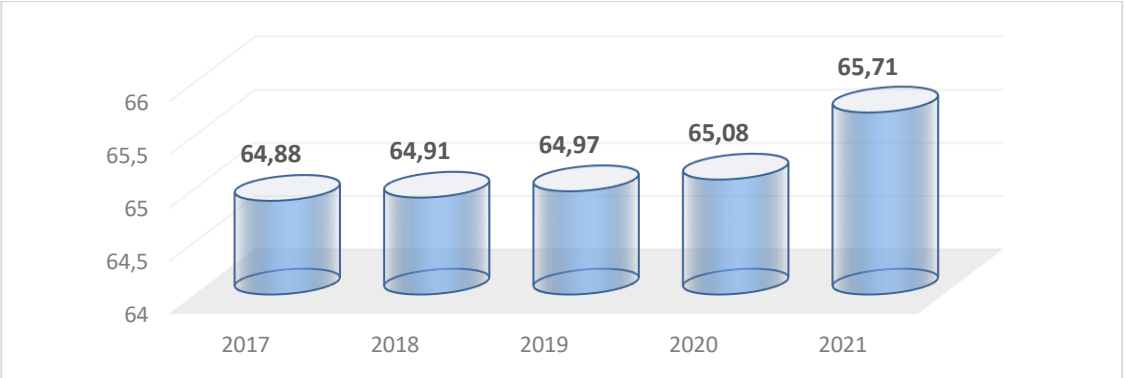
F. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS), bertujuan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup dengan mengukur kualitas air sungai (IPA) dan kualitas udara (IPU), tutupan lahan (ITH) dan kualitas layanan persampahan agar nantinya tercipta kualitas lingkungan hidup kota yang bersih, hijau, dan terjamin. Adapun upaya yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya antara lain pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, penghematan energi dengan cara konservasi energi yang dapat menurunkan pemakaian energi secara tidak tepat dan tidak efisien, serta upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.

IKLHS dijadikan sebagai salah satu parameter untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya, yang kualitas dan kondisi udara, air dan tutupan tanahnya dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan, industri besar, industri kecil, kepadatan lingkungan permukiman, kondisi tutupan lahan yang sangat dipengaruhi oleh

luas lahan dan besaran Ruang Terbuka Hijau serta sistem persampahan dan sanitasi. Hal ini sebagai tindaklanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Gambar 3.5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2017 – 2021



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022

Tabel 3.6
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2017 – 2021

INDIKATOR	#	2017	2018	2019	2020	2021
IKLHS (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan)	Target	61,1	63,3	64,9	65	65,1
	Realisasi	64,88	64,91	64,97	65,08	65,71

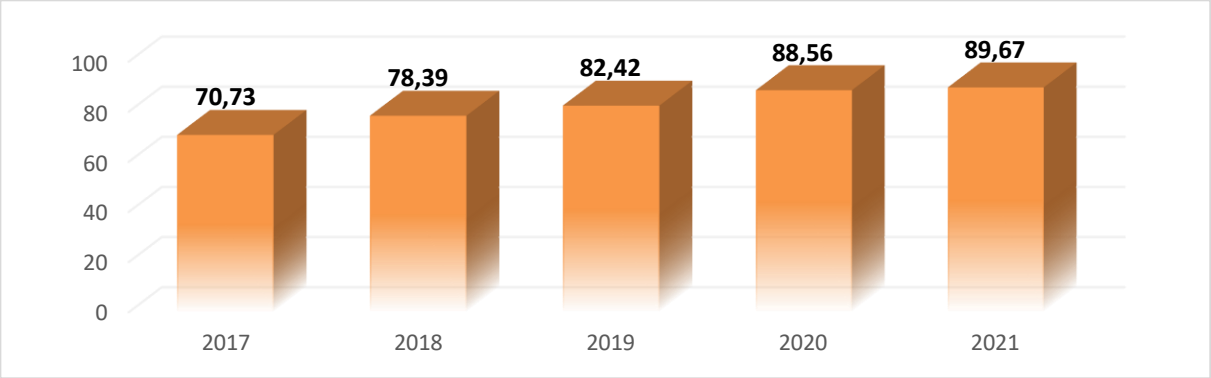
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022

Kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2017 sampai 2021, dimana pada tahun 2017 IKLHS sebesar 64,88, dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2021 IKLHS telah mencapai 65,71. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungannya, baik melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang bagus serta manajemen pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau dan pengawasan serta pengendalian dampak lingkungan yang sangat baik. Pada tahun 2021, IKLHS mengalami sedikit kenaikan karena salah satu unsur pembentuk nilai KLHS yaitu kualitas udara mengalami sedikit kenaikan. Hal ini terjadi disebabkan berkurangnya pemakaian kendaraan di masa pandemi Covid-19.

G. Indeks Budaya Lokal

Indeks budaya lokal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 mengukur pencapaian kualitas budaya lokal yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan bernilai kebangsaan. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019, Indeks Budaya Lokal dimaksudkan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Gambar 3.6
Indeks Budaya Lokal Tahun 2017 – 2021



Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022

Tabel 3.7
Indeks Budaya Lokal Tahun 2017 – 2021

INDIKATOR	#	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Budaya Lokal	Target	72,71	76,1	79,61	80,00	81,50
	Realisasi	70,73	78,39	82,42	88,56	89,67

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022

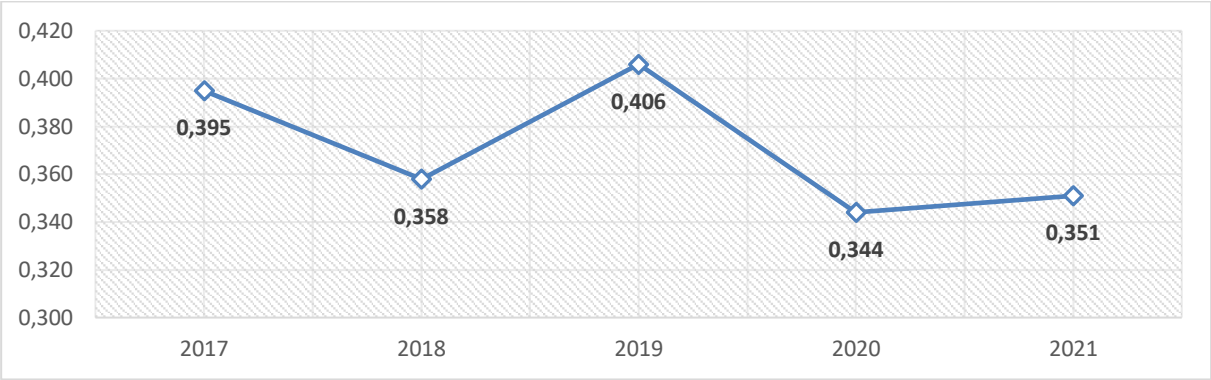
Pencapaian Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2021 realisasinya 89,67%. Angka realisasi tersebut terus meningkat dari realisasi tahun 2016 sebesar 69,37%. Peningkatan Indeks Budaya Lokal tersebut menunjukkan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang semakin membaik.

H. Indeks Gini

Indeks Gini dipergunakan untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berada diantara 0 dan 1. Apabila koefisien Gini

bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30.

Gambar 3.7
Indeks Gini Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Kota Surabaya dan BPS Jawa Timur, 2022

Tabel 3.8
Indeks Gini Tahun 2017 – 2021

INDIKATOR	#	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Gini	Target	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37
	Realisasi	0,395	0,358	0,406	0,344	0,351

Sumber : BPS Kota Surabaya dan BPS Jawa Timur, 2022

Pada tahun 2017 Indeks Gini tercatat 0,395, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,351. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan dalam pola distribusi pengeluaran/pendapatan diantara kelompok penduduk Kota Surabaya. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk menurunkan angka gini ratio, dengan strategi berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.

I. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu wilayah digambarkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Realisasi pertumbuhan PDRB/LPE Kota

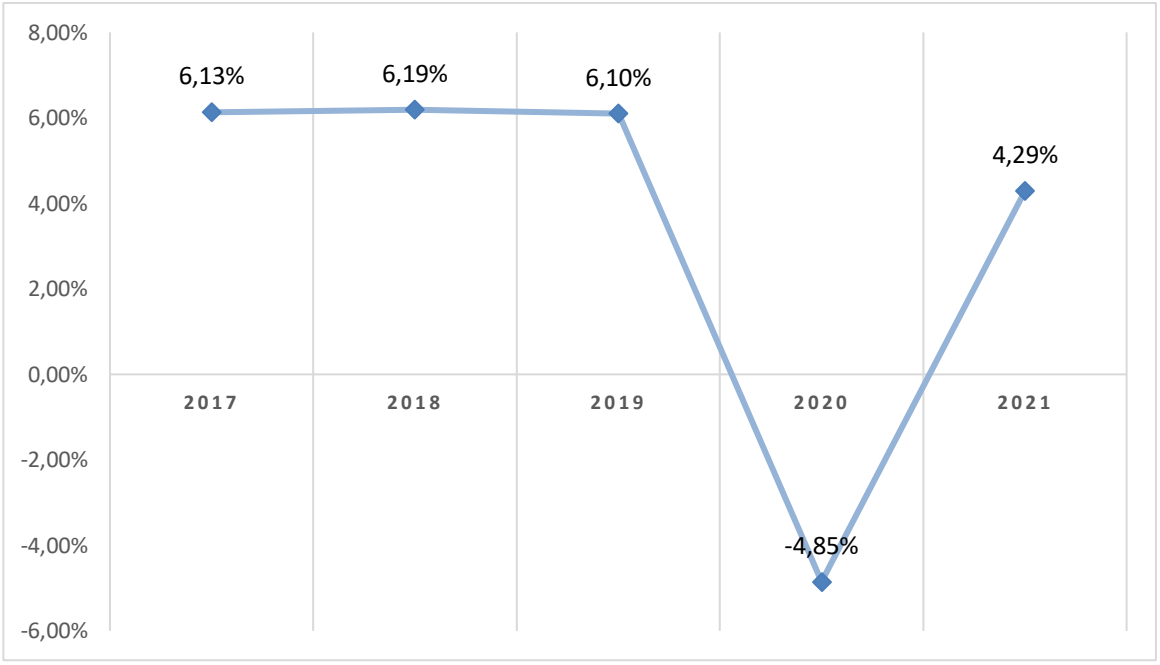
Surabaya cenderung stabil dan mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 yaitu dari 6,13% menjadi 6,10%. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB/LPE mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi -4,85%. Hal ini terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB/LPE Kota Surabaya mengalami peningkatan yaitu 4,29%.

Tabel 3.9
Pertumbuhan PDRB/LPE Tahun 2017 – 2021

INDIKATOR	#	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan ekonomi	Target	5,9-6,3%	6-6,5%	6,1-6,6%	6,3-6,7%	6,3 - 6,8%
	Realisasi	6,13%	6,19%	6,10%	-4,85%	*4,29%

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2022
*Catatan : *Data Sementara*

Gambar 3.8
Pertumbuhan PDRB/LPE Tahun 2017 – 2021



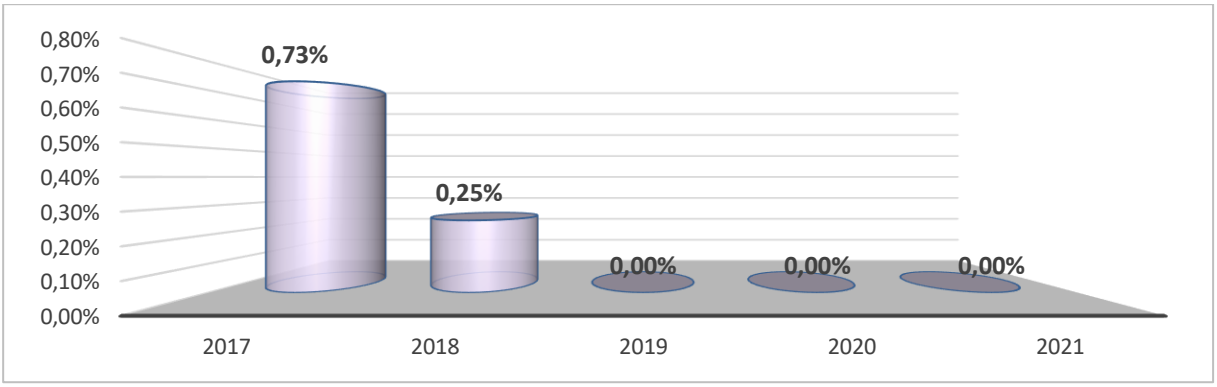
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

J. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Pemukiman kumuh dipandang memiliki relevansi dengan aspek-aspek kemiskinan. Peningkatan lingkungan di pemukiman kumuh dipandang akan berkontribusi terhadap upaya penanganan kemiskinan khususnya di perkotaan.

Indikator Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh bertujuan untuk mengukur peningkatan kualitas di permukiman kumuh yang menjadi prioritas sehingga luasannya menjadi nol.

Gambar 3.9
Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2017 – 2021



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2021

Tabel 3.10
Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2017 – 2021

INDIKATOR	#	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Target	0,74%	0,46%	0,28%	0,22%	0,00%
	Realisasi	0,73%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2021

Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Surabaya telah berhasil menurunkan luas kawasan permukiman kumuh secara signifikan dari 0,73% pada tahun 2017 menjadi 0% pada 2019 dan berlanjut bertahan sampai tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, sesuai dengan Arah Kebijakan dan Target Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan 2020-2025.

Namun demikian, penanganan permukiman kumuh akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik, baik secara lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, meningkatkan akses infrastruktur permukiman masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman, meningkatkan akses infrastruktur permukiman livelihood serta meningkatkan kepuasan masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh terhadap pembangunan. Salah satu stratagi

yang akan dijalankan adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, terutama pada lingkungan permukiman yang berada di lahan-lahan bukan milik pemerintah kota.

K. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit *(Enablers)*, yaitu penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Komponen Hasil *(Results)*, merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Pada Tahun 2020, Indikator Indeks Reformasi Birokrasi menjadi komponen pengukur ketercapaian tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Pada Tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator baru, yang ditargetkan mencapai nilai BB. Meskipun indikator tersebut bukan menjadi Indikator Kinerja Utama pada tahun-tahun sebelumnya, namun Indeks Reformasi Birokrasi tetap diperhatikan, untuk menilai keberhasilan reformasi birokrasi di Kota Surabaya.

Tabel 3.11
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017 – 2021

INDIKATOR	#	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Reformasi Birokrasi	Target	-	-	-	BB	A
	Realisasi	-	-	-	BB	BB

Sumber : Bagian Organisasi dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022

Namun pada tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan hasil evaluasinya. Pada Tahun 2020, berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan kriteria BB atau dengan nilai 78,13. Sedangkan tahun 2021 nilai Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 78,38.

3.1.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator sasaran kota yang menjadi tujuan dari Perangkat Daerah dimana tiap Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kota Surabaya mengampu minimal 1 sasaran kota. Berikut merupakan capaian IKK pada tahun 2021.

Tabel 3.12
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum	100%	100%	100%	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara	11,2%	11,97%	106,83%	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	98%	98,13%	100,13%	
Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Persentase Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	62%	76,4%	123,22%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Meningkatkan kualitas udara dan air	Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	85%	48,7%	57,30%	1. Sumber daya sebagai tenaga pengawas terbatas 2. Keterlambatan dalam mobilisasi bahan material bangunan dikarenakan keterbatasan lebar jalan menuju lokasi pembuatan jamban 3. Penghuni rumah tidak memiliki hubungan hukum dengan nama yang tertulis pada surat kepemilikan hak atas tanah.
Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,04	74,18	100,19%	
Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks Genangan	39,77%	36,52%	108,18%	
Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	0,933	1,57	168,29%	
Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Air Permukaan	57,63	58,18	100,96%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Udara Ambien	90,28	90,28	100%	
Meningkatkan minat baca masyarakat	Indeks minat baca masyarakat	0,6	0,62	103,17%	
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,7	93,90	100,21%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Indeks Penanggulangan Bencana	92,83%	96,53%	103,98%	
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Indeks Penanggulangan Bencana Kebakaran	92,83%	96,53%	103,98%	
Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	80,16	76,14	94,98%	Ketidaktercapaian indeks pendidikan dipengaruhi oleh 2 indikator, yaitu HLS dan RLS. Sehingga ketika salah satu dari indikator tersebut tidak tercapai (RLS tidak tercapai) maka indeks pendidikan nilainya menjadi tidak tercapai. Yang dilakukan pemerintah kota surabayaa saat ini adalah memberikan beasiswa bagi pelajar SMA/SMK sehingga dapat meningkatkan RLS, HLS maupun indeks pendidikan
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	2,01	1,94	96,50%	adanya rasionalisasi anggaran untuk covid - 19 dan ada sebagian Cabor tidak ada kegiatan event tingkat kejurda, kejurnas dan kejuaraan internasional

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Meningkatkan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	71,97%	84,71%	117,70%	
Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Luas kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	11437,03 hektar	11551,84 hektar	101%	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat	88,31%	88,37%	100,07%	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88,31%	88,37%	100,07%	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan	88,31%	88,37%	100,07%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Meningkatkan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	74719784275973 rupiah	29037084846314.9 rupiah	38,86%	bahwa perhitungan Nilai Realisasi Investasi pada tahun sebelumnya menggunakan data PMDN Non Fasilitas atau biasa disebut dengan Investasi Daerah (diambil dari perizinan portal SSW). Dengan adanya penerapan OSS RBA di Kota Surabaya tahun 2021, maka tidak menggunakan lagi data perizinan SSW tetapi menggunakan perizinan dari OSS RBA, tetapi perizinan dari OSS RBA dianggap oleh Kementrian Investasi/BKPM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur sebagai rencana investasi. Dengan Kondisi demikian maka dilakukan penyesuaian perhitungan Nilai Realisasi Investasi pada Tahun 2021 ini yakni data nilai investasi dihimpun dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diakui dan di rilis Kementrian Investasi/BKPM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.
Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	81	75,34	93,01%	Perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan proses bisnis, pengukuran kinerja, serta peningkatan kualitas evaluasi, sehingga dapat mendorong peningkatan budaya kinerja secara optimal.

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	76	97,78	128,65%	
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	1 WTP	1 WTP	100%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112164511,53 juta rupiah	91418079,70 juta rupiah	81,50%	Kinerja lapangan usaha ini di semester awal tahun 2021 mulai meningkat, namun dipertengahan tahun 2021 kembali mendapat tekanan berat akibat kembali diberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat seiring tingginya penyebaran virus Covid-19 varian Delta mengakibatkan banyak tenan-tenan yang kembali tutup sehingga produktivitas sektor ini secara akumulatif di tahun 2021 kurang optimal.
Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	200011526,517 juta rupiah	163509913,20 juta rupiah	81,75%	Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian di Kota Surabaya, termasuk pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sehingga PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Surabaya tahun 2021 produktivitasnya kurang optimal
Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah	69,07%	75,02%	108,62%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	75,22%	75,24%	100,03%	
Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	90,95%	92,58%	101,79%	
Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	Persentase cakupan ketersediaan prasarana kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi	98,35%	100%	101,68%	
Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	92,35%	100%	108,28%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pendidikan sesuai standar	92,68%	94,61%	102,08%	
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	100%	100%	100%	
Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio ≤ 0,95	78%	95,92%	122,97%	
Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan	20%	20%	100%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100%	99,83%	99,83%	Inovasi dalam pelayanan selama pandemi, sehingga meskipun ada keterbatasan tetap dapat memfasilitasi kegiatan DPRD, antara lain rapat secara daring, reses daring, dll
Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	Persentase ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF)	31,25%	59,74%	191,17%	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	4%	2,69%	132,66%	

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	80,12%	75,97%	94,82%	Faktor Penghambat Kegiatan Pendataan, Penetapan dan Pelayanan Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah: - Masih ada wajib pajak yang kurang memahami terkait Aturan Perpajakan. - Karena dampak pandemi covid-19 maka banyak objek pajak yang berhenti beroperasi sehingga mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor Penghambat Kegiatan Pendataan, Penetapan dan Pelayanan Pajak Hotel Restoran, PPJ dan Parkir : - Perbedaan pemahaman wajib pajak terkait aturan perpajakan. - Masih adanya wajib pajak yang pencatatan transaksinya secara manual sehingga penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Online belum sepenuhnya terlaksana. - Adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada operasional objek pajak sehingga mempengaruhi penerimaan pajak

					Faktor Penghambat Kegiatan Pendataan, Penetapan dan Pelayanan PBB dan BPHTB : - Kontributor terbesar pembayaran pajak adalah wajib pajak Badan dan selama pandemi usaha mereka hanya beroperasi secara terbatas atau bahkan tidak beroperasi maka hal ini mengakibatkan omset dan pendapatan mereka menurun sehingga pajak yang dibayarkan dari laba kotor mereka pun ikut terdampak - Pemindahan hak yang kontribusinya besar adalah dalam hal jual beli dan selama pandemi jumlah transaksi jual beli properti yang tercatat di Notaris/PPAT mengalami penurunan volume sehingga hal ini mengakibatkan nilai total pembayaran dari pajak BPHTB menjadi berkurang

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)	30%	33,02%	110,07%	
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus)	42%	44,65%	106,30%	
Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi	17,51%	28,07%	160,31%	
Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	100%	100%	100%	
Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	16,8%	33,5%	199,42%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni	Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran	100%	100%	100%	
Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	57%	60,02%	105,30%	
Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infastruktur	Persentase pengamanan aset tanah dan saluran untuk pembangunan infrastruktur	1,5%	6,2%	413,24%	
Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS	21,9%	26,57%	121,34%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
teknologi tepat guna dan ramah lingkungan					
Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai-nilai keagamaan	100%	99,88%	99,88%	Adanya Pandemi Covid 19 kegiatan keagamaan dikurangi sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan.
Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai-nilai kepahlawanan	100%	99,61%	99,61%	sesuai dengan anjuran Pemerintah selama masaa pandemi covid 19 untuk mengurangi kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa sehingga lembaga kepahlawanan mengurangi kegiatan kepahlawanan.
Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	45%	50,63%	112,52%	
Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	41,38%	100%	241,66%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi	32%	33,86%	105,80%	
Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya	100%	100%	100%	
Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Rasio Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai	1,15	1,37	80,68%	pembinaan telah dilakukan akan tetapi masih kurangnya komitmen aparatur dalam melakukan disiplin pekerjaan
Meningkatkan perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per 1.000 penduduk	62,6	65,95	105,34%	
Meningkatkan ketertiban umum	Rasio pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk	6,98	1,4	179,93%	
Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Tingkat Kehandalan Jaringan Jalan	0,42	0,42	99,27%	1. Pembangunan jalan yang dilakukan memperhatikan faktor bangkitan dan tarikan pergerakan (Trip Generation) lalu lintas di Kota Surabaya dan kawasan pendukungnya

3.1.2 Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan

3.1.2.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Surabaya pada tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Capaian program dan kegiatan dalam urusan wajib pelayanan dasar banyak yang telah mencapai lebih dari 100%. Penjabaran pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar yang dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Pendidikan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.47%	103.94%			
		Dinas Pendidikan			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
1.01.01.2.01		Dinas Pendidikan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
1.01.01.2.01.01		Dinas Pendidikan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
1.01.01.2.02		Dinas Pendidikan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
		Dinas Pendidikan			*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.01.01.2.02.01		Dinas Pendidikan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.01.01.2.02.01		Dinas Pendidikan			*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.01.01.2.07		Dinas Pendidikan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.01.01.2.07.11		Dinas Pendidikan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.01.02		Dinas Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A	87.10%	100.00%	114.81%			
		Dinas Pendidikan			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B	89.66%	100.00%	111.53%			
		Dinas Pendidikan			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C	91.37%	100.00%	109.45%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Pendidikan	**Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri - Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa**		Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan	74.50%	88.57%	118.88%			
		Dinas Pendidikan			Persentase ketuntasan pendidikan PAUD	79.75%	87.18%	109.31%			
		Dinas Pendidikan			Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional	0.20%	0.22%	109.61%			
		Dinas Pendidikan			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100.00%	110.29%	110.29%			
		Dinas Pendidikan			Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	93.19%	97.28%	104.39%			
		Dinas Pendidikan			Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0.15%	0.18%	117.44%			
		Dinas Pendidikan			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100.00%	110.44%	110.44%			
		Dinas Pendidikan			Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar	96.04%	95.06%	98.98%	Ketidaktercapaian indikator ini dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan sistem manajemen sarana dan prasarana sekolah	Optimalisasi pemanfaatan sistem manajemen sarana dan prasarana sekolah Meningkatkan pengendalian sarana dan prasarana sekolah, baik dari pemantauan, inventarisasi, penggunaan sarana dan prasarana, perawatan, dan menyediakan waktu untuk melakukan perawatan.	
		Dinas Pendidikan			Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	0.30%	0.44%	147.57%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Pendidikan			Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	83.18%	100.00%	120.22%			
		Dinas Pendidikan			Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	88.88%	100.00%	112.51%			
		Dinas Pendidikan			Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4	100.00%	95.52%	95.52%	Terdapat guru pada jenjang SD sedang dalam proses penyelesaian kuliah S1 dan menunggu ujian penyesuaian ijazah	Melakukan koordinasi untuk percepatan penyelenggaraan ujian penyesuain ijazah	
		Dinas Pendidikan			Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100.00%	98.84%	98.84%	Ketersediaan guru sesuai antara kualifikasi mata pelajaran dengan ijazah terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan guru dalam mata pelajaran tertentu ditempuh dengan cara memaksimalkan ketersediaan guru yang ada.	Pemenuhan kebutuhan tenaga guru melalui perekrutan CPNS dan PPPK	
		Dinas Pendidikan			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	85.00%	99.54%	117.11%			
		Dinas Pendidikan			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas	90.00%	99.24%	110.26%			
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar*	232 lembaga	232 lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar*	1 kali	1 kali	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar*	1 lembaga	1 lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan*	285 lembaga	285 lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan*	1390 orang	1655 orang	119.06 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kompetensi guru dan tenaga kependidikan						
		Dinas Pendidikan			*Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan*	1 Kali	1 Kali	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan*	667 lembaga	670 lembaga	100.45 %			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan*	298 Lembaga	285 Lembaga	95.64 %	Adanya Merger atau Perampingan SDN yang Semula 298 Menjadi 285 lembaga	Melakukan kajian dan analisa kebutuhan sekolah untuk meningkatkan pemerataan fasilitas operasional	
		Dinas Pendidikan			*Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD*	40153 orang	40153 orang	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan*	19 Lembaga	0 Lembaga	0%	Permohonan konsultasi perihal kendala pelaksanaan Pengadaan Peralatan TIK DAK fisik kepada Kementerian Keuangan belum terjawab sampai dengan berakhirnya batas waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, terkait Perpres no 12 Tahun 2021dimana barang - barang yang dibeli harus mengandung TKDN minimal 40%	Akan dilakukan koordinasi kembali dengan Kementerian Keuangan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	
1.01.02.2.01.28		Dinas Pendidikan		**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar*	232 lembaga	232 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.01.02.2.01.25		Dinas Pendidikan		**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	*Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar*	1 kali	1 kali	100%			
1.01.02.2.01.22		Dinas Pendidikan		**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**	*Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan*	19 Lembaga	0 Lembaga	0%	Permohonan konsultasi perihal kendala pelaksanaan Pengadaan Peralatan TIK DAK fisik kepada Kementerian Keuangan belum terjawab sampai dengan berakhirnya batas waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, terkait Perpres no 12 Tahun 2021dimana barang - barang yang dibeli harus mengandung TKDN minimal 40%	Akan dilakukan koordinasi kembali dengan Kementerian Keuangan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	
1.01.02.2.01.16		Dinas Pendidikan		**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**	*Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar*	1 lembaga	1 lembaga	100%			
1.01.02.2.01.29		Dinas Pendidikan		**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**	*Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan*	285 lembaga	285 lembaga	100%			
1.01.02.2.01.27		Dinas Pendidikan		**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**	*Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan*	1 Kali	1 Kali	100%			
1.01.02.2.01.27		Dinas Pendidikan			*Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan*	1390 orang	1655 orang	119.06 %			
1.01.02.2.01.21		Dinas Pendidikan		**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**	*Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan*	667 lembaga	670 lembaga	100.45 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.01.02.2.01.26		Dinas Pendidikan		**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**	*Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan*	298 Lembaga	285 Lembaga	95.64 %	Adanya Merger atau Perampingan SDN yang Semula 298 Menjadi 285 lembaga	Melakukan kajian dan analisa kebutuhan sekolah untuk meningkatkan pemerataan fasilitas operasional	
1.01.02.2.01.23		Dinas Pendidikan		**Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik**	*Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD*	40153 orang	40153 orang	100%			
1.01.02.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	*Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi*	64 bangunan	80 bangunan	125%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara*	160 bangunan	240 bangunan	150%			
1.01.02.2.01.06		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	*Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi*	64 bangunan	80 bangunan	125%			
1.01.02.2.01.19		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	*Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara*	160 bangunan	240 bangunan	150%			
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah*	294 Lembaga	433 Lembaga	147.28 %			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah*	1 Kali	1 Kali	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah*	1 Lembaga	1 Lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan*	641 orang	854 orang	133.23 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kompetensi guru dan tenaga kependidikan						
		Dinas Pendidikan			*Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan*	1 Kali	1 Kali	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan*	290 Lembaga	290 Lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah*	37413 Orang	37413 Orang	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan*	4 Lembaga	0 Lembaga	0%	Permohonan konsultasi perihal kendala pelaksanaan Pengadaan Peralatan TIK DAK fisik kepada Kementerian Keuangan belum terjawab sampai dengan berakhirnya batas waktu Penerimaan Dokumen Persyaratataan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, terkait Perpres no 12 Tahun 2021dimana barang - barang yang dibeli harus mengandung TKDN minimal 40%	Akan dilakukan koordinasi kembali dengan Kementerian Keuangan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	
1.01.02.2.02.41		Dinas Pendidikan		**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah*	294 Lembaga	433 Lembaga	147.28 %			
1.01.02.2.02.38		Dinas Pendidikan		**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	*Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah*	1 Kali	1 Kali	100%			
1.01.02.2.02.35		Dinas Pendidikan		**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**	*Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai*	4 Lembaga	0 Lembaga	0%	Permohonan konsultasi perihal kendala pelaksanaan	Akan dilakukan koordinasi kembali dengan Kementerian	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan				Pengadaan Peralatan TIK DAK fisik kepada Kementerian Keuangan belum terjawab sampai dengan berakhirnya batas waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, terkait Perpres no 12 Tahun 2021dimana barang - barang yang dibeli harus mengandung TKDN minimal 40%	Keuangan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	
1.01.02.2.02.27		Dinas Pendidikan		**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**	*Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah*	1 Lembaga	1 Lembaga	100%			
1.01.02.2.02.42		Dinas Pendidikan		**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**	*Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
1.01.02.2.02.40		Dinas Pendidikan		**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	*Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan*	641 orang	854 orang	133.23 %			
1.01.02.2.02.40		Dinas Pendidikan			*Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan*	1 Kali	1 Kali	100%			
1.01.02.2.02.32		Dinas Pendidikan		**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama**	*Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan*	290 Lembaga	290 Lembaga	100%			
1.01.02.2.02.39		Dinas Pendidikan		**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	*Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
1.01.02.2.02.36		Dinas Pendidikan		**Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik**	*Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah*	37413 Orang	37413 Orang	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.01.02.2.03		Dinas Pendidikan		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan*	2592 lembaga	2087 lembaga	80.52 %	Terdapat lembaga yang masa berlaku ijin operasionalnya telah berakhir sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BOP dan terdapat beberapa lembaga yang tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dimasa pandemi.	Optimalisasi Sistem Manajemen pendataan PAUD	
		Dinas Pendidikan			*Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	9141 orang	8649 orang	94.62 %	Terdapat beberapa tenaga pendidik PAUD yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima intervensi tersebut, berdasarkan rasio guru dan anak didik pada Permendikbud No. 137 tahun 2014	Melakukan optimalisasi Sistem Manajemen pendataan PAUD	
		Dinas Pendidikan			*Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini*	2 lembaga	2 lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan*	2 lembaga	2 lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga*	2 kali	2 kali	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini*	1515 lembaga	1857 lembaga	122.57 %			
1.01.02.2.03.18		Dinas Pendidikan		**Pengelolaan Dana BOP PAUD**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan*	2592 lembaga	2087 lembaga	80.52 %	Terdapat lembaga yang masa berlaku ijin operasionalnya telah berakhir sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BOP dan terdapat beberapa lembaga yang tidak	Melakukan optimalisasi Sistem Manajemen pendataan PAUD	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dimasa pandemi.		
1.01.02.2.03.16		Dinas Pendidikan		**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD**	*Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	9141 orang	8649 orang	94.62 %	Terdapat beberapa tenaga pendidik PAUD yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima intervensi tersebut, berdasarkan rasio guru dan anak didik pada Permendikbud No. 137 tahun 2014	Melakukan optimalisasi Sistem Manajemen pendataan PAUD	
1.01.02.2.03.11		Dinas Pendidikan		**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD**	*Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini*	2 lembaga	2 lembaga	100%			
1.01.02.2.03.15		Dinas Pendidikan		**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD**	*Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan*	2 lembaga	2 lembaga	100%			
1.01.02.2.03.13		Dinas Pendidikan		**Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD**	*Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini*	1515 lembaga	1857 lembaga	122.57 %			
1.01.02.2.03.13		Dinas Pendidikan			*Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga*	2 kali	2 kali	100%			
1.01.02.2.04		Dinas Pendidikan		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	*Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM*	134 lembaga	239 lembaga	178.36 %			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan*	30 lembaga	28 lembaga	93.33 %	Ketidaktercapaian dikarenakan pencairan BOP sesuai usulan penerimaan BOP Kesetaraan dari lembaga PKBM se Kota Surabaya	Akan dilakukan pendataan dan penyesuaian ulang	
		Dinas Pendidikan			*Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu*	12526 orang	12100 orang	96.6 %	Ketidaktercapaian indikator ini dikarenakan jumlah penerima jaspel yang mmenuhi syarat tidak sesuai dengan yang	Akan dilakukan pendataan dan penyesuaian ulang jumlah pendidik yang ditingkatkan mutunya	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									ditargetkan, yaitu sesuai usulan penerimaan jasa pelayanan keagamaan dari TPA/TPQ dan Sekolah Minggu se Kota Surabaya		
		Dinas Pendidikan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan*	1 lembaga	1 lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan*	33 lembaga	33 lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah SKB yang mendapatkan peningkatan sarana*	1 Lembaga	0 Lembaga	0%	Tidak dapat direalisasikan karena terkendala syarat penggunaan produk dalam negeri, dengan ketentuan TKDN 40%	Akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat terkait kendala pemenuhan persyaratan	
1.01.02.2.04.16		Dinas Pendidikan		**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	*Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM*	134 lembaga	239 lembaga	178.36 %			
1.01.02.2.04.11		Dinas Pendidikan		**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan**	*Jumlah SKB yang mendapatkan peningkatan sarana*	1 Lembaga	0 Lembaga	0%	Tidak dapat direalisasikan karena terkendala syarat penggunaan produk dalam negeri, dengan ketentuan TKDN 40%	Akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat terkait kendala pemenuhan persyaratan	
1.01.02.2.04.17		Dinas Pendidikan		**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan*	30 lembaga	28 lembaga	93.33 %	Ketidaktercapaian dikarenakan pencairan BOP sesuai usulan penerimaan BOP Kesetaraan dari lembaga PKBM se Kota Surabaya	Akan dilakukan pendataan dan penyesuaian ulang	
1.01.02.2.04.15		Dinas Pendidikan		**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	*Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu*	12526 orang	12100 orang	96.6 %	Ketidaktercapaian indikator ini dikarenakan jumlah penerima jaspel yang mmenuhi syarat tidak sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu	Akan dilakukan pendataan dan penyesuaian ulang jumlah pendidik yang ditingkatkan mutunya	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									sesuai usulan penerimaan jasa pelayanan keagamaan dari TPA/TPQ dan Sekolah Minggu se Kota Surabaya		
1.01.02.2.04.10		Dinas Pendidikan		**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan*	1 lembaga	1 lembaga	100%			
1.01.02.2.04.12		Dinas Pendidikan		**Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan*	33 lembaga	33 lembaga	100%			
1.01.03		Dinas Pendidikan		**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0.15%	0.18%	117.44%			
		Dinas Pendidikan			Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	0.30%	0.44%	147.57%			
1.01.03.2.01		Dinas Pendidikan		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	*Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar*	650 lembaga	650 lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah*	245 Lembaga	245 Lembaga	100%			
1.01.03.2.01.01		Dinas Pendidikan		**Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	*Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar*	650 lembaga	650 lembaga	100%			
1.01.03.2.01.02		Dinas Pendidikan		**Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	*Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah*	245 Lembaga	245 Lembaga	100%			
1.01.04		Dinas Pendidikan		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase guru PAUD yang kompeten	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Pendidikan			Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten	100.00%	91.16%	91.16%	Terdapat tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang tidak dinilai kompetensi kinerjanya dikarenakan tenaga kependidikan	Melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi manajemen tenaga kependidikan PAUD jenjang TK	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									PAUD jenjang TK dimaksud pensiun di tahun yang bersangkutan. Terkait tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang dinilai kompetensi kinerjanya, telah memenuhi standar kompetensi		
1.01.04.2.01		Dinas Pendidikan		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	*Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan*	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
1.01.04.2.01.01		Dinas Pendidikan		**Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	*Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan*	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSUD Bhakti Dharma Husada	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kesehatan			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.02%	98.89%	1. Kompetensi SDM yang belum optimal dalam pelayanan administrasi perkantoran	1. Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pelatihan pegawai terutama yang berhadapan langsung	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Sebesar 2% (Dua Persen) Terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Yang Terutang Akibat Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya - Peraturan					2. Perlu adanya pelatihan terkait peningkatan kompetensi terutama dalam memberikan pelayanan yang baik, efektif dan efisien	dengan pasien/masyarakat 2. Menyusun jadwal pelatihan/diskusi secara berkala terutama untuk pegawai non teknis misalnya terkait penatausahaan keuangan, penatausahaan barang dan asset dan perencanaan RS	
		Dinas Kesehatan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	83.53%	94.92%	adanya refocusing anggaran selama COVID-19 menyebabkan anggaran untuk penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dialihkan ke kegiatan untuk penanggulangan COVID-19	Melakukan perhitungan estimasi untuk kebutuhan anggaran kegiatan COVID-19 dengan berpedoman pada tren kenaikan kasus serta hasil evaluasi tahun sebelumnya	
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	84.29%	95.78%	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana kantor dikarenakan beberapa rencana pengadaan perlu dilakukan penjadwalan ulang	Melakukan perencanaan dan Koordinasi dengan bidang/unit pelayanan mengenai spesifikasi teknis dan penjadwalan penyediaan pemenuhan sarana prasarana secara lebih tepat	
		Dinas Kesehatan			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
1.02.01.2.01		Dinas Kesehatan		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
1.02.01.2.01.01		Dinas Kesehatan		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.01		RSUD Bhakti Dharma Husada	Walikota Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Bagi Penduduk Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Berupa Pembebasan Pajak Bagi Hotel Yang Dimanfaatkan Untuk Isolasi Warga Yang Memiliki Potensi Terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan Dan Pelaporan Data Masyarakat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
1.02.01.2.01.01		RSUD Bhakti Dharma Husada		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
1.02.01.2.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
1.02.01.2.01.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
1.02.01.2.02		Dinas Kesehatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.02.01.2.02.01		Dinas Kesehatan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.02.01.2.02		RSUD Bhakti Dharma Husada		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.02.01.2.02.01		RSUD Bhakti Dharma Husada		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.02.01.2.02		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.02.01.2.02.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.02.01.2.07		Dinas Kesehatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.02.01.2.07.10		Dinas Kesehatan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.02.01.2.08		Dinas Kesehatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
1.02.01.2.08.03		Dinas Kesehatan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
1.02.02		Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100.00%	105.96%	105.96%			
		Dinas Kesehatan			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan	100.00%	102.26%	102.26%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		RSUD Bhakti Dharma Husada	**Berpenghasilan Rendah - Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bahan Makanan Bagi Warga Masyarakat Terkonfirmasi Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pengurangan Tarif Sewa Rumah Susun Akibat Dampak Penyebaran Wabah Corona**		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100.00%	100.00%	100.00%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Mohammad Soewandhie	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kesehatan			Cakupan kunjungan ibu hamil K4	99.01%	99.38%	100.38%			
		Dinas Kesehatan			Cakupan kunjungan neonatal lengkap	100.00%	104.50%	104.50%			
		Dinas Kesehatan			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	97.74%	99.63%	101.93%			
		Dinas Kesehatan			Prevalensi balita gizi buruk	0.10%	0.10%	100.48%			
		Dinas Kesehatan			Prevalensi balita gizi kurang	8.23%	4.17%	149.34%			
		Dinas Kesehatan			Prevalensi balita stunting	8.89%	4.52%	149.16%			
		Dinas Kesehatan			Cakupan imunisasi dasar lengkap	97.80%	96.90%	99.08%	Adanya Pandemi COVID-19 sehingga kunjungan masyarakat ke Puskesmas / faskes lainnya lebih diprioritaskan untuk kasus kegawat daruratan sehingga menghindari penularan COVID-19.	Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar segera melakukan kunjungan imunisasi untuk bayi/balita dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan	
		Dinas Kesehatan			Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kesehatan			Cakupan kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kesehatan			Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	84.90%	85.25%	100.42%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar	80.00%	120.45%	150.57%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	52.00%	71.91%	138.29%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			Average Length of Stay (AvLOS)	4,00 hari	4,41 hari	110.37%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		RSUD Bhakti Dharma Husada	**Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya**		Bed Turn Over Ratio (BTO)	45,00 kali	36,86 kali	81.90%	Tingginya jumlah kasus covid-19 di pertengahan tahun 2021 sehingga menyebabkan pemakaian tempat tidur dan hari rawat untuk pasien covid menjadi meningkat, sedangkan pemakaian tempat tidur non covid menurun	Melakukan estimasi terhadap tren kasus covid-19 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga dapat melakukan pemilahan tempat tidur pasien covid dan non covid secara lebih efisien	
		RSUD Bhakti Dharma Husada			Turn Over Interval (TOI)	3,00 hari	5,44 hari	18.71%	Mulai menurunnya jumlah kasus covid-19 di triwulan IV tahun 2021, sehingga pemakaian tempat tidur untuk pasien covid menjadi berkurang, namun RS tetap wajib menyediakan bed isolasi khusus COVID 19 sehingga rata-rata tempat tidur tidak ditempati di atas standar yang ditetapkan	Melakukan estimasi terhadap tren kasus covid-19 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga dapat melakukan pemilahan tempat tidur pasien covid dan non covid secara lebih efisien	
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	1.00%	0.18%	181.65%			
		Dinas Kesehatan			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	83.75%	100.00%	119.40%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	96.40%	98.08%	101.75%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90.00%	91.76%	101.95%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Kesehatan			Persentase puskesmas yang terakreditasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kesehatan			Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standard	100.00%	100.00%	100.00%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
1.02.02.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang dibangun/direhabilitasi*	11 bangunan	19 bangunan	172.73 %			
1.02.02.2.01.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya**	*Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang dibangun/direhabilitasi*	11 bangunan	19 bangunan	172.73 %			
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan*	25 jenis	25 jenis	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan*	1 item	1 item	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan*	74 jenis	74 jenis	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan*	11 jenis	11 jenis	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan*	5 dokumen	5 dokumen	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan*	1 Jenis	0 Jenis	0%	Pada saat proses pengadaan, penyedia tidak dapat menyediakan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati sampai batas akhir jangka waktu yang ditentukan	1. Melakukan koordinasi dengan ULP dalam proses seleksi penyedia untuk pengadaan barang dan jasa 2. Memastikan bahwa penyedia yang gagal	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dalam melakukan tender tersebut untuk diblacklist dari daftar penyedia	
		Dinas Kesehatan			*Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK BOK)*	1 Jenis	1 Jenis	100%			
1.02.02.2.01.20		Dinas Kesehatan		**Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	*Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan*	25 jenis	25 jenis	100%			
1.02.02.2.01.14		Dinas Kesehatan		**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	*Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan*	1 item	1 item	100%			
1.02.02.2.01.17		Dinas Kesehatan		**Pengadaan Bahan Habis Pakai**	*Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan*	74 jenis	74 jenis	100%			
1.02.02.2.01.17		Dinas Kesehatan			*Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK BOK)*	1 Jenis	1 Jenis	100%			
1.02.02.2.01.16		Dinas Kesehatan		**Pengadaan Obat, Vaksin**	*Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan*	11 jenis	11 jenis	100%			
1.02.02.2.01.13		Dinas Kesehatan		**Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	*Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan*	1 Jenis	0 Jenis	0%	Pada saat proses pengadaan, penyedia tidak dapat menyediakan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati sampai batas akhir jangka waktu yang ditentukan	1. Melakukan koordinasi dengan ULP dalam proses seleksi penyedia untuk pengadaan barang dan jasa 2. Memastikan bahwa penyedia yang gagal dalam melakukan tender tersebut untuk diblacklist dari daftar penyedia	
1.02.02.2.01.07		Dinas Kesehatan		**Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya**	*Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan*	5 dokumen	5 dokumen	100%			
1.02.02.2.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			*Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara*	1 jenis	1 jenis	100%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			*Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara*	2 jenis	2 jenis	100%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			*Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan*	1 jenis	1 jenis	100%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			*Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan*	1 jenis	1 jenis	100%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			*Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan*	1 Jenis	1 Jenis	100%			
1.02.02.2.01.19		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.02.02.2.01.20		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	*Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara*	1 jenis	1 jenis	100%			
1.02.02.2.01.14		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	*Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara*	2 jenis	2 jenis	100%			
1.02.02.2.01.14		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			*Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan*	1 Jenis	1 Jenis	100%			
1.02.02.2.01.17		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pengadaan Bahan Habis Pakai**	*Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan*	1 jenis	1 jenis	100%			
1.02.02.2.01.16		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pengadaan Obat, Vaksin**	*Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan*	1 jenis	1 jenis	100%			
1.02.02.2.01.13		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.01		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			*Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran*	1 jenis	1 jenis	100%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			*Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran*	2 jenis	2 jenis	100%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			*Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan*	1 jenis	1 jenis	100%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			*Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan*	1 jenis	1 jenis	100%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			*Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*	1 jenis	1 jenis	100%			
1.02.02.2.01.19		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.02.02.2.01.20		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	*Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran*	1 jenis	1 jenis	100%			
1.02.02.2.01.14		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	*Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran*	2 jenis	2 jenis	100%			
1.02.02.2.01.17		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pengadaan Bahan Habis Pakai**	*Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan*	1 jenis	1 jenis	100%			
1.02.02.2.01.16		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pengadaan Obat, Vaksin**	*Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan*	1 jenis	1 jenis	100%			
1.02.02.2.01.13		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	*Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*	1 jenis	1 jenis	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik*	2118 orang	2260 orang	106.7 %			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			*Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan*	6756 orang	7265 orang	107.53 %			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			*Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan*	88 kali	106 kali	120.45 %			
1.02.02.2.02.32		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Operasional Pelayanan Rumah Sakit**	*Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik*	2118 orang	2260 orang	106.7 %			
1.02.02.2.02.15		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**	*Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan*	6756 orang	7265 orang	107.53 %			
1.02.02.2.02.18		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**	*Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan*	88 kali	106 kali	120.45 %			
1.02.02.2.02		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan*	155 kali	163 kali	105.16 %			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			*Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan*	2 jenis	2 jenis	100%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			*Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi rumah sakit*	20000 orang	14899 orang	74.5 %	Pelayanan kesehatan gizi kepada pasien menyesuaikan jumlah dan kebutuhan pasien yang dirawat di RS	Melakukan perencanaan/estimasi kebutuhan pelayanan gizi di RS secara lebih tepat dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya	
1.02.02.2.02.32		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Operasional Pelayanan Rumah Sakit**	*Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan*	155 kali	163 kali	105.16 %			
1.02.02.2.02.35		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota**	*Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan*	2 jenis	2 jenis	100%			
1.02.02.2.02.15		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**	*Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi rumah sakit*	20000 orang	14899 orang	74.5 %	Pelayanan kesehatan gizi kepada pasien menyesuaikan jumlah dan kebutuhan pasien yang dirawat di RS	Melakukan perencanaan/estimasi kebutuhan pelayanan gizi di RS secara lebih tepat dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya*	63 lembaga	63 lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi*	13 lembaga	13 lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular*	154 lembaga	155 lembaga	100.65 %			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan*	273337 orang	273337 orang	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan*	1045644 orang	1093374 orang	104.56 %			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi*	375 orang	375 orang	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	691 kunjungan	101 kunjungan	14.62 %	Adanya program Jaminan Kesehatan semesta/UHC sehingga persalinan Penduduk Kota Surabaya telah tercover melalui JKN	Melakukan usulan kebutuhan kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan estimasi persalinan penduduk yang bisa dicover melalui Jaminan Persalinan (penduduk non KTP Surabaya)	
		Dinas Kesehatan			*Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga*	64 lembaga	64 lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga*	63 lembaga	63 lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular*	154 lembaga	154 lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional*	64 lembaga	64 lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi*	63 lembaga	63 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Kesehatan			*Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani*	700 lokasi	874 lokasi	124.86 %			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
1.02.02.2.02.34		Dinas Kesehatan		**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya*	63 lembaga	63 lembaga	100%			
1.02.02.2.02.35		Dinas Kesehatan		**Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota**	*Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi*	13 lembaga	13 lembaga	100%			
1.02.02.2.02.25		Dinas Kesehatan		**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**	*Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular*	154 lembaga	155 lembaga	100.65 %			
1.02.02.2.02.25		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
1.02.02.2.02.26		Dinas Kesehatan		**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan*	1045644 orang	1093374 orang	104.56 %			
1.02.02.2.02.26		Dinas Kesehatan			*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan*	273337 orang	273337 orang	100%			
1.02.02.2.02.15		Dinas Kesehatan		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**	*Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi*	375 orang	375 orang	100%			
1.02.02.2.02.15		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.02		Dinas Kesehatan		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	*Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	691 kunjungan	101 kunjungan	14.62 %	Adanya program Jaminan Kesehatan semesta/UHC sehingga persalinan Penduduk Kota Surabaya telah tercover melalui JKN	Melakukan usulan kebutuhan kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan estimasi persalinan penduduk yang bisa dicover melalui Jaminan Persalinan (penduduk non KTP Surabaya)	
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	*Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga*	64 lembaga	64 lembaga	100%			
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
1.02.02.2.02.17		Dinas Kesehatan		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**	*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
1.02.02.2.02.17		Dinas Kesehatan			*Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga*	63 lembaga	63 lembaga	100%			
1.02.02.2.02.06		Dinas Kesehatan		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**	*Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular*	154 lembaga	154 lembaga	100%			
1.02.02.2.02.06		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
1.02.02.2.02.19		Dinas Kesehatan		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya**	*Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional*	64 lembaga	64 lembaga	100%			
1.02.02.2.02.20		Dinas Kesehatan		**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**	*Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi*	63 lembaga	63 lembaga	100%			
1.02.02.2.02.24		Dinas Kesehatan		**Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan**	*Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani*	700 lokasi	874 lokasi	124.86 %			
1.02.02.2.03		Dinas Kesehatan		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	*Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan*	1 aplikasi	1 aplikasi	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.03.01		Dinas Kesehatan		**Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan**	*Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan*	1 aplikasi	1 aplikasi	100%			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer*	64 lembaga	64 lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi*	59 lembaga	59 lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
1.02.02.2.04.03		Dinas Kesehatan		**Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**	*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	63 Lembaga	63 Lembaga	100%			
1.02.02.2.04.03		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer*	64 lembaga	64 lembaga	100%			
1.02.02.2.04.04		Dinas Kesehatan		**Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan**	*Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi*	59 lembaga	59 lembaga	100%			
1.02.03		RSUD Bhakti Dharma Husada		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar	60.00%	63.10%	105.17%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	52.00%	71.91%	138.29%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi	1.00%	0.16%	183.85%			
		Dinas Kesehatan			Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	98.18%	99.18%	101.02%			
1.02.03.2.02		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang diadakan*	95 kali	109 kali	114.74 %			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			*Jumlah tenaga kesehatan daerah yang menerima insentif dalam rangka penanganan pandemi COVID-19*	473 Orang	554 Orang	117.12 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.03.2.02.03		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	*Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang diadakan*	95 kali	109 kali	114.74 %			
1.02.03.2.02.02		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar**	*Jumlah tenaga kesehatan daerah yang menerima insentif dalam rangka penanganan pandemi COVID-19*	473 Orang	554 Orang	117.12 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan*	11 kali	12 kali	109.09 %			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah tenaga kesehatan daerah yang menerima insentif dalam rangka penanganan pandemi COVID-19*	1139 Orang	1890 Orang	165.94 %			
1.02.03.2.02.03		Dinas Kesehatan		**Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	*Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan*	11 kali	12 kali	109.09 %			
1.02.03.2.02.02		Dinas Kesehatan		**Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar**	*Jumlah tenaga kesehatan daerah yang menerima insentif dalam rangka penanganan pandemi COVID-19*	1139 Orang	1890 Orang	165.94 %			
1.02.03.2.03		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan*	75 kali	125 kali	166.67 %			
1.02.03.2.03.01		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan*	75 kali	125 kali	166.67 %			
1.02.03.2.03		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja*	80 orang	82 orang	102.5 %			
1.02.03.2.03.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya**	*Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja*	80 orang	82 orang	102.5 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1.02.04		Dinas Kesehatan		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	98.07%	100.00%	101.97%			
1.02.04.2.06		Dinas Kesehatan		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Sampel Yang Diperiksa*	2028 sampel	2028 sampel	100%			
1.02.04.2.06.01		Dinas Kesehatan		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Sampel Yang Diperiksa*	2028 sampel	2028 sampel	100%			
1.02.05		Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kesehatan			Persentase rumah sehat	86.44%	87.44%	101.16%			
1.02.05.2.01		Dinas Kesehatan		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	64 lembaga	64 lembaga	100%			
1.02.05.2.01.01		Dinas Kesehatan		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	64 lembaga	64 lembaga	100%			
1.02.05.2.02		Dinas Kesehatan		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan*	63 lembaga	63 lembaga	100%			
1.02.05.2.02.01		Dinas Kesehatan		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan*	63 lembaga	63 lembaga	100%			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat*	63 lembaga	63 lembaga	100%			
		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	64 Lembaga	64 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.05.2.03.01		Dinas Kesehatan		**Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	*Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan*	64 Lembaga	64 Lembaga	100%			
1.02.05.2.03.01		Dinas Kesehatan			*Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat*	63 lembaga	63 lembaga	100%			
1.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	15.48%	20.16%	130.23%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	100.00%	127.95%	127.95%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Persentase aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya yang diamankan	3.50%	6.20%	177.10%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.90%	99.89%	Adanya penyesuaian anggaran dan prioritas pelaksanaan pekerjaan	Pelayanan administrasi perkantoran diprioritaskan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.	
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.99%	99.99%	Adanya penyesuaian kebutuhan dan prioritas pelaksanaan pekerjaan	Pelayanan Administrasi perkantoran akan ditingkatkan untuk memaksimalkan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021							penggunaan sumber daya yang tersedia	
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
1.03.01.2.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
1.03.01.2.01.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
1.03.01.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
1.03.01.2.01.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
1.03.01.2.02		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.03.01.2.02.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.03.01.2.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.03.01.2.02.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.01.2.03		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	*Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan*	40 bidang	264 bidang	660%			
1.03.01.2.03.02		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	*Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan*	40 bidang	264 bidang	660%			
1.03.01.2.06		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.03.01.2.06.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.03.01.2.07		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.03.01.2.07.10		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.03.01.2.07		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	*Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang prasarananya dibangun/direhabilitasi*	57 bangunan	84 bangunan	147.37 %			
1.03.01.2.07.09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang prasarananya dibangun/direhabilitasi*	57 bangunan	84 bangunan	147.37 %			
1.03.01.2.09		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah peralatan besar yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak*	60 unit	80 unit	133.33 %			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak*	160 unit	176 unit	110%			
1.03.01.2.09.09		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.01.2.09.03		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**	*Jumlah peralatan besar yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak*	60 unit	80 unit	133.33 %			
1.03.01.2.09.02		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	*Jumlah alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak*	160 unit	176 unit	110%			
1.03.02		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Lama genangan	22,10 menit	22,04 menit	100.27%			
1.03.02.2.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak*	61 unit	73 unit	119.67 %			
1.03.02.2.01.55		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir**	*Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak*	61 unit	73 unit	119.67 %			
1.03.03		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	15.48%	20.16%	130.23%			
1.03.03.2.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1.03.03.2.01.13		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM**	*Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1.03.04		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	38.46%	32.26%	83.87%	terjadi perubahan desain pada perencanaan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi	mengoptimalkan Fasilitas pengelolaan sampah yang ada dengan Teknologi Tepat guna berupa TPS dan Rumah Kompos yang menggunakan prinsip teknologi 3R dalam pengolahan dan pemilahan sampah	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.04.2.01		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan*	1572 unit	1672 unit	106.36 %			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar*	1 rekening	1 rekening	100%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah sarana kebersihan yang dikelola*	21 unit	40 unit	190.48 %			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola*	183 lokasi	199 lokasi	108.74 %			
1.03.04.2.01.03		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**	*Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan*	1572 unit	1672 unit	106.36 %			
1.03.04.2.01.06		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Penyediaan Sarana Persampahan**	*Jumlah sarana kebersihan yang dikelola*	21 unit	40 unit	190.48 %			
1.03.04.2.01.06		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar*	1 rekening	1 rekening	100%			
1.03.04.2.01.04		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS**	*Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola*	183 lokasi	199 lokasi	108.74 %			
1.03.05		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	50.83%	53.31%	104.87%			
		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	85.00%	178.85%	210.41%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	100.00%	100.00%	100.00%			
1.03.05.2.01		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik*	96 lokasi	204 lokasi	212.5 %			
1.03.05.2.01.10		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**	*Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik*	96 lokasi	204 lokasi	212.5 %			
1.03.05.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban*	400 Unit	400 Unit	100%			
1.03.05.2.01.06		Dinas Lingkungan Hidup		**Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat**	*Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban*	400 Unit	400 Unit	100%			
1.03.06		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Luas genangan	500,00 hektar	452,57 hektar	109.49%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Tinggi genangan	12,10 cm	10,92 cm	109.73%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Persentase dokumen perancangan dan pengawasan pematusan yang tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%			
1.03.06.2.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah lokasi pemeliharaan saluran drainase dan boezem*	975 lokasi	1793 lokasi	183.9 %			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah lokasi pembangunan dan penyediaan sarana prasarana pematusan*	14 lokasi	20 lokasi	142.86 %			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah dokumen perencanaan pematusan kota yang disusun*	36 dokumen	46 dokumen	127.78 %			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah lokasi rehabilitasi saluran drainase dan boezem*	23 lokasi	28 lokasi	121.74 %			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab saluran drainase/gorong-gorong*	6 dokumen	6 dokumen	100%			
1.03.06.2.01.09		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase**	*Jumlah lokasi pemeliharaan saluran drainase dan boezem*	975 lokasi	1793 lokasi	183.9 %			
1.03.06.2.01.05		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan**	*Jumlah lokasi pembangunan dan penyediaan sarana prasarana pematusan*	14 lokasi	20 lokasi	142.86 %			
1.03.06.2.01.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan**	*Jumlah dokumen perencanaan pematusan kota yang disusun*	36 dokumen	46 dokumen	127.78 %			
1.03.06.2.01.07		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan**	*Jumlah lokasi rehabilitasi saluran drainase dan boezem*	23 lokasi	28 lokasi	121.74 %			
1.03.06.2.01.03		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan**	*Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab saluran drainase/gorong-gorong*	6 dokumen	6 dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.07		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan rekomendasi teknis yang memenuhi syarat	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan dan kelengkapannya	73.80%	120.36%	163.09%			
1.03.07.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di Rehabilitasi*	210 lokasi	347 lokasi	165.24 %			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan*	280 lokasi	507 lokasi	181.07 %			
1.03.07.2.01.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di Rehabilitasi*	210 lokasi	347 lokasi	165.24 %			
1.03.07.2.01.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan*	280 lokasi	507 lokasi	181.07 %			
1.03.07.2.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah rekomendasi teknis pendukung penunjang infrastruktur*	180 rekomendasi	180 rekomendasi	100%			
1.03.07.2.01.03		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah rekomendasi teknis pendukung penunjang infrastruktur*	180 rekomendasi	180 rekomendasi	100%			
1.03.08		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	60.79%	60.85%	100.10%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan			Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang									
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan	75.00%	98.31%	131.08%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	100.00%	127.95%	127.95%			
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	*Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara*	300 bangunan	334 bangunan	111.33 %			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan*	7169 data	7767 data	108.34 %			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*jumlah berkas permohonan SLF yang diproses*	50 berkas	93 berkas	186%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses*	7169 berkas	9028 berkas	125.93 %			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun*	4 dokumen	5 dokumen	125%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun*	24 dokumen	26 dokumen	108.33 %			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah dokumen perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan*	9 Dokumen	10 Dokumen	111.11 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah*	30 Dokumen	37 Dokumen	123.33 %			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun*	4 dokumen	4 dokumen	100%			
1.03.08.2.01.13		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara*	300 bangunan	334 bangunan	111.33 %			
1.03.08.2.01.09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan**	*Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan*	7169 data	7767 data	108.34 %			
1.03.08.2.01.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG**	*Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses*	7169 berkas	9028 berkas	125.93 %			
1.03.08.2.01.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*jumlah berkas permohonan SLF yang diproses*	50 berkas	93 berkas	186%			
1.03.08.2.01.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota**	*jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun*	4 dokumen	5 dokumen	125%			
1.03.08.2.01.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun*	24 dokumen	26 dokumen	108.33 %			
1.03.08.2.01.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah*	30 Dokumen	37 Dokumen	123.33 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.08.2.01.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun*	4 dokumen	4 dokumen	100%			
1.03.08.2.01.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah dokumen perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan*	9 Dokumen	10 Dokumen	111.11 %			
1.03.10		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	15.48%	20.16%	130.23%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Persentase jaringan jalan yang terbangun	0.09%	0.11%	129.15%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	5.45%	12.18%	223.40%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan yang tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	17,07 hektar	35,84 hektar	209.96%			
1.03.10.2.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	*Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang dibangun*	12 lokasi	23 lokasi	191.67 %			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah lokasi jembatan yang dibangun*	1 lokasi	2 lokasi	200%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur*	4 lokasi	4 lokasi	100%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang dipelihara*	2000 lokasi	2305 lokasi	115.25 %			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jalan dan jembatan*	6 dokumen	7 dokumen	116.67 %			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang disusun*	22 dokumen	24 dokumen	109.09 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang direhabilitasi/dipelihara*	2 lokasi	1 lokasi	50%	Penyesuaian desain pekerjaan sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi pada tahun anggaran berjalan	Akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan skala prioritas pekerjaan	
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah lokasi jembatan yang direhabilitasi/dipelihara*	1 lokasi	1 lokasi	100%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			*Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)*	1 lokasi	1 lokasi	100%			
1.03.10.2.01.05		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pembangunan Jalan**	*Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang dibangun*	12 lokasi	23 lokasi	191.67 %			
1.03.10.2.01.12		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pembangunan Jembatan**	*Jumlah lokasi jembatan yang dibangun*	1 lokasi	2 lokasi	200%			
1.03.10.2.01.02		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan**	*Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur*	4 lokasi	4 lokasi	100%			
1.03.10.2.01.11		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pemeliharaan Rutin Jalan**	*Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang dipelihara*	2000 lokasi	2305 lokasi	115.25 %			
1.03.10.2.01.23		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan**	*Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jalan dan jembatan*	6 dokumen	7 dokumen	116.67 %			
1.03.10.2.01.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**	*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang disusun*	22 dokumen	24 dokumen	109.09 %			
1.03.10.2.01.09		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Rehabilitasi Jalan**	*Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang direhabilitasi/dipelihara*	2 lokasi	1 lokasi	50%	Penyesuaian desain pekerjaan sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi pada tahun anggaran berjalan	Akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan skala prioritas pekerjaan	
1.03.10.2.01.18		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Rehabilitasi Jembatan**	*Jumlah lokasi jembatan yang direhabilitasi/dipelihara*	1 lokasi	1 lokasi	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.10.2.01.08		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Rekonstruksi Jalan**	*Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)*	1 lokasi	1 lokasi	100%			
1.03.11		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup konstruksi	93.00%	100.00%	107.53%			
1.03.11.2.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	*Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan*	407 berkas	199 berkas	48.89 %	Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa Penerbitan Izin Berusaha dibidang Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui OSS	Pemerintah Kota Surabaya tidak lagi memiliki kewenangan untuk penerbitan Izin Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku. Namun Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha di Bidang Jasa Konstruksi melalui sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi yang akan dimulai pada tahun 2022.	
1.03.11.2.03.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional**	*Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan*	407 berkas	199 berkas	48.89 %	Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan	Pemerintah Kota Surabaya tidak lagi memiliki kewenangan untuk penerbitan Izin Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku. Namun Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha di Bidang Jasa	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa Penerbitan Izin Berusaha dibidang Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui OSS	Konstruksi melalui sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi yang akan dimulai pada tahun 2022.	
1.03.12		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Indeks Pelayanan Tata Ruang	95.00%	97.28%	102.40%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100.00%	100.00%	100.00%			
1.03.12.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota yang dibuat*	3 dokumen	3 dokumen	100%			
1.03.12.2.01.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang**	*Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota yang dibuat*	3 dokumen	3 dokumen	100%			
1.03.12.2.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1.03.12.2.03.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah**	*Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1.03.12.2.03		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah ijin pemanfaatan jalan, saluran dan utilitas yang diterbitkan*	10 izin	11 izin	110%			
1.03.12.2.03.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk**	*Jumlah ijin pemanfaatan jalan, saluran dan utilitas yang diterbitkan*	10 izin	11 izin	110%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Investasi dan Pembangunan Daerah							
1.03.12.2.04		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan*	300 lokasi	412 lokasi	137.33 %			
1.03.12.2.04.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	*Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan*	300 lokasi	412 lokasi	137.33 %			
1.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa	100.00%	100.00%	100.00%			
1.04.02.2.05		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola*	103 blok	103 blok	100%			
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			*Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola*	3981 lokasi	3981 lokasi	100%			
1.04.02.2.05.01		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	*Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola*	103 blok	103 blok	100%			
1.04.02.2.05.02		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola*	3981 lokasi	3981 lokasi	100%			
1.04.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	50.83%	53.31%	104.87%			
		Dinas Sosial			Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki	100.00%	100.00%	100.00%			
1.04.03.2.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	*Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Infrastruktur*	100 dokumen	119 dokumen	119%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pengurangan Tarif Sewa Rumah Susun Akibat Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	*Perumahan dan Kawasan Permukiman*						
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun*	12 dokumen	21 dokumen	175%			
1.04.03.2.02.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	*Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman*	100 dokumen	119 dokumen	119%			
1.04.03.2.02.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			*Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun*	12 dokumen	21 dokumen	175%			
1.04.03.2.03		Dinas Sosial		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*	623 unit	623 unit	100%			
1.04.03.2.03.02		Dinas Sosial		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*	623 unit	623 unit	100%			
1.04.04		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	50.83%	53.31%	104.87%			
1.04.04.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah yang dibangun*	7 bangunan	13 bangunan	185.71 %			
1.04.04.2.01.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	*Jumlah rumah yang dibangun*	7 bangunan	13 bangunan	185.71 %			
1.04.05		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Indeks Pelayanan Tata Ruang	95.00%	97.28%	102.40%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			Persentase titik pemasangan PJU hemat energi	85.90%	107.63%	125.30%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	10.24%	12.96%	126.55%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	38.46%	32.26%	83.87%	terjadi perubahan desain pada perencanaan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi	mengoptimalkan Fasilitas pengelolaan sampah yang ada dengan Teknologi Tepat guna berupa TPS dan Rumah Kompos yang menggunakan prinsip teknologi 3R dalam pengolahan dan pemilahan sampah	
1.04.05.2.01		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	*Jumlah PJU hemat energi yang terpasang*	1276 titik	1324 titik	103.76 %			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan*	6674 rekening	7181 rekening	107.6 %			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi*	15 lokasi	17 lokasi	113.33 %			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan dipelihara*	14 lokasi	14 lokasi	100%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah titik PJU yang dipelihara*	73680 titik	90252 titik	122.49 %			
1.04.05.2.01.02		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**	*Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi*	15 lokasi	17 lokasi	113.33 %			
1.04.05.2.01.02		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah PJU hemat energi yang terpasang*	1276 titik	1324 titik	103.76 %			
1.04.05.2.01.02		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan*	6674 rekening	7181 rekening	107.6 %			
1.04.05.2.01.02		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah titik PJU yang dipelihara*	73680 titik	90252 titik	122.49 %			
1.04.05.2.01.02		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan dipelihara*	14 lokasi	14 lokasi	100%			
1.04.05.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	*Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun*	9 Dokumen	34 Dokumen	377.78 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.04.05.2.01.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan**	*Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun*	9 Dokumen	34 Dokumen	377.78 %			
1.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.84%	105.50%			
		Dinas Pemadam Kebakaran			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Pemadam Kebakaran			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
1.05.01.2.02		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.05.01.2.02.01		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.05.01.2.07		Dinas Pemadam Kebakaran		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.05.01.2.07.10		Dinas Pemadam Kebakaran	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Sebesar 2% (Dua Persen) Terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Yang Terutang Akibat Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.05.01.2.08		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.05.01.2.08.03		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%			
		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%			
		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%			
		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	77.72%	99.43%	127.93%			
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa*	191 kali	195 kali	102.09 %			
		Satuan Polisi Pamong Praja			*Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial*	2168 kali	3435 kali	158.44 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Satuan Polisi Pamong Praja	Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Berupa Pembebasan Pajak Bagi Hotel Yang Dimanfaatkan Untuk Isolasi Warga Yang Memiliki Potensi Terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bahan Makanan Bagi Warga Masyarakat Terkonfirmasi Wabah Corona		*Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP*	91 kali	91 kali	100%			
		Satuan Polisi Pamong Praja			*Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*	1914 kali	3002 kali	156.84 %			
1.05.02.2.01.06		Satuan Polisi Pamong Praja		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa*	191 kali	195 kali	102.09 %			
1.05.02.2.01.02		Satuan Polisi Pamong Praja		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial*	2168 kali	3435 kali	158.44 %			
1.05.02.2.01.05		Satuan Polisi Pamong Praja		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP*	91 kali	91 kali	100%			
1.05.02.2.01.09		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	*Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*	1914 kali	3002 kali	156.84 %			
1.05.02.2.01		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat*	793 orang	814 orang	102.65 %			
		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			*Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat*	100 orang	100 orang	100%			
1.05.02.2.01.03		Badan Penanggulangan		Koordinasi Penyelenggaraan	*Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan,*	793 orang	814 orang	102.65 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pengurangan Tarif Sewa Rumah Susun Akibat Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*ketenteraman, dan perlindungan masyarakat*					
1.05.02.2.01.04		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat*	100 orang	100 orang	100%			
1.05.02.2.02		Satuan Polisi Pamong Praja		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah penindakan pelanggaran Perda*	65 kali	76 kali	116.92 %			
		Satuan Polisi Pamong Praja			*Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah*	164 kali	183 kali	111.59 %			
		Satuan Polisi Pamong Praja			*Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi*	397 kali	416 kali	104.79 %			
1.05.02.2.02.03		Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah penindakan pelanggaran Perda*	65 kali	76 kali	116.92 %			
1.05.02.2.02.02		Satuan Polisi Pamong Praja		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi*	397 kali	416 kali	104.79 %			
1.05.02.2.02.02		Satuan Polisi Pamong Praja			*Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah*	164 kali	183 kali	111.59 %			
1.05.03		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan kejadian bencana alam ≤ 24 jam	100.00%	100.00%	100.00%			
		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			Persentase kelurahan tangguh bencana	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.05.03.2.02		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	*Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana*	300 orang	276 orang	92%	pelaksanaan PPKM dan keterbatasan pelaksanaan kegiatan tatap muka	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana kepada masyarakat dan peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana akan dilaksanakan secara daring (online) dengan menambahkan penilaian berupa pre-test dan post test untuk mengetahui materi yang diberikan telah tepat sasaran serta dapat implementasikan di lapangan / kepada masyarakat lainnya	
		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			*Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana*	1650 orang	1608 orang	97.45 %	pelaksanaan PPKM mikro dan keterbatasan pelaksanaan kegiatan tatap muka	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana kepada masyarakat dan peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana akan dilaksanakan secara daring (online) dengan menambahkan penilaian berupa pre-test dan post test untuk mengetahui materi yang diberikan telah tepat sasaran serta dapat implementasikan di lapangan / kepada masyarakat lainnya	
		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			*Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan*	8 jenis	14 jenis	175%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.05.03.2.02.02		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		**Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**	*Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana*	1650 orang	1608 orang	97.45 %	pelaksanaan PPKM mikro dan keterbatasan pelaksanaan kegiatan tatap muka	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana kepada masyarakat dan peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana akan dilaksanakan secara daring (online) dengan menambahkan penilaian berupa pre-test dan post test untuk mengetahui materi yang diberikan telah tepat sasaran serta dapat implementasikan di lapangan / kepada masyarakat lainnya	
1.05.03.2.02.02		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			*Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana*	300 orang	276 orang	92%	pelaksanaan PPKM dan keterbatasan pelaksanaan kegiatan tatap muka	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana kepada masyarakat dan peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana akan dilaksanakan secara daring (online) dengan menambahkan penilaian berupa pre-test dan post test untuk mengetahui materi yang diberikan telah tepat sasaran serta dapat implementasikan di lapangan / kepada masyarakat lainnya	
1.05.03.2.02.04		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		**Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	*Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan*	8 jenis	14 jenis	175%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.05.03.2.03		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	*Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana*	100%	100%	100%			
		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			*jenis kejadian bencana yang manajemen tanggap bencananya dikembangkan*	10 jenis	11 jenis	110%			
1.05.03.2.03.04		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		**Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	*Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana*	100%	100%	100%			
1.05.03.2.03.02		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		**Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota**	*jenis kejadian bencana yang manajemen tanggap bencananya dikembangkan*	10 jenis	11 jenis	110%			
1.05.04		Dinas Pemadam Kebakaran		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	50.5	46.11	108.69%			
		Dinas Pemadam Kebakaran			Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Pemadam Kebakaran			Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	83.00%	100.00%	120.48%			
1.05.04.2.01		Dinas Pemadam Kebakaran		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya*	830 orang	830 orang	100%			
		Dinas Pemadam Kebakaran			*Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur dan peran serta masyarakat*	30 kali	30 kali	100%			
		Dinas Pemadam Kebakaran			*Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun*	69 unit	69 unit	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Pemadam Kebakaran			*Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara*	200 unit	200 unit	100%			
1.05.04.2.01.02		Dinas Pemadam Kebakaran		**Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya*	830 orang	830 orang	100%			
1.05.04.2.01.07		Dinas Pemadam Kebakaran		**Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran**	*Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur dan peran serta masyarakat*	30 kali	30 kali	100%			
1.05.04.2.01.06		Dinas Pemadam Kebakaran		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri**	*Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun*	69 unit	69 unit	100%			
1.05.04.2.01.05		Dinas Pemadam Kebakaran		**Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri**	*Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara*	200 unit	200 unit	100%			
1.05.04.2.02		Dinas Pemadam Kebakaran		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	*Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan*	350 bangunan	350 bangunan	100%			
1.05.04.2.02.02		Dinas Pemadam Kebakaran		**Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**	*Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan*	350 bangunan	350 bangunan	100%			
1.05.04.2.04		Dinas Pemadam Kebakaran		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan*	20 kali	20 kali	100%			
1.05.04.2.04.01		Dinas Pemadam Kebakaran		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan*	20 kali	20 kali	100%			
1.06.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	89.92%	102.18%			
1.06.01.2.02		Dinas Sosial		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
1.06.01.2.02.01		Dinas Sosial		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.06.02		Dinas Sosial	Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	62.00%	85.94%	138.61%			
1.06.02.2.03		Dinas Sosial		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan PSKS yang dibina*	26 kali	29 kali	111.54 %			
1.06.02.2.03.04		Dinas Sosial		**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan PSKS yang dibina*	26 kali	29 kali	111.54 %			
1.06.04		Dinas Pendidikan		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100.00%	110.29%	110.29%			
		Dinas Sosial			Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	50.00%	50.12%	100.24%			
		Dinas Sosial			Persentase pemulangan PMKS	35.00%	41.29%	117.98%			
		Dinas Sosial			Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100.00%	100.00%	100.00%			
1.06.04.2.01		Dinas Sosial		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	*Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha*	160 orang	219 orang	136.88 %			
		Dinas Sosial			*Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat*	80 orang	83 orang	103.75 %			
1.06.04.2.01.06		Dinas Sosial		**Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat**	*Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat*	80 orang	83 orang	103.75 %			
1.06.04.2.01.06		Dinas Sosial			*Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi*	160 orang	219 orang	136.88 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan Dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bahan Makanan Bagi Warga Masyarakat Terkonfirmasi Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya		*kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha*					
1.06.04.2.01		Dinas Pendidikan		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	*Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan*	55 lembaga	55 lembaga	100%			
1.06.04.2.01.08		Dinas Pendidikan		**Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar**	*Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan*	55 lembaga	55 lembaga	100%			
1.06.04.2.02		Dinas Sosial		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	*Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia*	17 kali	9 kali	52.94 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan di masa pandemi COVID-19 terdapat pengurangan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19	Dilakukan pemetaan kegiatan dan penyesuaian konsep kegiatan dengan trend penyebaran COVID-19	
		Dinas Sosial			*Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan*	475 orang	302 orang	63.58 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan di masa pandemi COVID-19 terdapat pengurangan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19	Dilakukan pemetaan kegiatan dan penyesuaian konsep kegiatan dengan trend penyebaran COVID-19	
		Dinas Sosial			*Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih*	1100 orang	1787 orang	162.45 %			
		Dinas Sosial			*Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang Diselenggarakan*	4416 kali	3809 kali	86.25 %	Di masa pandemi Covid-19 masyarakat meminimalkan	Melakukan sosialisasi dan mengirimkan surat pemberitahuan ke	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									kunjungan ke rumah sakit kecuali pada situasi darurat dan mendesak sehingga menyebabkan penurunan jumlah klien yang menggunakan ambulance gratis	kelurahan agar masyarakat dapat memanfaatkan ambulance gratis baik untuk pengantar pasien berobat ke RS maupun pemakaman jenazah	
		Dinas Sosial			*Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitasi Pemakaman*	315 orang	0 orang	0%	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketentuan pemberian bantuan pemakaman masih dalam proses penyusunan	Melakukan percepatan penyelesaian ketentuan pemberian bantuan pemakaman	
		Dinas Sosial			*Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan*	660 orang	530 orang	80.3 %	Diberlakukannya PPKM di daerah asal PMKS sehingga proses reunifikasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal terkait pelaksanaan proses reunifikasi PMKS	
1.06.04.2.02.07		Dinas Sosial		**Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**	*Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia*	17 kali	9 kali	52.94 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan di masa pandemi Covid-19 terdapat pengurangan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19	Dilakukan pemetaan kegiatan dan penyesuaian konsep kegiatan dengan trend penyebaran COVID-19	
1.06.04.2.02.07		Dinas Sosial			*Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan*	475 orang	302 orang	63.58 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan di masa pandemi Covid-19 terdapat pengurangan kegiatan	Dilakukan pemetaan kegiatan dan penyesuaian konsep kegiatan dengan trend penyebaran COVID-19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									yang bersifat mengumpulkan massa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19		
1.06.04.2.02.08		Dinas Sosial		**Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA**	*Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih*	1100 orang	1787 orang	162.45 %			
1.06.04.2.02.02		Dinas Sosial		**Pemberian Layanan Kedaruratan**	*Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang Diselenggarakan*	4416 kali	3809 kali	86.25 %	Di masa pandemi Covid-19 masyarakat meminimalkan kunjungan ke rumah sakit kecuali pada situasi darurat dan mendesak sehingga menyebabkan penurunan jumlah klien yang menggunakan ambulance gratis	Melakukan sosialisasi dan mengirimkan surat pemberitahuan ke kelurahan agar masyarakat dapat memanfaatkan ambulance gratis baik untuk pengantar pasien berobat ke RS maupun pemakaman jenazah	
1.06.04.2.02.02		Dinas Sosial			*Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitasi Pemakaman*	315 orang	0 orang	0%	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketentuan pemakaman masih dalam proses penyusunan	Melakukan percepatan penyelesaian ketentuan pemberian bantuan pemakaman	
1.06.04.2.02.12		Dinas Sosial		**Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga**	*Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan*	660 orang	530 orang	80.3 %	Diberlakukannya PPKM di daerah asal PMKS sehingga proses reunifikasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal terkait pelaksanaan proses reunifikasi PMKS	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.06.05		Dinas Sosial		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan yang tersalurkan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Sosial			Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Sosial			Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	62.00%	85.94%	138.61%			
		Dinas Sosial			Persentase data kesejahteraan sosial yang termanfaatkan	100.00%	100.00%	100.00%			
1.06.05.2.01		Dinas Sosial		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	*Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan*	85 orang	55 orang	64.71 %	Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengkoordinasikan PMKS anak terlantar ke UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Membangun dan melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi PMKS	
		Dinas Sosial			*Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri*	45 orang	31 orang	68.89 %	Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengkoordinasikan PMKS anak terlantar ke UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Membangun dan melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi PMKS	
		Dinas Sosial			*Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan*	10 lembaga	10 lembaga	100%			
1.06.05.2.01.01		Dinas Sosial		**Penjangkauan Anak-Anak Terlantar**	*Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri*	45 orang	31 orang	68.89 %	Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengkoordinasikan PMKS anak terlantar ke UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Membangun dan melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi PMKS	
1.06.05.2.01.01		Dinas Sosial			*Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi*	85 orang	55 orang	64.71 %	Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan	Membangun dan melakukan optimalisasi	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan				untuk mengkoordinasikan PMKS anak terlantar ke UPTD Pondok Sosial Kalijudan	pemanfaatan sistem informasi PMKS	
1.06.05.2.01.02		Dinas Sosial		**Rujukan Anak-Anak Terlantar**	*Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan*	10 lembaga	10 lembaga	100%			
1.06.05.2.02		Dinas Sosial		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Yang Dilaksanakan*	22 kali	24 kali	109.09 %			
		Dinas Sosial			*Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS*	154 kelurahan	154 kelurahan	100%			
1.06.05.2.02.03		Dinas Sosial		**Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Yang Dilaksanakan*	22 kali	24 kali	109.09 %			
1.06.05.2.02.02		Dinas Sosial		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS*	154 kelurahan	154 kelurahan	100%			
1.06.07		Dinas Sosial		**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase lembaga/organisasi/kelompok kepahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan kepahlawanan	100.00%	100.00%	100.00%			
1.06.07.2.01		Dinas Sosial		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	*Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara*	7 lokasi	7 lokasi	100%			
1.06.07.2.01.02		Dinas Sosial		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	*Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara*	7 lokasi	7 lokasi	100%			

3.1.2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar berkaitan dengan penyelenggaraan pada bidang tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pangan; pertanian; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; serta kearsipan.

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar di Kota Surabaya telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang berkaitan hampir seluruhnya mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021.

Tabel 3.14
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.07.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi	77.00%	100.00%	129.87%			
		Dinas Tenaga Kerja			Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90.00%	100.00%	111.11%			
2.07.03.2.01		Dinas Tenaga Kerja		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang*	25 orang	25 orang	100%			
		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja*	441 orang	441 orang	100%			
2.07.03.2.01.02		Dinas Tenaga Kerja		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang*	25 orang	25 orang	100%			
2.07.03.2.01.01		Dinas Tenaga Kerja		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja*	441 orang	441 orang	100%			
2.07.03.2.05		Dinas Tenaga Kerja		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi*	48 orang	48 orang	100%			
		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2.07.03.2.05.01		Dinas Tenaga Kerja		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi*	48 orang	48 orang	100%			
2.07.03.2.05.01		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.07.04		Dinas Tenaga Kerja	- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5.20%	5.60%	107.65%			
2.07.04.2.01		Dinas Tenaga Kerja		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja*	1000 orang	1000 orang	100%			
		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja*	1050 orang	1050 orang	100%			
		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja*	50 orang	50 orang	100%			
		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha*	50 orang	53 orang	106%			
2.07.04.2.01.03		Dinas Tenaga Kerja		**Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja**	*Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja*	1000 orang	1000 orang	100%			
2.07.04.2.01.03		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja*	1050 orang	1050 orang	100%			
2.07.04.2.01.05		Dinas Tenaga Kerja		**Perluasan Kesempatan Kerja**	*Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja*	50 orang	50 orang	100%			
2.07.04.2.01.05		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha*	50 orang	53 orang	106%			
2.07.04.2.02		Dinas Tenaga Kerja		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek*	60 lembaga	60 lembaga	100%			
2.07.04.2.02.02		Dinas Tenaga Kerja		**Pengawasan dan Pengendalian LPTKS**	*Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek*	60 lembaga	60 lembaga	100%			
2.07.04.2.03		Dinas Tenaga Kerja		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	*Jumlah even job fair yang diselenggarakan*	3 kali	3 kali	100%			
2.07.04.2.03.03		Dinas Tenaga Kerja		**Job Fair/Bursa Kerja**	*Jumlah even job fair yang diselenggarakan*	3 kali	3 kali	100%			
2.07.04.2.04		Dinas Tenaga Kerja		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri*	250 orang	263 orang	105.2 %			
2.07.04.2.04.01		Dinas Tenaga Kerja		**Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon**	*Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri*	250 orang	263 orang	105.2 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)							
2.07.05		Dinas Tenaga Kerja		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup ketenagakerjaan	80.00%	100.00%	125.00%			
		Dinas Tenaga Kerja			Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7.77%	9.83%	126.57%			
2.07.05.2.01		Dinas Tenaga Kerja		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses*	500 berkas	615 berkas	123%			
		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses*	500 berkas	531 berkas	106.2 %			
		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja*	300 lembaga	360 lembaga	120%			
		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2.07.05.2.01.02		Dinas Tenaga Kerja		**Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan**	*Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses*	500 berkas	615 berkas	123%			
2.07.05.2.01.01		Dinas Tenaga Kerja		**Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan**	*Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses*	500 berkas	531 berkas	106.2 %			
2.07.05.2.01.03		Dinas Tenaga Kerja		**Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**	*Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja*	300 lembaga	360 lembaga	120%			
2.07.05.2.01.03		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2.07.05.2.02		Dinas Tenaga Kerja		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan**	*Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan industrial*	300 orang	300 orang	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							
		Dinas Tenaga Kerja			*Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*	110 kasus	122 kasus	110.91 %			
2.07.05.2.02.01		Dinas Tenaga Kerja		**Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan industrial*	300 orang	300 orang	100%			
2.07.05.2.02.02		Dinas Tenaga Kerja		**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*	110 kasus	122 kasus	110.91 %			
2.08.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.62%	102.98%			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
2.08.01.2.02		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak	2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021							
2.08.01.2.02.01		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.08.01.2.08		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.08.01.2.08.03		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.08.02		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase kelurahan yang responsif gender	41.56%	34.42%	82.81%	Belum optimalnya pemahaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh beberapa pemangku kepentingan	Melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap pemangku kepentingan yang belum memahami Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100.00%	100.00%	100.00%			
2.08.02.2.01		Dinas Pengendalian Penduduk,		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga**	*Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender*	72 lembaga	72 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**							
2.08.02.2.01.03		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG**	*Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender*	72 lembaga	72 lembaga	100%			
2.08.02.2.02		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	*Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan*	23 kali	18 kali	78.26 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan di masa pandemi Covid-19 terdapat pengurangan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19	Dilakukan pemetaan kegiatan dan penyesuaian konsep kegiatan dengan trend penyebaran Covid-19	
2.08.02.2.02.01		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**	*Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan*	23 kali	18 kali	78.26 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan di masa pandemi Covid-19 terdapat pengurangan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19	Dilakukan pemetaan kegiatan dan penyesuaian konsep kegiatan dengan trend penyebaran Covid-19	
2.08.03		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100.00%	100.00%	100.00%			
2.08.03.2.03		Dinas Pengendalian		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan**	*Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building*	926 orang	926 orang	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							
2.08.03.2.03.04		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	*Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building*	926 orang	926 orang	100%			
2.08.05		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100.00%	100.00%	100.00%			
2.08.05.2.01		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
2.08.05.2.01.01		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
2.08.06		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase kelurahan ramah anak	100.00%	99.35%	99.35%	Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pencapaian indikator Kelurahan/kampung layak anak	Melakukan sosialisasi secara meneyeluruh terhadap masyarakat dalam mendukung kegiatan pencapaian indikator kelurahan/kampung layak anak	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.08.06.2.02		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	*Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak*	431 lembaga	440 lembaga	102.09 %			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan*	154 kampung	154 kampung	100%			
2.08.06.2.02.03		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak*	431 lembaga	440 lembaga	102.09 %			
2.08.06.2.02.01		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	*Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan*	154 kampung	154 kampung	100%			
2.08.07		Dinas Pendidikan		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100.00%	110.44%	110.44%			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	74.98%	82.27%	109.72%			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan			Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.08.07.2.02		Dinas Pendidikan		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan*	37 Lembaga	37 Lembaga	100%			
2.08.07.2.02.03		Dinas Pendidikan		**Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota**	*Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan*	37 Lembaga	37 Lembaga	100%			
2.08.07.2.02		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan*	2 lembaga	2 lembaga	100%			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak*	200 kasus	247 kasus	123.5 %			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)*	75 Orang	75 Orang	100%			
2.08.07.2.02.02		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota**	*Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan*	2 lembaga	2 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.08.07.2.02.02		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)*	75 Orang	75 Orang	100%			
2.08.07.2.02.01		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak*	200 kasus	247 kasus	123.5 %			
2.09.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.08%	105.77%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
2.09.01.2.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.09.01.2.02.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.09.01.2.09		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.09.01.2.09.10		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.09.02		Dinas Ketahanan		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang	80.00%	83.53%	104.42%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pangan dan Pertanian	Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021		mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya						
2.09.02.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah bahan pembibitan yang disediakan*	9 jenis	9 jenis	100%			
2.09.02.2.01.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya**	*Jumlah bahan pembibitan yang disediakan*	9 jenis	9 jenis	100%			
2.09.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin (asal) komoditas pangan	63.60%	63.64%	100.06%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	1	1	100.00%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95.00%	94.48%	99.45%	Terganggunya ekonomi masyakat dampak pandemi Covid-19 membuat daya beli masyarakat menurun	Meningkatkan kualitas dan intensitas pendampingan ke masyarakat terkait pentingnya keaneragaman konsumsi masyarakat (PPH)	
2.09.03.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	*Jumlah laporan pelaksanaan monitoring*	15 laporan	15 laporan	100%			
2.09.03.2.01.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan**	*Jumlah laporan pelaksanaan monitoring*	15 laporan	15 laporan	100%			
2.09.03.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	*Jumlah Kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Yang Dilaksanakan*	11 kali	11 kali	100%			
		Dinas Ketahanan			*Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan*	28 kali	28 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pangan dan Pertanian									
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			*Jumlah kelompok yang mendapatkan intervensi*	8 Kelompok	2 Kelompok	25%	Kelompok sasaran yang menjadi target kegiatan tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai Permentan No.7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021	Identifikasi dini dalam penetapan kelompok sasaran intervensi menyesuaikan kriteria yang ditetapkan dalam Juknis Pelaksanaan Subkegiatan DAK (yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat)	
2.09.03.2.04.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**	*Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan*	28 kali	28 kali	100%			
2.09.03.2.04.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			*Jumlah kelompok yang mendapatkan intervensi*	8 Kelompok	2 Kelompok	25%	Kelompok sasaran yang menjadi target kegiatan tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai Permentan No.7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021	Identifikasi dini dalam penetapan kelompok sasaran intervensi menyesuaikan kriteria yang ditetapkan dalam Juknis Pelaksanaan Subkegiatan DAK (yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat)	
2.09.03.2.04.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			*Jumlah Kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Yang Dilaksanakan*	11 kali	11 kali	100%			
2.09.05		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	1	1	100.00%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	89.75%	92.77%	103.37%			
2.09.05.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah sampel produk pangan segar yang diperiksa*	2060 sampel	2060 sampel	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.09.05.2.01.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sampel produk pangan segar yang diperiksa*	2060 sampel	2060 sampel	100%			
2.10.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	89.33%	101.51%			
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
2.10.01.2.02		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.10.01.2.02.01		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.10.01.2.09		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.10.01.2.09.11		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.10.04		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100.00%	100.00%	100.00%			
2.10.04.2.01		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani*	12 Kasus	12 Kasus	100%			
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			*Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani*	18 obyek	18 obyek	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.10.04.2.01.01		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani*	12 Kasus	12 Kasus	100%			
2.10.04.2.01.02		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani*	18 obyek	18 obyek	100%			
2.10.05		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	43,38 hektar	43,38 hektar	100.00%			
2.10.05.2.01		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan*	1 lokasi	1 lokasi	100%			
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			*Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2.10.05.2.01.02		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2.10.05.2.01.02		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			*Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan*	1 lokasi	1 lokasi	100%			
2.10.08		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	100.00%	135.65%	135.65%			
2.10.08.2.01		Dinas Pengelolaan		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	*Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau*	10 kali	10 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Bangunan dan Tanah			*bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya*						
2.10.08.2.01.01		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya*	10 kali	10 kali	100%			
2.10.08.2.02		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	*Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan*	8000 lokasi	8227 lokasi	102.84 %			
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			*Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya*	7000 izin	7313 izin	104.47 %			
2.10.08.2.02.01		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong**	*Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan*	8000 lokasi	8227 lokasi	102.84 %			
2.10.08.2.02.02		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Pemanfaatan Tanah Kosong**	*Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya*	7000 izin	7313 izin	104.47 %			
2.10.10		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	39.03%	39.03%	100.00%			
2.10.10.2.01		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	*Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
2.10.10.2.01.01		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah**	*Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
2.11.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.01%	98.88%	Pelaksanaan kegiatan terkendala karena adanya kondisi pandemik Covid-19, dan adanya prioritas pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak memadai umtuk	akan ditingkatkan pelayanan untuk ketersediaan dan kualitas ATK,penyediaan sarana dan prasarana rapat, kebersihan lokasi kerja, ketersediaan dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021						memenuhi sarana dan prasarana perkantoran	kualitas sarana penunjang kerja, keamanan kantor, ketersediaan dan kualitas pelayanan kelistrikan, ketersediaan air bersih dan ketersediaan sarana komunikasi	
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	86.67%	98.49%	Pelaksanaan kegiatan terkendala karena adanya kondisi pandemik Covid-19, dan adanya prioritas pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak memadai umtuk memenuhi sarana dan prasarana perkantoran	akan ditingkatkan pelayanan untuk ketersediaan dan kualitas ATK,penyediaan sarana dan prasarana rapat, kebersihan lokasi kerja, ketersediaan dan kualitas sarana penunjang kerja, keamanan kantor, ketersediaan dan kualitas pelayanan kelistrikan, ketersediaan air bersih dan ketersediaan sarana komunikasi	
		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
2.11.01.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.11.01.2.02.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.11.01.2.02		Dinas Kebersihan dan		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Ruang Terbuka Hijau									
2.11.01.2.02.01		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.11.01.2.06		Dinas Lingkungan Hidup		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.11.01.2.06.02		Dinas Lingkungan Hidup		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.11.01.2.08		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
2.11.01.2.08.04		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
2.11.01.2.09		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.11.01.2.09.11		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.11.02		Dinas Lingkungan Hidup		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	100.00%	100.00%	100.00%			
2.11.02.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2.11.02.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2.11.02.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun*	3 dokumen	3 dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11.02.2.02.02		Dinas Lingkungan Hidup		**Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD**	*Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun*	3 dokumen	3 dokumen	100%			
2.11.03		Dinas Lingkungan Hidup		**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	95.00%	95.00%	100.00%			
		Dinas Lingkungan Hidup			Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	164,00 kegiatan dan/atau usaha	164,00 kegiatan dan/atau usaha	100.00%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16.00%	16.25%	101.58%			
2.11.03.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	*Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kawasan pesisir*	14 laporan	14 laporan	100%			
2.11.03.2.01.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**	*Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kawasan pesisir*	14 laporan	14 laporan	100%			
2.11.03.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	*Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa*	224 sampel	252 sampel	112.5 %			
		Dinas Lingkungan Hidup			*Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat sebanyak*	766 data	766 data	100%			
		Dinas Lingkungan Hidup			*Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi*	120 lembaga	120 lembaga	100%			
		Dinas Lingkungan Hidup			*Jumlah pelaksanaan Car Free Day*	46 kali	46 kali	100%			
2.11.03.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan**	*Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2*	766 data	766 data	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*sumur pantau selama satu tahun) yang didapat sebanyak*						
2.11.03.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup			*Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa*	224 sampel	252 sampel	112.5 %			
2.11.03.2.01.02		Dinas Lingkungan Hidup		**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**	*Jumlah pelaksanaan Car Free Day*	46 kali	46 kali	100%			
2.11.03.2.01.02		Dinas Lingkungan Hidup			*Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi*	120 lembaga	120 lembaga	100%			
2.11.03.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	*Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun sebanyak*	365 data	365 data	100%			
2.11.03.2.02.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat**	*Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun sebanyak*	365 data	365 data	100%			
2.11.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase pertumbuhan luas taman hutan raya yang dipelihara dan diawasi	60.19%	109.40%	181.75%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	10.24%	12.96%	126.55%			
		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	100.00%	100.00%	100.00%			
2.11.04.2.01		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	*Jumlah taman yang dipelihara*	39 lokasi	39 lokasi	100%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara*	425 lokasi	425 lokasi	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11.04.2.01.04		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	*Jumlah taman yang dipelihara*	39 lokasi	39 lokasi	100%			
2.11.04.2.01.04		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara*	425 lokasi	425 lokasi	100%			
2.11.04.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	*Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan dipelihara*	12 lokasi	12 lokasi	100%			
2.11.04.2.01.05		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**	*Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan dipelihara*	12 lokasi	12 lokasi	100%			
2.11.04.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun*	3 dokumen	3 dokumen	100%			
2.11.04.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	*Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun*	3 dokumen	3 dokumen	100%			
2.11.05		Dinas Lingkungan Hidup		**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	80.00%	85.52%	106.90%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang beroperasi dengan baik	38.46%	35.48%	92.26%	beberapa peralatan yang lebih dari 3 tahun yang membutuhkan peremajaan dan pemeliharaan yang lebih optimal.	akan dilakukan pemeliharaan dan peremajaan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R di Rumah Kompos, TPS 3R dan PLTSa agar bisa beroperasi dengan baik	
2.11.05.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	*Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi*	100 izin	194 izin	194%			
2.11.05.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem**	*Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi*	100 izin	194 izin	194%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
2.11.05.2.02		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan*	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
2.11.05.2.02.02		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan**	*Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan*	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
2.11.06		Dinas Lingkungan Hidup		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	80.00%	85.52%	106.90%			
		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	95.00%	95.00%	100.00%			
2.11.06.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan*	1300 berkas	1222 berkas	94%	Adanya transisi perubahan peraturan dengan diterbitkannya PP 5 tahun 2021, PP 22 tahun 2021 dan Permenlh 4 tahun 2021 dan Adanya perpindahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan di provinsi dan pusat	melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait adanya perpindahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan di provinsi dan pusat sesuai PP 5 tahun 2021, PP 22 tahun 2021 dan Permenlh 4 tahun 2021, agar pelayanan izin lingkungan dapat terlayani	
		Dinas Lingkungan Hidup			*Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan*	100 izin	113 izin	113%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Lingkungan Hidup			*Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya*	254 lembaga	254 lembaga	100%			
		Dinas Lingkungan Hidup			*Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah*	178 lokasi	178 lokasi	100%			
2.11.06.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**	*Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan*	100 izin	113 izin	113%			
2.11.06.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup			*Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan*	1300 berkas	1222 berkas	94%	Adanya transisi perubahan peraturan dengan diterbitkannya PP 5 tahun 2021, PP 22 tahun 2021 dan Permenlh 4 tahun 2021 dan Adanya perpindahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan di provinsi dan pusat	melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait adanya perpindahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan di provinsi dan pusat sesuai PP 5 tahun 2021, PP 22 tahun 2021 dan Permenlh 4 tahun 2021, agar pelayanan izin lingkungan dapat terlayani	
2.11.06.2.01.03		Dinas Lingkungan Hidup		**Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya*	254 lembaga	254 lembaga	100%			
2.11.06.2.01.03		Dinas Lingkungan Hidup			*Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah*	178 lokasi	178 lokasi	100%			
2.11.08		Dinas Lingkungan Hidup		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	75.00%	96.51%	128.68%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	13,00 lingkungan	24,00 lingkungan	184.62%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11.08.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan*	12 kali	12 kali	100%			
2.11.08.2.01.02		Dinas Lingkungan Hidup		**Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup**	*Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan*	12 kali	12 kali	100%			
2.11.08.2.01		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif*	1 lingkungan	1 lingkungan	100%			
2.11.08.2.01.02		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup**	*Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif*	1 lingkungan	1 lingkungan	100%			
2.11.10		Dinas Lingkungan Hidup		**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	95.00%	95.00%	100.00%			
2.11.10.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	*Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani*	50 obyek	51 obyek	102%			
2.11.10.2.01.02		Dinas Lingkungan Hidup		**Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan**	*Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani*	50 obyek	51 obyek	102%			
2.11.11		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari	85.95%	101.60%	118.21%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	10.93%	10.99%	100.54%			
		Dinas Kebersihan dan			Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Ruang Terbuka Hijau									
2.11.11.2.01		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Pengelolaan Sampah**	*Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran*	550 lokasi	550 lokasi	100%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian*	364 lokasi	364 lokasi	100%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan*	104 kegiatan	247 kegiatan	237.5 %			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah*	267 lokasi	267 lokasi	100%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola*	39 lokasi	39 lokasi	100%			
		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan*	1 kali	1 kali	100%			
2.11.11.2.01.03		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota**	*Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian*	364 lokasi	364 lokasi	100%			
2.11.11.2.01.03		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah*	267 lokasi	267 lokasi	100%			
2.11.11.2.01.03		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran*	550 lokasi	550 lokasi	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11.11.2.01.03		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			*Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan*	104 kegiatan	247 kegiatan	237.5 %			
2.11.11.2.01.02		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali**	*Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola*	39 lokasi	39 lokasi	100%			
2.11.11.2.01.04		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		**Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan**	*Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan*	1 kali	1 kali	100%			
2.12.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penerbitan KTP	95.00%	98.37%	103.55%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.70%	100.80%			
2.12.01.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
		Dinas Kependudukan			*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Pencatatan Sipil	Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021								
2.12.01.2.01.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
2.12.01.2.01.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
2.12.01.2.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.12.01.2.02.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.12.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan penerbitan KTP	95.00%	98.37%	103.55%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100.00%	100.00%	100.00%			
2.12.02.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	*Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk Non Permanen*	40930 berkas	83885 berkas	204.95 %			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			*Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani*	398986 berkas	516435 berkas	129.44 %			
2.12.02.2.01.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk**	*Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk Non Permanen*	40930 berkas	83885 berkas	204.95 %			
2.12.02.2.01.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			*Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani*	398986 berkas	516435 berkas	129.44 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.12.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Cakupan penerbitan akte kelahiran	99.94%	100.00%	100.06%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Cakupan penerbitan akte kematian	89.51%	100.00%	111.72%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	100.00%	100.00%	100.00%			
2.12.03.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	*Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani*	104682 berkas	130439 berkas	124.6 %			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			*Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani*	3250 berkas	5474 berkas	168.43 %			
2.12.03.2.01.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting**	*Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani*	104682 berkas	130439 berkas	124.6 %			
2.12.03.2.01.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			*Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani*	3250 berkas	5474 berkas	168.43 %			
2.12.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase peningkatan inovasi pelayanan	66.66%	116.67%	175.02%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah menggunakan data kependudukan	20.00%	62.50%	312.50%			
		Dinas Kependudukan			Persentase penurunan data ganda pada database SIAK	90.00%	97.57%	108.41%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Pencatatan Sipil									
2.12.04.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	*Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	6 dokumen	6 dokumen	100%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			*Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan*	2 kali	2 kali	100%			
2.12.04.2.01.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan**	*Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	6 dokumen	6 dokumen	100%			
2.12.04.2.01.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**	*Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan*	2 kali	2 kali	100%			
2.12.04.2.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	*Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara*	8 sistem	8 sistem	100%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			*data kependudukan yang di mutakhirkan*	146684 data	237053 data	161.61 %			
2.12.04.2.03.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	*Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara*	8 sistem	8 sistem	100%			
2.12.04.2.03.08		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan**	*data kependudukan yang di mutakhirkan*	146684 data	237053 data	161.61 %			
2.14.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19.22%	18.67%	102.86%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	KELUARGA BERENCANA		Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021								
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Persentase peserta KB aktif	80.95%	81.33%	100.47%			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	2.78%	0.22%	192.15%			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Persentase peserta KB baru	97.94%	63.62%	64.96%	Di masa pandemi Covid-19 masyarakat meminimalkan kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Layanan KB sehingga menyebabkan penurunan jumlah peserta KB baru	Melakukan pendampingan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) agar bersedia menjadi peserta KB baru	
2.14.03.2.01		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	*Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana*	1566 orang	1566 orang	100%			
2.14.03.2.01.02		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal**	*Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana*	1566 orang	1566 orang	100%			
2.14.03.2.03		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan**	*Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB*	325 orang	114 orang	35.08 %	Di masa pandemi Covid-19 masyarakat meminimalkan kunjungan ke Fasilitas	Melakukan pendampingan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) agar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perempuan dan Perlindungan Anak		**Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**					Kesehatan Layanan KB sehingga menyebabkan penurunan jumlah peserta KB baru	bersedia menjadi peserta KB baru	
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana*	19 unit	19 unit	100%			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	1950 Orang	896 Orang	45.95 %	Di masa pandemi Covid-19 masyarakat meminimalkan kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Layanan KB sehingga menyebabkan penurunan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP)	Melakukan pendampingan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) agar bersedia menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP)	
2.14.03.2.03.08		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya**	*Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB*	325 orang	114 orang	35.08 %	Di masa pandemi Covid-19 masyarakat meminimalkan kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Layanan KB sehingga menyebabkan penurunan jumlah peserta KB baru	Melakukan pendampingan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) agar bersedia menjadi peserta KB baru	
2.14.03.2.03.03		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	*Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	1950 Orang	896 Orang	45.95 %	Di masa pandemi Covid-19 masyarakat meminimalkan kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Layanan KB sehingga menyebabkan penurunan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP)	Melakukan pendampingan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) agar bersedia menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP)	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.14.03.2.03.06		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB**	*jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana*	19 unit	19 unit	100%			
2.14.04		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	10.33%	12.00%	116.17%			
2.14.04.2.01		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	*Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan*	38 Unit	0 Unit	0%	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di dalam proses pengadaan sarana BKB Kit tidak terdapat penyedia yang dapat memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan	Melakukan optimalisasi penyusunan timeline perencanaan pengadaan sarana BKB Kit	
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera*	480 orang	484 orang	100.83 %			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan			*Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi*	875 orang	875 orang	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak									
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri*	50 orang	50 orang	100%			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan*	1 bangunan	1 bangunan	100%			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan*	2 lembaga	2 lembaga	100%			
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi*	15 lembaga	15 lembaga	100%			
2.14.04.2.01.03		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**	*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera*	480 orang	484 orang	100.83 %			
2.14.04.2.01.04		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan		**Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R**	*Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi*	875 orang	875 orang	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak		**dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**							
2.14.04.2.01.01		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)**	*Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri*	50 orang	50 orang	100%			
2.14.04.2.01.02		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**	*Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan*	38 Unit	0 Unit	0%	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di dalam proses pengadaan sarana BKB Kit tidak terdapat penyedia yang dapat memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan	Melakukan optimalisasi penyusunan timeline perencanaan pengadaan sarana BKB Kit	
2.14.04.2.01.02		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			*Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan*	1 bangunan	1 bangunan	100%			
2.14.04.2.01.06		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**	*Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan*	2 lembaga	2 lembaga	100%			
2.14.04.2.01.07		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan		**Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	*Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi*	15 lembaga	15 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perempuan dan Perlindungan Anak		**(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**							
2.15.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.66%	104.16%			
		Dinas Perhubungan			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
2.15.01.2.02		Dinas Perhubungan		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.15.01.2.02.01		Dinas Perhubungan		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.15.01.2.06		Dinas Perhubungan		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.15.01.2.06.02		Dinas Perhubungan		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.15.02		Dinas Perhubungan		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan	80.00%	100.16%	125.20%			
		Dinas Perhubungan			Persentase penyediaan prasarana pendukung transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Perhubungan			Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	94.00%	95.35%	101.44%			
		Dinas Perhubungan			Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Perhubungan			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	40.00%	43.38%	108.44%			
		Dinas Perhubungan			Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	90,30 menit	88,60 menit	101.88%			
		Dinas Perhubungan			Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	40,00 kilometer per jam	41,24 kilometer per jam	103.09%			
		Dinas Perhubungan			Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2.00%	-12.14%	-607.14%	1. Pengguna jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas 2. Pertumbuhan	1. Akan dilaksanakan pembinaan serta sosialiasi keselamatan berlalu lintas dengan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									kendaraan yang selalu meningkat setiap tahun 3. Kesadaran masyarakat dalam keselamatan lalu lintas masih rendah	menggandeng jajaran terkait 2. Menyediakan integrasi angkutan umum yang memadai dan terjangkau 3. Memberlakukan Traffic Demand Management yang sesuai dengan kebutuhan Kota Surabaya	
2.15.02.2.02		Dinas Perhubungan		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	*Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun*	2 bangunan	2 bangunan	100%			
		Dinas Perhubungan			*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dladakan*	1491 unit	1492 unit	100.07 %			
		Dinas Perhubungan			*Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara*	5 Jenis	5 Jenis	100%			
2.15.02.2.02.01		Dinas Perhubungan		**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	*Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun*	2 bangunan	2 bangunan	100%			
2.15.02.2.02.02		Dinas Perhubungan		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dladakan*	1491 unit	1492 unit	100.07 %			
2.15.02.2.02.04		Dinas Perhubungan		**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**	*Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara*	5 Jenis	5 Jenis	100%			
2.15.02.2.03		Dinas Perhubungan		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	*Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan*	14 Lokasi	14 Lokasi	100%			
		Dinas Perhubungan			*Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi*	4 Paket	4 Paket	100%			
		Dinas Perhubungan			*Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara*	30 Lokasi	30 Lokasi	100%			
2.15.02.2.03.03		Dinas Perhubungan		**Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal**	*Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan*	14 Lokasi	14 Lokasi	100%			
2.15.02.2.03.01		Dinas Perhubungan		**Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C**	*Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi*	4 Paket	4 Paket	100%			
2.15.02.2.03.04		Dinas Perhubungan		**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal**	*Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara*	30 Lokasi	30 Lokasi	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				(Fasilitas Utama dan Pendukung)							
2.15.02.2.04		Dinas Perhubungan		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	*Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan*	1821 Lokasi	1821 Lokasi	100%			
2.15.02.2.04.02		Dinas Perhubungan		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota**	*Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan*	1821 Lokasi	1821 Lokasi	100%			
2.15.02.2.05		Dinas Perhubungan		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	*Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan*	1 jenis	1 jenis	100%			
		Dinas Perhubungan			*Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR dilokasi pengujian kendaraan Bermotor*	146069 Unit	146069 Unit	100%			
2.15.02.2.05.04		Dinas Perhubungan		**Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	*Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan*	1 jenis	1 jenis	100%			
2.15.02.2.05.01		Dinas Perhubungan		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	*Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR dilokasi pengujian kendaraan Bermotor*	146069 Unit	146069 Unit	100%			
2.15.02.2.06		Dinas Perhubungan		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	*Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun*	8 Dokumen	8 Dokumen	100%			
		Dinas Perhubungan			*Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan*	48 Kali	48 Kali	100%			
		Dinas Perhubungan			*Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan selama 12 bulan*	7 Jenis	7 Jenis	100%			
		Dinas Perhubungan			*Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan*	365 Kali	365 Kali	100%			
2.15.02.2.06.01		Dinas Perhubungan		**Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	*Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun*	8 Dokumen	8 Dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.15.02.2.06.04		Dinas Perhubungan		**Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota**	*Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.15.02.2.06.04		Dinas Perhubungan			*Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan selama 12 bulan*	7 Jenis	7 Jenis	100%			
2.15.02.2.06.04		Dinas Perhubungan			*Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan*	365 Kali	365 Kali	100%			
2.15.02.2.09		Dinas Perhubungan		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan*	28 Unit	28 Unit	100%			
		Dinas Perhubungan			*Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan*	365 Kali	365 Kali	100%			
		Dinas Perhubungan			*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang*	2 Kali	2 Kali	100%			
		Dinas Perhubungan			*Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 12 Bulan*	8 Unit	8 Unit	100%			
		Dinas Perhubungan			*Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan*	365 Kali	365 Kali	100%			
2.15.02.2.09.02		Dinas Perhubungan		**Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**	*Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan*	28 Unit	28 Unit	100%			
2.15.02.2.09.02		Dinas Perhubungan			*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang*	2 Kali	2 Kali	100%			
2.15.02.2.09.02		Dinas Perhubungan			*Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan*	365 Kali	365 Kali	100%			
2.15.02.2.09.01		Dinas Perhubungan		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 12 Bulan*	8 Unit	8 Unit	100%			
2.15.02.2.09.01		Dinas Perhubungan			*Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan*	365 Kali	365 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.15.02.2.11		Dinas Perhubungan		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
2.15.02.2.11.01		Dinas Perhubungan		**Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
2.15.02.2.14		Dinas Perhubungan		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan*	365 Kali	365 Kali	100%			
2.15.02.2.14.01		Dinas Perhubungan		**Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	*Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan*	365 Kali	365 Kali	100%			
2.15.03		Dinas Perhubungan		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	40.00%	43.38%	108.44%			
2.15.03.2.04		Dinas Perhubungan		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor*	2 Kali	2 Kali	100%			
2.15.03.2.04.02		Dinas Perhubungan		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota**	*Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor*	2 Kali	2 Kali	100%			
2.15.05		Dinas Perhubungan		**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	90,30 menit	88,60 menit	101.88%			
2.15.05.2.01		Dinas Perhubungan		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	*Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor*	1 Kali	1 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.15.05.2.01.02		Dinas Perhubungan		**Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian**	*Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor*	1 Kali	1 Kali	100%			
2.16.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.61%	100.69%			
2.16.01.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.16.01.2.02.01		Dinas Komunikasi dan Informatika	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.16.02		Dinas Komunikasi dan Informatika	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	32,414,00 kunjungan	227,423,06 kunjungan	701.62%			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75.00%	100.00%	133.33%			
		Bagian Hubungan Masyarakat		Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85.00%	90.97%	107.02%			
2.16.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial*	11 kali	11 kali	100%			
		Dinas Komunikasi dan Informatika		*Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani*	7000 berkas	11343 berkas	162.04 %			
		Dinas Komunikasi dan Informatika		*Jumlah saluran komunikasi yang dikelola*	19 Saluran	19 Saluran	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Komunikasi dan Informatika			*Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah*	3 Jenis	3 Jenis	100%			
		Dinas Komunikasi dan Informatika			*Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun*	3 dokumen	3 dokumen	100%			
2.16.02.2.01.08		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan**	*Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial*	11 kali	11 kali	100%			
2.16.02.2.01.06		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Pelayanan Informasi Publik**	*Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani*	7000 berkas	11343 berkas	162.04 %			
2.16.02.2.01.04		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik**	*Jumlah saluran komunikasi yang dikelola*	19 Saluran	19 Saluran	100%			
2.16.02.2.01.05		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Pengelolaan Media Komunikasi Publik**	*Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah*	3 Jenis	3 Jenis	100%			
2.16.02.2.01.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**	*Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun*	3 dokumen	3 dokumen	100%			
2.16.02.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan*	3 kali	3 kali	100%			
2.16.02.2.01.06		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Pelayanan Informasi Publik**	*Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan*	3 kali	3 kali	100%			
2.16.02.2.01		Bagian Hubungan Masyarakat		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa*	2287 kali	2304 kali	100.74 %			
		Bagian Hubungan Masyarakat			*Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan*	85 kali	94 kali	110.59 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.16.02.2.01.07		Bagian Hubungan Masyarakat		**Layanan Hubungan Media**	*Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa*	2287 kali	2304 kali	100.74 %			
2.16.02.2.01.12		Bagian Hubungan Masyarakat		**Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas**	*Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan*	85 kali	94 kali	110.59 %			
2.16.03		Dinas Pendidikan		**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	83.18%	100.00%	120.22%			
		Dinas Komunikasi dan Informatika			Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	58.37%	58.37%	100.00%			
		Dinas Komunikasi dan Informatika			Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	100.00%	100.00%	100.00%			
2.16.03.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK*	2 lokasi	2 lokasi	100%			
		Dinas Komunikasi dan Informatika			*Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK*	4 Jenis	4 Jenis	100%			
2.16.03.2.01.03		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**	*Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK*	2 lokasi	2 lokasi	100%			
2.16.03.2.01.03		Dinas Komunikasi dan Informatika			*Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK*	4 Jenis	4 Jenis	100%			
2.16.03.2.02		Dinas Pendidikan		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah*	1213 lembaga	1213 lembaga	100%			
		Dinas Pendidikan			*Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan*	2 kali	2 kali	100%			
2.16.03.2.02.07		Dinas Pendidikan		**Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**	*Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan*	2 kali	2 kali	100%			
2.16.03.2.02.07		Dinas Pendidikan			*jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah*	1213 lembaga	1213 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.16.03.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi Informasi yang dilaksanakan*	72 lokasi	72 lokasi	100%			
		Dinas Komunikasi dan Informatika			*Jumlah Pusat Data yang dikelola*	2 Lokasi	2 Lokasi	100%			
		Dinas Komunikasi dan Informatika			*Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan*	165 Aplikasi	165 Aplikasi	100%			
		Dinas Komunikasi dan Informatika			*Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun*	15 aplikasi	15 aplikasi	100%			
		Dinas Komunikasi dan Informatika			*Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan dan publik yang disediakan*	399 lokasi	399 lokasi	100%			
2.16.03.2.02.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi Informasi yang dilaksanakan*	72 lokasi	72 lokasi	100%			
2.16.03.2.02.03		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**	*Jumlah Pusat Data yang dikelola*	2 Lokasi	2 Lokasi	100%			
2.16.03.2.02.07		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**	*Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun*	15 aplikasi	15 aplikasi	100%			
2.16.03.2.02.07		Dinas Komunikasi dan Informatika			*Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan*	165 Aplikasi	165 Aplikasi	100%			
2.16.03.2.02.10		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**	*Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan dan publik yang disediakan*	399 lokasi	399 lokasi	100%			
2.17.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.91%	103.31%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	USAHA KECIL, DAN MENENGAH		Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro							
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
2.17.01.2.02		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.17.01.2.02.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.17.01.2.09		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.17.01.2.09.10		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.17.02		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	72.95%	72.97%	100.03%			
2.17.02.2.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi*	50 kelompok	50 kelompok	100%			
2.17.02.2.01.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi*	50 kelompok	50 kelompok	100%			
2.17.03		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	72.95%	72.97%	100.03%			
2.17.03.2.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	*Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan*	629 koperasi	629 koperasi	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			*Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya*	35 koperasi	35 koperasi	100%			
2.17.03.2.01.02		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan*	629 koperasi	629 koperasi	100%			
2.17.03.2.01.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya*	35 koperasi	35 koperasi	100%			
2.17.05		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	55.72%	61.07%	109.61%			
2.17.05.2.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM*	178 orang	210 orang	117.98 %			
2.17.05.2.01.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM*	178 orang	210 orang	117.98 %			
2.17.06		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	55.72%	61.07%	109.61%			
2.17.06.2.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis*	100 koperasi	101 koperasi	101%			
2.17.06.2.01.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	*Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis*	100 koperasi	101 koperasi	101%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.17.07		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	63.00%	77.08%	122.35%			
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	8.50%	9.97%	117.34%			
		Kec. Genteng			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Simokerto			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tegalsari			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	89.58%	89.58%	Penyesuaian anggaran/recofusing sehingga sebagian kegiatan dialokasikan untuk penanganan covid 19		
		Kec. Bubutan			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Kenjeran			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pabean Cantian			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Semampir			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Krembangan			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tambaksari			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gubeng			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Rungkut			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gunung Anyar			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukolilo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Mulyorejo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Wonokromo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Karangpilang			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Dukuh Pakis			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gayungan			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Jambangan			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonocolo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sawahan			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wiyung			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tandes			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Asemrowo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukomanunggal			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Benowo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Lakarsantri			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sambikerep			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pakal			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Bulak			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
2.17.07.2.01		Kec. Sukolilo		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Sukolilo		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.17.07.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Gunung Anyar		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Gunung Anyar		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Benowo		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Benowo		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Tandes		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Tandes		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Lakarsantri		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.17.07.2.01.01		Kec. Lakarsantri		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Asemrowo		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Asemrowo		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Gayungan		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Gayungan		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Jambangan		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Jambangan		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan*	175 orang	175 orang	100%			
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			*Jumlah sentra usaha yang difasilitasi*	58 sentra usaha	61 sentra usaha	105.17 %			
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			*Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan*	48 sentra usaha	49 sentra usaha	102.08 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.17.07.2.01.02		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		**Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro**	*Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan*	175 orang	175 orang	100%			
2.17.07.2.01.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan*	48 sentra usaha	49 sentra usaha	102.08 %			
2.17.07.2.01.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			*Jumlah sentra usaha yang difasilitasi*	58 sentra usaha	61 sentra usaha	105.17 %			
2.17.07.2.01		Kec. Wonocolo		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Wonocolo		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Genteng		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Genteng		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Krembangan		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Krembangan		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Dukuh Pakis		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.17.07.2.01.01		Kec. Dukuh Pakis		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Sambikerep		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Sambikerep		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Tambaksari		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Tambaksari		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Bubutan		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	36 Kali	36 Kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Bubutan		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	36 Kali	36 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Wiyung		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Wiyung		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Wonokromo		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							
2.17.07.2.01.01		Kec. Wonokromo		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Karangpilang		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Karangpilang		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Pabean Cantian		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Pabean Cantian		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Simokerto		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Simokerto		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Mulyorejo		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Mulyorejo		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.17.07.2.01		Kec. Rungkut		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Rungkut		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Sawahan		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	51 Kali	106.25 %			
2.17.07.2.01.01		Kec. Sawahan		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	51 Kali	106.25 %			
2.17.07.2.01		Kec. Pakal		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	49 kali	102.08 %			
2.17.07.2.01.01		Kec. Pakal		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	49 kali	102.08 %			
2.17.07.2.01		Kec. Semampir		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Semampir		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Kenjeran		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.17.07.2.01.01		Kec. Kenjeran		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Gubeng		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Gubeng		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Sukomanunggal		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Sukomanunggal		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 kali	48 kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Tegalsari		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01.01		Kec. Tegalsari		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	48 Kali	100%			
2.17.07.2.01		Kec. Bulak		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	69 Kali	143.75 %			
2.17.07.2.01.01		Kec. Bulak		**Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian*	48 Kali	69 Kali	143.75 %			
2.17.08		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan	40.00%	42.92%	107.29%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.17.08.2.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	*Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan*	707 orang	729 orang	103.11 %			
2.17.08.2.01.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		**Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi**	*Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan*	707 orang	729 orang	103.11 %			
2.18.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75.00%	100.00%	133.33%			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.81%	100.92%			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
2.18.01.2.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.18.01.2.02.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.18.01.2.09		Dinas Penanaman Modal dan		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Surabaya Tahun 2021								
2.18.01.2.09.10		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.18.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24.00%	37.67%	156.96%			
2.18.02.2.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal*	4 dokumen	4 dokumen	100%			
2.18.02.2.02.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal*	4 dokumen	4 dokumen	100%			
2.18.03		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24.00%	37.67%	156.96%			
2.18.03.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan*	3 kali	4 kali	133.33 %			
2.18.03.2.01.02		Dinas Penanaman Modal dan		**Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan*	3 kali	4 kali	133.33 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
2.18.04		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75.00%	100.00%	133.33%			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80.00%	99.86%	124.83%			
2.18.04.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	*Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan*	1 kali	1 kali	100%			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			*Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan*	60000 berkas	78939 berkas	131.57 %			
2.18.04.2.01.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**	*Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan*	1 kali	1 kali	100%			
2.18.04.2.01.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**	*Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan*	60000 berkas	78939 berkas	131.57 %			
2.18.05		Dinas Penanaman Modal dan		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42.00%	44.87%	106.83%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75.00%	100.00%	133.33%			
2.18.05.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi*	3500 perusahaan	3729 perusahaan	106.54 %			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			*Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi*	11000 pelaku usaha	11994 pelaku usaha	109.04 %			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			*Jumlah proyek yang dikunjungi dalam rangka pemantauan pelaksanaan penanaman modal*	6 Proyek	6 Proyek	100%			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			*Jumlah peserta yang hadir dalam rangka pembinaan pelaksanaan penanaman modal*	182 Peserta	314 Peserta	172.53 %			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			*Jumlah Proyek yang dikunjungi dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanaman modal*	12 Proyek	12 Proyek	100%			
2.18.05.2.01.01		Dinas Penanaman Modal dan		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal**	*Jumlah proyek yang dikunjungi dalam rangka pemantauan pelaksanaan penanaman modal*	6 Proyek	6 Proyek	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
2.18.05.2.01.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**	*Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi*	3500 perusahaan	3729 perusahaan	106.54 %			
2.18.05.2.01.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			*Jumlah peserta yang hadir dalam rangka pembinaan pelaksanaan penanaman modal*	182 Peserta	314 Peserta	172.53 %			
2.18.05.2.01.03		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**	*Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi*	11000 pelaku usaha	11994 pelaku usaha	109.04 %			
2.18.05.2.01.03		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			*Jumlah Proyek yang dikunjungi dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanaman modal*	12 Proyek	12 Proyek	100%			
2.18.06		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Indeks Pelayanan Tata Ruang	95.00%	97.28%	102.40%			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42.00%	44.87%	106.83%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.18.06.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan*	12250 Persil	12636 Persil	103.15 %			
2.18.06.2.01.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	*Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan*	12250 Persil	12636 Persil	103.15 %			
2.18.06.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah data investasi yang dikelola*	45151 data	45621 data	101.04 %			
2.18.06.2.01.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	*Jumlah data investasi yang dikelola*	45151 data	45621 data	101.04 %			
2.19.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021** **- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.37%	102.69%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
2.19.01.2.02		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.19.01.2.02.01		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.19.01.2.09		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.19.01.2.09.10		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.19.02		Dinas Pendidikan		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	46.12%	49.91%	108.22%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	141,00 kelurahan	141,00 kelurahan	100.00%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	5.00%	5.01%	100.22%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15.00%	15.96%	106.38%			
2.19.02.2.01		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	*Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja*	1000 peserta	1000 peserta	100%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan*	300 orang	282 orang	94%	Adanya pembatasan pergerakan masyarakat saat Pandemi Covid-19	Menggunakan metode online dan/atau menerapkan protokol kesehatan	
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan*	11 kali	11 kali	100%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun*	11 dokumen	11 dokumen	100%			
2.19.02.2.01.03		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya**	*Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja*	1000 peserta	1000 peserta	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
2.19.02.2.01.02		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula**	*Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan*	300 orang	282 orang	94%	Adanya pembatasan pergerakan masyarakat saat Pandemi Covid-19	Menggunakan metode online dan/atau menerapkan protokol kesehatan	
2.19.02.2.01.08		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda**	*Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan*	11 kali	11 kali	100%			
2.19.02.2.01.06		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota**	*Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun*	11 dokumen	11 dokumen	100%			
2.19.02.2.01		Dinas Pendidikan		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	*Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat*	2 kali	2 kali	100%			
2.19.02.2.01.07		Dinas Pendidikan		**Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi**	*Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat*	2 kali	2 kali	100%			
2.19.03		Dinas Pendidikan		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	2.00%	1.80%	89.99%	Ketidaktercapaian indikator ini dikarenakan jumlah lomba yang dilaksanakan terbatas, mengingat adanya pandemi covid-19, beberapa jenis lomba tingkat nasional ditiadakan.		
		Dinas Pendidikan			Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	4.50%	3.50%	77.88%	Ketidaktercapaian indikator ini dikarenakan jumlah lomba yang dilaksanakan terbatas, mengingat adanya pandemi covid-19, dari 5 cabor yang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									dipertandingkan hanya 3 cabor.		
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	141,00 keluraha n	141,00 keluraha n	100.00%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1,690,0 0 medali	4,373,0 0 medali	258.76%			
2.19.03.2.0 1		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan*	17 unit	17 unit	100%			
2.19.03.2.0 1.03		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota**	*Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan*	17 unit	17 unit	100%			
2.19.03.2.0 3		Dinas Pendidikan		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	*Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan*	18 kali	16 kali	88.89 %	1. Kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal karena dimasa pandemi Covid-19 terdapat pembatasan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa (peserta didik) dalam rangka memutus penyebaran mata rantai Covid-19 2. Beberapa kegiatan yang mengacu pada kegiatan Propinsi dan Nasional tidak dapat di laksanakan karena juknis dari Propinsi dan Nasional belum terbit 3. Beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring/ zoom meeting	Melakukan penyesuaian konsep pelaksanaan kegiatan dengan tren penyebaran Covid-19	
		Dinas Pendidikan			*Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan*	12 kali	11 kali	91.67 %	1. Kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal karena dimasa	Melakukan penyesuaian konsep pelaksanaan kegiatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pandemi Covid-19 terdapat pembatasan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa (peserta didik) dalam rangka memutus penyebaran mata rantai Covid-19 2. Beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring/ zoom meeting	dengan tren penyebaran Covid-19	
2.19.03.2.03.03		Dinas Pendidikan		**Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota**	*Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan*	12 kali	11 kali	91.67 %	1. Kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal karena dimasa pandemi Covid-19 terdapat pembatasan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa (peserta didik) dalam rangka memutus penyebaran mata rantai Covid-19 2. Beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring/ zoom meeting	Melakukan penyesuaian konsep pelaksanaan kegiatan dengan tren penyebaran Covid-19	
2.19.03.2.03.03		Dinas Pendidikan			*Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan*	18 kali	16 kali	88.89 %	1. Kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal karena dimasa pandemi Covid-19 terdapat pembatasan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa (peserta didik) dalam rangka memutus penyebaran mata rantai Covid-19 2. Beberapa kegiatan yang mengacu pada kegiatan Propinsi dan Nasional tidak dapat di	Melakukan penyesuaian konsep pelaksanaan kegiatan dengan tren penyebaran Covid-19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									laksanakan karena juknis dari Propinsi dan Nasional belum terbit 3. Beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring/ zoom meeting		
2.19.03.2.03		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	*Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan*	1 kali	1 kali	100%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi*	2 kali	2 kali	100%			
2.19.03.2.03.03		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota**	*Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan*	1 kali	1 kali	100%			
2.19.03.2.03.03		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi*	2 kali	2 kali	100%			
2.19.03.2.05		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	*Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak*	2 kali	2 kali	100%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki*	72 unit	72 unit	100%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan*	2 jenis	2 jenis	100%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi*	13 unit	13 unit	100%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan*	2 kali	2 kali	100%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional*	17 kali	17 kali	100%			
2.19.03.2.05.05		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat**	*Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak*	2 kali	2 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.19.03.2.05.03		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi**	*Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki*	72 unit	72 unit	100%			
2.19.03.2.05.03		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi*	13 unit	13 unit	100%			
2.19.03.2.05.03		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan*	2 jenis	2 jenis	100%			
2.19.03.2.05.01		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		**Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi**	*Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan*	2 kali	2 kali	100%			
2.19.03.2.05.01		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			*Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional*	17 kali	17 kali	100%			
2.20.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	100.00%	100.00%	100.00%			
2.20.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2.20.02.2.01.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**	*Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021								
2.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	100.00%	100.00%	100.00%			
2.21.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani*	100 persen	100 persen	100%			
2.21.02.2.01.04		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani*	100 persen	100 persen	100%			
2.21.02.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian Perkotaan yang dikelola*	1389 unit	1648 unit	118.65 %			
2.21.02.2.02.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian Perkotaan yang dikelola*	1389 unit	1648 unit	118.65 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya Tahun 2021								
2.22.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	59.00%	83.33%	141.24%			
2.22.02.2.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah*	235 kali	250 kali	106.38 %			
2.22.02.2.01.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan**	*Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah*	235 kali	250 kali	106.38 %			
2.22.02.2.02		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah pelaksaan festival budaya lokal*	1 kali	1 kali	100%			
2.22.02.2.02.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya**	*Jumlah pelaksaan festival budaya lokal*	1 kali	1 kali	100%			
2.22.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	35.00%	45.00%	128.57%			
2.22.03.2.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring*	7 lokasi	11 lokasi	157.14 %			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi*	770 kali	770 kali	100%			
2.22.03.2.01.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional**	*Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring*	7 lokasi	11 lokasi	157.14 %			
2.22.03.2.01.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi*	770 kali	770 kali	100%			
2.22.04		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase cagar budaya yang terpelihara	91.69%	92.04%	100.38%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.22.04.2.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah*	3 kali	3 kali	100%			
2.22.04.2.01.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah**	*Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah*	3 kali	3 kali	100%			
2.22.05		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase cagar budaya yang terpelihara	91.69%	92.04%	100.38%			
2.22.05.2.02		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	*Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian*	250 lokasi	250 lokasi	100%			
2.22.05.2.02.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pelindungan Cagar Budaya**	*Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian*	250 lokasi	250 lokasi	100%			
2.22.06		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	76.92%	86.67%	112.67%			
2.22.06.2.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	*Jumlah museum yang dipelihara*	6 lokasi	6 lokasi	100%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah Pelaksanaan event pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum*	4 Kali	4 Kali	100%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah Museum yang disediakan sarana penunjang*	1 Lokasi	1 Lokasi	100%			
2.22.06.2.01.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu**	*Jumlah museum yang dipelihara*	6 lokasi	6 lokasi	100%			
2.22.06.2.01.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap museum**	*Jumlah Pelaksanaan event pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum*	4 Kali	4 Kali	100%			
2.22.06.2.01.04		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum**	*Jumlah Museum yang disediakan sarana penunjang*	1 Lokasi	1 Lokasi	100%			
2.23.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	94.42%	107.30%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	PERPUSTAKAAN		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021								
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
2.23.01.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.23.01.2.02.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
2.23.01.2.07		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.23.01.2.07.11		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
2.23.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	51.60%	52.97%	102.65%			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	10.00%	10.06%	100.59%			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10.00%	10.30%	103.00%			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase penambahan koleksi buku	100.00%	88.56%	88.56%	Refocusing anggaran pengadaan buku untuk penanganan pandemi covid 19 sehingga pengadaan buku diperoleh dari CSR oleh swasta/masyarakat		
2.23.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan*	470 lembaga	470 lembaga	100%			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			*Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan*	30 lembaga	34 lembaga	113.33 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			*Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat*	1494 buku	2352 buku	157.43 %			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			*Jumlah layanan baca yang dikelola*	1494 lokasi	1494 lokasi	100%			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			*Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan*	500 lembaga	543 lembaga	108.6 %			
2.23.02.2.01.05		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota**	*Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan*	470 lembaga	470 lembaga	100%			
2.23.02.2.01.04		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan**	*Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan*	30 lembaga	34 lembaga	113.33 %			
2.23.02.2.01.09		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka**	*Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat*	1494 buku	2352 buku	157.43 %			
2.23.02.2.01.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah layanan baca yang dikelola*	1494 lokasi	1494 lokasi	100%			
2.23.02.2.01.06		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan*	500 lembaga	543 lembaga	108.6 %			
2.23.02.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca*	239 kali	257 kali	107.53 %			
2.23.02.2.02.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat**	*Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca*	239 kali	257 kali	107.53 %			
2.24.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021		Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	81.5	93.39	114.59%			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	100.00%	139.88%	139.88%			
2.24.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan*	9 item	9 item	100%			
2.24.02.2.01.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis**	*Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan*	9 item	9 item	100%			
2.24.02.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan*	52 kali	56 kali	107.69 %			
2.24.02.2.02.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis**	*Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan*	52 kali	56 kali	107.69 %			
2.24.02.2.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	*Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan*	130 lembaga	130 lembaga	100%			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			*Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan*	40 kali	40 kali	100%			
2.24.02.2.03.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan*	130 lembaga	130 lembaga	100%			
2.24.02.2.03.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN**	*Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan*	40 kali	40 kali	100%			

3.1.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Pemerintah Kota Surabaya menjalankan urusan pilihan diantaranya pariwisata; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; kelautan dan perikanan; dan pertanian.

Pada tahun 2021, meskipun terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil memaksimalkan pengembangan potensi dan kekhasan daerah dimana terlihat dari banyaknya program dan kegiatan yang telah mencapai target yang ditentukan dan capaiannya lebih dari 100%. Berikut merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pilihan pada tahun 2021.

Tabel 3.15
Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.25.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16.00%	16.25%	101.58%			
3.25.03.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipelihara dan diadakan*	48 unit	48 unit	100%			
3.25.03.2.01.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipelihara dan diadakan*	48 unit	48 unit	100%			
3.25.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	62.12%	85.09%	136.98%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16.00%	16.25%	101.58%			
3.25.04.2.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan*	15 kali	15 kali	100%			
3.25.04.2.02.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan*	15 kali	15 kali	100%			
3.25.04.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dipelihara dan diadakan*	553 unit	553 unit	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.25.04.2.04.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dipelihara dan diadakan*	553 unit	553 unit	100%			
3.26.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pariwisata	65.00%	96.70%	148.77%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	10.70%	27.79%	259.69%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	76.92%	86.67%	112.67%			
3.26.02.2.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel*	39 kali	39 kali	100%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda*	13 kali	13 kali	100%			
3.26.02.2.01.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel*	39 kali	39 kali	100%			
3.26.02.2.01.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda*	13 kali	13 kali	100%			
3.26.02.2.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang*	2 lokasi	2 lokasi	100%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang*	2 lokasi	2 lokasi	100%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan Destinasi Wisata*	2 kali	2 kali	100%			
3.26.02.2.03.04		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang*	2 lokasi	2 lokasi	100%			
3.26.02.2.03.04		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang*	2 lokasi	2 lokasi	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.26.02.2.03.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surabaya Tahun 2021	**Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**	*Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan Destinasi Wisata*	2 kali	2 kali	100%			
3.26.02.2.04		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses*	292 berkas	292 berkas	100%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses*	84 berkas	60 berkas	71.43 %	1. Adanya penyesuaian kewenangan perizinan RHU mengacu kepadaPeraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 2. Kondisi pandemi COVID 19 mengakibatkan usaha RHU tidak beroperasional	Menyesuaikan besaran target kegiatan mengacu kepada aturan baru / kewenangan yang berlaku	
3.26.02.2.04.02		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota**	*Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses*	292 berkas	292 berkas	100%			
3.26.02.2.04.02		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses*	84 berkas	60 berkas	71.43 %	1. Adanya penyesuaian kewenangan perizinan RHU mengacu kepadaPeraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 2. Kondisi pandemi COVID 19 mengakibatkan usaha RHU tidak beroperasional	Menyesuaikan besaran target kegiatan mengacu kepada aturan baru / kewenangan yang berlaku	
3.26.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	10.70%	27.79%	259.69%			
3.26.03.2.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti*	12 kali	12 kali	100%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah fasilitasi promosi wisata*	93 kali	93 kali	100%			
3.26.03.2.01.02		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik**	*Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti*	12 kali	12 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota							
3.26.03.2.01.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah fasilitasi promosi wisata*	93 kali	93 kali	100%			
3.26.05		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	12.00%	12.04%	100.31%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	76.92%	86.67%	112.67%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	100.00%	320.00%	320.00%			
3.26.05.2.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan*	1 kali	1 kali	100%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi*	6 lokasi	6 lokasi	100%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata*	6 kali	6 kali	100%			
3.26.05.2.01.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	*Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan*	1 kali	1 kali	100%			
3.26.05.2.01.02		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	*Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata*	6 kali	6 kali	100%			
3.26.05.2.01.02		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			*Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi*	6 lokasi	6 lokasi	100%			
3.26.05.2.01		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif*	300 orang	300 orang	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.26.05.2.01.06		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif*	300 orang	300 orang	100%			
3.27.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80.00%	85.86%	107.32%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	17.00%	30.19%	177.57%			
3.27.02.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan*	216 Orang	216 Orang	100%			
3.27.02.2.01.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan*	216 Orang	216 Orang	100%			
3.27.02.2.05		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan*	5 jenis	5 jenis	100%			
3.27.02.2.05.05		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan*	5 jenis	5 jenis	100%			
3.27.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	88.50%	88.51%	100.01%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80.00%	85.86%	107.32%			
3.27.04.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis*	1408 kali	1412 kali	100.28 %			
3.27.04.2.01.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	*Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis*	1408 kali	1412 kali	100.28 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.27.04.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Surabaya Tahun 2021	**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	*Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan*	4 kali	4 kali	100%			
3.27.04.2.04.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan**	*Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan*	4 kali	4 kali	100%			
3.27.06		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pertanian	80.00%	98.89%	123.61%			
3.27.06.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses*	220 berkas	290 berkas	131.82 %			
3.27.06.2.01.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian**	*Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses*	220 berkas	290 berkas	131.82 %			
3.27.07		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80.00%	83.53%	104.42%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	17.00%	30.19%	177.57%			
3.27.07.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	*Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura*	200 orang	200 orang	100%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			*Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian*	125 orang	125 orang	100%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			*Jumlah jenis sarana dan prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disediakan dan dipelihara*	5 jenis	5 jenis	100%			
3.27.07.2.01.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**	*Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura*	200 orang	200 orang	100%			
3.27.07.2.01.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan**	*Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian*	125 orang	125 orang	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pertanian di Kecamatan dan Desa							
3.27.07.2.01.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah jenis sarana dan prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disediakan dan dipelihara*	5 jenis	5 jenis	100%			
3.30.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	85.40%	97.05%	adanya rasionalisasi anggaran sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran	Perlu adanya komitmen dalam memberikan pelayanan administrasi perkantoran dengan sebaik-baiknya dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan guna supporting seluruh pelaksanaan kegiatan serta adanya dukungan anggaran APBD Kota Surabaya tahun berikutnya yang menjamin ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran terpenuhi dengan baik.	
		Dinas Perdagangan			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
3.30.01.2.02		Dinas Perdagangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
3.30.01.2.02.01		Dinas Perdagangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
3.30.01.2.08		Dinas Perdagangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
3.30.01.2.08.03		Dinas Perdagangan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
3.30.02		Dinas Perdagangan		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan	80.00%	97.92%	122.40%			
3.30.02.2.01		Dinas Perdagangan		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat	*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*	340 Berkas	365 Berkas	107.35 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							
3.30.02.2.01.01		Dinas Perdagangan		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*	340 Berkas	365 Berkas	107.35 %			
3.30.02.2.02		Dinas Perdagangan		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya*	1200 Lembaga	1227 Lembaga	102.25 %			
3.30.02.2.02.01		Dinas Perdagangan		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya*	1200 Lembaga	1227 Lembaga	102.25 %			
3.30.02.2.03		Dinas Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*	55 Berkas	55 Berkas	100%			
3.30.02.2.03.01		Dinas Perdagangan		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*	55 Berkas	55 Berkas	100%			
3.30.02.2.04		Dinas Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*	5 Berkas	5 Berkas	100%			
3.30.02.2.04.02		Dinas Perdagangan		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	*Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan*	5 Berkas	5 Berkas	100%			
3.30.02.2.05		Dinas Perdagangan		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya*	352 Lembaga	370 Lembaga	105.11 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.30.02.2.05.01		Dinas Perdagangan		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	*Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya*	352 Lembaga	370 Lembaga	105.11 %			
3.30.03		Dinas Perdagangan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan	17,00 kali	19,00 kali	111.76%			
3.30.03.2.02		Dinas Perdagangan		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina*	31 Kelompok	31 Kelompok	100%			
		Dinas Perdagangan			*Jumlah gudang yang dimonitor*	300 Lokasi	385 Lokasi	128.33 %			
3.30.03.2.02.01		Dinas Perdagangan		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina*	31 Kelompok	31 Kelompok	100%			
3.30.03.2.02.01		Dinas Perdagangan			*Jumlah gudang yang dimonitor*	300 Lokasi	385 Lokasi	128.33 %			
3.30.04		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75.00%	100.00%	133.33%			
		Dinas Perdagangan			Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	31,00 kali per kejadian	54,80 kali per kejadian	176.77%			
		Dinas Perdagangan			Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	85.00%	94.18%	110.80%			
3.30.04.2.02		Dinas Perdagangan		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan*	205 Kali	274 Kali	133.66 %			
		Dinas Perdagangan			*Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan*	12 Kali	12 Kali	100%			
3.30.04.2.02.03		Dinas Perdagangan		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan*	205 Kali	274 Kali	133.66 %			
3.30.04.2.02.01		Dinas Perdagangan		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	*Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan*	12 Kali	12 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*penting lainnya yang diselenggarakan*						
3.30.04.2.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau*	1 kali	1 kali	100%			
3.30.04.2.02.03		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau*	1 kali	1 kali	100%			
3.30.06		Dinas Perdagangan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	90.00%	100.00%	111.11%			
3.30.06.2.01		Dinas Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan*	16 Jenis	16 Jenis	100%			
		Dinas Perdagangan			*Jumlah alat UTTP yang dilayani*	24570 Unit	25164 Unit	102.42 %			
		Dinas Perdagangan			*Jumlah alat UTTP yang diawasi*	4500 Unit	4685 Unit	104.11 %			
3.30.06.2.01.01		Dinas Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	*Jumlah alat UTTP yang dilayani*	24570 Unit	25164 Unit	102.42 %			
3.30.06.2.01.01		Dinas Perdagangan			*Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan*	16 Jenis	16 Jenis	100%			
3.30.06.2.01.02		Dinas Perdagangan		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah alat UTTP yang diawasi*	4500 Unit	4685 Unit	104.11 %			
3.30.07		Dinas Perdagangan		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran produk	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	67.60%	84.79%	125.43%			
3.30.07.2.01		Dinas Perdagangan		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola*	15 Lokasi	15 Lokasi	100%			
		Dinas Perdagangan			*Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro*	820 orang	1439 orang	175.49 %			
3.30.07.2.01.01		Dinas Perdagangan		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam	*Jumlah Sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola*	15 Lokasi	15 Lokasi	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
3.30.07.2.01.02		Dinas Perdagangan		**Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota**	*Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro*	820 orang	1439 orang	175.49 %			
3.30.07.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	*Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan*	41 kali	41 kali	100%			
3.30.07.2.01.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota**	*Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan*	41 kali	41 kali	100%			

3.1.2.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verfikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur pendukung urusan pemerintahan ini merupakan unsur yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya.

Tabel 3.16
Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Organisasi	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase instansi yang memiliki POS sesuai probis	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Organisasi			Persentase instansi yang probisnya telah menggambarkan keterhubungan antar proses	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Organisasi			Persentase kinerja unit penyelenggara pelayanan yang minimal mutu pelayanannya kategori baik	70.00%	99.61%	142.30%			
		Bagian Umum Dan Protokol			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Hubungan Masyarakat			Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85.00%	90.97%	107.02%			
		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	90.00%	92.56%	102.85%			
		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			Persentase pemanfaatan aset	97.00%	99.27%	102.34%			
		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Organisasi			Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal BB	100.00%	97.22%	97.22%	Kurangnya SDM yang memahami pelaksanaan SAKIP pada perangkat daerahnya.	Perlu pendampingan lebih intensif tiap PD	
		Bagian Umum Dan Protokol			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021								
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	96.71%	109.90%			
		Bagian Hukum			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	95.73%	108.78%			
		Bagian Organisasi			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	84.78%	96.34%	Adanya refocusing anggaran penyediaan pelayanan administrasi perkantoran.	Pemenuhan Kebutuhan anggaran untuk penyediaan administrasi perkantoran	
		Bagian Administrasi Kerjasama			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.26%	100.30%			
		Bagian Administrasi Pembangunan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	94.60%	107.50%			
		Bagian Umum Dan Protokol			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.12%	103.55%			
		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	96.01%	109.10%			
		Bagian Hubungan Masyarakat			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.86%	106.66%			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	89.37%	101.56%			
		Satuan Polisi Pamong Praja			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	97.66%	110.98%			
		Kec. Simokerto			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	94.00%	106.82%			
		Kec. Kenjeran			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	96.42%	109.57%			
		Kec. Krembangan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.89%	105.56%			
		Kec. Rungkut			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.78%	99.75%	Belum optimalnya pemberian pelayanan barang jasa perkantoran dan kerjasama antar	Menjalin komunikasi yang intensif antar personil di kecamatan dan kelurahan agar dapat bekerjasama	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									personil di Kecamatan dan kelurahan	dengan baik dalam meningkatkan pelayanan barang jasa perkantoran	
		Kec. Gunung Anyar			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.18%	105.89%			
		Kec. Sukolilo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.82%	105.48%			
		Kec. Karangpilang			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.81%	103.19%			
		Kec. Tandes			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.14%	102.43%			
		Kec. Pakal			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.38%	102.70%			
		Dinas Tenaga Kerja			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.57%	105.19%			
		Dinas Pemadam Kebakaran			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.18%	104.75%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.39%	102.72%			
		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.21%	102.51%			
		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	89.72%	101.95%			
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Administrasi Kerjasama			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Rungkut			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukolilo			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Tandes			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Hukum			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Organisasi			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Umum Dan Protokol			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Hubungan Masyarakat			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Simokerto			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Krembangan			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gubeng			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Dukuh Pakis			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Tenaga Kerja			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
4.01.01.2.01		Bagian Umum Dan Protokol		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.01.2.01.01		Bagian Umum Dan Protokol		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
4.01.01.2.02		Bagian Administrasi Pembangunan		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Bagian Administrasi Pembangunan		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Dinas Pemadam Kebakaran		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Dinas Pemadam Kebakaran		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Kec. Simokerto		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Kec. Simokerto		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Bagian Organisasi		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Bagian Organisasi		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Kec. Tandes		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Kec. Tandes		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Kec. Gunung Anyar		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Kec. Gunung Anyar		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Kec. Sukolilo		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.01.2.02.01		Kec. Sukolilo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Bagian Umum Dan Protokol		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Bagian Umum Dan Protokol		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Kec. Pakal		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Kec. Pakal		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Kec. Rungkut		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Kec. Rungkut		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Dinas Tenaga Kerja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Dinas Tenaga Kerja		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Kec. Karangpilang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Kec. Karangpilang		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Kec. Krembangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Kec. Krembangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.01.2.02		Bagian Hubungan Masyarakat		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Bagian Hubungan Masyarakat		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Bagian Administrasi Kerjasama		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Bagian Administrasi Kerjasama		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Bagian Hukum		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Bagian Hukum		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Kec. Kenjeran		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Kec. Kenjeran		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.05		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	*Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan*	776 stel	598 stel	77.06 %	Adanya efisiensi dimasa pandemi dengan memperhatikan prioritas pelaksanaan kegiatan	Perlu melakukan pemusatan pengadaan skala kota untuk pakaian dinas	
4.01.01.2.05.02		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	*Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan*	776 stel	598 stel	77.06 %	Adanya efisiensi dimasa pandemi dengan memperhatikan prioritas pelaksanaan kegiatan	Perlu melakukan pemusatan pengadaan skala kota untuk pakaian dinas	
4.01.01.2.06		Bagian Hukum		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.06.02		Bagian Hukum		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.06		Bagian Organisasi		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.01.2.06.02		Bagian Organisasi		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.07		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	*Jumlah sarana kedinasan yang diadakan*	1370 unit	1832 unit	133.72 %			
		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.07.06		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	*Jumlah sarana kedinasan yang diadakan*	1370 unit	1832 unit	133.72 %			
4.01.01.2.07.10		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.08		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.08.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.08		Badan Kepegawaian dan Diklat		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.08.04		Badan Kepegawaian dan Diklat		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.08		Bagian Hubungan Masyarakat		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.08.03		Bagian Hubungan Masyarakat		**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Bagian Administrasi Pembangunan		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.11		Bagian Administrasi Pembangunan		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Kec. Tandes		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.10		Kec. Tandes		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.01.2.09		Bagian Administrasi Kerjasama		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.11		Bagian Administrasi Kerjasama		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Kec. Sukolilo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.10		Kec. Sukolilo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Satuan Polisi Pamong Praja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.11		Satuan Polisi Pamong Praja		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.06		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Bagian Organisasi		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.11		Bagian Organisasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Kec. Simokerto		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.11		Kec. Simokerto		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.01.2.09		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.11		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya*	2897 unit	2426 unit	83.74 %	Belum tersusunnya secara periodik dan berkala terhadap kebutuhan perawatan kendaraan operasional sesuai dengan jadwal dan data riwayat perawatan kendaraan.	Perlu dilakukan penjadwalan pemeliharaan dan penjadwalan pengurusan administrasi tiap-tiap kendaraan	
4.01.01.2.09.01		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	*Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya*	2897 unit	2426 unit	83.74 %	Belum tersusunnya secara periodik dan berkala terhadap kebutuhan perawatan kendaraan operasional sesuai dengan jadwal dan data riwayat perawatan kendaraan.	Perlu dilakukan penjadwalan pemeliharaan dan penjadwalan pengurusan administrasi tiap-tiap kendaraan	
4.01.01.2.09		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.10		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Dinas Tenaga Kerja		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.06		Dinas Tenaga Kerja		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Kec. Gubeng		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.10		Kec. Gubeng		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.01.2.09		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.11		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Kec. Rungkut		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.10		Kec. Rungkut		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Kec. Krembangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.10		Kec. Krembangan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Bagian Umum Dan Protokol		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.11		Bagian Umum Dan Protokol		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Bagian Hukum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.11		Bagian Hukum		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09		Kec. Dukuh Pakis		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.11		Kec. Dukuh Pakis		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.01.2.11		Bagian Umum Dan Protokol		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	*Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan dana penunjang operasional*	2 Orang	2 Orang	100%			
		Bagian Umum Dan Protokol			*Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan gaji dan/atau tunjangan*	2 Orang	2 Orang	100%			
4.01.01.2.11.04		Bagian Umum Dan Protokol		**Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	*Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan dana penunjang operasional*	2 Orang	2 Orang	100%			
4.01.01.2.11.01		Bagian Umum Dan Protokol		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	*Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan gaji dan/atau tunjangan*	2 Orang	2 Orang	100%			
4.01.01.2.13		Bagian Organisasi		**Penataan Organisasi**	*Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan monitoring*	254 lembaga	254 lembaga	100%			
		Bagian Organisasi			*Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat*	254 lembaga	254 lembaga	100%			
		Bagian Organisasi			*Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Bagian Organisasi			*Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Bagian Organisasi			*Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
		Bagian Organisasi			*Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi*	155 POS	246 POS	158.71 %			
4.01.01.2.13.04		Bagian Organisasi		**Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	*Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan monitoring*	254 lembaga	254 lembaga	100%			
4.01.01.2.13.04		Bagian Organisasi			*Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat*	254 lembaga	254 lembaga	100%			
4.01.01.2.13.01		Bagian Organisasi		**Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	*Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.01.2.13.01		Bagian Organisasi			*Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
4.01.01.2.13.03		Bagian Organisasi		**Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**	*Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
4.01.01.2.13.03		Bagian Organisasi			*Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi*	155 POS	246 POS	158.71 %			
4.01.01.2.14		Bagian Hubungan Masyarakat		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	*Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun*	7 dokumen	8 dokumen	114.29 %			
4.01.01.2.14.03		Bagian Hubungan Masyarakat		**Pendokumentasian Tugas Pimpinan**	*Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun*	7 dokumen	8 dokumen	114.29 %			
4.01.01.2.14		Bagian Umum Dan Protokol		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	*Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	100%	100%	100%			
4.01.01.2.14.01		Bagian Umum Dan Protokol		**Fasilitasi Keprotokolan**	*Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	100%	100%	100%			
4.01.02		Dinas Sosial		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Sosial			Persentase data kesejahteraan sosial yang termanfaatkan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	100.00%	105.13%	105.13%			
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	64.52%	51.61%	80.00%	(1) Adanya permasalahan batas dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas yang disebabkan oleh faktor eksternal karena masih adanya perbedaan pemahaman terkait	Perlu memberikan pemahaman dan koordinasi yang lebih baik kepada tokoh masyarakat	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									batas wilayah diantara tokoh masyarakat; (2) Koordinasi dengan tokoh masyarakat yang belum maksimal karena adanya pandemi covid-19.		
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	60.00%	100.00%	166.67%			
		Bagian Hukum			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Hukum			Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Hukum			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Hukum			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Administrasi Kerjasama			Persentase MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Administrasi Kerjasama			Persentase MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Administrasi Kerjasama			Persentase MoU kerjasama yang dievaluasi	100.00%	151.43%	151.43%			
4.01.02.2.01		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		**Administrasi Tata Pemerintahan**	*Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			*Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan*	16 kali	16 kali	100%			
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			*Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan*	1 kali	1 kali	100%			
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			*Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan*	185 lembaga	185 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			*Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			*Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan Kota Surabaya*	420 kali	510 kali	121.43 %			
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			*Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan*	115 Objek	124 Objek	107.83 %			
4.01.02.2.01.03		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		**Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**	*Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
4.01.02.2.01.03		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			*Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan*	16 kali	16 kali	100%			
4.01.02.2.01.01		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		**Penataan Administrasi Pemerintahan**	*Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan*	1 kali	1 kali	100%			
4.01.02.2.01.01		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			*Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan*	185 lembaga	185 lembaga	100%			
4.01.02.2.01.02		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		**Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**	*Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan*	115 Objek	124 Objek	107.83 %			
4.01.02.2.01.02		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			*Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
4.01.02.2.01.02		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			*Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan Kota Surabaya*	420 kali	510 kali	121.43 %			
4.01.02.2.02		Dinas Sosial		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	*Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi*	12 kali	12 kali	100%			
		Dinas Sosial			*Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi*	12 kali	12 kali	100%			
		Dinas Sosial			*Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi*	12 kali	12 kali	100%			
		Dinas Sosial			*Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi*	4 kali	4 kali	100%			
4.01.02.2.02.03		Dinas Sosial		**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat**	*Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi*	12 kali	12 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.02.2.02.03		Dinas Sosial			*Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi*	12 kali	12 kali	100%			
4.01.02.2.02.03		Dinas Sosial			*Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi*	12 kali	12 kali	100%			
4.01.02.2.02.02		Dinas Sosial		**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial**	*Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi*	4 kali	4 kali	100%			
4.01.02.2.02		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat			*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang ketahanan masyarakat yang disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat			*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
4.01.02.2.02.01		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		**Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**	*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.02.2.02.03		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat**	*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang ketahanan masyarakat yang disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.02.2.02.02		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial**	*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
4.01.02.2.03		Bagian Hukum		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	*Jumlah permasalahan hukum yang ditangani*	65 permasalahan hukum	65 permasalahan hukum	100%			
		Bagian Hukum			*Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
		Bagian Hukum			*Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun*	70 rancangan produk hukum	137 rancangan produk hukum	195.71 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Bagian Hukum			*Jumlah produk hukum yang dipublikasi*	70 produk hukum	137 produk hukum	195.71 %			
4.01.02.2.03.02		Bagian Hukum		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	*Jumlah permasalahan hukum yang ditangani*	65 permasalahan hukum	65 permasalahan hukum	100%			
4.01.02.2.03.01		Bagian Hukum		**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**	*Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
4.01.02.2.03.01		Bagian Hukum			*Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun*	70 rancangan produk hukum	137 rancangan produk hukum	195.71 %			
4.01.02.2.03.03		Bagian Hukum		**Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**	*Jumlah produk hukum yang dipublikasi*	70 produk hukum	137 produk hukum	195.71 %			
4.01.02.2.04		Bagian Administrasi Kerjasama		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	*Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi*	35 lembaga	37 lembaga	105.71 %			
		Bagian Administrasi Kerjasama			*Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang difasilitasi*	20 lembaga	26 lembaga	130%			
		Bagian Administrasi Kerjasama			*Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi*	88 orang	150 orang	170.45 %			
		Bagian Administrasi Kerjasama			*Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi*	10 lembaga	19 lembaga	190%			
4.01.02.2.04.03		Bagian Administrasi Kerjasama		**Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama**	*Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi*	35 lembaga	37 lembaga	105.71 %			
4.01.02.2.04.01		Bagian Administrasi Kerjasama		**Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri**	*Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang difasilitasi*	20 lembaga	26 lembaga	130%			
4.01.02.2.04.02		Bagian Administrasi Kerjasama		**Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri**	*Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi*	10 lembaga	19 lembaga	190%			
4.01.02.2.04.02		Bagian Administrasi Kerjasama			*Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi*	88 orang	150 orang	170.45 %			
4.01.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan di gedung milik pemerintah kota	49,00 unit	77,00 unit	157.14%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			Persentase BUMD yang berhasil dibina	78.00%	100.00%	128.21%			
		Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	83.50%	78.79%	94.36%	Pemenuhan pelaksanaan kegiatan guna menunjang capaian sub kegiatan s/d bulan Desember dan memperhatikan prioritas pelaksanaan kegiatan		
		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			Persentase pemanfaatan aset	97.00%	99.27%	102.34%			
		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100.00%	100.00%	100.00%			
		RSUD Bhakti Dharma Husada			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.02%	98.89%	Masih belum optimalnya pemberian pelayanan sarpras dan barjas perkantoran untuk seluruh karyawan karyawati RSUD Bhakti Dharma Husada dikarenakan masih harus dilakukannya peningkatan kualitas SDM dalam pemberian pelayanan secara berkesinambungan agar SDM memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, memberikan peningkatan pelayanan dari tahun ke tahun		
		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	96.71%	109.90%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Bagian Administrasi Kerjasama			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.26%	100.30%			
		Bagian Administrasi Pembangunan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	94.60%	107.50%			
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.37%	102.69%			
		Bagian Umum Dan Protokol			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.12%	103.55%			
		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	96.01%	109.10%			
		Bagian Hubungan Masyarakat			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.86%	106.66%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	94.54%	107.43%			
		Inspektorat			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.70%	100.80%			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.91%	101.03%			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	89.37%	101.56%			
		Satuan Polisi Pamong Praja			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	97.66%	110.98%			
		Kec. Genteng			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.81%	103.19%			
		Kec. Simokerto			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	94.00%	106.82%			
		Kec. Tegalsari			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.63%	105.26%			
		Kec. Bubutan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	89.11%	101.26%			
		Kec. Kenjeran			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	96.42%	109.57%			
		Kec. Pabean Cantian			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.87%	104.40%			
		Kec. Semampir			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	89.71%	101.94%			
		Kec. Krembangan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.89%	105.56%			
		Kec. Tambaksari			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.17%	104.74%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Gubeng			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.00%	104.55%			
		Kec. Rungkut			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.78%	99.75%	Belum optimalnya pemberian pelayanan barang jasa perkantoran dan kerjasama antar personil di Kecamatan dan kelurahan	Menjalin komunikasi yang intensif antar personil di kecamatan dan kelurahan agar dapat bekerjasama dengan baik dalam meningkatkan pelayanan barang jasa perkantoran	
		Kec. Gunung Anyar			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.18%	105.89%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.74%	99.70%	Belum optimalnya pemberian pelayanan barang jasa perkantoran dan kerjasama antar personil di Kecamatan dan kelurahan	Menjalin komunikasi yang intensif antar personil di kecamatan dan kelurahan agar dapat bekerjasama dengan baik dalam meningkatkan pelayanan barang jasa perkantoran	
		Kec. Sukolilo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.82%	105.48%			
		Kec. Mulyorejo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.15%	103.58%			
		Kec. Wonokromo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.43%	106.17%			
		Kec. Karangpilang			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.81%	103.19%			
		Kec. Dukuh Pakis			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.88%	104.41%			
		Kec. Gayungan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.10%	105.80%			
		Kec. Jambangan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.53%	106.28%			
		Kec. Wonocolo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.82%	103.20%			
		Kec. Sawahan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.26%	105.98%			
		Kec. Wiyung			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	95.12%	108.09%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Tandes			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.14%	102.43%			
		Kec. Asemrowo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	94.09%	106.92%			
		Kec. Sukomanunggal			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.58%	105.20%			
		Kec. Benowo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.06%	104.61%			
		Kec. Lakarsantri			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.88%	104.41%			
		Kec. Sambikerep			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	95.53%	108.56%			
		Kec. Pakal			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.38%	102.70%			
		Kec. Bulak			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.17%	104.74%			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.08%	105.77%			
		Dinas Perdagangan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	85.40%	97.05%	adanya rasionalisasi anggaran sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran	adanya rasionalisasi anggaran sehingga disebabkan untuk percepatan penanggulangan pendemi covid 19	
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.91%	103.31%			
		Dinas Tenaga Kerja			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.57%	105.19%			
		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	84.29%	95.78%	Beberapa pemenuhan sarana prasarana masih dalam proses pengadaan yang membutuhkan waktu dan koordinasi		
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	94.42%	107.30%			
		Dinas Pendidikan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.47%	103.94%			
		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.25%	103.69%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Masyarakat									
		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.84%	105.50%			
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.90%	99.89%	Adanya penyesuaian anggaraan dan prioritas pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat dari terjadinya pandemi COVID-19		
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	89.33%	101.51%			
		Dinas Pemadam Kebakaran			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.18%	104.75%			
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.99%	99.99%	Sehubungan dengan adanya refocusing/rasionalisasi anggaran sebagai dampak pandemi covid 19 sehingga adanya penyesuaian kebutuhan dan prioritas		
		Dinas Komunikasi dan Informatika			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.61%	100.69%			
		Dinas Perhubungan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.66%	104.16%			
		Dinas Lingkungan Hidup			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.01%	98.88%	Pelaksanaan kegiatan terkendala karena adanya kondisi pandemik Covid-19, dan adanya prioritas pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak memadai umtuk memenuhi sarana dan prasarana perkantoran	akan ditingkatkan pelayanan untuk ketersediaan dan kualitas ATK,penyediaan sarana dan prasarana rapat, kebersihan lokasi kerja, ketersediaan dan kualitas sarana penunjang kerja dan keamanan kantor, ketersediaan dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										kualitas pelayanan kelistrikan, ketersediaan air bersih, ketersediaan sarana komunikasi	
		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.62%	102.98%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.70%	100.80%			
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.39%	102.72%			
		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.21%	102.51%			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.81%	100.92%			
		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	89.72%	101.95%			
		Dinas Sosial			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
4.01.03.2.01		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	*Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi*	9 BUMD	9 BUMD	100%			
		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			*Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah*	12 laporan	12 laporan	100%			
		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			*Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro*	4 dokumen	4 dokumen	100%			
		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			*Jumlah pelaksanaan operasi pasar dalam rangka pengawasan rokok dan pita cukai ilegal*	6 kali	5 kali	83.33 %	Perlunya dukungan dan pendampingan dari berbagai pihak dan dari instansi	Perlu melakukan koordinasi lebih intensif terhadap semua pihak/instansi dalam pelaksanaan operasi pasar pengawasan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										rokok dan pita cukai ilegal	
4.01.03.2.01.01		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah		**Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**	*Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi*	9 BUMD	9 BUMD	100%			
4.01.03.2.01.02		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah		**Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	*Jumlah pelaksanaan operasi pasar dalam rangka pengawasan rokok dan pita cukai ilegal*	6 kali	5 kali	83.33 %	Perlunya dukungan dan pendampingan dari berbagai pihak dan dari instansi	Perlu melakukan koordinasi lebih intensif terhadap semua pihak/instansi dalam pelaksanaan operasi pasar pengawasan rokok dan pita cukai ilegal	
4.01.03.2.01.02		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			*Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah*	12 laporan	12 laporan	100%			
4.01.03.2.01.03		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah		**Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil**	*Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro*	4 dokumen	4 dokumen	100%			
4.01.03.2.02		Bagian Administrasi Pembangunan		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	*Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun*	6 dokumen	6 dokumen	100%			
		Bagian Administrasi Pembangunan			*Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun*	16 dokumen	16 dokumen	100%			
		Bagian Administrasi Pembangunan			*Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara*	6 sistem	6 sistem	100%			
		Bagian Administrasi Pembangunan			*Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya*	72 lembaga	72 lembaga	100%			
4.01.03.2.02.01		Bagian Administrasi Pembangunan		**Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan**	*Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun*	6 dokumen	6 dokumen	100%			
4.01.03.2.02.03		Bagian Administrasi Pembangunan		**Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	*Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun*	16 dokumen	16 dokumen	100%			
4.01.03.2.02.02		Bagian Administrasi Pembangunan		**Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan**	*Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara*	6 sistem	6 sistem	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.03.2.02.02		Bagian Administrasi Pembangunan			*Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya*	72 lembaga	72 lembaga	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Dukuh Pakis		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Dukuh Pakis		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Genteng		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Genteng		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Wonocolo		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Wonocolo		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Gayungan		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Gayungan		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Bagian Hubungan Masyarakat		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Bagian Hubungan Masyarakat		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.03.2.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Sukomanunggal		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Sukomanunggal		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Gubeng		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Gubeng		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Bulak		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Bulak		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Bagian Administrasi Kerjasama		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Bagian Administrasi Kerjasama		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Semampir		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Semampir		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Kenjeran		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Kenjeran		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Mulyorejo		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Mulyorejo		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Pendidikan		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	75%	75%	Belum optimalnya pemanfaatan sistem inventarisasi barang dan jasa perkantoran	Melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem inventarisasi barang dan jasa perkantoran	
4.01.03.2.03.01		Dinas Pendidikan		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	75%	75%	Belum optimalnya pemanfaatan sistem inventarisasi barang dan jasa perkantoran	Melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem inventarisasi barang dan jasa perkantoran	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.03.2.03		Kec. Simokerto		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Simokerto		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Badan Kepegawaian dan Diklat		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Badan Kepegawaian dan Diklat		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Tenaga Kerja		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Tenaga Kerja		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Karangpilang		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Karangpilang		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan*	304 dokumen	324 dokumen	106.58 %			
		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.03		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan*	304 dokumen	324 dokumen	106.58 %			
4.01.03.2.03.01		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Bagian Administrasi Pembangunan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.03.2.03.01		Bagian Administrasi Pembangunan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Pemadam Kebakaran		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Pemadam Kebakaran		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Sambikerep		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Sambikerep		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Perhubungan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Perhubungan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Asemrowo		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Asemrowo		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.03.2.03		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Jambangan		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Jambangan		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		RSUD Bhakti Dharma Husada		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Tandes		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Tandes		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Benowo		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.03.2.03.01		Kec. Benowo		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Lakarsantri		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Lakarsantri		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Sukolilo		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Sukolilo		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Gunung Anyar		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Gunung Anyar		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Inspektorat		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Inspektorat		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Tegalsari		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Tegalsari		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Bagian Umum Dan Protokol		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Bagian Umum Dan Protokol		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Pakal		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Pakal		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Rungkut		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Rungkut		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Sawahan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Sawahan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perempuan dan Perlindungan Anak									
4.01.03.2.03.01		Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Lingkungan Hidup		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Lingkungan Hidup		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Perdagangan		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Perdagangan		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Wonokromo		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Wonokromo		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Pabean Cantian		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Pabean Cantian		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Satuan Polisi Pamong Praja		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Satuan Polisi Pamong Praja		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Komunikasi dan Informatika			*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Komunikasi dan Informatika			*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Wiyung		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Wiyung		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Bubutan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Bubutan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Tambaksari		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Tambaksari		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Badan Perencanaan Pembangunan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Badan Perencanaan Pembangunan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Kec. Krembangan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Kec. Krembangan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03		Dinas Sosial		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
		Dinas Sosial			*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Sosial		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.01.03.2.03.01		Dinas Sosial			*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.03.2.04		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	*Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan*	3 unit	3 unit	100%			
4.01.03.2.04.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		**Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air**	*Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan*	3 unit	3 unit	100%			
4.02.01	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100.00%	99.73%	99.73%	sebagian besar kegiatan sudah terlaksana, tetapi dalam 9 bulan terakhir ada beberapa keiatan yang tidak maksimal dikarenakan akibat pandemi covid19 dengan adanya Inovasi dalam pelayanan selama pandemi, sehingga meskipun ada keterbatasan tetap dapat memfasilitasi kegiatan DPRD, antara lain rapat secara daring, reses daring. Selain itu adanya alternatif penyedia publikasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD.		
		Sekretariat DPRD			Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Sekretariat DPRD			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.51%	102.85%			
		Sekretariat DPRD			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
4.02.01.2.02		Sekretariat DPRD		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.02.01.2.02.01		Sekretariat DPRD	Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
4.02.01.2.06		Sekretariat DPRD		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.02.01.2.06.02		Sekretariat DPRD		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran*	100%	100%	100%			
4.02.01.2.09		Sekretariat DPRD		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.02.01.2.09.10		Sekretariat DPRD		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
4.02.01.2.14		Sekretariat DPRD		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD*	185 kali	188 kali	101.62 %			
		Sekretariat DPRD			*Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan*	264 kali	253 kali	95.83 %	sesuai dengan realisasi kegiatan keamanan, terjadawal tanggal efektif kerja.		
		Sekretariat DPRD			*Jumlah studi banding yang difasilitasi*	240 kali	218 kali	90.83 %	sesuai kehadiran tamu dari DPRD KOTA / KABUPATEN dan Propinsi yang berkunjung ke DPRD Kota Surabaya dan dikarenakan adanya PPKM		
4.02.01.2.14.01		Sekretariat DPRD		Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan*	264 kali	253 kali	95.83 %	sesuai dengan realisasi kegiatan keamanan, terjadawal tanggal efektif kerja.		
4.02.01.2.14.01		Sekretariat DPRD			*Jumlah studi banding yang difasilitasi*	240 kali	218 kali	90.83 %	sesuai kehadiran tamu dari DPRD KOTA / KABUPATEN dan Propinsi yang berkunjung ke DPRD Kota Surabaya dan dikarenakan adanya PPKM		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.02.01.2.14.01		Sekretariat DPRD			*Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD*	185 kali	188 kali	101.62 %			
4.02.01.2.15		Sekretariat DPRD		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan DPRD*	100%	100%	100%			
4.02.01.2.15.01		Sekretariat DPRD		**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan DPRD*	100%	100%	100%			
4.02.01.2.16		Sekretariat DPRD		**Layanan Administrasi DPRD**	*Jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan*	45 kali	50 kali	111.11 %			
		Sekretariat DPRD			*Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan*	930 kali	910 kali	97.85 %	Rapat pembahasan di AKD tergantung pengajuan masyarakat yang masuk sehingga tidak bisa terjadwal; seringkali jadwal kegiatan berbenturan dengan jadwal kegiatan DPRD lainnya; regulasi yang berubah-ubah;		
4.02.01.2.16.03		Sekretariat DPRD		**Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD**	*Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan*	930 kali	910 kali	97.85 %	Rapat pembahasan di AKD tergantung pengajuan masyarakat yang masuk sehingga tidak bisa terjadwal; seringkali jadwal kegiatan berbenturan dengan jadwal kegiatan DPRD lainnya; regulasi yang berubah-ubah;		
4.02.01.2.16.03		Sekretariat DPRD			*Jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan*	45 kali	50 kali	111.11 %			
4.02.02		Sekretariat DPRD		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100.00%	99.73%	99.73%	sebagian besar kegiatan sudah terlaksana, tetapi dalam 9 bulan terakhir ada beberapa keiatan yang tidak maksimal dikarenakan akibat pandemi covid19 dengan adanya Inovasi dalam pelayanan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									selama pandemi, sehingga meskipun ada keterbatasan tetap dapat memfasilitasi kegiatan DPRD, antara lain rapat secara daring, reses daring. Selain itu adanya alternatif penyedia publikasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD.		
		Sekretariat DPRD			Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Sekretariat DPRD			Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
4.02.02.2.01		Sekretariat DPRD		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	*Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas*	6 dokumen	3 dokumen	50%	Memerlukan waktu koordinasi antara DPRD dan kelompok pakar; seringkali jadwal kegiatan berbenturan dengan jadwal kegiatan DPRD lainnya; regulasi yang berubah-ubah.		
4.02.02.2.01.01		Sekretariat DPRD		**Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**	*Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas*	6 dokumen	3 dokumen	50%	Memerlukan waktu koordinasi antara DPRD dan kelompok pakar; seringkali jadwal kegiatan berbenturan dengan jadwal kegiatan DPRD lainnya; regulasi yang berubah-ubah.		
4.02.02.2.04		Sekretariat DPRD		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	*Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD*	5 media	5 media	100%			
4.02.02.2.04.03		Sekretariat DPRD		**Publikasi dan Dokumentasi Dewan**	*Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD*	5 media	5 media	100%			
4.02.02.2.05		Sekretariat DPRD		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	*Jumlah Fasilitasi Reses*	3 kali	3 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.02.02.2.05.03		Sekretariat DPRD		**Pelaksanaan Reses**	*Jumlah Fasilitasi Reses*	3 kali	3 kali	100%			
4.02.02.2.08		Sekretariat DPRD		**Fasilitasi Tugas DPRD**	*Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD*	32 kali	21 kali	65.63 %	Sehubungan dengan adanya pandemi dan PPKM sehingga realisasi belum mencapai target		
4.02.02.2.08.01		Sekretariat DPRD		**Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**	*Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD*	32 kali	21 kali	65.63 %	Sehubungan dengan adanya pandemi dan PPKM sehingga realisasi belum mencapai target		

3.1.2.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di Kota Surabaya pada tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2021 menjadi salah satu penyebab beberapa program dan kegiatan yang tidak tercapai, namun pelaksanaan administrasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Pencapaian pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan Kota Surabaya tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.17
Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.01.01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	94.54%	107.43%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
5.01.01.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
5.01.01.2.01.01		Badan Perencanaan Pembangunan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
5.01.01.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
5.01.01.2.02.01		Badan Perencanaan Pembangunan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
5.01.01.2.08		Badan Perencanaan Pembangunan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
5.01.01.2.08.03		Badan Perencanaan Pembangunan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
5.01.02		Badan Perencanaan Pembangunan		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	97.00%	88.97%	91.72%	Dari 1206 sub kegiatan Pemerintah Kota Surabaya masih terdapat 133 sub kegiatan yang capaiannya belum 76% hal ini disebabkan di antaranya akibat pembatasan ketika pandemi Covid-19 sedang tinggi-tingginya, serta di sebagian kecil kegiatan, belum tersedianya dasar		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021						hukum terkait teknis pelaksanaa		
		Badan Perencanaan Pembangunan			Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100.00%	100.00%	100.00%			
5.01.02.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	*Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun*	9 dokumen	9 dokumen	100%			
5.01.02.2.01.07		Badan Perencanaan Pembangunan		**Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun*	9 dokumen	9 dokumen	100%			
5.01.02.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	*Jumlah data urusan yang dikelola*	17 data urusan	17 data urusan	100%			
5.01.02.2.02.01		Badan Perencanaan Pembangunan		**Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	*Jumlah data urusan yang dikelola*	17 data urusan	17 data urusan	100%			
5.01.02.2.03		Badan Perencanaan Pembangunan		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	*Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah*	72 PD	72 PD	100%			
5.01.02.2.03.03		Badan Perencanaan Pembangunan		**Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	*Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah*	72 PD	72 PD	100%			
5.01.03		Badan Perencanaan Pembangunan		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase penyusunan rencana induk sektoral	100.00%	100.00%	100.00%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	85.00%	100.00%	117.65%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan	85.00%	100.00%	117.65%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Badan Perencanaan Pembangunan			Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	85.00%	100.00%	117.65%			
5.01.03.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	*Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi*	12 kali	12 kali	100%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
5.01.03.2.01.08		Badan Perencanaan Pembangunan		**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**	*Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi*	12 kali	12 kali	100%			
5.01.03.2.01.08		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.01.03.2.01.04		Badan Perencanaan Pembangunan		**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan**	*Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
5.01.03.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	*Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun*	6 dokumen	6 dokumen	100%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
5.01.03.2.02.04		Badan Perencanaan Pembangunan		**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan**	*Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun*	6 dokumen	6 dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian							
5.01.03.2.02.04		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
5.01.03.2.02.04		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
5.01.03.2.02.08		Badan Perencanaan Pembangunan		**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA**	*Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian yang disusun*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
5.01.03.2.03		Badan Perencanaan Pembangunan		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	*Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan Hidup*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.01.03.2.03.04		Badan Perencanaan Pembangunan		**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**	*Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.01.03.2.03.04		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.01.03.2.03.08		Badan Perencanaan Pembangunan		**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan**	*Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan Hidup*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.01.03.2.03.08		Badan Perencanaan Pembangunan			*Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan*	1 dokumen	1 dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.02.01	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Sebesar 2% (Dua Persen) Terhadap Retribusi Izin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
5.02.01.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun*	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
5.02.01.2.01.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun*	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
5.02.01.2.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
5.02.01.2.09.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
5.02.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan	90.00%	100.00%	111.11%			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	75.00%	100.00%	133.33%			
5.02.02.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 laporan	2 laporan	100%			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	3 laporan	3 laporan	100%			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah*	4 dokumen	4 dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.02.02.2.01.07		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Mendirikan Bangunan Yang Terutang Akibat Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Berupa Pembebasan Pajak Bagi Hotel Yang Dimanfaatkan Untuk Isolasi Warga Yang Memiliki Potensi Terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 laporan	2 laporan	100%			
5.02.02.2.01.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	3 laporan	3 laporan	100%			
5.02.02.2.01.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah*	4 dokumen	4 dokumen	100%			
5.02.02.2.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola*	245 dokumen	249 dokumen	101.63 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang disusun*	4 dokumen	4 dokumen	100%			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani*	72000 berkas	99220 berkas	137.81 %			
5.02.02.2.02.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola*	245 dokumen	249 dokumen	101.63 %			
5.02.02.2.02.05		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang disusun*	4 dokumen	4 dokumen	100%			
5.02.02.2.02.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	*Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani*	72000 berkas	99220 berkas	137.81 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pengurangan Tarif Sewa Rumah Susun Akibat Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya	Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait						
5.02.02.2.03		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun*	22 dokumen	22 dokumen	100%			
5.02.02.2.03.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun*	22 dokumen	22 dokumen	100%			
5.02.02.2.04		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase realisasi bagi hasil retribusi*	100%	100%	100%			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Persentase realisasi dana darurat dan mendesak*	25%	##########	154.99 %			
5.02.02.2.04.10		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Persentase realisasi bagi hasil retribusi*	100%	100%	100%			
5.02.02.2.04.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Persentase realisasi dana darurat dan mendesak*	25%	##########	154.99 %			
5.02.03		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tanah aset yang tersertifikasi	45.22%	50.04%	110.67%			
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	100.00%	135.65%	135.65%			
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			Persentase bangunan gedung yang dipelihara	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			Persentase pemanfaatan aset	97.00%	99.27%	102.34%			
		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	100.00%	100.00%	100.00%			
5.02.03.2.01		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			*Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan*	35 dokumen	35 dokumen	100%			
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			*Jumlah tanah aset yang diamankan*	75 bidang	75 bidang	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			*Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola*	25 lokasi	25 lokasi	100%			
5.02.03.2.01.10		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah**	*Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan*	1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.02.03.2.01.07		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Pengamanan Barang Milik Daerah**	*Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan*	35 dokumen	35 dokumen	100%			
5.02.03.2.01.07		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			*Jumlah tanah aset yang diamankan*	75 bidang	75 bidang	100%			
5.02.03.2.01.09		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		**Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah**	*Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola*	25 lokasi	25 lokasi	100%			
5.02.03.2.01		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	*Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah*	6 Berkas	9 Berkas	150%			
		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			*Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor*	72 lembaga	72 lembaga	100%			
5.02.03.2.01.10		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		**Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah**	*Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah*	6 Berkas	9 Berkas	150%			
5.02.03.2.01.05		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		**Penatausahaan Barang Milik Daerah**	*Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor*	72 lembaga	72 lembaga	100%			
5.02.04		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	85.00%	61.94%	72.87%	- Adanya Pandemi Covid -19 menyebabkan banyak objek pajak tutup, - Adanya PPKM sehingga ada pembatasan jam operasional buka - Adanya wajib pajak / penyelenggara reklame yang menunda pembayaran karena	Melakukan koordinasi dengan intansi terkait untuk penagihan piutang pajak	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									kondisi pendemi Covid -19 - Terjadi penurunan pemasangan materi reklame/ promosi yang berdampak penurunan ijin reklame karena wajib pajak daerah (Hotel, Restoran, Hiburan) - Adanya penerapan PPKM pada kondisi pandemi Covid-19, banyak objek Pajak Hiburan tutup - Kemampuan dan/ atau kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak menurun		
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan	85.00%	99.95%	117.59%			
5.02.04.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani*	2313 berkas	296 berkas	12.8 %	Masih banyak usaha hiburan yang belum beroperasional secara penuh sehingga berdampak pada kegiatan analisa dan pengembangan pajak hiburan	Melakukan koordinasi secara intensif dengan Wajib Pajak	
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani*	150000 berkas	169534 berkas	113.02 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani*	650 berkas	1106 berkas	170.15 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	1799 objek pajak	1870 objek pajak	103.95 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	16914 objek pajak	28291 objek pajak	167.26 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	57144 objek pajak	58452 objek pajak	102.29 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani*	71000 berkas	86017 berkas	121.15 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani*	500000 berkas	660543 berkas	132.11 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani*	26776 berkas	28748 berkas	107.36 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	34800 objek pajak	744330 objek pajak	2138.88 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	7804 objek pajak	7989 objek pajak	102.37 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	29670 objek pajak	44356 objek pajak	149.5 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	6288 objek pajak	6835 objek pajak	108.7 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	721142 objek pajak	752504 objek pajak	104.35 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	21066 berkas	44168 berkas	209.66 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani*	680 berkas	375 berkas	55.15 %	Masih belum sepenuhnya tempat usaha beroperasional (Hotel, Restoran, Hiburan) pada masa pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan penurunan pada bidang promosi/ pemasangan materi reklame	Melakukan koordinasi secara intensif dengan Wajib Pajak	
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani*	250 berkas	293 berkas	117.2 %			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani*	110 berkas	194 berkas	176.36 %			
5.02.04.2.01.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.**	*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani*	150000 berkas	169534 berkas	113.02 %			
5.02.04.2.01.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani*	650 berkas	1106 berkas	170.15 %			
5.02.04.2.01.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani*	2313 berkas	296 berkas	12.8 %	Masih banyak usaha hiburan yang belum beroperasional secara penuh sehingga berdampak pada kegiatan analisa dan pengembangan pajak hiburan	Melakukan koordinasi secara intensif dengan Wajib Pajak	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.02.04.2.01.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**	*Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	57144 objek pajak	58452 objek pajak	102.29 %			
5.02.04.2.01.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	16914 objek pajak	28291 objek pajak	167.26 %			
5.02.04.2.01.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	1799 objek pajak	1870 objek pajak	103.95 %			
5.02.04.2.01.11		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**Penagihan Pajak Daerah**	*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani*	26776 berkas	28748 berkas	107.36 %			
5.02.04.2.01.11		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani*	500000 berkas	660543 berkas	132.11 %			
5.02.04.2.01.11		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani*	71000 berkas	86017 berkas	121.15 %			
5.02.04.2.01.05		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**	*Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	29670 objek pajak	44356 objek pajak	149.5 %			
5.02.04.2.01.05		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	34800 objek pajak	744330 objek pajak	2138.88 %			
5.02.04.2.01.05		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	7804 objek pajak	7989 objek pajak	102.37 %			
5.02.04.2.01.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**Penetapan Wajib Pajak Daerah**	*Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	6288 objek pajak	6835 objek pajak	108.7 %			
5.02.04.2.01.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	721142 objek pajak	752504 objek pajak	104.35 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.02.04.2.01.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi*	21066 berkas	44168 berkas	209.66 %			
5.02.04.2.01.13		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		**Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**	*Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani*	110 berkas	194 berkas	176.36 %			
5.02.04.2.01.13		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani*	250 berkas	293 berkas	117.2 %			
5.02.04.2.01.13		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			*Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani*	680 berkas	375 berkas	55.15 %	Masih belum sepenuhnya tempat usaha beroperasional (Hotel, Restoran, Hiburan) pada masa pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan penurunan pada bidang promosi/ pemasangan materi reklame	Melakukan koordinasi secara intensif dengan Wajib Pajak	
5.03.01	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Diklat	**- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.91%	101.03%			
5.03.01.2.02		Badan Kepegawaian dan Diklat		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
5.03.01.2.02.01		Badan Kepegawaian dan Diklat		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
5.03.02		Dinas Pendidikan		**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase guru SD yang kompeten	100.00%	85.57%	85.57%	Terdapat guru yang tidak dinilai kompetensi kinerjanya dikarenakan guru dimaksud pensiun di tahun bersangkutan. Terkait guru yang telah dinilai kompetensi kinerjanya, telah memenuhi standar kompetensi	Melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi manajemen kinerja guru	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Pendidikan	2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021		Persentase guru SMP yang kompeten	100.00%	80.83%	80.83%	Terdapat guru yang tidak dinilai kompetensi kinerjanya dikarenakan guru dimaksud pensiun di tahun bersangkutan. Terkait guru yang telah dinilai kompetensi kinerjanya, telah memenuhi standar kompetensi	Melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi manajemen kinerja guru	
		Inspektorat			Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya	100.00%	100.84%	100.84%			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja	100.00%	100.00%	100.00%			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	52.03%	73.98%	142.19%			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	65.06%	66.78%	102.65%			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan	100.00%	100.00%	100.00%			
5.03.02.2.01		Badan Kepegawaian dan Diklat		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN*	3 tahap	4 tahap	133.33 %			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			*Jumlah data pegawai yang dikelola*	8437 data	9323 data	110.5 %			
5.03.02.2.01.04		Badan Kepegawaian dan Diklat		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	*Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN*	3 tahap	4 tahap	133.33 %			
5.03.02.2.01.11		Badan Kepegawaian dan Diklat		Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah data pegawai yang dikelola*	8437 data	9323 data	110.5 %			
5.03.02.2.02		Badan Kepegawaian dan Diklat		Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian*	8437 berkas	10045 berkas	119.06 %			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			*Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan*	118 berkas	118 berkas	100%			
5.03.02.2.02.02		Badan Kepegawaian dan Diklat		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian*	8437 berkas	10045 berkas	119.06 %			
5.03.02.2.02.01		Badan Kepegawaian dan Diklat		Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan*	118 berkas	118 berkas	100%			
5.03.02.2.03		Inspektorat		Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP*	50 kali	50 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.03.02.2.03.14		Inspektorat		**Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional**	*Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP*	50 kali	50 kali	100%			
5.03.02.2.03		Badan Kepegawaian dan Diklat		**Pengembangan Kompetensi ASN**	*Jumlah pelaksanaan assesmen pegawai*	5 kali	5 kali	100%			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			*Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya*	274 orang	241 orang	87.96 %	Adanya peserta yang tidak lolos verifikasi administrasi oleh BKN untuk ujian penyesuaian ijazah	Menindaklanjuti dengan usulan Penetapan Surat Keputusan Walikota tentang Jabatan Pelaksana untuk memastikan Kualifikasi pendidikan PNS sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan menurut ketentuan yang berlaku	
5.03.02.2.03.02		Badan Kepegawaian dan Diklat		**Pengelolaan Assessment Center**	*Jumlah pelaksanaan assesmen pegawai*	5 kali	5 kali	100%			
5.03.02.2.03.01		Badan Kepegawaian dan Diklat		**Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN**	*Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya*	274 orang	241 orang	87.96 %	Adanya peserta yang tidak lolos verifikasi administrasi oleh BKN untuk ujian penyesuaian ijazah	Menindaklanjuti dengan usulan Penetapan Surat Keputusan Walikota tentang Jabatan Pelaksana untuk memastikan Kualifikasi pendidikan PNS sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan menurut ketentuan yang berlaku	
5.03.02.2.04		Badan Kepegawaian dan Diklat		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	*Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya*	7226 orang	7460 orang	103.24 %			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			*Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai*	216 orang	233 orang	107.87 %			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			*Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaiannya*	1005 orang	1005 orang	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.03.02.2.04.02		Badan Kepegawaian dan Diklat		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya*	7226 orang	7460 orang	103.24 %			
5.03.02.2.04.07		Badan Kepegawaian dan Diklat		Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaiannya*	1005 orang	1005 orang	100%			
5.03.02.2.04.07		Badan Kepegawaian dan Diklat			*Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai*	216 orang	233 orang	107.87 %			
5.03.02.2.04		Dinas Pendidikan		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan*	957 Lembaga	1570 Lembaga	164.05 %			
5.03.02.2.04.02		Dinas Pendidikan		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan*	957 Lembaga	1570 Lembaga	164.05 %			
5.04.02	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Diklat	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	52.03%	73.98%	142.19%			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	65.06%	66.78%	102.65%			
5.04.02.2.01		Badan Kepegawaian dan Diklat		Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis*	2 jenis	2 jenis	100%			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			*Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)*	3 materi	3 materi	100%			
5.04.02.2.01.03		Badan Kepegawaian dan Diklat		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis*	2 jenis	2 jenis	100%			
5.04.02.2.01.02		Badan Kepegawaian dan Diklat		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	*Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)*	3 materi	3 materi	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
5.04.02.2.02		Badan Kepegawaian dan Diklat		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural*	2 jenis	2 jenis	100%			
		Badan Kepegawaian dan Diklat			*Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial*	2 jenis	2 jenis	100%			
5.04.02.2.02.07		Badan Kepegawaian dan Diklat		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural*	2 jenis	2 jenis	100%			
5.04.02.2.02.07		Badan Kepegawaian dan Diklat			*Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial*	2 jenis	2 jenis	100%			
5.05.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dinas Pendidikan	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	88.88%	100.00%	112.51%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			- Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021								
		Badan Perencanaan Pembangunan			Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%			
5.05.02.2.02		Dinas Pendidikan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah*	805 lembaga	805 lembaga	100%			
5.05.02.2.02.03		Dinas Pendidikan		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	*jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah*	805 lembaga	805 lembaga	100%			
5.05.02.2.04		Badan Perencanaan Pembangunan		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi*	4 dokumen	4 dokumen	100%			
5.05.02.2.04.01		Badan Perencanaan Pembangunan		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi*	4 dokumen	4 dokumen	100%			

3.1.2.6 Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verfikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Unsur pengawasan urusan pemerintahan mencakup Urusan Pemerintahan bidang Inspektorat Daerah.

Pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan di Kota Surabaya pada tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan Kota Surabaya tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.18
Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6.01.01	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Inspektorat			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	88.70%	100.80%			
		Inspektorat			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
6.01.01.2.01		Inspektorat		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	13 dokumen	108.33 %			
6.01.01.2.01.01		Inspektorat		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 dokumen	13 dokumen	108.33 %			
6.01.01.2.02		Inspektorat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
6.01.01.2.02.01		Inspektorat		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
6.01.01.2.07		Inspektorat		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
6.01.01.2.07.10		Inspektorat		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
6.01.02		Inspektorat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100.00%	100.00%	100.00%			
		Inspektorat			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100.00%	100.00%	100.00%			
		Inspektorat			Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah IV	100.00%	100.00%	100.00%			
		Inspektorat			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV	100.00%	100.00%	100.00%			
		Inspektorat			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah						
6.01.02.2.01		Inspektorat		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	*Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
		Inspektorat			*Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
		Inspektorat			*Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan*	35 lembaga	48 lembaga	137.14 %			
		Inspektorat			*Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja*	18 lembaga	18 lembaga	100%			
6.01.02.2.01.07		Inspektorat		**Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**	*Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu*	2 dokumen	2 dokumen	100%			
6.01.02.2.01.07		Inspektorat			*Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan*	12 dokumen	12 dokumen	100%			
6.01.02.2.01.02		Inspektorat		**Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**	*Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja*	18 lembaga	18 lembaga	100%			
6.01.02.2.01.02		Inspektorat			*Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan*	35 lembaga	48 lembaga	137.14 %			
6.01.02.2.02		Inspektorat		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	*Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan*	35 lembaga	35 lembaga	100%			
		Inspektorat			*Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja*	18 lembaga	18 lembaga	100%			
6.01.02.2.02.02		Inspektorat		**Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	*Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan*	35 lembaga	35 lembaga	100%			
6.01.02.2.02.02		Inspektorat			*Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja*	18 lembaga	18 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
6.01.03		Inspektorat		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100.00%	100.00%	100.00%			
		Inspektorat			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100.00%	100.00%	100.00%			
		Inspektorat			Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100.00%	100.00%	100.00%			
		Inspektorat			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100.00%	100.00%	100.00%			
6.01.03.2.01		Inspektorat		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	*Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan*	35 lembaga	51 lembaga	145.71 %			
		Inspektorat			*Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja*	18 lembaga	19 lembaga	105.56 %			
6.01.03.2.01.01		Inspektorat		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**	*Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja*	18 lembaga	19 lembaga	105.56 %			
6.01.03.2.01.01		Inspektorat			*Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan*	35 lembaga	51 lembaga	145.71 %			
6.01.03.2.02		Inspektorat		**Pendampingan dan Asistensi**	*Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja*	18 lembaga	18 lembaga	100%			
		Inspektorat			*Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan*	35 lembaga	43 lembaga	122.86 %			
6.01.03.2.02.01		Inspektorat		**Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**	*Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja*	18 lembaga	18 lembaga	100%			
6.01.03.2.02.01		Inspektorat			*Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan*	35 lembaga	43 lembaga	122.86 %			

3.1.2.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verfikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur Kewilayahan ini meliputi Kecamatan.

Pelaksanaan unsur Kewilayahan di Kota Surabaya pada tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur Kewilayahan Kota Surabaya tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.19
Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01.01	KECAMATAN	Kec. Genteng	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan Dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.81%	103.19%			
		Kec. Tegalsari			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.63%	105.26%			
		Kec. Bubutan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	89.11%	101.26%			
		Kec. Pabean Cantian			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.87%	104.40%			
		Kec. Semampir			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	89.71%	101.94%			
		Kec. Tambaksari			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.17%	104.74%			
		Kec. Gubeng			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.00%	104.55%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	87.74%	99.70%	1. Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana perkantoran 2. Perlunya peningkatan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana 3. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar personil di kecamatan dan	1. Mengembangkan metode/cara inventarisasi sarana prasarana perkantoran agar lebih optimal 2. Mendorong SDM agar meningkat komptensi dan kinerjanya sehingga dapat melahirkan komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Menjalin komunikasi yang intensif antar personil di kecamatan dan kelurahan agar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			- Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bahan Makanan Bagi Warga Masyarakat Terkonfirmasi Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya						kelurahan perlu ditingkatkan	dapat bekerjasama dengan baik	
		Kec. Mulyorejo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.15%	103.58%			
		Kec. Wonokromo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.43%	106.17%			
		Kec. Dukuh Pakis			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.88%	104.41%			
		Kec. Gayungan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.10%	105.80%			
		Kec. Jambangan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.53%	106.28%			
		Kec. Wonocolo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	90.82%	103.20%			
		Kec. Sawahan			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	93.26%	105.98%			
		Kec. Wiyung			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	95.12%	108.09%			
		Kec. Asemrowo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	94.09%	106.92%			
		Kec. Sukomanunggal			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.58%	105.20%			
		Kec. Benowo			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.06%	104.61%			
		Kec. Lakarsantri			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.88%	104.41%			
		Kec. Sambikerep			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	95.53%	108.56%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Bulak			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	92.17%	104.74%			
		Kec. Tambaksari			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wiyung			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukomanunggal			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Genteng			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tegalsari			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Bubutan			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Kenjeran			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pabean Cantian			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Semampir			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gunung Anyar			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Mulyorejo			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonokromo			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Karangpilang			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Gayungan			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Jambangan			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonocolo			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sawahan			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Asemrowo			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Benowo			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Lakarsantri			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sambikerep			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pakal			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Bulak			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
7.01.01.2.02		Kec. Dukuh Pakis		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Dukuh Pakis		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Bubutan		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Bubutan		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Wiyung		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Wiyung		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.02		Kec. Sawahan		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Sawahan		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Mulyorejo		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Mulyorejo		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Semampir		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Semampir		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Pabean Cantian		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Pabean Cantian		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Bulak		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Bulak		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Gubeng		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Gubeng		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Sukomanunggal		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Sukomanunggal		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Tegalsari		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Tegalsari		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Genteng		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Genteng		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Wonocolo		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.02.01		Kec. Wonocolo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Tambaksari		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Tambaksari		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Lakarsantri		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Lakarsantri		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Benowo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Benowo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Wonokromo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Wonokromo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Gayungan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Gayungan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Jambangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Jambangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Asemrowo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Asemrowo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02		Kec. Sambikerep		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.02.01		Kec. Sambikerep		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Tambaksari		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.10		Kec. Tambaksari		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Bubutan		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Bubutan		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Sambikerep		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Sambikerep		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Benowo		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.10		Kec. Benowo		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Lakarsantri		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Lakarsantri		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Gunung Anyar		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.10		Kec. Gunung Anyar		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Asemrowo		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.10		Kec. Asemrowo		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Gayungan		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Gayungan		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Jambangan		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Jambangan		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Mulyorejo		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.10		Kec. Mulyorejo		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Sawahan		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Sawahan		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Sukomanunggal		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.10		Kec. Sukomanunggal		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Tegalsari		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Tegalsari		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Bulak		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Bulak		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Semampir		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Semampir		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Pakal		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.10		Kec. Pakal		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Kenjeran		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.10		Kec. Kenjeran		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Wiyung		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.10		Kec. Wiyung		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Wonokromo		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Wonokromo		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Karangpilang		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Karangpilang		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09		Kec. Pabean Cantian		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	50%	50%	Belum dilakukan penyesuaian kebutuhan akan pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran sehingga realisasi belum dapat optimal	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Pabean Cantian		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	50%	50%	Belum dilakukan penyesuaian kebutuhan akan pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran sehingga realisasi belum dapat optimal	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.09		Kec. Genteng		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	50%	50%	Belum dilakukan penyesuaian kebutuhan akan pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran sehingga realisasi belum dapat optimal	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.09.11		Kec. Genteng		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	50%	50%	Belum dilakukan penyesuaian kebutuhan akan pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran sehingga realisasi belum dapat optimal	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
7.01.01.2.09		Kec. Wonocolo		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.01.2.09.11		Kec. Wonocolo		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.02		Kec. Genteng		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Simokerto			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tegalsari			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	89.58%	89.58%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Bubutan			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Kenjeran			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pabean Cantian			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Semampir			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Krembangan			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tambaksari			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gubeng			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Rungkut			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gunung Anyar			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukolilo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Mulyorejo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonokromo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Karangpilang			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Dukuh Pakis			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gayungan			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Jambangan			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonocolo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sawahan			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wiyung			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tandes			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Asemrowo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukomanunggal			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Benowo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Lakarsantri			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sambikerep			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pakal			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Bulak			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Genteng			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Simokerto			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tegalsari			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Bubutan			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Kenjeran			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pabean Cantian			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Semampir			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Krembangan			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	95.71%	95.71%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Tambaksari			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gubeng			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Rungkut			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	87.50%	87.50%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Gunung Anyar			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukolilo			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Mulyorejo			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonokromo			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Karangpilang			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Dukuh Pakis			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gayungan			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Jambangan			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonocolo			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sawahan			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wiyung			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tandes			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Asemrowo			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukomanunggal			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Benowo			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	95.14%	95.14%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Lakarsantri			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sambikerep			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pakal			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Bulak			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Genteng			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Simokerto			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tegalsari			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Bubutan			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Kenjeran			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pabean Cantian			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Semampir			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Krembangan			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tambaksari			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gubeng			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Rungkut			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gunung Anyar			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukolilo			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Mulyorejo			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonokromo			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Dukuh Pakis			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Gayungan			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Jambangan			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonocolo			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sawahan			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wiyung			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tandes			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Asemrowo			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Benowo			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Lakarsantri			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sambikerep			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pakal			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Bulak			Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Genteng			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Simokerto			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Tegalsari			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	94.44%	94.44%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Bubutan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Kenjeran			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	99.81%	99.81%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Pabean Cantian			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Semampir			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Krembangan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tambaksari			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gubeng			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Rungkut			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gunung Anyar			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukolilo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Mulyorejo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	96.49%	96.49%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Wonokromo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	99.44%	99.44%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Karangpilang			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Dukuh Pakis			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gayungan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Jambangan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonocolo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sawahan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wiyung			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tandes			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Asemrowo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukomanunggal			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Benowo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Lakarsantri			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sambikerep			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pakal			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Bulak			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%			
7.01.02.2.01		Kec. Rungkut		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	6 lembaga	150%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Rungkut		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	6 lembaga	150%			
7.01.02.2.01		Kec. Bulak		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 Lembaga	5 Lembaga	125%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Bulak		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 Lembaga	5 Lembaga	125%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01		Kec. Tegalsari		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	6 lembaga	150%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Tegalsari		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	6 lembaga	150%			
7.01.02.2.01		Kec. Asemrowo		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Asemrowo		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Sukomanunggal		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	6 lembaga	9 lembaga	150%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Sukomanunggal		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti*	6 lembaga	9 lembaga	150%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*						
7.01.02.2.01		Kec. Jambangan		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Jambangan		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Gunung Anyar		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Gunung Anyar		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01		Kec. Kenjeran		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Kenjeran		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Sukolilo		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Sukolilo		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah*	4 lembaga	5 lembaga	125%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*						
7.01.02.2.01		Kec. Dukuh Pakis		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Dukuh Pakis		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01		Kec. Benowo		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Benowo		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Semampir		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Semampir		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Pakal		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.01.01		Kec. Pakal		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Tandes		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	6 lembaga	11 lembaga	183.33 %			
7.01.02.2.01.01		Kec. Tandes		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	6 lembaga	11 lembaga	183.33 %			
7.01.02.2.01		Kec. Lakarsantri		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Lakarsantri		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01		Kec. Wonocolo		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Wonocolo*	4 Lembaga	4 Lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Wonocolo		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Wonocolo*	4 Lembaga	4 Lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Gubeng		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	6 lembaga	9 lembaga	150%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.01.01		Kec. Gubeng		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	6 lembaga	9 lembaga	150%			
7.01.02.2.01		Kec. Gayungan		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Gayungan		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Mulyorejo		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Mulyorejo		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01		Kec. Tambaksari		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Tambaksari		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Krembangan		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti*	6 lembaga	7 lembaga	116.67 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan						
7.01.02.2.01.01		Kec. Krembangan		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan*	6 lembaga	7 lembaga	116.67 %			
7.01.02.2.01		Kec. Genteng		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Genteng		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Wiyung		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Wiyung		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01		Kec. Karangpilang		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Karangpilang		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.01		Kec. Bubutan		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Bubutan		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Simokerto		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Simokerto		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Sambikerep		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Sambikerep		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01		Kec. Pabean Cantian		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Pabean Cantian		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti*	4 lembaga	4 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*						
7.01.02.2.01		Kec. Wonokromo		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Wonokromo		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.02.2.01		Kec. Sawahan		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	6 lembaga	6 lembaga	100%			
7.01.02.2.01.01		Kec. Sawahan		**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	*Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan*	6 lembaga	6 lembaga	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Rungkut		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	54 kali	75%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.02.2.02.03		Kec. Rungkut		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	54 kali	75%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.02.2.02		Kec. Gunung Anyar		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	72 kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Gunung Anyar		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan*	72 kali	72 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Pengarusutamaan Gender dan Anak*						
7.01.02.2.02		Kec. Benowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	65 kali	90.28 %	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.02.2.02.03		Kec. Benowo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	65 kali	90.28 %	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.02.2.02		Kec. Asemrowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	72 kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Asemrowo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	72 kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Jambangan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	107 Kali	115 Kali	107.48 %			
7.01.02.2.02.03		Kec. Jambangan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	107 Kali	115 Kali	107.48 %			
7.01.02.2.02		Kec. Bubutan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	105 Kali	114 Kali	108.57 %			
7.01.02.2.02.03		Kec. Bubutan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	105 Kali	114 Kali	108.57 %			
7.01.02.2.02		Kec. Wiyung		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan*	72 kali	72 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Pengarusutamaan Gender dan Anak*						
7.01.02.2.02.03		Kec. Wiyung		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	72 kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Sukolilo		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	97 kali	134.72 %			
7.01.02.2.02.03		Kec. Sukolilo		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	97 kali	134.72 %			
7.01.02.2.02		Kec. Tegalsari		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	96 Kali	116 Kali	120.83 %			
7.01.02.2.02.03		Kec. Tegalsari		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	96 Kali	116 Kali	120.83 %			
7.01.02.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	80 kali	80 kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	80 kali	80 kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Gayungan		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Gayungan		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.02		Kec. Wonocolo		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	108 Kali	108 Kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Wonocolo		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	108 Kali	108 Kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Genteng		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Genteng		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Dukuh Pakis		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	105 Kali	108 Kali	102.86 %			
7.01.02.2.02.03		Kec. Dukuh Pakis		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	105 Kali	108 Kali	102.86 %			
7.01.02.2.02		Kec. Krembangan		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	72 kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Krembangan		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	72 kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Tambaksari		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	80 kali	111.11 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.02.03		Kec. Tambaksari		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	80 kali	111.11 %			
7.01.02.2.02		Kec. Karangpilang		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Karangpilang		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Simokerto		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Simokerto		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Mulyorejo		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	88 kali	122.22 %			
7.01.02.2.02.03		Kec. Mulyorejo		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	88 kali	122.22 %			
7.01.02.2.02		Kec. Semampir		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Semampir		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Kenjeran		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan*	72 kali	72 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Pengarusutamaan Gender dan Anak*						
7.01.02.2.02.03		Kec. Kenjeran		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	72 kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Sukomanunggal		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 kali	137 kali	118.1 %			
7.01.02.2.02.03		Kec. Sukomanunggal		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 kali	137 kali	118.1 %			
7.01.02.2.02		Kec. Gubeng		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	73 kali	73 kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Gubeng		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	73 kali	73 kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Bulak		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	120 Kali	103.45 %			
7.01.02.2.02.03		Kec. Bulak		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	120 Kali	103.45 %			
7.01.02.2.02		Kec. Tandes		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	72 kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Tandes		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan*	72 kali	72 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Pengarusutamaan Gender dan Anak*						
7.01.02.2.02		Kec. Lakarsantri		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	104 Kali	104 Kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Lakarsantri		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	104 Kali	104 Kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Sambikerep		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 kali	116 kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Sambikerep		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 kali	116 kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Wonokromo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Wonokromo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Pabean Cantian		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Pabean Cantian		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	116 Kali	100%			
7.01.02.2.02		Kec. Sawahan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	120 Kali	103.45 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03		Kec. Sawahan		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	116 Kali	120 Kali	103.45 %			
7.01.02.2.02		Kec. Pakal		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	72 kali	100%			
7.01.02.2.02.03		Kec. Pakal		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak*	72 kali	72 kali	100%			
7.01.02.2.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.02.2.03.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	220 Lembaga	220 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Karangpilang		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	220 Lembaga	220 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	627 Lembaga	627 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04.02		Kec. Sawahan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	627 Lembaga	627 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	280 Lembaga	280 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Wonocolo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	280 Lembaga	280 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	168 Lembaga	168 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Jambangan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	168 Lembaga	168 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Benowo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	188 Lembaga	188 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Benowo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	188 Lembaga	188 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	568 Lembaga	568 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Wonokromo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan*	568 Lembaga	568 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				terkait dengan Nonperizinan	*yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*						
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	211 lembaga	211 lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Wiyung		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	211 lembaga	211 lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	217 lembaga	217 lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Gunung Anyar		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	217 lembaga	217 lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Bubutan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	414 Lembaga	414 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Bubutan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	414 Lembaga	414 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	365 Lembaga	365 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Tegalsari		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan*	365 Lembaga	365 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					peningkatan mutu selama 12 bulan						
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	376 Lembaga	376 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Pabean Cantian		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	376 Lembaga	376 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Pakal		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	229 Lembaga	229 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Pakal		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	229 Lembaga	229 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	260 Lembaga	260 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Sambikerep		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	260 Lembaga	260 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	205 Lembaga	205 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Lakarsantri		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	205 Lembaga	205 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Tandes		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	371 lembaga	371 lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Tandes		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	371 lembaga	371 lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	197 Lembaga	197 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Gayungan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	197 Lembaga	197 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	356 Lembaga	356 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Simokerto		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	356 Lembaga	356 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	185 lembaga	185 lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	185 lembaga	185 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	346 Lembaga	346 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Mulyorejo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	346 Lembaga	346 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Kenjeran		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	460 lembaga	460 lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Kenjeran		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	460 lembaga	460 lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Semampir		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	636 Lembaga	636 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Semampir		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	636 Lembaga	636 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Rungkut		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	488 lembaga	488 lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Rungkut		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	488 lembaga	488 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Bulak		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	158 Lembaga	158 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Bulak		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	158 Lembaga	158 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	749 lembaga	749 lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Tambaksari		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	749 lembaga	749 lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	431 Lembaga	431 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Krembangan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	431 Lembaga	431 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	480 Lembaga	480 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Gubeng		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	480 Lembaga	480 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	323 lembaga	323 lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Sukomanunggal		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	323 lembaga	323 lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Sukolilo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	439 lembaga	439 lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Sukolilo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	439 lembaga	439 lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	195 Lembaga	195 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Dukuh Pakis		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	195 Lembaga	195 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	139 lembaga	139 lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Asemrowo		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	139 lembaga	139 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Genteng		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	364 Lembaga	364 Lembaga	100%			
7.01.02.2.04.02		Kec. Genteng		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	*Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan*	364 Lembaga	364 Lembaga	100%			
7.01.03		Kec. Genteng		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	24.68%	24.68%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Simokerto			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	36.45%	36.45%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tegalsari			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	30.38%	30.38%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Bubutan			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	27.39%	27.39%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Kenjeran			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	27.52%	27.52%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan		
		Kec. Pabean Cantian			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	24.80%	24.80%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Semampir			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	22.77%	22.77%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan		
		Kec. Krembangan			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	26.11%	26.11%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tambaksari			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	24.59%	24.59%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Gubeng			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	23.13%	23.13%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan		
		Kec. Rungkut			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	20.00%	20.00%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Gunung Anyar			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	30.02%	30.02%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan		
		Kec. Tenggilis Mejoyo			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	40.30%	40.30%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukolilo			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	22.20%	22.20%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Mulyorejo			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	20.63%	20.63%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Wonokromo			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	24.51%	24.51%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Karangpilang			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	28.90%	28.90%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan		
		Kec. Dukuh Pakis			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	27.89%	27.89%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Gayungan			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	26.01%	26.01%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan		
		Kec. Jambangan			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	41.34%	41.34%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wonocolo			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	35.98%	35.98%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sawahan			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	28.56%	28.56%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan		
		Kec. Wiyung			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	36.00%	36.00%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tandes			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	34.28%	34.28%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan		
		Kec. Asemrowo			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	43.40%	43.40%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukomanunggal			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	25.17%	25.17%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Benowo			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	43.42%	43.42%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Lakarsantri			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	53.62%	53.62%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sambikerep			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	30.85%	30.85%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan		
		Kec. Pakal			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	46.19%	46.19%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Bulak			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100.00%	56.95%	56.95%	Beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan penundaan pelaksanaan di Triwulan I-III karena aparat kewilayahan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19, sehingga baru di Triwulan IV sebagian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan		
		Kec. Benowo			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
7.01.03.2.01		Kec. Benowo		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	*Pengembangan Kampung Edukasi*	3 kali	3 kali	100%			
7.01.03.2.01.02		Kec. Benowo		**Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan**	*Pengembangan Kampung Edukasi*	3 kali	3 kali	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Tandes		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 lembaga	15 lembaga	107.14 %			
		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	8 lembaga	88.89 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	1 lembaga	25%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	6 lembaga	100%			
		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	1 lembaga	14.29 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	6 lembaga	150%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	12 lembaga	133.33 %			
		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	9 lembaga	128.57 %			
		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	15 lembaga	15 lembaga	100%			
		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	10 lembaga	111.11 %			
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	6 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	1 lembaga	25%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 lembaga	15 lembaga	107.14 %			
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	1 lembaga	14.29 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	8 lembaga	88.89 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	7 lembaga	9 lembaga	128.57 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	6 lembaga	150%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	15 lembaga	15 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	12 lembaga	133.33 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	10 lembaga	111.11 %			
7.01.03.2.02		Kec. Lakarsantri		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemulihan di masa pandemi Covid 19	subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	5 Lembaga	100%			
		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	15 Lembaga	300%			
		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	7 Lembaga	233.33 %			
		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	7 Lembaga	233.33 %			
		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	5 Lembaga	100%			
		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	8 Lembaga	114.29 %			
		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	4 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	5 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	4 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	15 Lembaga	300%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	7 Lembaga	233.33 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	5 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	8 Lembaga	114.29 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	7 Lembaga	233.33 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Sawahan		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	18 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	9 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	11 Lembaga	110%			
		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	24 Lembaga	171.43 %			
		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	18 Lembaga	18 Lembaga	100%			
		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	18 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	24 Lembaga	171.43 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	18 Lembaga	18 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	11 Lembaga	110%			
7.01.03.2.02		Kec. Pakal		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	1 lembaga	10%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	7 lembaga	116.67 %			
		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	7 lembaga	140%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	3 lembaga	37.5 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 lembaga	14 lembaga	100%			
		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	8 lembaga	133.33 %			
		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	8 lembaga	160%			
		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	9 lembaga	112.5 %			
7.01.03.2.02.02		Kec. Pakal		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	3 lembaga	37.5 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	1 lembaga	10%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	7 lembaga	116.67 %			
7.01.03.2.02.02		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	7 lembaga	140%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Pakal		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 lembaga	14 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	8 lembaga	160%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	9 lembaga	112.5 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Pakal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	6 lembaga	8 lembaga	133.33 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02		Kec. Wonokromo		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	10 Lembaga	90.91 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	5 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	6 Lembaga	120%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	5 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	10 Lembaga	90.91 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	12 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	6 Lembaga	120%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Pabean Cantian		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	10 Lembaga	6 Lembaga	60%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	1 Lembaga	10%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	6 Lembaga	60%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	3 Lembaga	37.5 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Pabean Cantian		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	10 Lembaga	6 Lembaga	60%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	3 Lembaga	37.5 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	1 Lembaga	10%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	6 Lembaga	60%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Pabean Cantian		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Pabean Cantian			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Krembangan		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	5 lembaga	5 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	6 lembaga	46.15 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	8 lembaga	114.29 %			
		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	6 Lembaga	66.67 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	13 lembaga	100%			
		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Krembangan		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	8 lembaga	114.29 %			
7.01.03.2.02.02		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	6 lembaga	46.15 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	6 Lembaga	66.67 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Krembangan		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	8 lembaga	8 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02.03		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	13 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Krembangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Tambaksari		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemulihan di masa pandemi Covid 19	melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	5 lembaga	45.45 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	5 lembaga	7 lembaga	140%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	8 lembaga	72.73 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	12 lembaga	100%			
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	12 lembaga	109.09 %			
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	8 lembaga	8 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	8 lembaga	72.73 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	7 lembaga	140%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	5 lembaga	45.45 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemulihan di masa pandemi Covid 19	melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	12 lembaga	109.09 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	12 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Gayungan		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	4 Lembaga	100%			
		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gayungan		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	4 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemulihan di masa pandemi Covid 19	melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Gayungan		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gayungan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Simokerto		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	9 Lembaga	64.29 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	14 Lembaga	100%			
		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	9 Lembaga	112.5 %			
		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Simokerto		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	9 Lembaga	64.29 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Simokerto		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	14 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	9 Lembaga	112.5 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Simokerto			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Kenjeran		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	10 lembaga	125%			
		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	14 Lembaga	100%			
		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	12 lembaga	100%			
		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Kenjeran		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	10 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	10 lembaga	125%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Kenjeran		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	14 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Kenjeran			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	12 lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Sukomanunggal		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	1 lembaga	20%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	6 lembaga	6 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	10 lembaga	100%			
		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	4 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	1 lembaga	20%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	6 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	10 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	7 lembaga	7 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02		Kec. Bulak		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	4 Lembaga	133.33 %			
		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	3 Lembaga	100%			
		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	3 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Bulak		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	4 Lembaga	133.33 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Bulak		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	3 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Bulak			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	3 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Karangpilang		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	11 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	3 Lembaga	100%			
		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 Lembaga	25 Lembaga	192.31 %			
		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	4 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Karangpilang		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Karangpilang		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	3 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	4 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Karangpilang			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 Lembaga	25 Lembaga	192.31 %			
7.01.03.2.02		Kec. Gunung Anyar		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	13 lembaga	162.5 %			
		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	9 lembaga	9 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gunung Anyar		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	4 lembaga	4 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02.02		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	13 lembaga	162.5 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gunung Anyar		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gunung Anyar			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Sukolilo		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukolilo				*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukolilo				*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukolilo				*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	1 lembaga	20%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukolilo				*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	13 lembaga	100%			
		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	7 lembaga	140%			
		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	10 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	1 lembaga	20%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	13 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	7 lembaga	7 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	7 lembaga	140%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	10 lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Benowo		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 lembaga	3 lembaga	100%			
		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	7 lembaga	1 lembaga	14.29 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 lembaga	3 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Benowo		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 lembaga	3 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	1 lembaga	14.29 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Benowo		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Benowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 lembaga	3 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Asemrowo		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	1 lembaga	25%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Asemrowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	1 lembaga	16.67 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Asemrowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Asemrowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Asemrowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	6 lembaga	6 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
		Kec. Asemrowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Asemrowo		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Asemrowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	1 lembaga	25%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Asemrowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	1 lembaga	16.67 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Asemrowo		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	6 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Asemrowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Asemrowo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	5 lembaga	125%			
7.01.03.2.02		Kec. Jambangan		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	8 Lembaga	114.29 %			
		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	2 Lembaga	50%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemulihan di masa pandemi Covid 19	subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	4 Lembaga	100%			
		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	3 Lembaga	100%			
		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Jambangan		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan,	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	8 Lembaga	114.29 %			
7.01.03.2.02.02		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	2 Lembaga	50%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Jambangan		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 Lembaga	3 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02.03		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 Lembaga	4 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Jambangan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Rungkut		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	15 lembaga	5 lembaga	33.33 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemulihan di masa pandemi Covid 19	melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	15 lembaga	1 lembaga	6.67 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	13 lembaga	17 lembaga	130.77 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	11 lembaga	110%			
		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	15 lembaga	15 lembaga	100%			
		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	15 lembaga	16 lembaga	106.67 %			
		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	12 lembaga	100%			
		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	11 lembaga	110%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	11 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	15 lembaga	1 lembaga	6.67 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	15 lembaga	5 lembaga	33.33 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	11 lembaga	110%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	11 lembaga	110%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	17 lembaga	130.77 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	15 lembaga	15 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	12 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	15 lembaga	16 lembaga	106.67 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02		Kec. Tegalsari		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	7 Lembaga	4 Lembaga	57.14 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	14 Lembaga	100%			
		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	6 Lembaga	6 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02.02		Kec. Tegalsari		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	4 Lembaga	57.14 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	11 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Tegalsari		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	6 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tegalsari			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	14 Lembaga	14 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02		Kec. Bubutan		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	3 Lembaga	50%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	7 Lembaga	70%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan,	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	6 Lembaga	100%			
		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Bubutan		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	3 Lembaga	50%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Bubutan					*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Bubutan					*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Bubutan					*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	7 Lembaga	70%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Bubutan					*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Bubutan				**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Bubutan			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	6 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Wiyung		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	10 lembaga	166.67 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Wiyung		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	5 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Wiyung		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 lembaga	9 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	10 lembaga	166.67 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Wiyung			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Wonocolo		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemulihan di masa pandemi Covid 19	melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	4 Lembaga	44.44 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	1 Lembaga	10%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	13 Lembaga	10 Lembaga	76.92 %	Terdapat penundaan pelaksanaan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	6 Lembaga	100%			
		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonocolo		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	1 Lembaga	10%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	4 Lembaga	44.44 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemulihan di masa pandemi Covid 19	melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonocolo		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 Lembaga	10 Lembaga	76.92 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	6 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	9 Lembaga	9 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonocolo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 Lembaga	10 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Genteng		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	16 Lembaga	16 Lembaga	100%			
		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	15 Lembaga	15 Lembaga	100%			
		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02.02		Kec. Genteng		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	16 Lembaga	16 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Genteng		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 Lembaga	8 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	15 Lembaga	15 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02.03		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	12 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Genteng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Dukuh Pakis		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	3 Lembaga	42.86 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	6 Lembaga	100%			
		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	7 Lembaga	140%			
		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	1 Lembaga	16.67 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemulihan di masa pandemi Covid 19	subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %			
		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	6 Lembaga	100%			
		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	5 Lembaga	100%			
		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Dukuh Pakis		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	3 Lembaga	42.86 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	7 Lembaga	140%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	6 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	1 Lembaga	16.67 %	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Dukuh Pakis		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	6 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 Lembaga	5 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Dukuh Pakis			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 Lembaga	7 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tenggilis Mejoyo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tenggilis Mejoyo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Tenggilis Mejoyo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Tenggilis Mejoyo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	6 lembaga	100%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	6 lembaga	100%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tenggilis Mejoyo					*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Tenggilis Mejoyo					*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Tenggilis Mejoyo				**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tenggilis Mejoyo					*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Tenggilis Mejoyo					*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	6 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Tenggilis Mejoyo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	6 lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Mulyorejo		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	10 lembaga	10 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	10 lembaga	100%			
		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	6 lembaga	100%			
		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	6 lembaga	120%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	10 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	6 lembaga	6 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	10 lembaga	10 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	6 lembaga	120%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	5 lembaga	5 lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Semampir		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	13 Lembaga	108.33 %			
		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	17 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	16 Lembaga	16 Lembaga	100%			
		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	16 Lembaga	16 Lembaga	100%			
		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana*	14 Lembaga	14 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	13 Lembaga	108.33 %			
		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	17 Lembaga	17 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Semampir		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	13 Lembaga	108.33 %			
7.01.03.2.02.02		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	17 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	0 Lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	16 Lembaga	16 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Semampir		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 Lembaga	13 Lembaga	108.33 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 Lembaga	11 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	17 Lembaga	17 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	16 Lembaga	16 Lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Semampir			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	14 Lembaga	14 Lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Sambikerep		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	12 lembaga	14 lembaga	116.67 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Sambikerep		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemulihan di masa pandemi Covid 19	melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.02		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Sambikerep		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	4 lembaga	4 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	14 lembaga	116.67 %			
7.01.03.2.02.03		Kec. Sambikerep			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	7 lembaga	7 lembaga	100%			
7.01.03.2.02		Kec. Gubeng		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 lembaga	3 lembaga	100%			
		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 lembaga	3 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	13 lembaga	100%			
		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 lembaga	3 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	8 lembaga	8 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	12 lembaga	0 lembaga	0%	Terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan karena aparat kewilayahan fokus untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan di masa pandemi Covid 19	Terjalinnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan untuk percepatan pemulihan di masa Pandemi Covid 19 sehingga dapat melaksanakan subkegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	11 lembaga	11 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	3 lembaga	3 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	8 lembaga	8 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat*	13 lembaga	13 lembaga	100%			
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng			*Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi*	8 lembaga	8 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat						
7.01.04		Dinas Sosial		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Genteng			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Simokerto			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tegalsari			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	94.44%	94.44%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Bubutan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Kenjeran			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	99.81%	99.81%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Pabean Cantian			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Semampir			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Krembangan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tambaksari			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gubeng			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Rungkut			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gunung Anyar			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukolilo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Mulyorejo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	96.49%	96.49%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Wonokromo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	99.44%	99.44%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Karangpilang			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Dukuh Pakis			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gayungan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Jambangan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonocolo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sawahan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Wiyung			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tandes			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Asemrowo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukomanunggal			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Benowo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Lakarsantri			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sambikerep			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pakal			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Bulak			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
7.01.04.2.01		Dinas Sosial		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	*Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan*	86 kali	56 kali	65.12 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan di masa pandemi Covid-19 terdapat pengurangan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19	Dilakukan pemetaan kegiatan dan penyesuaian konsep kegiatan dengan trend penyebaran Covid-19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.01.02		Dinas Sosial		**Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	*Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan*	86 kali	56 kali	65.12 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan di masa pandemi Covid-19 terdapat pengurangan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19	Dilakukan pemetaan kegiatan dan penyesuaian konsep kegiatan dengan trend penyebaran Covid-19	
7.01.04.2.02		Kec. Sukolilo		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	408 kali	408 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Sukolilo		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	408 kali	408 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Gunung Anyar		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	408 kali	408 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Gunung Anyar		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	408 kali	408 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Lakarsantri		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian*	360 kali	374 kali	103.89 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*						
7.01.04.2.02.01		Kec. Lakarsantri		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	374 kali	103.89 %			
7.01.04.2.02		Kec. Benowo		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Benowo		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Tandes		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Tandes		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Jambangan		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	365 kali	101.39 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.02.01		Kec. Jambangan		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	365 kali	101.39 %			
7.01.04.2.02		Kec. Gayungan		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Gayungan		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Asemrowo		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Asemrowo		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Wonocolo		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Wonocolo		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian*	360 kali	360 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja*						
7.01.04.2.02		Kec. Genteng		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Genteng		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Sambikerep		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Sambikerep		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Krembangan		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Krembangan		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
7.01.04.2.02		Kec. Dukuh Pakis		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Dukuh Pakis		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Tambaksari		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	365 kali	101.39 %			
7.01.04.2.02.01		Kec. Tambaksari		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	365 kali	101.39 %			
7.01.04.2.02		Kec. Bubutan		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	364 kali	101.11 %			
7.01.04.2.02.01		Kec. Bubutan		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	364 kali	101.11 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.02		Kec. Wiyung		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Wiyung		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Karangpilang		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Karangpilang		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Pabean Cantian		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	365 kali	101.39 %			
7.01.04.2.02.01		Kec. Pabean Cantian		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	365 kali	101.39 %			
7.01.04.2.02		Kec. Wonokromo		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian*	360 kali	363 kali	100.83 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*						
7.01.04.2.02.01		Kec. Wonokromo		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	363 kali	100.83 %			
7.01.04.2.02		Kec. Simokerto		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Simokerto		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Rungkut		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	408 kali	408 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Rungkut		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	408 kali	408 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Sawahan		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.02.01		Kec. Sawahan		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Mulyorejo		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	408 kali	365 kali	89.46 %	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan terutama diarea zona lindung	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.04.2.02.01		Kec. Mulyorejo		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	408 kali	365 kali	89.46 %	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan terutama diarea zona lindung	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.04.2.02		Kec. Kenjeran		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	358 kali	99.44 %	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.04.2.02.01		Kec. Kenjeran		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	358 kali	99.44 %	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.04.2.02		Kec. Semampir		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	365 kali	101.39 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.02.01		Kec. Semampir		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	365 kali	101.39 %			
7.01.04.2.02		Kec. Pakal		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Pakal		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Bulak		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	365 kali	101.39 %			
7.01.04.2.02.01		Kec. Bulak		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	365 kali	101.39 %			
7.01.04.2.02		Kec. Sukomanunggal		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	365 kali	101.39 %			
7.01.04.2.02.01		Kec. Sukomanunggal		**Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan**	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian*	360 kali	365 kali	101.39 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*						
7.01.04.2.02		Kec. Gubeng		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Gubeng		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	360 kali	100%			
7.01.04.2.02		Kec. Tegalsari		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	366 kali	101.67 %			
7.01.04.2.02.01		Kec. Tegalsari		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja*	360 kali	366 kali	101.67 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
7.01.05		Dinas Sosial		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase lembaga/organisasi/kelompok kepahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan kepahlawanan	100.00%	100.00%	100.00%			
7.01.05.2.01		Dinas Sosial		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	*Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan*	33 kali	34 kali	103.03 %			
7.01.05.2.01.02		Dinas Sosial		**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	*Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan*	33 kali	34 kali	103.03 %			
7.01.06		Kec. Genteng		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Simokerto			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tegalsari			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	94.44%	94.44%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Bubutan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Kenjeran			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	99.81%	99.81%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Pabean Cantian			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Semampir			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Krembangan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tambaksari			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gubeng			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Rungkut			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gunung Anyar			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukolilo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Mulyorejo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	96.49%	96.49%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Wonokromo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	99.44%	99.44%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
		Kec. Karangpilang			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Dukuh Pakis			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Gayungan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kec. Jambangan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wonocolo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sawahan			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Wiyung			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Tandes			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Asemrowo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sukomanunggal			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Benowo			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Lakarsantri			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Sambikerep			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Pakal			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kec. Bulak			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	100.00%			
7.01.06.2.01		Kec. Wonocolo		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan,Verifikasi dam Validasi Data Sarana*	60 Kali	60 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.06.2.01.18		Kec. Wonocolo		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan,Verifikasi dam Validasi Data Sarana*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Genteng		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Genteng		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Sambikerep		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Sambikerep		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Dukuh Pakis		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Dukuh Pakis		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Krembangan		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Krembangan		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Tambaksari		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Tambaksari		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan*	60 kali	60 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*						
7.01.06.2.01		Kec. Gunung Anyar		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Gunung Anyar		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Sukolilo		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Sukolilo		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Tenggilis Mejoyo		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Lakarsantri		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	69 Kali	115%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Lakarsantri		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	69 Kali	115%			
7.01.06.2.01		Kec. Benowo		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Benowo		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.06.2.01		Kec. Tandes		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Tandes		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Jambangan		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Jambangan		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Gayungan		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Gayungan		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Asemrowo		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Asemrowo		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Simokerto		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	120 Kali	120 Kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Simokerto		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	120 Kali	120 Kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Sawahan		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan*	60 Kali	60 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengawasan Pemerintahan Desa	*Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*						
7.01.06.2.01.18		Kec. Sawahan		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Rungkut		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Rungkut		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Mulyorejo		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Mulyorejo		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Kenjeran		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Kenjeran		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Pakal		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Pakal		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Semampir		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.06.2.01.18		Kec. Semampir		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Bulak		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Bulak		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Sukomanunggal		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	83 kali	138.33 %			
7.01.06.2.01.18		Kec. Sukomanunggal		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	83 kali	138.33 %			
7.01.06.2.01		Kec. Gubeng		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Gubeng		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Tegalsari		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Tegalsari		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Bubutan		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	45 Kali	45 Kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Bubutan		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan*	45 Kali	45 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*						
7.01.06.2.01		Kec. Wiyung		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Wiyung		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 kali	60 kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Pabean Cantian		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Pabean Cantian		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01		Kec. Karangpilang		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	66 Kali	110%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Karangpilang		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	66 Kali	110%			
7.01.06.2.01		Kec. Wonokromo		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			
7.01.06.2.01.18		Kec. Wonokromo		**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	*Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah*	60 Kali	60 Kali	100%			

3.1.2.8 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verfikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur Pemerintahan Umum mencakup urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum di Kota Surabaya pada tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum Kota Surabaya tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.20
Capaian Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.01.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88.00%	91.25%	103.69%			
		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%	100.00%	100.00%			
8.01.01.2.02		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
8.01.01.2.02.01		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	100%	100%			
8.01.01.2.08		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
8.01.01.2.08.03		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran*	100%	100%	100%			
8.01.02		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	80.00%	81.58%	101.97%			
		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	77.72%	99.43%	127.93%			
8.01.02.2.01		Badan Penanggulangan Bencana Dan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	*Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat*	81 kali	81 kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Masyarakat	Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	**Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**							
8.01.02.2.01.04		Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat		**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	*Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat*	81 kali	81 kali	100%			
8.01.02.2.01		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	*Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan*	750 orang	783 orang	104.4 %			
8.01.02.2.01.04		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	*Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan*	750 orang	783 orang	104.4 %			
8.01.03		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	80.00%	81.58%	101.97%			
8.01.03.2.01		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan*	10 lembaga	10 lembaga	100%			
8.01.03.2.01.04		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan*	10 lembaga	10 lembaga	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
8.01.04		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	80.00%	81.58%	101.97%			
8.01.04.2.01		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan*	21 lembaga	24 lembaga	114.29 %			
8.01.04.2.01.05		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	*Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan*	21 lembaga	24 lembaga	114.29 %			
8.01.05		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	80.00%	81.58%	101.97%			
8.01.05.2.01		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	*Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama*	30 kali	30 kali	100%			
8.01.05.2.01.04		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	*Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama*	30 kali	30 kali	100%			
8.01.06		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN**	Persentase gangguan ketenteraman umum yang ditangani	100.00%	99.66%	99.66%	- Mengingat situasi pandemi sudah mulai membaik, sehingga semua permasalahan	- Terus dilakukan koordinasi dengan jajaran samping agar gejolak aksi unjuk rasa	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					gejolak IPOLEKSOSBUD di Kota Surabaya mulai muncul. - Terus melakukan koordinasi dengan jajaran samping terkait rencana aksi yang akan dilaksanakan pengunjuk rasa sehingga perlu dilakukan audiensi tanpa melakukan unjuk rasa turun ke jalan. - Terus melakukan koordinasi dengan SKPD	turun jalan dapat diminimalisir tanpa melakukan aksi dimaksud; - Melakukan koordinasi dengan SKPD untuk dapat menemui perwakilan aksi unjuk rasa melalui audiensi.	
8.01.06.2.01		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	*Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota*	194 kali	270 kali	139.18 %			
		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat			*Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota*	24 kali	39 kali	162.5 %			
8.01.06.2.01.04		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	*Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota*	194 kali	270 kali	139.18 %			
8.01.06.2.01.05		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,**	*Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota*	24 kali	39 kali	162.5 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							

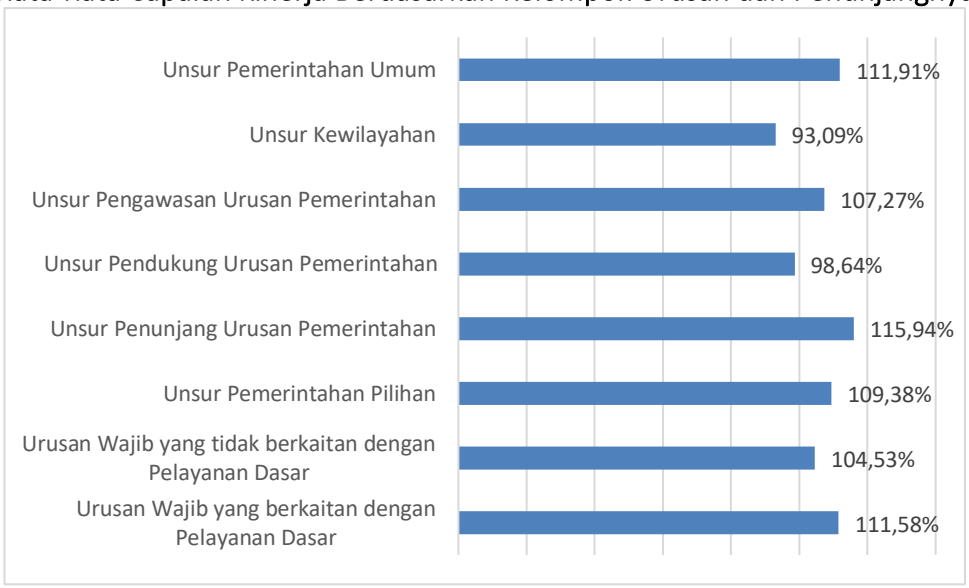
Kesimpulan :

Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak semester pertama tahun 2020, telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam rangka penanganan pandemi tersebut, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan berbagai penyesuaian dan *refocusing* program kerja dan anggaran serta langkah inovasi sesuai aturan, ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data capaian kinerja dapat diketahui Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, dan Unsur Pemerintahan Umum mampu mencapai dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas penyelenggara pemerintahan kota cukup tinggi dari semua elemen, dalam menghadapi tantangan yang cukup berat pada masa pandemi tersebut. Fungsi dan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masih tetap dapat dipertahankan dengan baik.

Sedangkan Unsur Kewilayahan dan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi yang terjadi.

Gambar 3.10
Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Kelompok Urusan dan Penunjangnya



Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2022

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja

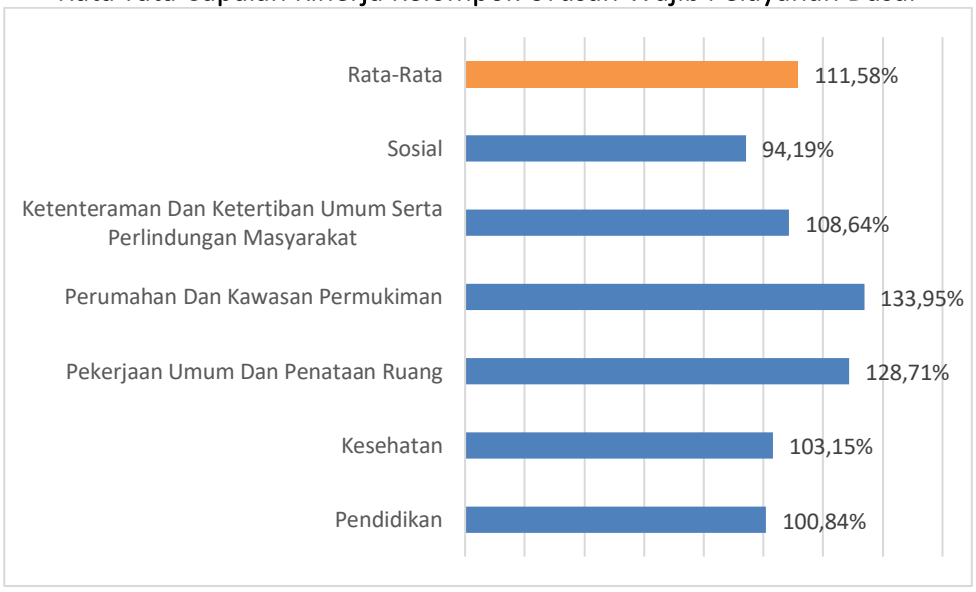
3.1.3.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, serta Sosial mampu mencatat kinerja yang baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan wajib pelayanan dasar mencapai 111,58%.

Meskipun demikian, pada urusan wajib pelayanan dasar, rata-rata capaian kinerja urusan sosial layak untuk memperoleh perhatian yang lebih besar karena angka rata-ratanya masih di bawah 100%, yakni mencapai 94,19%. Beberapa program yang mendukung urusan sosial antara lain: Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Adapun capaian program yang kurang optimal adalah Program Rehabilitasi Sosial, kurang optimalnya capaian program tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terjadinya Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada aspek mobilitas dan interaksi sosial, sehingga mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar sosial. Kedua, kegiatan jumlah orang yang mendapat fasilitasi Pemakaman tidak berjalan karena Perwali pelaksanaan kegiatan Pemakaman masih dalam proses penyusunan.

Gambar 3.11
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib Pelayanan Dasar



Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2022

3.1.3.2 Kinerja Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

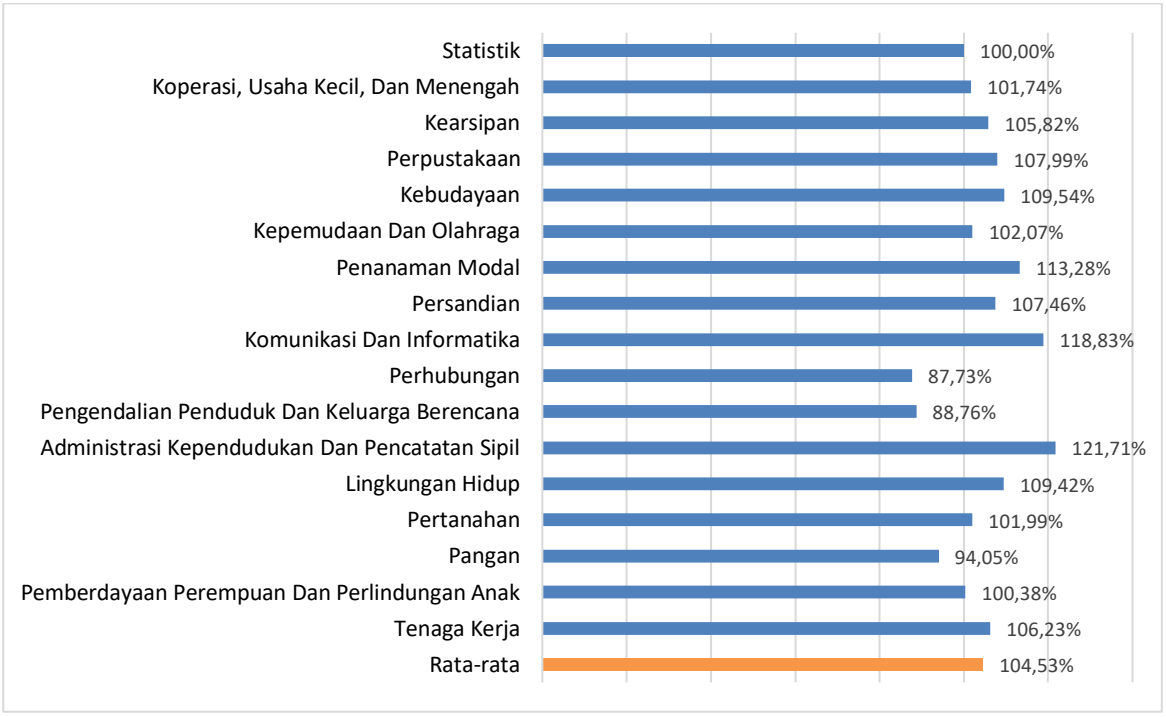
Secara umum, kinerja Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: urusan Tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Pangan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Persandian, Penanaman modal, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Koperasi dan UMKM serta Statistik mencatat hasil yang sangat baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan wajib bukan pelayanan dasar mencapai 104,53%.

Adapun beberapa urusan yang mungkin perlu memperoleh perhatian khusus ada tiga urusan. Pertama, menyangkut rata-rata kinerja urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang mencapai 94,05%. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, untuk indikator jumlah kelompok yang mendapatkan intervensi tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Permentan No.7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Kedua, menyangkut rata-rata kinerja urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mencapai 88,76%. Hal ini disebabkan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk indikator Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan tidak terlaksana dengan baik karena tidak ada penyedia yang memenuhi syarat.

Ketiga, menyangkut rata-rata kinerja urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang mencapai 87,73%. Hal ini disebabkan pada program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tidak terlaksana dengan baik karena masih ada pengguna jalan yang masih melanggar dan tidak mematuhi serta mentaati rambu-rambu lalu lintas.

Gambar 3.12
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

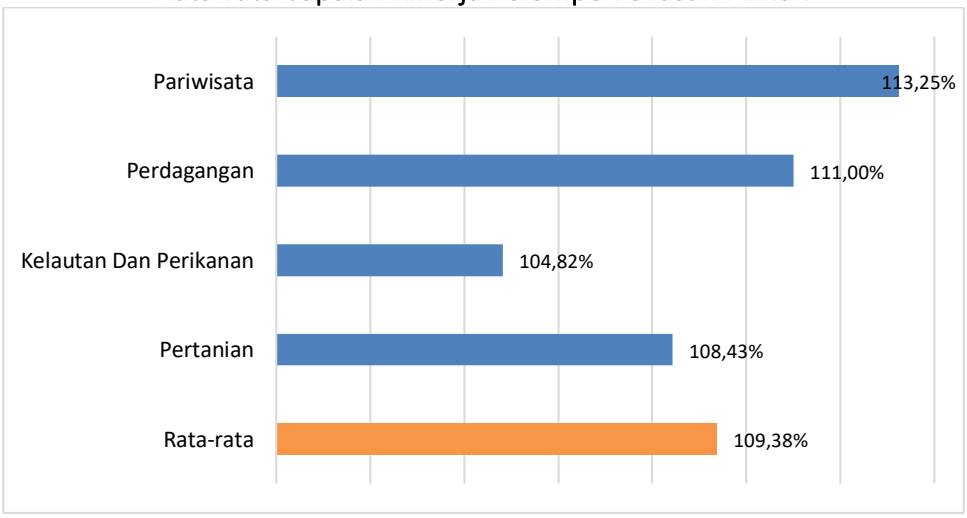


Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2022

3.1.3.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Secara umum, kinerja Urusan Pilihan yang meliputi: Urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pilihan mencapai 109,38%.

Gambar 3.13
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pilihan

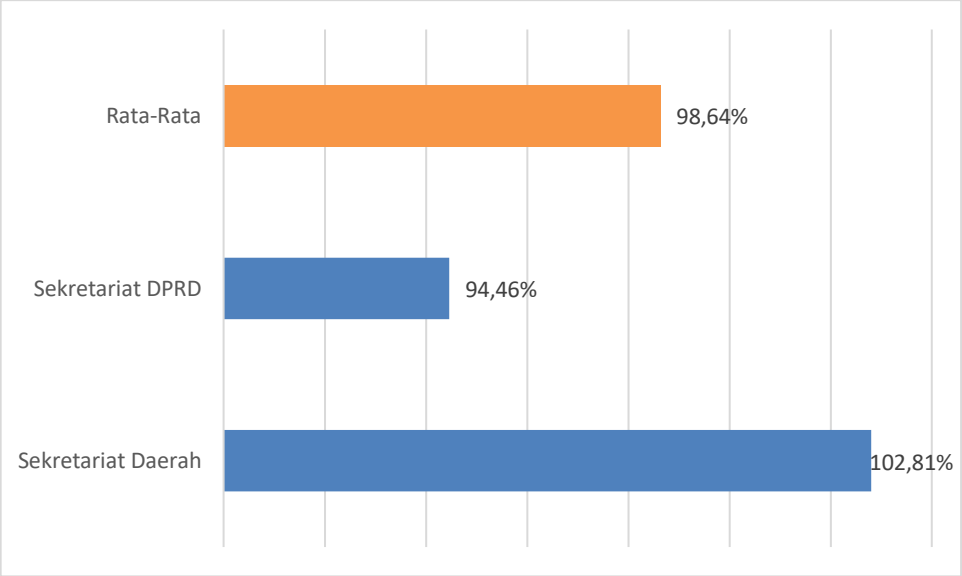


Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2022

3.1.3.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang meliputi urusan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD belum terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 98,56%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19, sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana secara maksimal.

Gambar 3.14
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

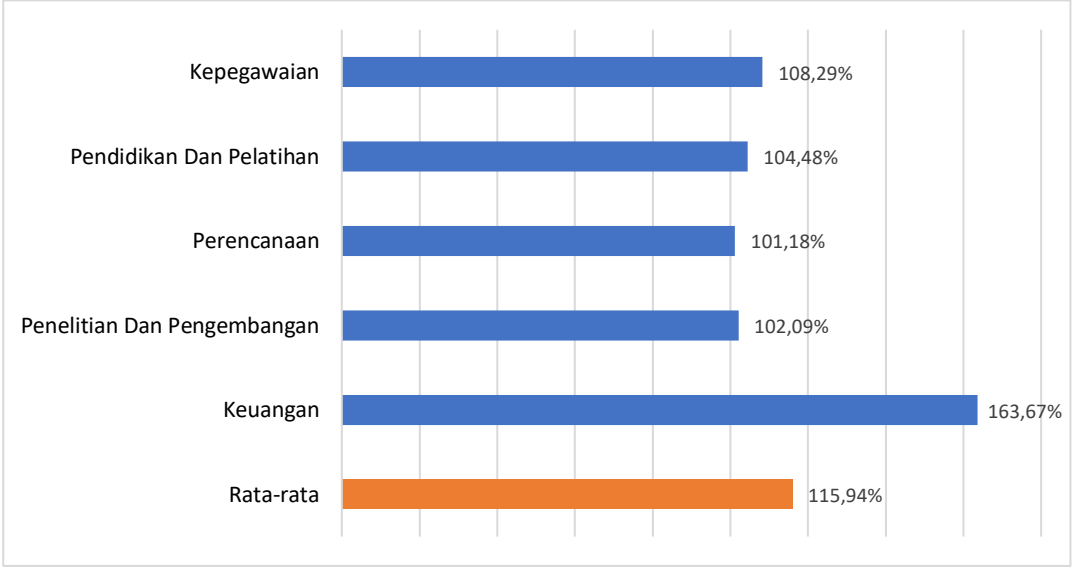


Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2022

3.1.3.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang meliputi fungsi: Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dan Keuangan secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 115,94%. Adapun program Pengelolaan Pendapatan Daerah belum berjalan dengan baik, karena situasi pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pada bidang promosi/pemasangan materi reklame. Akibatnya tempat usaha seperti Hotel, Restoran, dan hiburan belum beroperasi secara penuh sehingga berpengaruh pada pendapatan daerah Kota Surabaya.

Gambar 3.15
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan



Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2022

3.1.3.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Secara umum, kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Inspektorat Daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan mencapai 107,27%.

3.1.3.7 Kinerja Unsur Kewilayahan

Kinerja Unsur Kewilayahan yang meliputi Urusan Kecamatan belum terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 93,09%. Hal ini disebabkan pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kurang berjalan dengan baik karena penggunaan keuangan daerah diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

3.1.3.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pemerintahan Umum mencapai 111,91%.

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan yang diambil oleh Walikota Surabaya Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.21
Kebijakan Strategis Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya
2	Pemberdayaan Usaha Mikro	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro	Untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah
3	Pendapatan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan	Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
5	RKPD Kota Surabaya Tahun 2021	Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	1 Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 2. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
6	Pendapatan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Sebesar 2% (Dua Persen) Terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Yang Terutang Akibat Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya	1. untuk memberikan penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang akibat dampak penyebaran Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) di Kota Surabaya 2. untuk memberikan keringanan beban masyarakat akibat dampak penyebaran wabah Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) di Kota Surabaya
7	Penanganan Covid-19	Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya	Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Penerapan Protokol kesehatan guna pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya, terhadap penyelenggaraan kegiatan rekreasi dan hiburan umum
8	Kesehatan	Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Bagi Penduduk Kota Surabaya	untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk di Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
9	Pendapatan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Berupa Pembebasan Pajak Bagi Hotel Yang Dimanfaatkan Untuk Isolasi Warga Yang Memiliki Potensi Terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	1. untuk memberikan insentif pajak berupa pembebasan pajak hotel yang dipakai untuk tempat isolasi warga yang memiliki potensi terinfeksi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) 2. untuk memberikan keringanan beban pajak kepada pengusaha/pengelola hotel yang dipakai untuk tempat isolasi warga yang memiliki potensi terinfeksi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19)
10	Pendidikan	Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri	Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri bertujuan memberi kesempatan seluas–luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik–baiknya
11	Pendapatan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya	dalam rangka evaluasi penerapan pajak online guna optimalisasi penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara online
12	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan Dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah	dalam rangka pemberian intervensi pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
13	Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2021	Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021	Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 serta adanya perubahan kebijakan dan program prioritas Tahun 2021
14	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya	salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau terlantar dan terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya agar memperoleh kebutuhan permakanan yang layak
15	Penanganan Covid-19	Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bahan Makanan Bagi Warga Masyarakat Terkonfirmasi Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya	1. sebagai upaya penanganan guna memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah 2. memberikan kepastian dalam pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar berupa pangan bagi warga masyarakat yang menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi dan/atau berkontak erat dengan warga masyarakat yang terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah
16	Pendapatan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pengurangan Tarif Sewa Rumah Susun Akibat Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya	Untuk memberikan pengurangan tarif sewa rumah susun akibat dampak penyebaran Corona Virus Disease 2O19 (Covid-19) di Kota Surabaya

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
17	Pendidikan	Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa	1. Dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa 2. Penambahan jenis beasiswa yang diberikan dan perubahan syarat penerima beasiswa
18	Penanggulangan Bencana	Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak-lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut.

Tabel 3.22
Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	Sosialisasi terkait produk hukum yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat tetap perlu dilakukan, meskipun sudah memiliki akses JDIH Surabaya. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi atau web tersebut serta cara akses dan penggunaannya. Hal ini sebagai upaya membentuk masyarakat agar taat pada peraturan daerah yang berlaku	Bagian Hukum	Produk hukum tetap disampaikan kepada masyarakat melalui RT/RW/LPMK dalam bentuk CD/DVD. Jadi produk hukum disebarluaskan tidak hanya melalui JDIH dan sosialisasi tapi juga dikemas dlm CD/DVD	TA 2021 sudah dianggarkan pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
2	Melakukan inovasi budidaya maggot sebagai upaya untuk menekan biaya pakan ternak atau pakan ikan, serta bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk budidaya ternak atau perikanan tersebut. Budidaya maggot juga dapat memanfaatkan sampah organik, dengan berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan melihat/mempelajari pilot projectnya terlebih dahulu guna mengetahui potensi budidaya maggot serta penghematan yang dilakukan jika maggot diberikan sebagai alternatif	Inovasi budidaya maggot sebagai upaya untuk menekan biaya pakan ternak atau pakan ikan telah terakomodir pada Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
3	Perlunya pemberdayaan nelayan, baik nelayan kelompok kecil maupun kelompok besar. Perlunya pembinaan secara mental/motivasi, pemahaman kondisi laut perikanan dan tata cara penangkapan ikan, serta memfasilitasi nelayan agar dapat berlayar lebih jauh untuk peningkatan kuantitas hasil tangkapan. Untuk pembinaan bisa bekerjasama dengan Perguruan tinggi atau Universitas yang membidangi.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melakukan koordinasi secara intensif dengan kelompok nelayan serta melaksanakan kegiatan pembinaan nelayan untuk perikanan tangkap	Pemberdayaan nelayan telah terakomodir pada Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Dimana peserta yang dibina merupakan nelayan dan pembudidaya ikan dengan mendapatkan materi dan praktek pemeliharaan kapal, service

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
				mesin perahu, dan sebagainya. Pada tahun 2021, juga dilakukan pembinaan motivasi yaitu Penumbuhan Semangat dan Spirit Bekerja.
4	Dalam pembinaan budidaya ikan (lele) di masyarakat, harus ada pemantauan dan pembinaan berkelanjutan sampai masyararakat dapat berbudidaya secara mandiri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah melakukan pembinaan terhadap pembudidaya ikan, akan tetapi proses pembinaan tersebut masih perlu ditingkatkan sampai masyarakat pembudidaya ikan dapat melakukan secara mandiri.	Pembinaan terhadap masyarakat pembudidaya ikan telah terakomodir pada Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Pada tahun 2021, dilakukan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan dan Aplikasi Probiotik pada Budidaya Ikan Air Tawar dan payau, tentang aplikasi pemberian probiotik dalam pakan mampu menghasilkan ikan lele dengan pertumbuhan yang lebih baik menggunakan aplikasi probiotik dalam pakan jika dibandingkan dengan tanpa probiotik (kontrol)
5	Optimalisasi peningkatan fasilitas di Sentra Ikan agar dapat dijadikan ikon dalam destinasi wisata terpadu dengan berkolaborasi bersama UMKM kekinian untuk meningkatkan daya tarik wisata.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Selain penataan kawasan serta penyediaan sarana dan prasarana di Sentra Ikan, upaya optimalisasi juga dilakukan dengan melibatkan nelayan setempat untuk optimalisasi pengembangan wisata bahari dengan	Optimalisasi fungsi Sentra Ikan sudah terakomodir dalam sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dan sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			menggunakan perahu wisata serta fasilitasi UMKM unggulan setempat.	Kabupaten/Kota dimana didalam sub kegiatan tersebut terdapat komponen komponen operasional untuk pengembangan sentra ikan.
6	Kelompok Informasi Masyarakat, agar diberikan fasilitas serta dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas SDM nya. Hal ini dimaksudkan untuk fungsi pengendalian informasi pemerintah Kota Surabaya serta menghindari berita-berita hoax yang merugikan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Telah dilakukan koordinasi dengan Camat dan Lurah se-Surabaya untuk melibatkan KIM dalam peliputan event yang berlangsung di tiap-tiap wilayah	Peningkatan kapasitas SDM Kelompok Informasi Masyarakat melalui pelatihan (misalnya pelatihan jurnalistik, pembuatan konten, public speaking) bagi dilaksanakan melalui sub kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
7	Pelaksanaan pemberian perangkat jaringan internet pada tiap RW yang masuk anggaran kelurahan / kecamatan, agar dilakukan pemantauan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terkait kualitas sistem jaringannya.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika selalu memantau dengan menjadi pihak yang berhubungan dengan penyedia jasa (provider) setelah menerima keluhan dari Kelurahan/Kecamatan	Keluhan yang masuk tentang Internet RW, Dinas turut mengkomunikasikan dengan pihak penyedia jasa (provider) untuk tindaklanjutnya
8	Perlu peningkatan sinergi antara Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pengembangan UMKM.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Telah dilakukan virtual exhibition pada 9-11 April yang melibatkan UMKM dimana sistem jual beli dilakukan secara virtual	Untuk mendukung UMKM salah satunya yang dilakukan adalah pameran virtual pada 9-11 April. Saat ini sedang proses, integrasi data dan informasi dari aplikasi yang ada di Perangkat Daerah ke dalam Dashboard.
9	Agar dilakukan sosialisasi bagaimana tujuan, manfaat dan cara penggunaan aplikasi “wargaku” sebagai media untuk menampung keluhan, pertanyaan dan pelaporan masyarakat kepada Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Akan dikoordinasikan	Penggunaan aplikasi “wargaku” akan terus disosialisasikan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
10	Standart respon rata-rata pemadaman kebakaran agar lebih ditingkatkan lagi, tidak terpaku pada 15 menit, karena standart tersebut selama ini sudah tercapai	Dinas Pemadam Kebakaran	Capaian Respon Time tidak melebihi 15 menit mengacu kepada SPM kebakaran, adapun capaian realisasi di Kota Surabaya bisa mencapai 7 menit.	Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kebakaran < 15 menit adapun pencapaian respon time di Kota Surabaya tahun 2021 sudah mencapai 7 menit dan telah diakomodir melalui sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota serta ditunjang dengan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
11	Perlu peningkatan kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan peran serta masyarakat dalam menangani serta melakukan mitigasi kejadian kebakaran. Perlu diberikan sosialisasi pada masing-masing RT/RW dan diberikan perlengkapan darurat yang dibutuhkan untuk pemadaman kebakaran di lingkungan sekitar.	Dinas Pemadam Kebakaran	Telah dilakukan peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pemenuhan kebutuhan serta sosialisasi kepada warga dan pegawai pemerintahan dan non pemerintahan dalam melakukan evakuasi saat terjadi kebakaran.	Peningkatan kompetensi aparatur telah diakomodir melalui sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran, sedangkan sosialisasi terhadap masyarakat diakomodir dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
12	Terhadap perijinan investasi yang telah diterbitkan, agar dilakukan pemantauan pelaksanaan usaha dan kondisi usaha, khususnya bagi usaha-usaha kecil. Sehingga kondisi investasi dapat diupdate dan dipantau secara berkala.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melakukan pengawasan atas setiap perizinan yang telah diterbitkan dengan obyek pengawasan adalah	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha baik secara daring / maupun luring terhadap perkembangan kegiatan penanaman modal. Pemantauan/pengawasan perijinan/investasi pada tahun 2021

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			kesesuaian antara Izin yang diterbitkan dengan Kegiatan Usaha.	dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
13	Pelayanan secara online agar lebih dioptimalkan dengan sistem dan prosedur perijinan yang lebih sederhana, mudah dan cepat. Selain itu perlu sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait layanan perijinan on line tersebut	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah menyediakan pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. DPMPTSP juga telah melakukan sosialisasi terkait perizinan online melalui media sosial dan sosialisasi kepada pelaku usaha.	Akan melakukan penyempurnaan pelayanan online sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah serta Peraturan pendukung lainnya. Pelayanan perijinan secara online pada tahun 2021 dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
14	Melakukan appraisal atau kajian terhadap pengelolaan seluruh aset daerah yang dikelola Dinas Pemuda dan Olah Raga, agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat serta mendapatkan PAD dari retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah melakukan kajian dan pengajuan Perda Retribusi terkait penggunaan aset dibawah Pemerintah Kota Surabaya yang berkaitan dengan even pemuda dan olahraga yang juga dapat berkontribusi terhadap PAD diantaranya GOR Tambaksari dan GBT.	Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk mendukung perolehan PAD

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
15	Saat ini sudah mencakup separuh dari pemuda Surabaya telah dilakukan pembinaan kepemudaan. Perlu peningkatan pembinaan kepemudaan agar bisa mencakup seluruh pemuda di Surabaya, untuk menekan kenakalan remaja dengan aktivitas-aktivitas yang lebih produktif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pelaksanaan pembinaan terhadap pemuda oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah dilakukan secara rutin yang setiap tahunnya dapat membina sebanyak 300-400 peserta. Namun dalam masa pandemi kegiatan tersebut dilakukan secara virtual dan kegiatan tatap muka hanya menampung sebanyak 100 peserta.	Melakukan pembinaan terhadap kelompok pemuda dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas daya saing
16	Memberikan kemudahan akses terhadap para atlit olahraga yang memiliki potensi agar mampu meningkatkan prestasi olah raga dan membawa nama baik Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kemudahan akses olahraga telah dilakukan melalui pemenuhan prasarana olahraga melalui unit terkecil yaitu tingkat RT.	Melakukan pembinaan atlit secara berjenjang dan berkelanjutan serta penyediaan dan kemudahan akses ke prasarana pendukung olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga
17	Menjalin Kerjasama dengan seluruh instansi/lembaga/ perorangan yang selama ini memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Surabaya dalam satu wadah tertentu agar lebih berkesinambungan	Bagian Administrasi Kerjasama	Kami sepakat dibentuk suatu wadah/forum untuk mendorong, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelakasanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha/lembaga/perorangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, yang mengamanatkan kabupaten/kota untuk membentuk forum dimaksud yang dikoordinir oleh Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota. Saat ini pelaksanaan CSR oleh badan usaha,	- Mendorong Perangkat Daerah untuk Berkoordinasi menjalin Kerjasama dengan badan usaha, lembaga, dan perorangan yang berkenan mensinergikan kegiatannya dengan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya - Pembuatan dokumen untuk pelaksanaan kerjasama akan difasilitasi oleh Bagian Administrasi Kerjasama - Akan dibentuk forum sebagai wadah sarana CSR/tanggung jawab sosial dengan badan usaha, lembaga,

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			lembaga maupun perorangan masih dikelola oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang CSR nya. Misal CSR pembuatan taman dikoordinir oleh DKRTH, CSR pembangunan jalan/jembatan dikoordinir oleh DPUMBP. Untuk admistrasi nya dibantu oleh Bagian Administrasi Kerjasama (pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah)	dan perorangan sebagai anggota forum
18	Menjalin kerjasama dengan investor-investor perusahaan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, baik dalam bentuk bina lingkungan maupun terkait usaha kemitraan	Bagian Administrasi Kerjasama	Sepakat untuk dilakukan menjalin kerjasama yang sebanyak-banyaknya dengan badan usaha, lembaga maupun perorangan yang nantinya dapat membantu/disinergikan dengan program kegiatan yang ada di Perangkat Daerah sehingga dapat menambah jangkauan/sasaran/luasan program kegiatan yang akan dikerjakan	- Berkoordinasi menjalin Kerjasama dengan badan usaha, lembaga, dan perorangan yang berkenan mensinergikan kegiatannya dengan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya - Pembuatan dokumen untuk pelaksanaan kerjasama akan difasilitasi oleh Bagian Administrasi Kerjasama - Akan dibentuk forum sebagai wadah sarana CSR/tanggung jawab sosial dengan badan usaha, lembaga, dan perorangan sebagai anggota forum
19	Melakukan update kembali dan memaksimalkan kerjasama dengan Luar Negeri di tengah kondisi perkembangan pandemi Covid-19.	Bagian Administrasi Kerjasama	Sepakat untuk memaksimalkan kerjasama luar negeri meskipun ditengah kondisi pandemi Covid-19, dengan melakukan pemilahan jenis kerjasama yang saling menguntungkan	Dengan tetap berkoordinasi dengan negara-negara yang masih ada perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			dengan tetap mempertimbangkan antisipasi penyebaran Covid-19 dari luar negeri	negara lain untuk menawarkan untuk menjalin kerjasama
20	Dengan adanya permintaan rusun sekitar 11.000 KK, maka Pemerintah Kota Surabaya agar segera melakukan kajian pemenuhan kebutuhan rusun tersebut, baik dengan memanfaatkan aset tanah pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat atau dapat memaksimalkan jumlah lantai bangunan rumah susun yang sudah dimiliki, mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, serta lahan permukiman yang semakin terbatas	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berupa Rusunawa, Pemerintah Kota Surabaya melakukan beberapa usaha antara lain : 1. Mengajukan bantuan pembangunan Rusunawa kepada Pemerintah Pusat, 2. Melakukan screening data pemohon dan melakukan sinkronisasi dengan data MBR dari Dinas Sosial. JUmlah lantai maksimal Rusunawa yang dibangun (5 lantai) dengan mempertimbangkan ketentuan pada PERMEN PU NOMOR : 60/PRT/1992 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN dimana pada pasal 18 ayat (3) disebutkan Tangga harus digunakan pada bangunan rumah susun sampai dengan 5 (lima) lantai dan untuk bangunan rumah susun lebih dari 5 (lima) lantai harus dilengkapi dengan lift atau escalator. Selain itu juga mempertimbangkan biaya operasional Rusunawa dibandingkan dengan kemampuan penghuni Rusunawa	Melakukan review terhadap kemungkinan mekanisme pembiayaan rusunawa

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
21	Agar dilakukan penelitian secara faktual dan akurat terhadap penghuni rusun lama, terkait perkembangan kondisi sosial ekonomi apakah masih layak masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah yang masih perlu difasilitasi penyediaan rumah susun, serta terkait Batasan waktu yang ditetapkan sebagai penghuni rumah susun, mengingat rumah susun bukan untuk tempat tinggal tetap.	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	DPBT secara berkala memantau perkembangan kondisi sosial ekonomi penghuni rusun. Jika dinilai sudah tidak layak untuk tinggal di rusun lagi, penghuni diminta untuk mencari tempat tinggal lain	Pengelolaan rumah susun pada tahun 2021 dilaksanakan melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun dan sub kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
22	Membuat standarisasi klasifikasi pemohon yang layak menempati rusun dan ditetapkan kriteria prioritas terkait mereka yang mengajukan sebagai penghuni rusun baru. Untuk kebutuhan tersebut maka diperlukan petugas lapangan yang mampu melakukan pemetaan kondisi masyarakat secara riel sehingga tidak salah dalam menetapkan prioritas penghuni rumah susun.	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Sudah ada standarisasi klasifikasi pemohon yang layak menempati rusun	Dilakukan review terhadap standarisasi klasifikasi penghuni Rusunawa
23	Membantu memaksimalkan desain dan konstruksi pembangunan rumah susun agar bisa efektif dan mampu menampung pemohon rumah susun yang cukup banyak.	Dinas Perumahan Rakyat dan permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Desain dan konstruksi rumah susun telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan juga mempertimbangkan biaya pemeliharaan rutin.	Pembuatan desain terkait rumah susun telah terakomodir dalam sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian terkait biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan rumah susun
24	Memberikan update kondisi perkembangan pembangunan di Kota Surabaya. Apabila terdapat pembangunan yang belum optimal,	Dinas Perumahan Rakyat dan permukiman,	akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait upaya optimalisasi pembangunan, termasuk	kegiatan jaring aspirasi masyarakat telah terakomodir dalam sub kegiatan Pembangunan Infrastruktur

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	maka dapat memanfaatkan kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat sehingga dapat ditindaklanjuti.	Cipta Karya dan Tata Ruang	memanfaatkan kegiatan jaring aspirasi masyarakat	dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman dari segi infrastruktur (jalan paving dan saluran)
25	Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung-gedung milik Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan tingkat kelurahan agar tidak mudah rusak, karena terdapat beberapa bangunan yang usia bangunannya cukup lama serta adanya potensi kerusakan karena cuaca ekstrim	Dinas Perumahan Rakyat dan permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Pemeliharaan gedung milik pemerintah dilakukan secara rutin dan berkala disesuaikan dengan kondisi bangunan gedung serta anggaran yang tersedia.	Pelaksanaan pemeliharaan gedung milik pemerintah telah terakomodir dalam sub kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan agar bisa lebih lama bertahan terhadap segala kondisi, termasuk cuaca ekstrim
26	Tetap melestarikan budaya khas Surabaya, agar tidak tenggelam terutama di masa modern serta di tengah masa pandemi Covid-19, dengan lebih meningkatkan promosi pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan berbagai terobosan dan inovasi dengan menggelar pagelaran seni dan budaya secara virtual sehingga memfasilitasi warga Kota Surabaya untuk tetap dapat menikmati budaya khas Surabaya secara jarak jauh serta memfasilitasi pemberdayaan para seniman Kota Surabaya untuk tetap berkarya. Penampilan seniman di balai pemuda telah diliput secara live melalui kanal youtube Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan juga milik Pemerintah Kota Surabaya diantaranya, Sparkling	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid Kota Surabaya untuk dapat segera menyelenggarakan pagelaran seni dan buadaya secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			Surabaya, Sapa Warga Surabaya, dan Bangga Surabaya, juga berkolaborasi dengan beberapa media televisi. Demi meramaikan pertunjukkan "Parade Seni Budaya" yang berlangsung secara virtual dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menggandeng beberapa tokoh seniman dan budayawan asal Surabaya seperti, Cak Kartolo, Cak Lupus, dan Cak Suro.	
27	Dengan adanya pembongkaran Taman Hiburan Rakyat sebagai salah satu ikon tempat budaya, maka harus ada tempat sementara/pengganti agar kegiatan seni budaya tetap dapat dilaksanakan dan dilestarikan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	THR sedang dalam tahap renovasi, namun masyarakat Surabaya masih bisa menikmati kegiatan seni budaya melalui kanal media sosial yang telah dipublikasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik melalui youtube maupun instagram.	Pelaksanaan revitalisasi Taman Remaja dalam rangka menciptakan pusat kesenian dan kebudayaan Kota Surabaya sebagai sarana berkreasi dan pemberdayaan bagi para seniman Kota Surabaya.
28	Lebih meningkatkan sosialisasi secara masiv, adanya kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan secara virtual.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya telah melakukan kegiatan pengembangan pariwisata dan kebudayaan secara virtual selama Pandemi diantaranya adalah: Pagelaran Seni Virtual, website tur museum, tur kuliner virtual, tur destinasi wisata virtual, dan sebagainya. Dalam rangka promosi berbagai kegiatan dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan promosi melalui sosial	Promosi pariwisata dan budaya Kota Surabaya akan dilaksanakan secara lebih masif dan terintegrasi dengan koordinasi intensif dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kedutaan Besar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah lain, akademisi, sektor swasta serta peran serta aktif warga Kota Surabaya.

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			media yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri serta dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Humas. Promosi juga dilaksanakan melalui koordinasi intensif dengan komunitas seniman Kota Surabaya.	
29	Memperhatikan kegiatan seni budaya keagamaan, untuk dilakukan pembinaan dan dipublikasikan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sejak tahun 2019, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mendirikan sebuah sanggar dan juga melaksanakan festival hadrah guna melestarikan seni budaya keagamaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan meningkatan frekuensi tampilan seni budaya keagamaan di skala lokal, regional atau nasional.
30	Membuat database dan pemetaan potensi pencemaran lingkungan di seluruh Kota Surabaya terkait jenis pencemaran, bahaya pencemaran dan disosialisasikan di masing-masing kecamatan sebagai upaya antisipasi diwilayah tersebut. Segera melakukan pengawasan dan penanganan sejak dini terkait kegiatan produksi baik perijinan lama maupun baru yang berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan.	Dinas Lingkungan Hidup	Selektif dalam memberikan perizinan yang akan berdampak negatif pada lingkungan hidup, namun dengan tetap mengoptimalkan layanan perizinan	1. Database dan pemetaaan potensi pencemaran dilakukan melalui : - Pengujian laboratorium sampel air dari beberapa lokasi badan air yang tersebar di Kota Surabaya setiap bulan untuk diketahui tingkat pencemaran air di beberapa daerah tersebut. - Pemantauan data Indeks ISPU selama 365 hari dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) Kebun Bibit Wonorejo dan Kebonsari 2. Penanganan dan pengawasan perijinan lama maupun baru pada tahun 2021 dilaksanakan melalui Pengelolaan dan Pemantauan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
				Lingkungan terhadap kegiatan usaha yang ada di wilayah Kota Surabaya yang dilakukan secara berkelanjutan. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya memiliki target sebanyak 254 lembaga yang akan dilakukan pengawasan serta pembinaan.
31	Menginisiasi legalitas program jamban pada lahan-lahan yang bukan milik pemerintah kota, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki jamban.	Dinas Lingkungan Hidup	Mengoptimalkan pelaksanaan program jamban terutama untuk mencapai target 100% akses sanitasi layak	Terhadap lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya akan dilakukan koordinasi agar pelaksanaan program jamban skala RT bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat dilakukan
32	Mengoptimalkan tenaga kerja yang fokus untuk pelaksanaan pembinaan koperasi dan usaha mikro di wilayah kecamatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Akan dilaksanakan	Pembinaan usaha mikro pada tahun 2021 dilaksanakan melalui sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Sedangkan pembinaan koperasi dilakukan melalui sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
				Kompetensi SDM Koperasi, serta sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
33	Segera melakukan verifikasi dan update data kondisi saat ini, kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Surabaya (sekitar 58.000 UMKM), untuk segera dilakukan klasifikasi dan dibuatkan program pembinaan sesuai klasifikasi, serta akses permodalan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	saat ini sedang dilakukan proses verifikasi dan update data UMKM sesuai dengan data dari kelurahan dan kecamatan, dan nantinya akan dipetakan ke dalam program pembinaan yang sesuai	Pada tahun 2021, pendataan UMKM dilaksanakan melalui sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, sedangkan pembinaan terhadap UMKM dilaksanakan melalui sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Untuk akses permodalan, difasilitasi melalui sub kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
34	Pelaksanaan pembinaan terhadap UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, secara kerkualitas dan intensif termasuk terkait manajemen pengelolaan keuangan agar dapat UMKM tersebut bisa mengembalikan pinjamannya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaksanaan pembinaan manajemen pengelolaan keuangan dilakukan dengan pendampingan bagaimana bantuan modal digunakan dan apakah ada/terjadi tunggakan	Pembinaan terhadap UMKM pada tahun 2021 dilaksanakan melalui sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
35	Melakukan revitalisasi Sentra Wisata Kuliner, agar mengundang minat pengunjung, serta dilakukan inovasi pelayanan yang menerapkan protokol kesehatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	beberapa SWK sedang dilakukan revitalisasi untuk menarik minat dan memberikan rasa nyaman ke pengunjung. SWK dan pedagang di dalamnya juga telah melaksanakan protokol kesehatan (penyediaan tempat cuci tangan, pedagang menggunakan masker dan mengatur jarak tempat duduk	Revitalisasi SWK untuk menarik minat pengunjung merupakan salah satu bentuk fasilitasi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan usaha pelaku usaha mikro binaan. Pada tahun 2021, hal ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
36	Dilakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat agar koperasi-koperasi memenuhi legalitasnya. Serta memberikan tindakan yang tegas terhadap koperasi simpan pinjam yang menggunakan jasa debt kolektor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Telah dilakukan pembinaan kepada koperasi dan mendorong mereka untuk memenuhi legalitas. Terhadap koperasi yang menggunakan debt collector, akan dilakukan pengawasan lebih ketat lagi	Pengawasan terhadap koperasi terutama terhadap aspek legalitas pada tahun 2021 dilaksanakan melalui sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
37	Memberikan tranparansi dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, baik layanan umum dan layanan BPJS sehingga seluruh pasien dapat terlayani secara mudah	RSUD Dr. Soewandhie	Pendaftaran pasien di Rumah Sakit menggunakan *e-health*, sehingga pasien datang di Rumah Sakit sesuai dengan estimasi jam yang tercantum pada saat pendaftaran. Selanjutnya pasien dapat dilayani sesuai prosedur.	Optimalisasi penggunaan *e-health* dan peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit serta SDM yang kompeten dalam rangka meningkatkan kualitas layanan
38	Tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pemberian layanan, khususnya terkait keluarga penunggu pasien	RSUD Dr. Soewandhie	Sejak awal pandemi Jam besuk pasien rawat inap ditiadakan, pasien hanya didampingi satu orang pendamping dan wajib melaksanakan protokol kesehatan.	Pemantauan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan oleh pasien, pendamping pasien, pengunjung serta SDM di Rumah Sakit.

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
39	Memiliki data base vaksinasi seluruh pasien dan penunggu pasien untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19	RSUD Dr. Soewandhie	Database vaksinasi pasien menggunakan web yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan kota Surabaya.	Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait keberlangsungan program vaksinasi kepada seluruh sasaran di Kota Surabaya
40	Pelayanan berbasis protokol kesehatan lebih diketatkan lagi	RSUD Bhakti Dharma Husada	Sejak awal pandemi Jam besuk pasien rawat inap ditiadakan, pasien hanya didampingi satu orang pendamping dan wajib melaksanakan protokol kesehatan.	Pemantauan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan oleh pasien, pendamping pasien, pengunjung serta SDM di Rumah Sakit.
41	Memiliki data base vaksinasi seluruh pasien dan penunggu pasien untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19	RSUD Bhakti Dharma Husada	Database vaksinasi pasien menggunakan web yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan kota Surabaya.	Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait keberlangsungan program vaksinasi kepada seluruh sasaran di Kota Surabaya
42	Peningkatan pelayanan terutama waktu tunggu pelayanan agar pasien tidak terlalu lama menunggu di dalam area rumah sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	Pendaftaran pasien di Rumah Sakit menggunakan *e-health*, sehingga pasien datang di Rumah Sakit sesuai dengan estimasi jam yang tercantum pada saat pendaftaran. Selanjutnya pasien dapat dilayani sesuai prosedur.	Bagi pasien rawat jalan dimohon hadir tepat waktu sesuai estimasi jam yang tertera pada antrian online dengan didampingi satu orang dewasa, sehingga waktu tunggu di rumah sakit tidak terlalu lama
43	Peningkatan pelayanan kualitas dan waktu pelayanan kepada pasien di Puskesmas, khususnya terkait layanan rujukan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pasien di Puskesmas melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai serta SDM yang berkualitas	Peningkatan kualitas layanan di Puskesmas ditindaklanjuti melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai serta SDM yang kompeten.

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
44	Update database layanan obat yang bisa diakses masyarakat secara digital terkait ketersediaan obat-obatan	Dinas Kesehatan	Untuk ketersediaan obat-obatan, Dinas Kesehatan telah memiliki aplikasi yang dapat diakses oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Farmasi mengenai ketersediaan obat-obatan	Layanan obat belum dapat diakses oleh masyarakat, karena hal tersebut merupakan aplikasi mengenai persediaan obat yang tersedia di GFK untuk pelayanan masyarakat di Puskesmas.
45	Sinkronisasi data kependudukan warga Surabaya yang terintegrasi dengan Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan yang ada di Kota Surabaya, untuk mendukung program Walikota bahwa KTP Surabaya bisa mendapatkan layanan fasilitas kesehatan di Kota Surabaya. Diharapkan tidak ada kendala teknis dalam pemberian layanan tersebut	Dinas Kesehatan	Terkait Pelayanan UHC di Kota Surabaya, aplikasi yang disiapkan telah diintegrasikan dengan data kependudukan serta dapat diakses oleh Puskesmas dan RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, telah disiapkan pula SOP yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya.	Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk peningkatan pelayanan terutama terkait masalah kependudukan, sehingga tidak menghambat pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat.
46	Pemberian vaksinasi kepada pelaku ekonomi khususnya seluruh UMKM Kota Surabaya. Serta update data warga Surabaya yang sudah diberikan vaksinasi agar pihak Kelurahan dan Kecamatan dapat melakukan pemantauan dengan baik	Dinas Kesehatan	Database penduduk yang telah menerima vaksinasi di Kota Surabaya telah tercantum dalam web yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka pemantauan sasaran yang belum mendapatkan vaksinasi	Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan mengenai keberlangsungan program vaksinasi kepada seluruh sasaran di kota Surabaya.
47	Mendukung kegiatan budidaya maggot untuk budidaya ikan dan ternak yang diusulkan dilakukan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Akan melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait pelaksanaan budidaya ikan dan ternak. Rencananya	Pada Tahun 2021 kegiatan budidaya maggot ini telah diakomodir melalui sub kegiatan "Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	Pertanian, dengan memberikan sampah organic beserta Teknik pengelolaannya		akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan mempertimbangkan pilot projectnya terlebih dahulu guna mengetahui potensi budidaya maggot serta penghematan yang dilakukan jika maggot diberikan sebagai alternatif	Persampahan". Pembudidayaan maggot ini dilakukan melalui pendampingan dan pemberian bantuan maggot kepada masyarakat agar dapat digunakan untuk pengurangan sampah organik.
48	Perlu penambahan fungsi taman kota untuk lahan pangan yang produktif baik tanaman buah-buahan maupun tanaman yang mendukung kebutuhan pokok masyarakat sebagai upaya urban farming, selain untuk fungsi keindahan, mengurangi polusi, serta wisata sederhana	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Akan melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait penambahan fungsi taman kota	Pada Tahun 2021 pengelolaan taman kota ini telah di akomodir melalui sub kegiatan "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)". Peningkatan fungsi taman kota sebagai lahan pangan produktif baik tanaman buah maupun urban farming akan dikoordinasikan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
49	Agar seluruh taman kota bisa segera dibuka untuk masyarakat, sebagai wisata local warga kota Surabaya, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap ada batasan jumlah pengunjung	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	DKRTH akan melakukan percobaan pembukaan taman di beberapa wilayah Surabaya, karena adanya pandemi rencanya tidak semua taman dibuka. Serta untuk menghindari adanya kluster baru, akan ada prosedur kesehatan yang harus dipatuhi	Untuk pelaksanaan pilot project pembukaan taman akan menunggu Perwali yang baru. Serta nantinya untuk pelaksanaannya akan ada petugas jaga taman, kuota pengunjung akan dibatasi (50% dari kapasitas)serta ada pembatasan jam kunjungan. Pada tahun 2021 mengenai pembukaan taman ini akan dilaksanakan melalui sub kegiatan "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)"

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
50	Meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan pengendara sepeda, serta bentuk pengaturannya agar tidak mengganggu fasilitas pengguna kendaraan bermotor	Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Telah dilaksanakan penyediaan prasarana pejalan kaki berupa trotoar yang dilengkapi saluran pada bagian bawahnya di beberapa jalan protokol di Kota Surabaya. Untuk fasilitas pengendara sepeda akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan	Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pengendara sepeda berupa trotoar dilaksanakan melalui sub kegiatan Pembangunan Jalan
51	Membuat indikator pemetaan dan pemantauan hambatan aliran air yang dikarenakan sampah atau struktur tanah secara berkala oleh petugas PU Bina Marga dan Pematusan, sehingga bisa dilakukan pengerukan tanpa perlu pengajuan dari masyarakat	Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala berupa pengerukan saluran melalui satgas	Pengerukan saluran/normalisasi dilaksanakan melalui sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
52	Segera melakukan perbaikan jalan rusak yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Surabaya agar tidak membahayakan pengguna jalan raya	Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan melaksanakan pemeliharaan rutin jalan seperti pengaspalan lubang melalui satgas	Perbaikan jalan rusak dilaksanakan melalui sub kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jalan
53	Meningkatkan respon terhadap pengaduan masyarakat terkait kondisi traffic light dan perparkiran yang bermasalah di lapangan	Dinas Perhubungan	Pengaduan terkait kondisi traffic light dan parkir dapat disampaikan via hotline 112 yang beroperasi selama 24 jam. Pengaduan atau keluhan kemacetan lalu lintas bahkan kecelakan merupakan salah satu pengaduan yang telah diakomodir di command center 112. Tidak hanya itu, command center 112 juga akan mengirimkan ambulans apabila terjadi	Dalam peningkatan respon terhadap pengaduan masyarakat terkait kerusakan perlengkapan jalan (traffic light, PCTL, dsb) serta masalah penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya dapat disampaikan melalui Command Center 112 yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kotamaupun aplikasi

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			kecelakaan. Petugas yang dipostkan di command center akan tanggap merespon dan mengatasi pengaduan apapun yang disampaikan masyarakat 24 jam.	WargaKu sehingga dapat ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan melalui sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
54	Parkir progresif untuk bisa diterapkan dan dilakukan dengan benar dan tepat, serta system pembayarannya tidak melalui jukir, namun langsung masuk ke kas daerah sehingga mengurangi adanya penyalahgunaan retribusi parkir	Dinas Perhubungan	Sistem parkir di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Penyelenggaraan parkir di Kota Surabaya akan diatur kembali melalui Peraturan Daerah yang baru (saat ini masih dalam pembahasan penyusunan Raperda). Dalam Peraturan Daerah yang baru ini juga dibahas mengenai rencana ke depannya, di mana penyelenggaraan parkir akan dilakukan secara non tunai (cashless) dan diberlakukan secara progresif.	Terkait dengan penyelenggaraan sistem perparkiran (baik penerapan parkir Progresif dan sistem pembayaran non tunai untuk mencegah terjadinya kebocoran), DInas Perhubungan akan dilakukan evaluasi penyelenggaraan sistem parkir eksisting, melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya dan dilakukan percepatan pembahasan penyusunan Raperda.
55	Bisa memaksimalkan Bus Suroboyo atau bus yang dimiliki oleh pemerintah kota Surabaya	Dinas Perhubungan	Dalam pelaksanaannya, Suroboyo Bus melayani rute tertentu yang telah	Dalam memaksimalkan penyelenggaraan Suroboyo Bus telah

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	yang menerapkan antar jemput pegawai Pemerintah Kota Surabaya dengan jadwal tertentu. Hal tersebut sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memaksimalkan transportasi masal dalam rangka untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara		ditentukan dan hanya ada 28 unit (20 beroperasi, 8 cadangan) bus yang melayani 3 rute eksisting. Tentunya apabila ingin menerapkan mekanisme antar jemput pegawai, jumlah bus harus ditambah dan penyesuaian rute harus dilakukan. Ke depannya, Suroboyo Bus akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan BTS dan rute yang dilayani akan lebih luas. Selain itu, ada wacana selain menggunakan plastik, pembayaran Suroboyo Bus juga akan dilakukan dengan uang elektronik. Harapannya, jumlah daerah yang tercover semakin banyak dan masyarakat yang ingin menggunakan layanan Suroboyo Bus tanpa harus membawa sampah plastik dapat tetap naik bus ini dan lebih terbantu.	dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota di mana penerapannya dapat dimulai terlebih dahulu untuk memaksimalkan pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang awalnya menggunakan kendaraan pribadi menjadi pengguna Suroboyo Bus maupun angkutan umum lainnya sehingga nantinya dapat memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat Kota Surabaya
56	Sinkronisasi secara akurat seluruh traffic light, dengan mengukur volume kendaraan antar traffic light dan memperhatikan jarak antar trafict light, serta ketepatan dan kecepatan penyesuaiannya	Dinas Perhubungan	Pengaturan/manajemen lalu lintas di Kota Surabaya telah dilakukan dengan memanfaatkan ATCS (Adaptive Traffic Control System). Dengan adanya ATCS tersebut sebagai sistem pengendalian lampu lalu-lintas, petugas/operator mampu mengendalikan atau melakukan pengaturan waktu nyala lampu lalu-lintas secara real-time berdasarkan kondisi lalu lintas saat itu	Dalam pengaturan/manajemen lalu lintas di Kota Surabaya, Dinas Perhubungan telah melakukan dengan memanfaatkan sistem ATCS (Adaptive Traffic Control System) dalam sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, di mana dapat dilakukan sinkronisasi seluruh jaringan traffic light dengan menyesuaikan antara waktu lampu

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			yang dilihat dari pemantauan CCTV yang terhubung dengan sistem atau laporan masyarakat. Saat ini seluruh simpang di Kota Surabaya sudah dilengkapi dengan sistem ATCS tersebut, apabila dalam penerapan di lapangan masih terdapat simpang tiga/empat yang belum terpantau, akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penerapan tersebut.	menyala merah, kuning, dan hijau dengan volume kendaraan yang melintas.
57	Adanya inovasi untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, yang saat ini diterapkan beberapa daerah, dengan memberikan peringatan menggunakan pengeras suara di traffic light atau bisa menggunakan alarm khusus bagi pengguna jalan yang melanggar rambu-rambu lau lintas. Hal ini bisa memberikan efek jera secara sosial karena akan diperhatikan pengendara lain dan meminimalisir pelanggaran selanjutnya	Dinas Perhubungan	Upaya penertiban pelanggaran dan pencegahan kecelakaan lalu lintas saat ini telah dilaksanakan secara rutin dan berkala melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang meliputi Penertiban Parkir, Penertiban dan Sosialisasi Pengembalian Fungsi Trotoar, Penertiban Kendaraan Yang Melanggar Rambu Larangan, Penderekan Kendaraan, Penertiban Kendaraan Melawan Arus, Pengaturan Arus Lalu Lintas Kegiatan Insidentil, dan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas. Selain itu Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga melakukan pembinaan keselamatan lalu lintas bagi Pelajar dan Masyarakat di Kota Surabaya. Pelaksanaan kegiatan ini	Terkait dengan inovasi untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas akan terus dikembangkan oleh Dinas Perhubungan melalui sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota serta Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Di samping itu, Dinas Perhubungan juga terus melakukan kegiatan dalam Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota untuk memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat dalam hal keselamatan dalam berlalu lintas. Serta Dinas Perhubungan akan terus

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			dilakukan melalui sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, dengan sasaran Kader, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat yang dipandang sangat tepat mendapat pembinaan tentang cara berlalu lintas yang baik, dengan harapan informasi yang di peroleh dapat disampaikan pada keluarga, kerabat dan orang di sekitar serta menjadi motivator sekaligus pelopor Keselamatan Lalu-lintas di lingkungan tempat tinggalnya masing–masing dengan motto “santun dijalan dan selamat sampai tujuan”.	melaksanakan program penyediaan angkutan umum yang ramah dan nyaman sehingga dapat mengurangi jumlah kendaraan bermotor.
58	Ijin-ijin operasional PAUD agar dipermudah dengan tetap menjaga kualitas sekolah yang baik, untuk menciptakan generasi yang berkualitas, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, khususnya di masa pandemi Covid-19	Dinas Pendidikan	Ijin Operasional di akhir tahun 2020 telah dilakukan evaluasi, sehingga seluruh proses perizinan dapat diselesaikan penuh secara daring, tanpa kontak dan tanpa harus mengunjungi kantor Dinas Pendidikan.	Evaluasi terhadap fasilitasi dan pelayanan ijin operasional akan terus dilakukan agar semakin mempermudah dan mempercepat waktu layanan tanpa mengurangi substansi perijinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan.
59	Agar tenaga pendidik tidak terlalu fokus pada kegiatan administrasi yang dipersyaratkan oleh Dinas Pendidikan, sehingga mengesampingkan kualitas belajar mengajar	Dinas Pendidikan	Pemerintah Kota setuju untuk mengurangi beban bagi guru di luar jam mengajar. Meski hal ini sedikit terhambat oleh aktivitas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan akan melaksanakan fungsi kontrol terhadap 5 kegiatan pokok guru sebagaimana diatur dalam Permendikbud.

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
60	Jika anak usia Sekolah Dasar atau anak usia dini diperbolehkan sekolah tatap muka, agar bisa diberikan pendampingan untuk penerapan protokol kesehatan, mengingat usia mereka yang rawan mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu untuk mendukung kegiatan belajar secara tatap muka agar seluruh guru telah diberikan vaksinasi	Dinas Pendidikan	Pemerintah Kota telah mempersiapkan teknis dan prosedur, bahkan simulasi sekolah tatap muka setelah berkoordinasi intensif dengan para pakar, termasuk pakar epidemologi. Sedangkan untuk guru dan tenaga kependidikan yang kemungkinan akan dekat dengan siswa, semuanya sudah diwajibkan untuk menjalani vaksinasi lengkap, sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka.	Dalam rangka pelaksanaan sekolah tatap muka, Pemerintah Kota juga akan menerapkan azas kehati-hatian dan mengutamakan keselamatan serta koordinasi intensif dengan orang tua/wali siswa, termasuk memperhatikan perkembangan peta penyebaran Covid di sekitar. Salah satunya strategi yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan sekolah tatap muka di jenjang SMP terlebih dahulu, dengan metode luring dan daring, untuk mengurangi jumlah siswa yang berada di sekolah pada waktu yang sama.
61	Saat ini dana yang diberikan kepada Tenaga Pendidik dinilai masih minim. Agar Pemerintah Kota Surabaya bisa meningkatkan anggaran untuk biaya operasional Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan	Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan apresiasi kepada tenaga pendidik PAUD berupa jasa pelayanan dan bagi guru swasta berupa tambahan perbaikan penghasilan yang diberikan setiap bulan/triwulan sesuai dengan aturan yang berlaku.	Pemerintah Kota berkomitmen untuk memberikan apresiasi kepada tenaga pendidik di luar sekolah negeri berupa tunjangan/insentif yang diberikan setiap bulan/triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya bantuan biaya operasional ini diharapkan kinerja tenaga pendidik menjadi lebih baik untuk mencerdaskan anak-anak Surabaya.
62	Inventarisasi dan digitalisasi data barang pengadaan atau aset pemerintah kota Surabaya, yang pengelolaannya ada di masing-	Bagian Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Aset	Pemerintah Kota telah melakukan digitalisasi data barang berbasis aplikasi pada kegiatan Pengelolaan	Peningkatan kualitas digitalisasi data aset Pemerintah Kota Surabaya

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	masing Perangkat Daerah, sehingga dapat diakses seluruh pegawai Perangkat Daerah tersebut, untuk meningkatkan pengawasan bersama dalam merawat dan menjaga aset daerah		Barang Milik Daerah dan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan melalui sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (S I M B A D A). SIMBADA merupakan suatu sistem aplikasi dalam rangka inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format laporan standar yang telah baku serta mudah dilaksanakan. Akses sistem informasi ini dapat diakses dan dipergunakan oleh pengurus barang, kasubag umum dan kepegawaian, sekretaris dan kepala OPD. Kegunaan dari sistem aplikasi dimaksud adalah sebagai sarana pelaporan dan pendataan barang-barang inventaris yang terdapat di Perangkat Daerah baik dari segi kuantitas maupun kondisinya.	
63	Belanja langsung pada saat pandemi, agar difokuskan untuk percepatan penanganan pandemi dan pemulihan dampak ekonomi dan sosial	Bagian Administrasi Pembangunan	Pemerintah Kota telah melakukan refocusing anggaran di tahun 2020 yang lalu secara khusus untuk mempercepat penanganan dampak pandemi.	Di tahun anggaran 2021, Pemerintah Kota lebih fokus untuk mempercepat penanganan dampak pandemi, sesuai arahan Bapak Walikota. Di antaranya fasilitas kesehatan gratis, tambahan permakanan, tambahan beasiswa, dan sebagainya.
64	Terhadap adanya piutang pajak, agar dilakukan langkah-langkah penagihan pajak yang efektif	Badan Pengelolaan	Telah dilakukan relaksasi dalam pembayaran pajak seperti	dilakukan upaya penagihan lebih intensif

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
		Keuangan dan Pajak Daerah	pembebasan denda dan prosedur pembayaran dengan cara mengangsur	
65	Terdapat pajak hiburan yang realisasinya melebih target. Agar dilakukan perhitungan target berdasarkan data potensi pendapatan yang up to date	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Hal ini didorong dengan inovasi pembayaran pajak hotel yang telah berbasis elektronik. Dari sekitar 4.000 pajak restoran yang terdata, hanya 1200 yang belum dionlinekan Dikarenakan kondisi pandemi tahun lalu, maka dilakukan revisi target saat di posisi PAK	Dilakukan upaya persuasif agar Wajib Pajak bersedia menerapkan tax surveillance dalam sistem pembayarannya
66	Agar benar-benar dihitung ulang terkait target deviden yang diberikan kepada BUMD dalam RUPS, tanpa ada titik berat pada salah satu pihak, mengingat beberapa BUMD juga masih dalam proses pemulihan dimasa pandemi Covid-19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	terkait target deviden yang diberikan, Pemkot Surabaya sudah melakukan koordinasi dengan BUMD	Dilakukan koordinasi dengan BUMD terkait pehitungan deviden sesuasi dengan laporan keuangan BUMD yang telah diaudit
67	Melakukan pengawasan protocol kesehatan pada setiap pasar-pasar yang ada di Kota Surabaya	Dinas Perdagangan	Dilakukan pendirian posko penanganan Covid-19 di sekitar pasar-pasar tradisional untuk pengawasan dan penegakan protokol kesehatan. selain itu juga menggelar operasi protokol kesehatan di pasar/ pusat keramaian.	Berkoordinasi dengan PD Pasar Surya dan Dinkop untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan oleh tenaga keamanan pasar, penyediaan masker, wastafel pengukur suhu pada pasar yang ditangani.
68	Pengendalian harga bapokting dilakukan dengan update data secara berkala, setiap bulan atau dua minggu sekali	Dinas Perdagangan	Update harga Bapokting sudah dilakukan setiap hari dengan berkoordinasi dengan PD Pasar Surya, jika diketahui/ditemukan terdapat kenaikan harga komoditas bapokting secara signifikan akan segera	Pengendalian harga bapokting pada tahun 2021 terakomodir pada Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			dilakukan operasi pasar untuk menstabilkan kembali harga komoditas tersebut.	Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
69	Penerapan tera kepada seluruh timbangan tanpa terkecuali, khususnya timbangan-timbangan yang hendak dijual dan diberikan label, bahwasanya tera sudah dilakukan pada barang tersebut	Dinas Perdagangan	Penerapan tera sudah dilakukan pada pelaksanaan kegiatan berupa pelayanan tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dilaksanakan dalam 3 jenis kegiatan yaitu Sidang Kantor yang dilaksanakan di Ruang Uji Sidang Kantor UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya, Sidang Loko yang dilaksanakan di tempat alat UTTP berada, dan Sidang Pasar/Kecamatan yang dilaksanakan secara berkala di Pasar-pasar/Kecamatan-kecamatan wilayah kota Surabaya.	Pelaksanaan kegiatan berupa pelayanan tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) tahun 2021 terakomodir pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang dan Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
70	Kontrol dan evaluasi pasar-pasar yang sudah diterbitkan izin dari Dinas Perdagangan, agar kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Selain itu, juga dilakukan pendampingan dan pengawasan untuk penerapan protokol kesehatan	Dinas Perdagangan	Sepakat untuk dilakukan kontrol dan evaluasi terhadap pasar-pasar yang ada agar kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan peraturan walikota yang berlaku. Selain itu, juga dilakukan pendampingan dan pengawasan untuk penerapan protokol kesehatan.	Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi/lembaga yang menaungi pasar untuk dilaksanakan kontrol, evaluasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan.
71	Segera melakukan pendataan agar seluruh pedagang pasar dapat dilakukan vaksinasi,	Dinas Perdagangan	Vaksinasi untuk para pedagang telah dilakukan di beberapa pasar. Sebelum pelaksanaan vaksinasi Perusahaan	Berkoordinasi dengan Dinas Kesahatan untuk percepatan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	khususnya pasar yang ijinnya diterbitkan oleh Dinas Perdagangan		Daerah Pasar Surya melalui unit pasar masing-masing telah melakukan sosialisasi dan dilanjutkan dengan pendataan nama peserta vaksin disertai pengumpulan fotokopi KTP dan hasilnya diserahkan ke Dinas Kesehatan.	pelaksanaan vaksinasi pada pedagang pasar.
72	Perlu dibuat layanan pengaduan masyarakat kepada DPRD Kota Surabaya secara online, untuk mempermudah akses masyarakat. Aplikasi harus detail untuk menghindari pengaduan yang tidak bertanggungjawab	Sekretariat DPRD	Terkait layanan pengaduan masyarakat kepada DPRD Kota Surabaya secara online dapat dilakukan melalui dprd.Surabaya.go.id	akan dilakukan tindak lanjut layanan pengaduan secara berkala sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD
73	Digitalisasi berkas-berkas yang ada di lingkungan sekretariat DPRD, yang dapat diakses oleh Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan tupoksi masing-masing	Sekretariat DPRD	Telah tersedia e-arsip untuk digitalisasi berkas	Akan dilakukan koordinasi terkait pengembangan sistem arsip yang dapat diakses oleh Anggota DPRD sesuai tugas dan fungsi
74	Bisa memaksimalkan souvenir yang bertema protokol kesehatan sekaligus menunjukkan ikon Surabaya hasil produksi UMKM binaan Pemerintah Kota Surabaya, misal masker batik Surabaya	Bagian Umum dan Protokol	Bagian Umum dan Protokol telah mengoptimalkan pembelian souvenir dari produk UMKM Surabaya berupa scarf, kain atau baju batik, kebaya, udeng, parcel makanan dan minuman produk olahan UMKM Kota Surabaya. Sedangkan untuk kelengkapan protokol kesehatan pada acara kedinasan, Bagian Umum dan Protokol merujuk pada pemakaian masker medis sesuai standar protokol kesehatan.	Bagian Umum dan Protokol akan lebih mengoptimalkan pembelian souvenir dari produk UMKM Kota Surabaya dalam rangka mendukung peningkatan pemberdayaan ekonomi warga Kota Surabaya.

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
75	Selain menginventarisasi seluruh aduan atau pengajuan masyarakat kepada walikota Surabaya secara langsung surat-menyurat, juga agar dilakukan inventarisasi dalam bentuk online, baik melalui aplikasi, call center maupun media online lainnya. Selain itu juga perlu dilakukan pencatatan terhadap perkembangan penanganannya, meskipun yang melakukan adalah Perangkat Daerah lainnya	Bagian Umum dan Protokol	- Untuk mengetahui tindak lanjut dari surat-surat untuk Bapak Walikota Surabaya yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait, dapat menghubungi Bagian Umum dan Protokol di pesawat 372 atau 277. - Pemerintah Kota Surabaya telah merilis aplikasi “WargaKu” yang berfungsi sebagai media pengaduan dan layanan untuk warga Kota Surabaya. Melalui aplikasi ini, warga Surabaya dapat menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi, keluhan atau apresiasi terhadap Pemerintah Kota Surabaya.	Melalui aplikasi "Wargaku", pelapor beserta instansi terkait juga dapat saling berinteraksi dan memantau status pengaduan. Apabila dalam 1×24 jam keluhan warga tidak ditanggapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi tersebut, maka secara sistem akan langsung masuk ke gawai milik Bapak Walikota Surabaya.
76	Memantau kelayakan SOP pada setiap struktur organisasi yang ada di Perangkat Daerah, khususnya dalam pengoptimalan Tenaga Kerja Kontrak dan agar peran ASN bisa tetap maksimal	Bagian Organisasi	Bagian organisasi sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi kelayakan SOP perangkat daerah setiap tahunnya disesuiakan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing perangkat daerah. Terkait optimalisasi tenaga kontrak, telah dilakukan analisa beban kerja masing-masing PD disesuaikan dengan jumlah ASN penanggung jawab yang ada, sehingga penyelesaian tugas dan fungsi PD bisa Optimal	Pada tahun 2021 untuk kegiatan memantau kelayakan SOP semua PD terakomodir dalam sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. selain itu, SOP mengenai optimalisasi tenaga kerja kontrak akan dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Bagian Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah sehingga diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
77	Penguasaan seluruh variable yang melingkupi Perangkat Daerah sehingga bisa memaksimalkan pendampingan dan pembinaan pada seluruh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, agar koordinasi dan penanganan permasalahan dapat segera dilaksanakan dengan tepat dan cepat	Bagian Organisasi	Bagian organisasi sudah melaksanakan pendampingan dan pembinaan pada seluruh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya meliputi : 1) Pendampingan penyusunan laporan kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran ; 2)Monitoring dan evaluasi kelayakan SOP semua perangkat daerah; 3) Monitoring dan evaluasi atas mutu pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya; 4) Monitoring dan evaluasi atas kesesuaian kelembagaan perangkat daerah dengan peraturan yang berlaku; 5) Monitoring dan evaluasi atas penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja seluruh perangkat daerah. Bagian Organisasi juga melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam penanganan permasalahan terutama terkait penerapan SOP, penilaian mutu pelayanan publik,	Kegiatan dalam rangka optimalisasi koordinasi, pendampingan, pembinaan serta penyelesaian permasalahan sesuai tugas dan fungsi Bagian Organisasi telah terakomodir dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			analisa jabatan serta analisa beban kerja sesuai dengan tugas fungsinya	
78	Untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan serta pelayanan yang didelegasikan ke kecamatan / kelurahan dengan baik	Kecamatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan di tingkat kecamatan senantiasa dilakukan untuk memastikan agar kegiatan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik.	Pada sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
79	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat daerah / Dinas-Dinas teknis terkait pelaksanaan pembangunan di lapangan, agar pembangunan berjalan lancar	Kecamatan	Musrenbang kecamatan telah rutin dilaksanakan dan memungkinkan Pemerintah Kota Surabaya untuk menjaring aspirasi masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan di level kecamatan (bottom up), selain itu hal ini juga memudahkan kecamatan untuk berkoordinasi dengan OPD serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
80	Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan di masyarakat, dengan standarisasi sama sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kecamatan	Sejak awal masuknya Covid-19 di Kota Surabaya tahun lalu, para camat se-Surabaya langsung menerbitkan SK Pembentukan Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan Covid-19, termasuk di dalamnya sosialisasi hidup sehat, untuk selalu memakai	Pelatihan Satgas dan koordinasi dengan Puskesmas dan Camat/Lurah dan jajaran terkait.

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Para satgas yang direkrut dalam gugus tugas ini juga diberikan mandat untuk menegur atau memperingatkan warga yang tidak patuh dan disiplin. Selain itu para satgas ini juga bertugas untuk mendata ODP/OTG dan berkoordinasi dengan Puskesmas setempat jika ada yang perlu penanganan atau pertolongan.	
81	Membantu untuk selalu update pendataan di masyarakat terkait MBR, UMKM, dll, sehingga intervensi yang dilakukan oleh dinas menjadi tepat sasaran	Kecamatan	Kecamatan telah membantu OPD terkait untuk melakukan *updating* pendataan secara rutin dan berkala terkait MBR dan UMKM	Melalui sub kegiatan pemberian permakanan bagi lansia, anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan penyakit tertentu melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sedangkan terkait kecamatan juga turut membantu melalui validasi dan monitoring usaha mikro melalui kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
82	Dalam kegiatan pembakuan rupa bumi, diharapkan Pemerintah Kota melakukan update dan menetapkan batas-batas wilayah yang jelas antar daerah, batas garis pantai dan batas wilayah kecamatan atau kelurahan	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otoda pada tahun 2020 sudah melakukan pembakuan Nama Rupabumi sebanyak 70 objek yang sudah diajukan sedangkan untuk penetapan batas -batas wilayah Bagian Administrasi Pemerintahan pada	Pada tahun 2021 terkait Rupa Bumi dan Batas wilayah terakomodir di sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			tahun 2020 membentuk tim penetapan dan penegasan batas kecamatan dan kelurahan di kota surabaya kemudian melakukan pendataan dan penegasan batas wilayah di sepuluh kecamatan beserta kelurahan yang ada didalamnya yaitu kecamatan genteng, kecamatan simokerto, kecamatan tambaksari, kecamatan gayungan, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Jambangan, kecamatan wonocolo, kecamatan bubutan, kecamatan tegalsari dan kecamatan rungkut mulai dari penyiapan dokumen, survey lapangan, sosialisasi dan pembuatan berita acara serta pembuatan peta batas wilayah . Sedangkan untuk batas garis pantai merupakan wewenang dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) dalam menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	
83	Memfasilitasi pegawai kecamatan dan kelurahan dalam peningkatan kualitas kinerja, terutama terkait pelayanan secara online	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah memfasilitasi kecamatan dan kelurahan dalam peningkatan kualitas kinerja dengan cara melakukan monitoring dan	Pada tahun 2021 terkait memfasilitasi pegawai kecamatan dan kelurahan terakomodir di sub kegiatan penataan administrasi

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			evaluasi terhadap aparatur kecamatan dan kelurahan. Salah satunya bentuk peningkatan kualitas yang dimaksud adalah dengan cara melakukan pembinaan terhadap aparatur Kecamatan dan kelurahan terkait pelayanan publik berupa sosialisasi dan konsultasi terkait permasalahan yang sering terjadi. Hal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi	pemerintahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah
84	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia / tenaga kerja melalui fasilitasi kegiatan magang, sertifikasi dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19	Dinas Tenaga Kerja	Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan magang, sertifikasi serta pelatihan tetapi dalam jumlah terbatas mengingat adanya pandemi Covid-19	Pelaksanaan magang, sertifikasi dan pelatihan untuk masyarakat pada tahun 2021 dilakukan melalui kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
85	Memperluas informasi kesempatan kerja ke seluruh lapisan masyarakat sehingga mengakomodir masyarakat yang terkena dampak kondisi pandemi Covid-19	Dinas Tenaga Kerja	Penyebarluasan informasi lapangan kerja telah dilakukan melalui kegiatan job fair, baik yang dilaksanakan secara online maupun offline. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi secara langsung dengan dunia usaha terkait informasi lapangan kerja	Pelaksanaan perluasan informasi kesempatan kerja ke masyarakat pada tahun 2021 dilaksanakan melalui kegiatan Job Fair/Bursa Kerja

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
86	Terkait perbaikan rumah tidak layak huni, perlu dilakukan pendataan yang terintegrasi, sehingga bisa tepat sasaran dan tepat penganggaran	Dinas Sosial	Kriteria, persyaratan, dan tahapan kegiatan pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni berpedoman pada Perwali Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Usulan calon penerima manfaat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni berasal dari RT, RW dan masyarakat, kemudian dikoordinasikan oleh UPKM (Unit Pembinaan Keluarga Miskin) atau kelurahan di masing-masing wilayahnya, untuk selanjutnya disinkronkan dengan data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sehingga kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat penganggaran.	Optimalisasi pendampingan dan monitoring oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya.
87	Untuk mengembangkan ambulan gratis untuk masyarakat. baik untuk keperluan di dalam kota maupun keluar kota, khususnya kepada mereka yang ber KTP Surabaya	Dinas Sosial	Layanan Ambulance gratis di Dinas Sosial hanya digunakan dalam lingkup Kota Surabaya	Peningkatan akses layanan ambulance gratis melalui call center maupun command center bagi penduduk Kota Surabaya dan dalam lingkup Kota Surabaya.
88	Terkait penutupan lokalisasi, agar dilakukan peningkatan pengawasan dari Dinas Sosial sehingga tidak terjadi kegiatan prostitusi yang terselubung ataupun ada permasalahan social lainnya	Dinas Sosial	Dalam rangka pencegahan kegiatan prostitusi terselubung, Satpol PP Kota maupun kecamatan secara rutin mengadakan patroli secara bergantian di wilayah eks lokalisasi. Selain itu	Optimalisasi pengawasan secara berkelanjutan di lokasi-lokasi yang rawan terjadinya permasalahan sosial serta optimalisasi pemanfaatan tempat/gedung di wilayah eks-

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			kelurahan dan kecamatan juga telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan TNI dan POLRI, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama terkait pencegahan Prostitusi terselubung di wil eks lokalisasi.	lokalisasi yang dialihfungsikan untuk kegiatan masyarakat
89	Perlu pengembangan panti sosial berdasarkan zonasi lokasi panti sosial. Sebagai contoh Panti Sosial Kalijudan untuk Surabaya Pusat, Keputih untuk Surabaya Timur, Griya Werdha di Jambangan untuk Surabaya Selatan. Selain itu agar lebih dikembangkan dan ditingkatkan pengelolaan panti sosial	Dinas Sosial	Saat ini pengembangan panti sosial di Kota Surabaya menggunakan pendekatan sasaran penerima manfaat / jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Hal ini dikarenakan masing-masing jenis penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) memerlukan cara penanganan dan pemberdayaan yang berbeda-beda. Hal tersebut juga berpengaruh pada design bangunan dan fasilitas yang disediakan. Terkait pengelolaan panti sosial tersebut, Pemerintah Kota Surabaya selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada para penghuni melalui peningkatan fasilitas dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pemulihan fungsi sosial para penghuni.	Dinas Sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya serta instansi terkait di luar Pemerintah Kota Surabaya guna peningkatan layanan kepada penghuni panti sosial.
90	Perlu optimalisasi peran TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) sebagai	Dinas Sosial	Dinas Sosial secara rutin telah melakukan Pembinaan/Capacity Building dan monev kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial	Optimalisasi pembinaan terhadap TKSK dan IPSM oleh Dinas Sosial diantaranya melalui kegiatan PSM

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	mitra pemerintah dalam penanggulangan penyandang kesejahteraan sosial		Kecamatan) dan IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) sebagai upaya optimalisasi perannya dalam penanggulangan penyandang kesejahteraan sosial	Berprestasi, LKS Berprestasi dan Karang Taruna Berprestasi.
91	Meningkatkan prestasi terkait dengan Kota Layak Anak sebagai komitmen Kota Surabaya dalam pengintegrasian sistem pembangunan berbasis hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Surabaya telah mempertimbangkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak. Dan dalam pelaksanaannya juga melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dan partisipasi masyarakat, serta kepolisian/kejaksaan. Pada tahun 2017 Kota Surabaya sudah meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama, dan berhasil mempertahankan predikat KLA Utama di tahun 2018 dan 2019.	Optimalisasi upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung terwujudnya Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak diantaranya melalui pemenuhan 5 klaster untuk pencapaian Kota Layak Anak dan berperan aktif dalam memfasilitasi Forum Anak Surabaya
92	Meningkatkan upaya-upaya memenuhi kebutuhan ber-KB (unmeet need)	Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan ber-KB, upaya yang telah dilakukan yaitu Konseling, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Program KB, alat kontrasepsi, dan program KB lainnya, pemenuhan Sarana Penunjang Pelayanan KB, serta pembinaan pada kader KB secara rutin.	Optimalisasi upaya Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memacu dan menstimulasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana, diantaranya melalui peningkatan peran aktif kader untuk mencari akseptor KB serta pemenuhan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
93	Perlu sinkronisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan data-data MBR yang terupdate	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Sinkronisasi program kesejahteraan masyarakat dengan data MBR dilakukan melalui aplikasi Simprolamas yang telah terintegrasi dengan aplikasi updating data MBR yang dikelola oleh Dinas Sosial. Pada aplikasi Simprolamas tersebut dilakukan updating terhadap seluruh intervensi kepada penduduk Kota Surabaya sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya.	Optimalisasi analisa dan evaluasi hasil intervensi Pemerintah Kota Surabaya kepada MBR oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat program
94	Agar Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki peran untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan apakah telah benar-benar menyentuh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Sesuai dengan tupoksi nya, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan sebagian tugas Sekretariat Daerah di bidang Kesejahteraan Masyarakat, Pengembangan Potensi Masyarakat, dan Ketahanan Masyarakat. Dalam menjalankan tupoksi tersebut, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dan menyusun evaluasi terhadap kebijakan dan program Pemerintah Kota Surabaya di bidang kesejahteraan rakyat dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi dalam menyusun	Optimalisasi analisa dan evaluasi hasil intervensi Pemerintah Kota Surabaya kepada seluruh warga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			program di tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya.	
95	Meningkatkan kinerja PDAM agar dapat meningkatkan deviden, terutama pasca pandemi	Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	akan dilaksanakan	PDAM Surya Sembada telah berkomitmen untuk merealisasikan Cakupan Layanan di Kota Surabaya mencapai 100% pada bulan Juli 2021. Hal tersebut ditunjang dengan penyerapan air SPAM Umbulan sebesar 500 liter per detik di bulan Mei 2021.
96	Menginisiasi produk air siap minum maupun air minum kemasan yang berkualitas	Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	akan dikoordinasikan	PDAM Surya Sembada telah berkomitmen dalam penyerapan Air SPAM Umbulan dengan kualitas yang lebih baik dan akan menyusun kajian dan potensi pengembangan usaha penyediaan Air Minum Dalam Kemasan
97	Meningkatkan respon/penanganan terhadap aduan masyarakat terkait pelayanan air bersih dan pembayaran layanan air	Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	akan dilaksanakan	PDAM Surya Sembada telah berpartisipasi dalam program Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk aplikasi "Wargaku". di mana PDAM Surya Sembada akan menindaklanjuti masukan dan keluhan pelanggan dalam waktu paling lambat 24 jam
98	Lebih memaksimalkan sosialisasi terkait produk yang dimiliki PT Surya Karsa Utama dalam bidang properti, serta	PT Surya Karsa Utama	akan dikoordinasikan	PT Surya Karsa Utama telah melakukan upaya sosialisasi/promosi/pemasaran dengan menyebarkan brosur,

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	menginformasikan perkembangan properti yang sudah terjual			mempresentasikan penawaran produk di Instansi Pemerintah dan swasta (Dinas Pendidikan untuk guru, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, PNS Pemerintah Kota Surabaya, Kebun Binatang Surabaya dll.) mengikuti pameran REI dan promosi melalui media sosial. Untuk menarik calon pembeli, PT Surya Karsa Utama memberikan diskon dan kemudahan dalam pembayaran. Jumlah unit rumah yang belum terjual sebanyak 80 unit dari total 940 unit
99	Meningkatkan bantuan permodalan kepada UMKM agar usahanya dapat berkembang dan dapat bertahan terutama pada masa pandemi Covid-19	PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama	Meningkatkan bantuan permodalan kepada 800 UMKM dengan bunga 3%	Bantuan permodalan kepada UMKM akan mulai berjalan pada bulan Mei 2021, dengan UMKM sasaran termasuk UMKM binaan Pemkot Surabaya
100	Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersama UMKM untuk penyampaian produk-produk PT BPR Surya Artha Utama	PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama	akan dikoordinasikan	Sosialisasi bantuan permodalan berupa program Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh (PUSPITA) kepada UMKM dilaksanakan sesuai hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, antara lain Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan, Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
101	Meningkatkan kinerja BPR Jawa Timur terutama dalam penyaluran perkreditan untuk UMKM	Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	akan dilaksanakan	Dalam rangka meningkatkan kinerja, Bank BPR Jawa Timur melakukan kerjasama dengan Unversitas, Yayasan Pendidikan, Perusahaan Swasta dan bersinergitas dengan BUMD di Jawa Timur antara lain dengan Bank Jatim, Wira Jatim Group, PT Jatim Prasarana Utama, PT. Air bersih , PT SIER, PT Jamkrida Jatim, serta mengoptimalkan penyaluran kredit di sektor produktif kepada UMKM di Jawa Timur
102	Memberikan progres keberhasilan perkreditan UMKM yang disalurkan kepada warga kota Surabaya, sebagai upaya peningkatan minat warga kota Surabaya terhadap BPR Jawa Timur	Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	akan dilaksanakan	Baki Debet Kredit Yang Diberikan secara gabungan sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp 2,053 triliun. Kredit yang diberikan untuk Cabang Surabaya sebesar Rp161,783 milyar meningkat Rp12,77 milyar atau 8,57% dibandingkan posisi akhir tahun 2019. Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan minat dan kepercayaan masyarakat Jawa Timur khususnya Kota Surabaya kepada Bank BPR Jatim dalam hal pembiayaan/akses permodalan di sektor produktif untuk UMKM, sehingga perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
				salah satu pemegang saham Bank BPR Jatim
103	Membantu permodalan UMKM kota Surabaya agar usahanya dapat berkembang dan dapat bertahan terutama pada masa pandemi Covid-19	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	akan dilaksanakan	Bank Jatim memberikan kebijakan stimulus kredit berupa penurunan suku bunga 1-4% dan pemberian *grace period* sampai dengan 12 bulan, serta pemberian bunga promosi sebesar 10% untuk sektor pertanian.
104	Agar memiliki inovasi-inovasi untuk membantu Star-Up	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	akan dikoordinasikan	Bank Jatim telah memiliki program kredit Menengah dan Korporat, maupun kredit Mikro, Ritel dan Program di mana sasaran kredit tersebut adalah Perusahaan, UMKM dan usaha yang baru merintis
105	Agar berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BUMD lain, seperti BPR Surya Artha Utama untuk membantu peningkatan modalnya	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	akan dikoordinasikan	Bank Jatim telah memiliki program kredit linkage program BPR, di mana merupakan fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada pengusaha mikro dan kecil melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbamida dan Perbarindo, baik yang sudah menjadi anggota APEX maupun belum menjadi anggota APEX. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dipertimbangkan untuk berkolaborasi dengan BPR Surya Artha Utama dalam penyaluran kredit Bank Jatim

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
106	Melakukan efisiensi bahan pangan untuk binatang, dengan menanam tanaman atau tumbuhan pakan di lahan Kebun Binatang Surabaya yang masih kosong, serta mengganti pakan daging menjadi ayam	Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	Efisiensi bahan pangan untuk binatang sudah dilakukan oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yaitu dengan cara menanam tanaman pakan di lahan Kebun Binatang Surabaya yang masih Kosong, selain itu juga mengganti pakan daging menjadi ayam.	Efisiensi pemberian pakan hewan juga dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pakan setiap satwa sehingga tepat jumlah dan minim pakan yang terbuang
107	Dengan menurunnya pendapatan Kebun Binatang Surabaya sehingga mengalami kerugian, maka perlu inovasi dan strategi-strategi baru untuk meningkatkan minat pengunjung Kebun Binatang Surabaya. Sebagai contoh pembuatan kartu member pengunjung dan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat pengunjung seperti sebelum pandemi Covid-19 namun tetap menerapkan protokol kesehatan	Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	Inovasi dan strategi-strategi baru untuk meningkatkan minat pengunjung Kebun Binatang Surabaya terus ditingkatkan diantaranya Gowes to Zoo yaitu bersepeda di Kebun Binatang Surabaya menjadi pilihan sehat di tengah pandemi untuk warga.	Selain program Gowes to Zoo, Kebun Binatang Surabaya juga memiliki program pemberian pakan oleh pengunjung kepada beberapa binatang. Akan ditambahkan program-program lain untuk menarik minat berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya
108	Optimalisasi peningkatan kinerja PD Rumah Potong Hewan di Pegirian dan Kedurus, sehingga deviden dapat naik di tahun berikutnya, didukung telah adanya vaksin, sehingga perekonomian lebih menggeliat	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan	Optimalisasi peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan yang sudah dilakukan yaitu retribusi biaya sapi import. Masih terus dilakukan optimalisasi terkait peningkatan dividen tersebut.	PD Rumah Potong Hewan akan terus mencari peluang bisnis dan diversifikasi usaha penjualan daging segar dan Rumah Daging yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan *supply* di seluruh restoran, hotel dan katering di wilayah Surabaya
109	Perlu meningkatkan fasilitas Rumah Potong Hewan, sehingga semakin meningkatkan jasa	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan	akan dikoordinasikan	PD Rumah Potong Hewan akan melakukan optimalisasi pemanfaatan aset dalam hal pelayanan dan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	pemotongan yang berdaya saing di Kota Surabaya bahkan Jawa Timur			operasional perusahaan, menata ulang fasilitas pemotongan di RPH Kedurus sesuai NKV, menata ulang Rumah Daging dan penetrasi pasar distribusi daging segar RPH
110	Optimalisasi pengelolaan pasar-pasar tradisional dengan baik dan sesuai kewenangan PD Pasar Surya berdasarkan dengan peraturan yang berlaku dan ditambahkan pengaturan terkait protokol kesehatan	Perusahaan Daerah Pasar Surya	akan dilaksanakan	PD Pasar Surya akan melakukan evaluasi terkait dengan peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan pasar, mempertimbangkan pengembangan Teknologi Informasi dan digitalisasi dalam pembayaran Iuran Layanan Perpasaran serta pendapatan rutin lainnya serta penerapan protokol kesehatan dalam operasional perpasaran
111	Agar melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional supaya kondisinya layak, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja ke pasar-pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya	Perusahaan Daerah Pasar Surya	akan dilaksanakan	Akan dilakukan penyusunan kajian teknis dan rencana revitalisasi dengan mempertimbangkan karakteristik tiap pasar, disertai dengan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB), profil pasar dan/atau potensi kerjasama dengan pihak ketiga
112	Melakukan pendataan kembali terkait program vaksinasi pedagang, agar bisa memaksimalkan program vaksinasi kepada selurug pedagang pasar yang dikelola PD Pasar Surya	Perusahaan Daerah Pasar Surya	akan dilaksanakan	PD Pasar Surya akan melakukan pendataan kembali terhadap pedagang dalam rangka pelaksanaan program vaksinasi
113	Menghimpun dan Menyalurkan CSR dari seluruh perusahaan dibawah koordinasi PT	PT SIER	akan dikoordinasikan	Penyaluran CSR perusahaan yang berhimpun di kawasan PT SIER

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	SIER untuk selanjutnya agar bisa dimaksimalkan untuk masyarakat dan pembangunan Kota Surabaya, dalam rangka Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan			merupakan otoritas kebijakan masing-masing perusahaan, namun dana CSR PT SIER sebesar Rp659,85 juta telah disalurkan kepada masyarakat terutama yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan
114	Segera menyelesaikan persoalan yang timbul di masyarakat secara langsung dari kegiatan produksi diwilayah industri yang dibawah koordinasi PT SIER	PT SIER	akan dikoordinasikan	Persoalan yang timbul yang disebabkan perusahaan di kawasan, PT SIER telah berupaya menyelesaikan dengan cepat dan berkoordinasi dg perangkat pemerintahan setempat.
115	Perlu penyesuaian Peraturan Daerah terkait semua BUMD menyesuaiakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang perusahaan BUMD	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah	akan dilaksanakan	Penyesuaian Peraturan daerah terkait BUMD dilakukan mulai tahun 2022
116	Dalam penentuan target di RPJMD dan RKPD, agar mempertimbangkan data capaian sebelumnya, agar target lebih rasional dan juga memperhatikan kegiatan dan program prioritas, terutama pada saat pandemi Covid-19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penentuan target untuk indikator yang sama dengan mempertimbangkan target sebelumnya sebagai t0 dalam melakukan *forecasting* untuk tahun berikutnya. Dalam masa pandemi Covid-19 kegiatan yang dilaksanakan lebih diprioritaskan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.	Penentuan target indikator pada Dokumen Rancangan RPJMD dibahas bersama Perangkat Daerah pengampu dengan mempertimbangkan kondisi atau nilai capaian di tahun eksisting, nilai capaian di tahun dasar tersebut menjadi bahan untuk menetapkan target 5 tahun kedepan.

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
117	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mendorong program-program pengembangan perekonomian serta ketahanan pangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dalam rangka pengembangan ekonomi telah dilaksanakan pembentukan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro serta pengembangan alternatif wisata. Untuk peningkatan ketahanan pangan telah dilakukan diversifikasi pangan dan urban farming.	Di tahun 2021 ini Bappeko telah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk percepatan pemulihan ekonomi, salah satunya UMKM dikota Surabaya telah dilakukan intervensi dalam bentuk pelatihan, fasilitasi sertifikasi, dan fasilitasi pemasaran.
118	Penertiban dan pengawasan PKL agar bersinergi dan diikuti dengan penyiapan lahan untuk relokasi PKL / penataan PKL, terutama selama masa pandemi Covid-19	Satuan Polisi Pamong Praja	Penertiban PKL telah dilakukan secara humanis, sebagai solusi atas penertiban tersebut dapat dilakukan relokasi dengan memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Dalam melakukan upaya penataan dan relokasi PKL dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Koperasi, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) dan Kecamatan.	Satpol PP akan melakukan pengawasan PKL pada 30 ruas jalan, dan sebelum dilakukan penertiban telah dilakukan pendataan PKL.
119	Agar pengawasan restauran dilakukan dengan prinsip agar perekonomian tetap tumbuh, namun tetap menjaga protokol kesehatan	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengawasan restoran di masa pandemi lebih mengedepankan untuk memastikan sudah dilakukannya penilaian risiko dan sudah dipatuhinya protokol kesehatan antara lain kapasitas maksimal dan jaga jarak antar kursi.	Pengawasan protokol kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2020. Himbauan kepada pengusaha restauran agar

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
				menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi jam operasional restoran.
120	Adanya sinkronisasi koordinasi bersama Bakesbangpol dan Linmas dalam melakukan penegakan protokol kesehatan dimasyarakat umum maupun didalam tempat usaha	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Protokol Kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Satpol PP, BPB Linmas dan OPD lainnya yang diberi wewenang melakukan tindakan penegakan Perda kepada pelanggar perorangan maupun badan, hal tersebut di lakukan dengan memperhatikan kondisi Pandemi sehingga perlu untuk mempercepat pelaksanaan disiplin protokol kesehatan	Dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi guna melihat tingkat pelanggaran protokol kesehatan dan kepatuhannya.
121	Perlu dilakukan pendampingan dan assesment untuk persyaratan beroperasionalnya kembali RHU, pada saat pandemi Covid-19	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja	Dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dimana pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib mentaati Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di kota Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010.	Sudah lebih dari 100 RHU yang dilakukan asesment dan terus berlangsung bagi RHU yang mengajukan permohonan asessment/ penilaian tempat/kegiatan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			Berdasarkan Pasal 7 huruf n Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 bahwa pelaku usaha mengajukan permohonan penilaian tempat/kegiatan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan apabila akan membuka kembali tempat/kegiatan usaha, dan berdasarkan pasal 28A Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 Ayat (3) bahwa setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib mematuhi dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan. Sedangkan penilaian resiko berdasarkan ketentuan pasal 29 Ayat (1) bahwa Kepala Badan selaku Wakil Sekretaris Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya bersama Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya dapat melakukan penilaian resiko terhadap tempat atau kegiatan yang akan digunakan untuk kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Risiko. Sehingga sesuai dengan ketentuan	

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			Peraturan Walikota diatas terkait penerapan protokol kesehatan, pelaku usaha wajib melaksanakan poin-poin rekomendasi dari hasil assesmen/penilaian yang dilakukan jika akan membuka kegiatan usahanya kembali.	
122	Perlu adanya standarisasi terhadap penindakan penegakan protokol kesehatan oleh seluruh petugas satgas Covid-19 dan berkolaborasi dengan Satpol PP dan jajaran kepolisian dan TNI	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	Penindakan pelanggaran protokol kesehatan berdasar pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang penerapan Protokol Kesehatan Dalam rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya, dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020. Satpol PP, BPB Linmas atau Perangkat Daerah terkait dalam melakukan penindakan penegakan protokol kesehatan bersinergi dengan jajaran TNI - Polri serta mendorong peran aktif warga dalam Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo	Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kedepan akan dikoordinasikan dalam pelaksanaan tugas dilapangan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			Suroboyo dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19.	
123	Perlindungan masyarakat terkait teroris dan narkoba, agar bisa benar-benar menjadi hal yang difokusi, tidak hanya penanganan melainkan juga preventif	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dari unsur jajaran samping (TNI, kepolisian, kejaksaan) yang setiap bulan diadakan beberapa kali pertemuan terkait antisipasi seperti adanya terorisme dan juga mengundang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 dalam forum inisiasi yang digagas. Selain itu telah ada tim kewaspadaan dini dari jajaran intel (Kominda) termasuk Badan Intelejensi Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk Pemkot diwakili oleh Kepala Bakesbang. Tim kewaspadaan dini didukung kepanjangan tangan kebawah yaitu deteksi dini yang melaporkan kejadian yang dimonitor setiap hari. Keinginan pemerintah adalah bagaimana agar masyarakat mau menjadi agen/kemandirian deteksi dini. Bakesbangpol membangun sistem Aplikasi Sipandu yang mendorong masyarakat untuk peduli dalam melaksanakan deteksi dini. Sedangkan terkait Narkoba telah	Kegiatan yang melibatkan jajaran Kominda telah diakomodir dalam Sub Kegiatan "Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah" Sedangkan terkait ancaman bahaya Narkotika diakomodir dalam Sub Kegiatan "Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah"

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			dilaksanakan kegiatan P4GN dimana terdapat program kampung Bersinar dari BNN untuk disinergikan dengan Kampung Wani Jogo Suroboyo, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga.	
124	Peningkatan ideologi bangsa, agar bisa menjawab tantangan saat ini banyak pemahaman yang bertentangan dari Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan ideologi bangsa sangat diperlukan terutama ditanamkan pada kalangan generasi muda agar tidak terpapar ideologi/pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila. Seiring dengan adanya pandemi Covid-19, ada pola pelaksanaan kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya yang bisa bertatap muka, tetapi sekarang melalui daring/online, sehingga kedapannya akan dipersiapkan konten konten terkait wawasan kebangsaan untuk ditampilkan secara daring maupun lewat media sosial	Dalam meningkatkan ideologi bangsa telah diakomodir pada Sub Kegiatan "Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan"
125	Perlu pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	BPB Linmas telah melakukan agenda rutin pelatihan evakuasi dan telah melakukan kerjasama dengan Basarnas dan ITS untuk melakukan pemetaan bencana. Selain itu BPB Linmas juga berencana untuk menggunakan media stiker yang akan ditempel di depan rumah sebagai	Pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dalam sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, di mana salah satu outcome nya adalah

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			penanda kategori warga yang menjadi prioritas dalam penyelamatan ketika terjadi bencana, terutama masyarakat yang berada di kawasan pantai dan kampung padat penduduk.	pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana yang dapat memberikan penanganan dan penanggulangan pertama yang dapat ditangani secara mandiri atau sampai menunggu tim penanganan bencana datang ketika bencana berskala besar.
126	Untuk mengatur SOP penanganan kebakaran di bangunan tinggi. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran serta mengatur konsep penyelamatan dan mitigasinya	1. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat 2. Dinas Pemadam Kebakaran	BPB Linmas bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran telah bersama-sama melakukan proteksi, dimana secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, dan BPB Linmas mempersiapkan manajemen resikonya.	Terkait dengan SOP dan mitigasi bahaya kebakaran pada bangunan tinggi telah diatur oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya melalui sub kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran. Sedangkan dalam upaya penanganan kebakaran dan konsep penyelamatannya, telah dilaksanakan edukasi kepada masyarakat serta manajemen resiko bencana yang diwujudkan melalui sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran serta sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan Penanganan kepada para korban bencana pada Badan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
				Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
127	Agar dilakukan pencegahan dan pengawasan lebih ketat lagi terhadap ASN	Inspektorat	berdasarkan PP 53/2010 tentang disiplin PNS pengawasan dan pembinaan PNS melekat pada atasan langsung. Inspektorat bertugas untuk melakukan pengawasan apabila ada laporan pengaduan atau laporan untuk pemeriksaan lebih lanjut dari PD	memberikan masukan terkait aturan disipin PNS kepada OPD. Fungsi waskat ASN sendiri ada pada atasan langsungnya, pada Badan Kepegawaian dan Diklat telah diakomodir melalui sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN. Namun Inspektorat bertugas melakukan pengawasan lebih lanjut apabila ada laporan pengaduan dari masyarakat atau laporan dari PD bersangkutan.
128	Pengembangan wawasan aparatur tetap dilaksanakan, meskipun dengan tanpa tatap muka. Sehingga anggaran juga bisa disesuaikan, apabila memakai metode daring	Badan Kepegawaian dan Diklat	Pengembangan wawasan aparatur di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan, jika kegiatan tersebut memungkin untuk dilakukan secara daring maka hal itu akan menjadi lebih baik.	Dalam melakukan pengembangan wawasan aparatur terdapat pada sub keg Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
129	Analisa perhitungan terkait kekurangan atau kelebihan formasi jumlah PNS pada masing-masing OPD agar dilakukan penetapan kebutuhannya, serta Analisa kemungkinan ditangani dengan jumlah PNS baru maupun tenaga kontrak sebagai upaya memenuhi kekurangan PNS akibat dari tahun 2020 tidak adanya rekrutmen	Badan Kepegawaian dan Diklat	Kebutuhan pegawai adalah didasarkan pada penyusunan ABK (Analisa Beban Kerja) pada masing-masing Perangkat Daerah salah satunya dengan mengisi posisi/formasi sejumlah ASN yang purna tugas atau meninggal dunia melalui rekrutmen ASN yang baru sesuai dengan formasi dan kebutuhan. Sedangkan untuk	Formasi kebutuhan ASN terdapat pada sub kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			tenaga kontrak dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhannya	
130	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN agar tidak melakukan pelanggaran dan sumpah ASN	Badan Kepegawaian dan Diklat	berdasarkan PP 53/2010 tentang disiplin PNS pengawasan dan pembinaan PNS melekat pada atasan langsung, BKD sebagai unsur kepegawaian melakukan memonitor terkait pelaksanaannya. Jika terjadi pelanggaran disiplin, maka penanganan dilakukan berjenjang dimulai dari atasan langsungnya, dan jika terjadi pelanggaran berat, maka akan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian	Dalam melakukan pembinaan terhadap ASN pada Badan Kepegawaian dan Diklat telah diakomodir melalui sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
131	Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembinaan pegawai	Badan Kepegawaian dan Diklat	Dalam melaksanakan evaluasi terkait pembinaan dapat dilakukan dengan cara memonitor jumlah kasus pelanggaran secara regular/rutin. Setiap 3 bulan sekali pegawai melaksanakan test perilaku kerja yang dapat dikaitkan dengan mental/perilaku. Test ini dilakukan penilaian secara 360 derajat, yaitu penilaian dilakukan oleh rekan, atasan maupun bawahan	Tahun Anggaran 2021 telah diakomodir melalui sub kegiatan Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
132	Optimalisasi peningkatan pelayanan kependudukan secara on line agar lebih baik dan lebih cepat penyelesaian kepengurusannya	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan secara online dengan membangun atau memperbaiki system , dikembangkan setiap tahunnya yang terintegrasi dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), SIAK adalah system memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Sampai dengan akhir tahun 2020 pelayanan sudah mulai membaik sesuai dengan perda 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyatakan waktu penyelesaian pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dibuktikan dengan penyelesaian diatas 7 hari semakin berkurang	Pada tahun 2021 peningkatan pelayanan Kependudukan secara on line terakomodir di sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
133	Mendukung kegiatan one day service terhadap layanan administrasi kependudukan yang melibatkan PN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Terima kasih atas dukungan terhadap layanan one day service yang melibatkan Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Layanan One Day Service yang dimaksud adalah layanan yang terkait perubahan biodata nama	Pada tanggal 16 April 2021 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengadakan kegiatan Launching Pelayanan Terintegrasi Adminstrasi Kependudukkan dengan Pengadilan

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
			maupun akta kelahiran yang melibatkan pihak Pengadilan Negeri, dimana proses sidang dan penyerahan hasil penetapan selesai pada hari yang sama	Negeri yang diresmikan oleh Bapak Walikota Surabaya
134	Perlu adanya peningkatan kualitas kepada petugas kecamatan atau kelurahan yang membidangi kependudukan, terutama terhadap system online kependudukan, selain itu juga proses sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam meningkatkan SDM (petugas layanan kependudukan) sebelum ditempatkan di Kecamatan maupun di Kelurahan petugas tersebut dibekali untuk memahami alur pelayanan kependudukan melalui sistem yang ada dan selalu dilakukan koordinasi untuk pelayanan lebih cepat kepada masyarakat	Mulai 2021 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mulai memperkuat pelayanan di Kelurahan dengan menugaskan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertugas untuk memproses verifikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di loket pelayanan
135	Memfasilitasi terkait layanan data kependudukan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, sehingga dapat mempermudah warga yang ber KTP surabaya terdapat masalah teknis dalam pemberian pelayanan kesehatan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan membantu memfasilitasi permasalahan teknis terkait penyesuaian data diri (KTP, KK dll) sehingga mempermudah dalam pemberian layanan kesehatan	Pada tahun 2021 terkait layanan data kependudukan yang terintegrasi terakomodir di sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
136	Agar Bagian Humas memiliki strategi dan inovasi untuk meningkatkan perekonomian Kota Surabaya, terutama dalam pemberian informasi dan promosi secara masif	Bagian Hubungan Masyarakat	Mempromosikan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi warga Kota Surabaya seperti, SWK, UMKM Kota Surabaya melalui kanal media sosial IG, FB, Youtube dengan akun Bangga Surabaya serta menggandeng para influencer untuk membantu promosi.	Selain promosi di media sosial, kebutuhan penyebarluasan juga dituangkan dalam beberapa jenis media cetak seperti buku, booklet, brosur, poster, dan sebagainya.

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
137	Memaksimalkan Program pemberitaan dimasyarakat agar sifatnya bisa sosialisasi secara rutin terkait program-program pemerintah kota Surabaya yang sangat diperlukan masyarakat, yang bisa tersampaikan seluruh lapisan masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat	Secara rutin mengupdate pemberitaan terkait program-program Pemerintah Kota di media sosial Bangga Surabaya, iklan media cetak dan media elektronik	Tahun 2021 di sub kegiatan Layanan hubungan media sudah dianggarkan belanja iklan untuk media cetak dan elektronik
138	Banyaknya program walikota dan wakil walikota yang fenomenal, harus diimbangi dengan sosialisasi dari humas, khususnya terkait akses yang bisa diberikan kepada masyarakat, hal ini bisa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memaksimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat, yang juga berfungsi mencegah pemberitaan hoax terkait pemberitaan pemerintah Kota Surabaya	Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat Kota Surabaya sudah menetapkan proporsi media massa yang efektif guna mendukung publikasi terkait program Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Humas telah melakukan evaluasi terkait pemberitaan positif dan negatif dari media dalam laporan analisa media yang di tahun 2021 yang terdapat di sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
139	Menambah jumlah e-book agar memudahkan masyarakat membaca dimanapun dan kapanpun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sudah dilaksanakan	Pada tahun 2021 melalui subkegiatan Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka telah dialokasikan anggaran kebutuhan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Kota Surabaya untuk pengadaan 348 ebook. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga akan menerbitkan ebook hasil tulisan bibit penulis yang memenuhi syarat publikasi sebagai bagian dari penghargaan terhadap

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
				upaya literasi yang dilaksanakan oleh anak-anak Surabaya.
140	Menambah jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) hingga seluruh RW di Surabaya terpenuhi, untuk menjangkau kemudahan masyarakat dalam meningkatkan minat baca anak	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Karena prioritas saat ini untuk penanganan Covid-19, maka usulan untuk TBM baru masih belum bisa terealisasi	Sampai dengan tahun 2021 jumlah TBM RW sebanyak 469 titik
141	Perlunya dilakukan pendampingan oleh satgas TBM dalam upaya menumbuhkan minat baca pada anak usia dini sampai pada tingkat sekolah dan masyarakat umum di tingkat RT/RW, serta mendukung program bimbingan belajar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	529 Petugas TBM saat ini telah melaksanakan layanan pendampingan pada 1494 titik lokasi antara lain perpustakaan umum, TBM RW, TBM Kelurahan, TBM Kecamatan, TBM Rusun, TBM Instansi, TBM Terminal, TBM RS, TBM Taman, TBM Liponsos, layanan bus keliling, perpustakaan sekolah, dan layanan keliling taman. Dengan demikian 1 petugas menangani antara 2-3 layanan baca di seluruh wilayah Kota Surabaya. Selain itu, petugas TBM juga melakukan pendampingan untuk membentuk 1000 bibit penulis dan pendongeng di seluruh wilayah di Kota Surabaya, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas literasi yang merata.	Pelaksanaan upaya peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui promosi perpustakaan, penyuluhan dan bimbingan tentang pemanfaatan dan penggunaan perpustakaan dokumentasi dan informasi dapat dilihat dari subkegiatan di tahun 2021 yaitu Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah Kabupaten/Kota
142	Sinergisitas koleksi perpustakaan pusat dan daerah untuk memperbanyak koleksi di galeri baik buku fisik maupun digital	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sudah dilaksanakan	Pada tahun 2021 melalui subkegiatan Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka telah dialokasikan anggaran kebutuhan untuk

NO	REKOMENDASI DPRD KOTA SURABAYA	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN/JAWABAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
				meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Kota Surabaya meliputi: Belanja buku umum, filsafat, agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, ilmu pengetahuan praktis, arsitektur, kesenian dan olahraga, geografi, biografi dan sejarah serta pengadaan 348 ebook.
143	Optimalisasi layanan baca kepada orang dengan keterbatasan dengan memberikan layanan Voice book	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sedang dilaksanakan	Pemerintah Kota Surabaya sedang mengembangkan fasilitas non visual desktop access (NVDA) di layanan baca sehingga pengunjung tunanetra dapat mengakses komputer dengan lebih mudah
144	Menginisiasi link data terpusat terkait seluruh arsip administrasi umum maupun arsip asset-aset kota Surabaya, kepada seluruh OPD, Kelurahan dan Kecamatan, dalam bentuk pusat data namun yang bisa mengakses OPD terkait (digitalisasi kearsipan) bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sedang dikembangkan	Saat ini sudah dilakukan digitalisasi peta kretek 153 Kelurahan dari 154 Kelurahan di kota Surabaya. 1 Kelurahan masih dalam proses PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

3.4 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menjalin kerjasama dengan pemerintah kota-kota lain di dalam maupun luar negeri menjadi sesuatu kebutuhan, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya agar kerjasama yang telah dilakukan dapat terus berkembang, baik jumlah mitra kerjasama maupun kualitas program dan kegiatan kerjasama dalam mendukung terwujudnya Kota Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya baik dengan lembaga/instansi di dalam negeri maupun di luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Antar Daerah Luar Negeri

Kerjasama dengan luar negeri oleh Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, sumber daya manusia dan manajemen/pengelolaan kota melalui antara lain kerjasama *sister city*, *sister school*, dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini telah melakukan kerjasama dengan kota-kota lain di luar negeri sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 3.23
Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021

No.	Mitra Kerjasama	Bidang/Ruang Lingkup
1.	Kota Seattle	Manajemen Perkotaan; Manajemen Pelabuhan; Lingkungan Hidup; Pendidikan; Seni, Budaya dan Pariwisata; IPTEK; Pengembangan Dunia Usaha
2.	Kota Busan	Manajemen Pelabuhan; Perdagangan; Pendidikan; Seni, Budaya dan Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga; Lingkungan Hidup; Manajemen Perkotaan; Transportasi; IPTEK, Peningkatan SDM
3.	Kota Kochi	Perdagangan; Industri; Seni, Budaya dan Pariwisata; Pendidikan
4.	Kota Monterrey	Perdagangan; Pengembangan Dunia Usaha; Promosi Industri; Promosi Seni; Promosi Pariwisata; Promosi Kebudayaan

No.	Mitra Kerjasama	Bidang/Ruang Lingkup
5.	Kota Guangzhou	Manajemen Perkotaan; Pengembangan Dunia Usaha; Perdagangan; Seni, Budaya dan Pariwisata; Pendidikan; Pemuda dan Olah Raga
6.	Kota Xiamen	Pengembangan Dunia Usaha; Perdagangan; IPTEK; Pendidikan; Seni, Budaya dan Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga; Kesehatan
7.	Kota Varna	Industri; Perdagangan; Pendidikan; IPTEK; Transportasi; Kesehatan; Seni, Budaya dan Pariwisata
8.	Kota Kitakyushu	Bidang-bidang lingkungan termasuk: a. Masyarakat Rendah Karbon; b. Daur Ulang Sumber Daya; c. Peningkatan Kapasitas pejabat masing- masing kota
9.	Kota Liverpool	Pengembangan Ekonomi Kreatif; Manajemen Pelabuhan; Pengembangan Kota Pintar; Peningkatan SDM
10.	Kota Gaziantep	a. Promosi Budaya dan Pariwisata; b. Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan c. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Sumber: Bagian Kerjasama, Tahun 2021

2. Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri

Pemerintah Kota Surabaya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial dan budaya, keamanan, dan lain sebagainya. Kerjasama ini bersifat saling menguntungkan dan karakteristiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Pada tahun 2021 kerjasama baru dengan daerah lain adalah sebagai berikut.

Tabel 3.24
Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Daerah Dalam Negeri
Tahun 2021

No.	Mitra Kerjasama	Bidang/Ruang Lingkup
1.	Pemerintah Kabupaten Blitar	Kerjasama jaringan lintas perkotaan sebagai suplai bahan pokok bagi masyarakat kota Surabaya.

Sumber: Bagian Kerjasama, Tahun 2021

3. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya dijalin dengan pemerintah daerah lain, tetapi juga dengan pihak ketiga. Hal ini merupakan salah satu strategi agar Pemerintah Kota Surabaya dapat terus berkembang seiring dengan antisipasi dan penyelesaian permasalahan yang muncul. Pada Tahun 2021 terjalin beberapa kerjasama baru dengan pihak ketiga, namun masih terdapat pula beberapa kerjasama yang masih berlangsung. Tabel berikut menunjukkan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak ketiga maupun kerjasama dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang baru terjalin pada Tahun 2021.

Tabel 3.25
Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pihak Ketiga Tahun 2021

No.	Mitra kerjasama	Bidang-bidang kerjasama
1.	Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Pemberian Akses Closed Circuit Television (CCTV) dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya
2.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan dalam mengatasi pencemaran plastik di laut melalui pengumpulan data sampah plastik, kerangka pemantauan, strategi investasi dan perencanaan aksi di Kota Surabaya
3.	Universitas Airlangga	Kesehatan, Ekonomi, Sosial Politik, Hukum, Lingkungan Hidup, Pertanian, Farmasi, Seni Budaya dan Pariwisata
4.	Yayasan Trampil Indonesia	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Surabaya
5.	Yayasan Dinamika Edukasi Dasar	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Surabaya
6.	Yayasan Quali International Surabaya	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Surabaya
7.	STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8.	BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya	Jaminan Kesehatan Semesta bagi Penduduk Kota Surabaya
9.	Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Pemberian Jasa Pelayanan Masyarakat bagi Tenaga Pendidik Keagamaan
10.	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
11.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	Layanan Jasa Perbankan dalam Pengelolaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kota Surabaya

No.	Mitra kerjasama	Bidang-bidang kerjasama
12.	Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan dan Pengoperasian Sumur Pantau
13.	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali	Pengamanan Bahaya Kebakaran Pembangunan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 KV Di Jembatan Suramadu
14.	Universitas Airlangga ; Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Jawa Timur ; Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Jawa Timur (DPD ASITA JATIM) ; Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Travel Agent Indonesia Jawa Timur (DPD ASTINDO JATIM) ; Badan Perwakilan Daerah Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia Jawa Timur (BPD PHRI JATIM)	Penyelenggaraan Layanan Wisata Medis (Medical Tourism) Di Kota Surabaya
15.	PT. Cendikia Netra Madani	Pemberian Bantuan Layanan Kesehatan Mata dan Edukasi Kesehatan Mata Kepada Masyarakat

Sumber: Bagian Kerjasama, Tahun 2021

3.5 PENGHARGAAN TAHUN 2021

Beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.26
Penghargaan Internasional Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021

No	Tahun	Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	21 Oktober 2021	**The 5th Asean Environmentally Sustainable Cities and and the 4 Certificate of Recognition Award** Certificate of Recognition Clean Air for Big Cities	The ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC)

Tabel 3.27
Penghargaan Nasional Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021

No	Tahun	Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	22 Februari 2021	**Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah**	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	06 April 2021	**Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020**	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3	15 April 2021	**Penghargaan Pembangunan Daerah** (Terbaik I)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4	16 April 2021	Beritajatim Media Digital Award a. Pengelolaan Medsos (#2) b. Pengelolaan Website Pemda se Jatim (#2)	PT. Beritajatim Cyber Media
5	11 Mei 2021	**Opini WTP atas LKPD 2020** (9x berturut2)	PT. Beritajatim Cyber Media
6	31 Maret 2021	**PR Indonesia Award 2021** Kategori : Terpopuler di Media Cetak 2020 (Sub Kategori Pemerintah Daerah)	PR Indonesia
7	01 Mei 2021	**Indeks Kota Toleran Award 2020** #6	Setara Institue
8	15 Juni 2021	**Green Leadership 2020 "Nirwasita Tantra 2020"** Peerintah Daerah Kota Besar	Kementerian LHK
9	15 Juni 2021	**Green Leadership 2020 "Nirwasita Tantra 2020"** DPRD Kota Besar	Kementerian LHK
10	29 Juli 2021	**Kota Layak Anak** Kategori Utama	Kementerian PPPA

No	Tahun	Penghargaan	Pemberi Penghargaan
11	24 September 2021	**Angugerah Parahira Ekapraya (APE) 2020** Katgori Mentor	Kementerian PPPA
12	04 Oktober 2021	**TOP BUMD Awards 2021** • Salah satu BUMD Terbaik • Pembina BUMD Terbaik	Top Business
13	06 Oktober 2021	**Top 45 Kovablik Jatim 2021** Tim Rescue (PMK)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
14	13 Oktober 2021	**Jer Basuki Mawa Beya Emas** ASN Achievement Awards 2021 Kategori : a. Kepala daerah yang serius meningkatkan kompetensi ASN b. Pemerintah daerah yang serius meningkatkan kompetensi ASN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
15	19 Oktober 2021	**Penghargaan ProKlim 2021** Kategori a. Lestari : RW 03 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan b. Trophy ProKim Utama : RW 06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep; RW 06 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo c. Piagam Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Kota/Kabupaten d. Sertiflkat ProKlim Utama: RW 04 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, RW 02 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, RW 01 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, RW 05 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, RW 03 Kelurahan Perak Kecamatan Krembangan, RW 02 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep, RW 01 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	28 Oktober 2021	**Penghargaan atas capaian WTP selama lebih dari 5 kali berturut-turut**	Kementerian Keuangan RI
17	04 November 2021	**Anugerah Media Humas 2021** • Komunikasi Publik kab/kota #1 • Website kab/kota #2	Bakohumas - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
18	10 November 2021	Memorandum Award 2021 Kategori : Mitra Terbaik	Harian Memorandum

No	Tahun	Penghargaan	Pemberi Penghargaan
19	22 November 2021	**Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Tahun 2021** Kategori Pratama: Kelurahan Simomulyo, Kelurahan Margorejo Kategori Madya : Kelurahan Perak Utara	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur
20	22 November 2021	**Sekolah Adiwiyata Pemprov Jatim 2021** A. Tingkat SD/MI 1. SDN Asemrowo 2. SDN Banjarsugihan II 3. SDN Banjarsugihan V 4. SDN Ngagelrejo I 5. SDN Pagesangan 6. SDN Wonokusumo V B. Tingkat SMP/MTs 1. SMPN 2 2. SMPN 22 3. SMPN 40 4. SMPN 49 5. SMPN 54	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
21	26 November 2021	**BKN Award 2021** Kategori Perencanaan kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun (#3)	BKN RI
22	10 Desember 2021	**Most Popular Leader In Social Media 2021** Kategori : Walikota	PR Indonesia
23	13 Desember 2021	**Penanganan Covid-19 Terbaik** Kategori Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
24	17 Desember 2021	**Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur 2021** SDN Asemrowo, SDN Banjarsugihan 2, SDN Banjarsugihan 5, SDN Ngagelrejo 1, SDN Pagesangan, SDN Wonokusumo 5, SMPN 2, SMPN 22, SMPN 40, SMPN 49, dan SMPN 54	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
25	17 Desember 2021	**Eco Pesantren Provinsi Jawa Timur 2021** Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
26	20 Desember 2021	**Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Award 2021**	Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
27	21 Desember 2021	**Widya Wiyata Dharma Samya**	Universitas Negeri Surabaya

No	Tahun	Penghargaan	Pemberi Penghargaan
28	27 Desember 2021	**RKCI & RTDI 2021** Kategori : Kota Besar 1. Kota menuju cerdas 2. Kota dengan ekonomi cerdas 3. Kota dengan lingkungan cerdas 4. Kota dengan kesehatan cerdas 5. Kota dengan masyarakat cerdas 6. Kota dengan mobilitas cerdas 7. Kota dengan energi cerdas 8. Kota dengan perhatian terhadap perubahan iklim 9. Kota tangguh (resilience city) 10. Kota dengan kesiapan digital terbaik	ITB dan APEKSI
29	27 Desember 2021	**Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Jawa Timur Tahun 2021**	Forum Komunikasi (Forkom) Jurnalis Nahdliyin
30	29 Desember 2021	**Innovative Government Award (IGA) 2021** Kategori : Kota Terinovatif	Kementerian Dalam Negeri RI
31	29 Desember 2021	**Ombudsman Awards 2021** Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 Zona Hijau Kategori Kota (Nilai Kepatuhan 83,62)	Ombudsman RI

Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat, Tahun 2021

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

4.1.1 Identifikasi Tugas Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat Daerah Atasnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, lalu dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota/kabupaten, serta dari pemerintah kota/kabupaten ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN. Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2021 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkat Pemerintahan di bawahnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan dan tidak memiliki Desa, sehingga Pemerintah Kota Surabaya tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat Pemerintahan dibawahnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan bahwa Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.

4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2021 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi serta tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat Pemerintahan dibawahnya

BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2021 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya selama satu tahun anggaran, pada tahun 2021. LKPJ Walikota Surabaya Tahun 2021 tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan pembangunan, baik berupa capaian makro maupun mikro yang diukur berdasarkan capaian misi dan sasaran pembangunan Kota Surabaya serta rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021. LKPJ Walikota Surabaya Tahun 2021 ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sepanjang Tahun Anggaran 2021 pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya, meskipun diwarnai dengan kondisi pandemi Covid-19, tetap dapat dilaksanakan secara optimal sehingga tetap mampu meningkatkan kualitas pembangunan kota. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan capaian nilai Indikator Kinerja Utama antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,31; Indeks Ketertiban dan Ketentraman sebesar 1,82; Indeks Gini sebesar 0,344; Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,58; Indeks Infrastruktur sebesar 0,995; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) sebesar 65,71; Indeks Budaya Lokal sebesar 89,67. Namun demikian, dengan adanya pandemi Covid-19, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang ikut terdampak. Indikator yang terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah indikator Persentase Penduduk Miskin.

Cukup optimalnya penyelenggaraan pemerintahan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, patut disyukuri. Hal tersebut dapat diraih dengan tidak terlepas dari daya upaya dan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, DPRD, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berlandaskan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan pencapaian pembangunan yang telah disampaikan, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama, terutama dalam menghadapi tantangan situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Penyelenggaraan pembangunan tetap harus dilaksanakan dengan baik, seiring dengan percepatan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung pada tahun 2021.

Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya pada masa yang akan datang dan membawa Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan. Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

.

Surabaya, Maret 2022

Walikota Surabaya



ERI CAHYADI



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

TAHUN 2022